



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, maka perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Pembangunan Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

Sw

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i yang memuat pendahuluan;
 - b. bab ii yang memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab iii yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab iv yang memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab v yang memuat penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian mengenai Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:
 - a. rancangan perubahan RPKD Tahun 2026; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026.

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 September 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARYAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 992

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta tata cara evaluasi dan perubahan terhadap dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah secara khusus, serta pembangunan daerah secara umum. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja berperan penting sebagai penghubung antara dokumen perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, Renja menjamin kesinambungan perencanaan, sinkronisasi arah kebijakan, serta keterukuran capaian pembangunan melalui target tahunan yang konkret.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Renja Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dokumen ini memuat informasi terkait program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

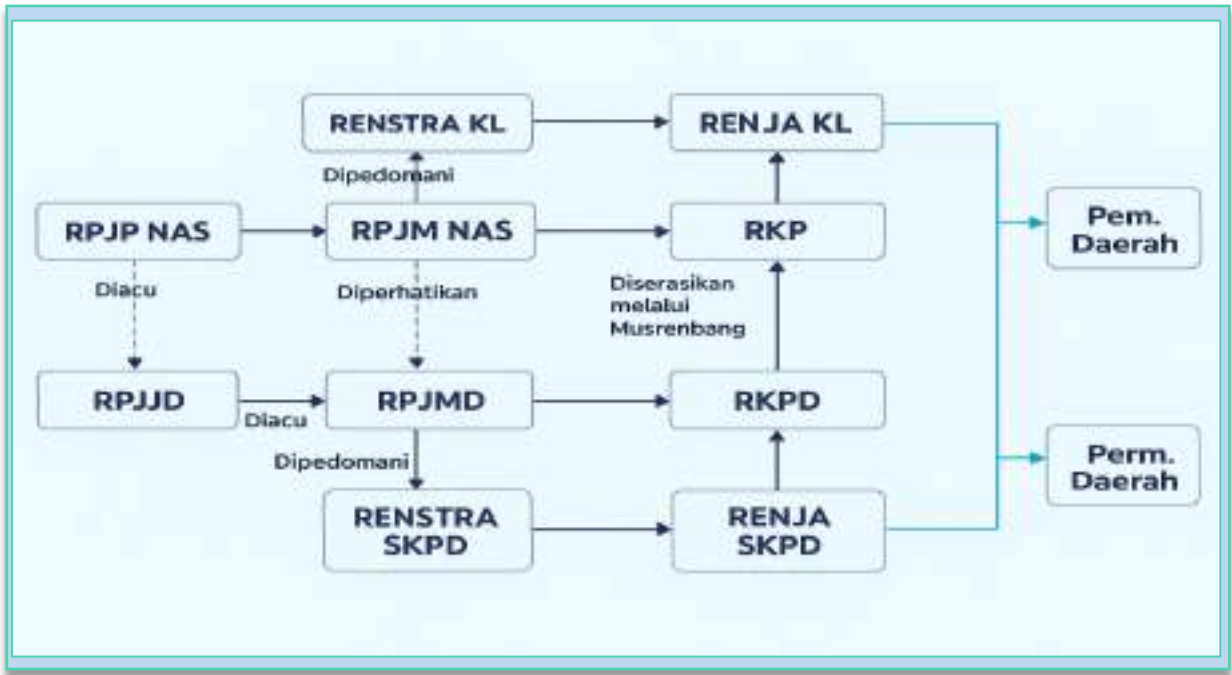
Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja dilaksanakan secara simultan dan terpadu dengan penyusunan RKPD Kabupaten, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan Renja,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan Renja.

Lebih lanjut, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan secara sistematis pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan **Gambar 1.1**, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen

perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif, dan demokratis, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dokumen Renja ini berfungsi sebagai:

1. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,
2. Rujukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten, serta
3. Acuan dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN.

Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen kunci yang menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terukur..

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah

- Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
 22. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 memiliki maksud sebagai berikut:

1. Menjadi dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan serta merumuskannya ke dalam program dan kegiatan yang bersifat prioritas;
3. Menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan secara baik, transparan, akuntabel baik dari sisi keuangan maupun kinerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Ranwal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026:

- 1) Menjamin keterpaduan dan kesesuaian antara dokumen perencanaan tahunan (Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Menjamin peningkatan kinerja dan pelayanan publik dalam urusan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelaksanaan program/kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas kinerja dan keuangan yang transparan.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan penjabaran operasional tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun n-2) dan proyeksi capaian Tahun 2025 (tahun n-1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang pada saat penyusunan Renja seharusnya telah ditetapkan.

Evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan,
2. Mengidentifikasi tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra,
3. Menjadi dasar dalam perumusan prioritas dan strategi perencanaan tahun 2026.

Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan estimasi capaian Tahun 2025 dikaitkan secara langsung dengan target-target dalam Renstra 2025–2029, berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam:

1. Laporan Kinerja Tahunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2. dan/atau realisasi APBD untuk urusan pendidikan dan kebudayaan.

Hasil evaluasi dan capaian kinerja program/kegiatan tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.1 (Format TC.29) yang memuat informasi mengenai indikator kinerja, target, realisasi, serta analisis pencapaian kinerja:

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Urusan Pemerintahan Daerah									
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	5	4	4	100	4	4	100,00
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	20	0	0	0	0	0	0,00
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilita si								
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah	Iklim Kebinekaan SMP	71.00	73,07	72	69,00	95,83	72	69,00	95,83
	Iklim Inklusivitas SD	61.10	52,32	63,6	56,1	88,21	63,6	56,1	88,21
	Iklim Inklusivitas SMP	58.32	54,77	60,72	53,52	88,14	60,72	53,52	88,14
	Iklim Keamanan SD	72.47	68,26	73,37	70,67	96,32	73,37	70,67	96,32
	Iklim Keamanan SMP	67.90	68,98	69,4	64,9	93,52	69,4	64,9	93,52
	Iklim Kebinekaan SD	71.47	70,69	72,47	69,47	95,86	72,47	69,47	95,86

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	30.99	20,75	31,99	20,75	64,86	31,99	20,75	64,86
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	95.58	49,48	100	57,25	57,25	100	57,25	57,25
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	48.94	43,78	51,44	43,94	85,42	51,44	43,94	85,42
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	48.45	35,73	51,35	42,65	83,06	51,35	42,65	83,06
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	57.78	56,46	58,88	55,58	94,40	58,88	55,58	94,40
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP	55.16	52,32	56,16	52,16	92,88	56,16	52,16	92,88

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	berdasarkan Asesmen Nasional								
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	95,9	100	97,52	97,52	100	97,52	97,52
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	75	100	68,16	68,16	100	68,16	68,16
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	95,9	100	97,52	97,52	100	97,52	97,52
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-	100	95,9	100	97,52	97,52	100	97,52	97,52

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	15 tahun dalam Pendidikan dasar								
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	13,48	100	21,45	21,45	100	21,45	21,45
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	2	1	1	100	1	0	0,00
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	4	7	7	100	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	28	5	3	3	100	5	0	0,00
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	4	4	100	0	0	#DIV/0!
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	1	1	100	0	0	#DIV/0!

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0	0	3	3	100	0	0	#DIV/0!
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	750	0	0	0	0	300	0	0,00
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10	6612	10	10	100	0	0	#DIV/0!
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	0	0	0	0	4	0	0,00
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	365	51	150	141	94	100	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	Akademik dan Non Akademik								
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125	211	205	205	100	102	100	98,04
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	260	200	200	100	78	0	0,00
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	73	73	73	73	100	73	73	100,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	Kelembagaan dan manajemen sekolah								
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	73	73	73	73	100	73	73	100,00
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	73	0	0	0	0	73	73	100,00
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	3	2	2	100	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	4	4	100	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	73	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	6	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	73	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10	0	0	0	0	1	0	0,00
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5	0	0	0	0	41	41	100,00
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	73	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	73000	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3500	3343	3000	3000	100	3500	0	0,00
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	1	0	0	0	6	0	0,00
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	0	0	0	2	0	0,00
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	365	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan yang dilaksanakan								
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	73	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	4	3	3	100	3	0	0,00
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	81	54	29	29	100	35	0	0,00
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	73	0	0	0	0	3	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
dan Peraga Peserta Didik									
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	1	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	5	3	3	100	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	1	4	4	100	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	3	0	0	0	1	0	0,00
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah	10	1	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat								
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								
1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77	2	1	1	100	1	0	0,00
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	500	0	0	0	0	200	0	0,00
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5	4195	681	681	100	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	1	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan								
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	81	58	18	18	100	38	0	0,00
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	105	54	62	62	100	53	0	0,00
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	55	79	76	76	100	40	40	100,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80	0	143	143	100	150	0	0,00
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	21	21	21	21	100	21	21	100,00
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21	21	21	21	100	21	21	100,00
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	21	21	21	21	100	43	43	100,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Sekolah Menengah Pertama	BOS Sekolah Menengah Pertama								
1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	21	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	4	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	21	0	0	9	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10	0	0	0	0	8	5	62,50
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	21	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi								
1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	0	0	0	0	1	0	0,00
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	105	0	105	105	100	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	21000	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2000	1603	1500	1500	100	2000	0	0,00
1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5	0	0	0	0	33	0	0,00
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2	2	1	1	100	1	0	0,00
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	21	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	60	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5	2045	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	81	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	35	68	52	52	100	20	0	0,00
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	150	150	147	147	100	146	146	100,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	115	103	103	103	100	105	105	100,00
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	115	95	103	103	100	110	105	95,45
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	249	0	16	16	100	16	16	100,00
1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	0	0	0	0	0	110	110	100,00
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0	0	0	0	0	110	50	45,45

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	115	0	0	0	0	95	95	100,00
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	3	3	0	0	0	2	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Kebijakan Bidang Pendidikan	advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan								
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	0	0	0	0	1	0	0,00
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	0	0	0	0	1	0	0,00
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	45	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2800	0	0	0	0	3014	0	0,00
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi								
1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1250	870	900	900	100	1100	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta	5	0	0	0	0	2	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
dan Peraga Peserta Didik PAUD	Didik PAUD yang Tersedia								
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat								
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15	13	9	9	100	9	9	100,00
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	15	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4	2	4	4	100	4	4	100,00
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan								
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	1	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis,	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	40	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan								
1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	13	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	194	0	0	0	0	0	0	0,00
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	1	0	0	0	0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	5	20,35	21,2	21,2	100,00	22,3	21,2	95,07
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang	10	0	10	10	100,0	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan								
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	275	50	150	150	100,0	60	60	100,00
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	90	88	100	100	100	0	0	0,00
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	90	88	100	100	100	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6	0	0	0	0	0	0	0,00
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	0	2	2	100	0	0	0,00
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2	0	0	0	0	0	0	0,00
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3	0	1	1	100	0	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)	Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan	Tingkat Realisas i (%)
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	50	0	0	0	0	0	0	0,00
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota									
2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	25	0	0	0	0	0	0	0,00
2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	10	0	0	0	0	0	0	0,00

Berdasarkan hasil review pada tabel **2.1 (TC-29)** diatas Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
(01)	(02)	(06)	(08)	(10)	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,47	3,46	99,71	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	5	100	SDM keuangan yang kompeten; SOP jelas; sistem akuntansi terintegrasi; data dan dokumen lengkap; dukungan anggaran
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	6	100	Petugas inventaris yang terlatih; sistem pencatatan barang; data aset akurat; dukungan anggaran; koordinasi antar unit

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	100	Perencanaan kebutuhan yang tepat; penyedia yang berkualitas; proses pengadaan sesuai aturan; anggaran memadai; pengawasan ketat
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	Ketersediaan kontrak layanan; infrastruktur teknis siap; pembayaran tepat waktu; koordinasi dengan penyedia jasa
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	SDM pelayanan memadai; peralatan kerja lengkap; SOP pelayanan jelas; dukungan biaya operasional
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100	Jadwal pemeliharaan rutin; bengkel rekanan terpercaya; administrasi pajak tertib; anggaran cukup
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah	Iklim Kebinekaan SMP	72	69,00	95,83	
	Iklim Inklusivitas SD	63,6	56,1	88,21	
	Iklim Inklusivitas SMP	60,72	53,52	88,14	
	Iklim Keamanan SD	73,37	70,67	96,32	
	Iklim Keamanan SMP	69,4	64,9	93,52	
	Iklim Kebinekaan SD	72,47	69,47	95,86	
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	31,99	20,75	64,86	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	100	57,25	57,25	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	51,44	43,94	85,42	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	51,35	42,65	83,06	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,88	55,58	94,40	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,16	52,16	92,88	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam	100	97,52	97,52	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
	pendidikan menengah pertama				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	68,16	68,16	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	97,52	97,52	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100	97,52	97,52	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	21,45	21,45	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	1	100	Perencanaan teknis matang; tenaga konstruksi berpengalaman; bahan bangunan berkualitas; anggaran cukup; pengawasan ketat
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	7	100	Desain sesuai standar kesehatan; kontraktor kompeten; material berkualitas; pengawasan dan monitoring intensif
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	3	100	RAB jelas; kontraktor handal; bahan berkualitas; pengawasan ketat; anggaran memadai
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4	4	100	Perencanaan matang; kontraktor terpercaya; material sesuai spesifikasi; dukungan dana penuh
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	100	Data kondisi bangunan akurat; kontraktor berpengalaman; bahan sesuai standar; anggaran mencukupi

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	3	3	100	Tim teknis kompeten; perencanaan rehabilitasi detail; anggaran memadai; pengawasan lapangan intensif
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10	10	100	Daftar kebutuhan jelas; pemasok terpercaya; kualitas barang sesuai standar; anggaran cukup
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	205	205	100	Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan rutin; distribusi tenaga merata; insentif memadai
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	200	100	Program pelatihan berkelanjutan; dukungan sertifikasi; anggaran pengembangan SDM; monitoring capaian

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	73	73	100	SOP manajemen sekolah; koordinasi antar pihak; dukungan regulasi; pendanaan operasional
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	73	73	100	Transparansi dan akuntabilitas; bendahara terlatih; sistem pelaporan tepat waktu; pengawasan internal
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	2	100	Perencanaan teknis sesuai standar pendidikan; kontraktor handal; peralatan laboratorium berkualitas
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	100	Data kerusakan akurat; kontraktor berpengalaman; material sesuai standar pendidikan
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3000	3000	100	Kebutuhan teridentifikasi jelas; pemasok resmi; kualitas sesuai standar pendidikan; distribusi tepat waktu
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	3	3	100	RAB rinci; tim teknis berpengalaman; bahan berkualitas; pengawasan ketat

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
	Direhabilitasi Sedang/Berat				
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	29	29	100	Alokasi dana memadai; administrasi keuangan tertib; distribusi dana tepat sasaran
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	3	100	Desain sesuai standar kesehatan; kontraktor berpengalaman; pengawasan intensif
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4	4	100	Perencanaan teknis matang; kontraktor berpengalaman; peralatan sesuai spesifikasi; anggaran cukup
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	100	Data kerusakan lengkap; kontraktor handal; bahan berkualitas
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	681	681	100	Perencanaan kebutuhan tepat; pemasok terpercaya; kualitas barang sesuai

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18	18	100	Dana cukup; administrasi rapi; penyaluran tepat waktu
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	62	62	100	Program kegiatan kreatif; pembina kompeten; fasilitas memadai; anggaran mendukung
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76	76	100	Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan; distribusi merata; insentif memadai
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	143	143	100	Program pelatihan; sertifikasi; dana pengembangan; monitoring

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	21	21	100	SOP manajemen sekolah; koordinasi antar pihak; pendanaan operasional
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21	21	100	Transparansi; bendahara terlatih; pelaporan tepat waktu; pengawasan
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21	21	100	Pelatihan pengelolaan dana; sistem akuntansi; supervisi rutin
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	105	105	100	Narasumber ahli; materi sesuai kebutuhan; fasilitas pelatihan lengkap
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500	1500	100	Kebutuhan jelas; pemasok terpercaya; kualitas sesuai

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	1	100	Perencanaan matang; kontraktor handal; bahan berkualitas
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	52	52	100	Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan; distribusi merata
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	147	147	100	Program pelatihan; sertifikasi; dukungan dana
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	103	103	100	SOP kelembagaan; koordinasi pihak terkait; pendanaan operasional

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	103	103	100	Transparansi; bendahara terlatih; pelaporan tepat waktu
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	16	16	100	Pelatihan; sistem akuntansi; supervisi
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	900	900	100	Kebutuhan jelas; pemasok resmi; kualitas sesuai
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9	9	100	Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan; distribusi merata
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4	4	100	Transparansi; pelaporan; pengawasan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	21,2	21,2	100,00	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	10	100,0	Tenaga ahli budaya; dukungan regulasi; anggaran cukup; kerjasama instansi
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150	150	100,0	Program pelatihan; dukungan fasilitas; koordinasi lintas pihak
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	100	100	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100	100	100	
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	2	100	Tim ahli cagar budaya; data dan dokumen lengkap; dukungan regulasi
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	1	100	Tim teknis pelestarian; dana cukup; kerjasama pihak terkait; regulasi jelas

- 2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah**

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penghambatnya

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Penghambat
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,47	3,46	99,71	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1020	1014	99,41	-Terjadi keterlambatan penyaluran dana dari pusat/daerah - Adanya perubahan regulasi penggajian di tengah tahun anggaran - Data ASN yang belum sepenuhnya terupdate sehingga Terjadi penyesuaian

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Penghambat
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
					- Kendala teknis pada sistem pembayaran elektronik
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah	Iklm Kebinekaan SMP	72	69,00	95,83	
	Iklm Inklusivitas SD	63,6	56,1	88,21	
	Iklm Inklusivitas SMP	60,72	53,52	88,14	
	Iklm Keamanan SD	73,37	70,67	96,32	
	Iklm Keamanan SMP	69,4	64,9	93,52	
	Iklm Kebinekaan SD	72,47	69,47	95,86	
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	31,99	20,75	64,86	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Penghambat
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	100	57,25	57,25	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	51,44	43,94	85,42	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	51,35	42,65	83,06	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,88	55,58	94,40	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan	56,16	52,16	92,88	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Penghambat
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
	Asesmen Nasional				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	97,52	97,52	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	68,16	68,16	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	97,52	97,52	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Penghambat
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100	97,52	97,52	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	21,45	21,45	
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Faktor Penghambat
		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	141	94	- Beberapa kegiatan pembinaan terpaksa dibatalkan akibat keterbatasan waktu dan anggaran - Partisipasi siswa menurun pada semester akhir karena padatnya jadwal akademik - Fasilitas pendukung tidak tersedia di semua sekolah target - Cuaca buruk yang mengganggu pelaksanaan kegiatan lapangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :

Tabel 2.4 (TC-30)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel 2.4 (TC-30)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM	IKK	Target Renstra Daerah			Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rata- rata lama sekolah			8,6	8,85	8,93	9	9,1	8,17	8,28	8,85	8,93	Tren capaian menunjukkan kenaikan stabil dari 8,17 tahun (2023) menjadi 8,28 tahun (2024). Proyeksi tahun 2027–2028 selaras dengan target Renstra, namun gap dengan target 2030 masih memerlukan percepatan peningkatan akses pendidikan formal. Diperlukan strategi intervensi pada kelompok usia produktif yang belum menamatkan pendidikan dasar/menengah.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2027	Tahun 2028	
2	Harapan lama sekolah			12,45	12,5	12,54	12,58	12,65	12,33	12,34	12,5	12,54	Capaian 2023–2024 relatif mendekati target tahunan, menunjukkan stabilitas akses dan minat melanjutkan sekolah. Proyeksi konsisten dengan target Renstra, namun peningkatan masih kecil (<0,1 tahun per tahun). Perlu program motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk mendorong percepatan.
3	Capaian SPM Pendidikan			57,7	58,4	61,5	63,46	65	46,56	56,92	58,4	61,5	Realisasi 2023 masih jauh di bawah target (selisih >10 poin), namun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Proyeksi tahun 2027–2028 sudah sesuai target, tetapi keberlanjutan capaian perlu dijaga melalui peningkatan mutu guru, sarana, dan pembelajaran berbasis literasi-numerasi. Potensi risiko capaian kembali turun jika intervensi tidak konsisten.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2027	Tahun 2028	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah			22,4	23,1	23,3	23,6	24	19,56	20,25	23,1	23,3	Realisasi 2023–2024 masih di bawah target Renstra, meskipun tren naik. Proyeksi 2027–2028 sudah sesuai target, tetapi memerlukan dukungan program promosi dan pemberdayaan komunitas budaya. Potensi capaian maksimal akan tercapai jika kolaborasi lintas sektor diperkuat.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024 merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib Pelayanan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Faktor Penghambat
Belum meratanya distribusi Guru SMP, berdasarkan mata pelajaran	- Penempatan guru belum berbasis analisis kebutuhan riil di sekolah - Terbatasnya minat guru untuk ditempatkan di daerah terpencil - Proses mutasi dan rekrutmen yang memakan waktu lama- - Ketidaksesuaian formasi CPNS/PPPK dengan kebutuhan mata pelajaran
Masih rendahnya pendidik yang bersertifikat pendidik	- Keterbatasan kuota program sertifikasi guru setiap tahun - Persyaratan administrasi dan portofolio yang belum dipenuhi oleh sebagian guru- - Minimnya informasi dan pendampingan terkait prosedur sertifikasi - Beban tugas guru yang tinggi sehingga sulit mengikuti pelatihan/pendidikan
Rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga pendidik untuk PAUD	- Sebagian tenaga pendidik PAUD berasal dari masyarakat umum tanpa latar belakang pendidikan formal kependidikan - Keterbatasan akses untuk

Permasalahan	Faktor Penghambat
	melanjutkan studi ke jenjang S1 PAUD - Minimnya dukungan beasiswa atau insentif peningkatan kualifikasi - Rendahnya kesadaran pentingnya kualifikasi akademik bagi pendidik PAUD
Rendahnya tingkat partisipasi penduduk usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan	- Lokasi pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang jauh dari tempat tinggal peserta- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan - Faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak bekerja - Minimnya tenaga pendidik di pendidikan non-formal
Belum maksimalnya sinkronisasi data kependidikan dengan data kependudukan	- Perbedaan format dan sistem pengelolaan data antara dinas pendidikan dan dinas kependudukan - Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pembaruan data - Keterlambatan input data oleh satuan pendidikan - Keterbatasan SDM operator sekolah dalam mengelola data
Rendahnya rata-rata lama sekolah	- Tingginya angka putus sekolah di jenjang menengah - Faktor ekonomi yang membuat anak bekerja lebih awal - Akses pendidikan di daerah terpencil masih terbatas - Rendahnya motivasi belajar pada sebagian masyarakat
Akses jaringan komunikasi untuk transaksi Dapodik,	- Infrastruktur jaringan internet belum menjangkau seluruh

Permasalahan	Faktor Penghambat
dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum	wilayah - Kecepatan internet yang rendah di daerah tertentu - Biaya layanan internet yang relatif tinggi - Ketergantungan pada perangkat tertentu yang terbatas di sekolah
Masih terbatasnya ketersediaan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional	- Keterbatasan anggaran pengadaan buku dan fasilitas perpustakaan - Minimnya tenaga perpustakaan yang kompeten - Kurangnya ruang khusus perpustakaan yang memadai- - Rendahnya minat baca siswa yang mengurangi prioritas pengembangan perpustakaan

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

- a. Tantangan
 - Ketimpangan akses dan kualitas, infrastruktur terbatasMasih kekurangan guru pada setiap jenjang pendidikan
 - Kekurangan guru, kualitas PAUD, sertifikasi rendah
 - Anggaran nasional terbatas
 - Lemahnya pendidikan karakter dan vokasi
- b. Peluang
 - Digitalisasi, pembelajaran hybrid
 - Pelatihan digital, rekrutmen adaptif
 - Sinergi daerah-pusat, kemitraan swasta
 - Penguatan Ketrampilan pada Pendidikan Kesetaraan SKB/PKBM dan pengembangan soft skills.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta

peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Distribusi dan Kualifikasi Pendidik

Catatan:

1. Distribusi guru SMP belum merata, khususnya berdasarkan mata pelajaran.
2. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik PAUD masih rendah.
3. Persentase pendidik bersertifikat pendidik masih belum optimal.

Rekomendasi:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis mata pelajaran dan lokasi sekolah.
2. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik PAUD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.
3. Memperluas akses pelatihan sertifikasi guru melalui program Kemendikbudristek.

2. Akses dan Partisipasi Pendidikan

Catatan:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi penduduk usia 7–18 tahun pada pendidikan formal maupun kesetaraan.
2. Rata-rata lama sekolah masih di bawah target nasional.

Rekomendasi:

1. Mengembangkan program beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu.
2. Mengoptimalkan pendidikan kesetaraan dengan metode pembelajaran fleksibel dan berbasis komunitas.
3. Melaksanakan kampanye “Sekolah Tuntas 12 Tahun” dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan dunia usaha.

3. Infrastruktur dan Teknologi Pendidikan

Catatan:

1. Akses jaringan komunikasi untuk transaksi Dapodik dan pelaksanaan AKM belum merata.
2. Perpustakaan sekolah belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) baik dari sisi sarpras, koleksi, maupun SDM.

Rekomendasi:

1. Mengajukan penguatan infrastruktur jaringan internet ke Kemenkominfo dan penyedia layanan swasta.
2. Mengalokasikan dana khusus untuk revitalisasi perpustakaan sekolah sesuai SNP.
3. Mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari pembelajaran.

4. Data dan Perencanaan Pendidikan

Catatan:

1. Sinkronisasi data kependidikan dengan data kependudukan belum maksimal.

Rekomendasi:

1. Mengembangkan sistem integrasi data berbasis NIK yang terhubung dengan Dukcapil.
2. Membentuk tim validasi data tingkat kabupaten yang melibatkan operator sekolah dan dinas terkait.

5. Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Catatan:

1. Tantangan era digital memerlukan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran.
2. Masih perlunya penguatan program pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa.

Rekomendasi:

1. Mengimplementasikan kurikulum yang adaptif dengan tren teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
2. Mendorong kompetisi akademik dan non-akademik tingkat daerah maupun nasional.
3. Mengembangkan program ekstra kurikuler berbasis potensi lokal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.6 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.6 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(030	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				82.000.000.00 0				92.369.512.99 5	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.45	82.000.000.00 0	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.45	92.369.512.99 5	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81.055.000.00 0				91.406.555.71 7	
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1010	81.000.000.00 0,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1010	91.351.555.71 7,00	
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Kabupate n	5	55.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Kabupate n	5	55.000.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Bolaang Mongond ow Selatan			dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Bolaang Mongond ow Selatan			
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				90.000.000,00				90.000.000,00	
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	6	90.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	6	90.000.000,00	
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000,00				20.000.000	
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	20.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	20.000.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				375.000.000				392.957.278	
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	12	55.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	12	55.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	12	320.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	12	337.957.278,00	
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				460.000.000				460.000.000	
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kabupaten Bolaang	9	300.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kabupaten Bolaang	9	300.000.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mongondow Selatan			Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mongondow Selatan			
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	10.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	10.000.000,00	
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	100.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	100.000.000,00	
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	50.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	50.000.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				41.307.497.34 8				52.654.023.86 9	
Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah	Iklm Kebinekaan SMP		71.00	41.307.497.34 8	Iklm Kebinekaan SMP		71.00	52.654.023.86 9	
	Iklm Inklusivitas SD		61.10		Iklm Inklusivitas SD		61.10		
	Iklm Inklusivitas SMP		58.32		Iklm Inklusivitas SMP		58.32		
	Iklm Keamanan SD		72.47		Iklm Keamanan SD		72.47		
	Iklm Keamanan SMP		67.90		Iklm Keamanan SMP		67.90		
	Iklm Kebinekaan SD		71.47		Iklm Kebinekaan SD		71.47		
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD		30.99		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD		30.99		
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD		95.58		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD		95.58		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		48.94		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		48.94		
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		48.45		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		48.45		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		57.78		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		57.78		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		55.16		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		55.16		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan		100		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan		100		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
	menengah pertama				menengah pertama				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar		100		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar		100		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi		100		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi		100		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
	dalam pendidikan kesetaraan				dalam pendidikan kesetaraan				
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				22.568.749.00 6				27.636.901.05 6	
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	2	274.764.954	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	2	705.000.000,0 0	
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	28	2.619.036.158	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	28	2.240.000.000, 00	
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe naga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala	Kabupaten	0	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala	Kabupaten	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Bolaang Mongondow Selatan			Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Bolaang Mongondow Selatan			
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	750	745.373.013	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	750	844.937.500,0 0	
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	379.994.085	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	295.268.000,0 0	
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	233.842.513	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	504.952.056,0 0	
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat,	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	Kabupaten Bolaang	365	204.612.199	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	Kabupaten Bolaang	365	316.000.000,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Mongondow Selatan			Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Mongondow Selatan			
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	125	1.096.136.785	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	125	1.080.000.000,00	
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	100	840.394.919	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	100	843.515.000,00	
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Kabupaten Bolaang Mongondow	73	876.909.427	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Kabupaten Bolaang Mongondow	73	911.607.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
	Kelembagaan dan manajemen sekolah	ow Selatan			Kelembagaan dan manajemen sekolah	ow Selatan			
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	4.676.850.283	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	6.733.740.000,00	
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	292.303.142	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	319.240.000,00	
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	292.303.142	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	235.000.000,00	
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang	1	146.151.570	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang	1	470.000.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Laboratorium Sekolah Dasar	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Mongondow Selatan			yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Mongondow Selatan			
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	146.151.570	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	91.838.500,00	
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	35.076.376	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	25.140.000,00	
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	146.151.570	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	540.200.000,00	
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Kabupaten	7	146.151.570	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Kabupaten	7	66.698.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bolaang Mongondow Selatan			Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bolaang Mongondow Selatan			
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	292.303.142	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	159.585.000,00	
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	1.169.212	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	1.200.000,00	
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	365.378.928	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	360.000.000,00	
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan	Kabupaten Bolaang	73	5.846.062	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan	Kabupaten Bolaang	73	5.800.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Mongond ow Selatan			pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Mongond ow Selatan			
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	73000	3.200.719.412	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	73000	1.205.712.000, 00	
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	3500	1.636.897.598	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	3500	1.650.158.000, 00	
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	584.606.285	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	601.500.000,0 0	
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupate n Bolaang	3	263.072.827	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupate n Bolaang	3	3.170.000.000, 00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Mongond ow Selatan			yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Mongond ow Selatan			
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	365	832.187.046	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	365	1.377.990.000, 00	
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	73	2.923.030	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	73	12.320.000,00	
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	1.256.903.513	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	2.605.500.000, 00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	628.451.756	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	235.000.000,0 0	
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	81	47.353.108	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	81	29.000.000,00	
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	73	298.733.811	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	73		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				10.698.733.45 5				12.248.527.05 0	
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond	0	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
		ow Selatan				ow Selatan			
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	9	841.833.050	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	9	960.000.000,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	1.227.673.199	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	210.000.000,0 0	
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula	Kabupaten	0	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula	Kabupaten	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Bolaang Mongondow Selatan			yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Bolaang Mongondow Selatan			
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	77	1.575.513.939	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	77	1.015.000.000, 00	
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang	500	496.915.342	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang	500	844.698.000,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
		Mongond ow Selatan				Mongond ow Selatan			
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	175.381.885	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	250.070.000,0 0	
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	116.921.256	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	81	71.029.663	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	81	37.500.000,00	
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Kabupate n Bolaang Mongond	105	146.151.570	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Kabupate n Bolaang Mongond	105	501.516.550,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
	Akademik dan Non Akademik	ow Selatan			Akademik dan Non Akademik	ow Selatan			
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	55	482.300.184	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	55	480.000.000,00	
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	80	634.005.515	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	80	673.401.000,00	
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	Kabupaten Bolaang	21	584.606.285	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	Kabupaten Bolaang	21	783.889.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan	Mongond ow Selatan			Dilaksanakan Pembinaan	Mongond ow Selatan			
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	2.630.728.284, 00	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	3.009.270.000, 00	
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	175.381.885	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	176.803.000,0 0	
1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Kabupate n Bolaang	21	87.690.942	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Kabupate n Bolaang	21	6.237.500,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Mongondow Selatan			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Mongondow Selatan			
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	4	23.384.250	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	4	25.160.000,00	
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	87.690.942	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	283.557.000,00	
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	146.151.570	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	50.535.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	175.381.885	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	74.501.000,00	
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	1.169.212	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	1.200.000,00	
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	4.092.243	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	4.000.000,00	
1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	1.753.818	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	6.160.000,00	
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	584.606.285	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	160.000.000,0 0	
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	105	279.295.652	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	105	475.033.000,0 0	
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond	21000	920.754.898	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond	21000	827.298.000,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
		ow Selatan				ow Selatan			
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2000	935.370.056	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2000	932.698.000,0 0	
1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	412.147.431	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	160.000.000,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	146.151.570	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5		
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	365.378.928	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	300.000.000,0 0	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.378.653.775				10.865.434.28 5	
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kabupaten Bolaang	2	175.381.885	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kabupaten Bolaang	2	2.000.000.000, 00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	yang Telah Dibangun	Mongond ow Selatan			yang Telah Dibangun	Mongond ow Selatan			
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	122.767.319	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	21	400.000.000,0 0	
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	60	70.152.753	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	60	69.000.000,00	
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	58.460.628	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	376.290.000,0 0	
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond	81	35.514.831	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond	81	35.250.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
		ow Selatan				ow Selatan			
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	35	306.918.299	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	35	300.000.000,0 0	
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	150	824.294.862	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	150	845.250.000,0 0	
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	115	1.753.818.856	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	115	1.623.143.885, 00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	115	993.830.684	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	115	1.588.440.000, 00	
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	249	467.685.027	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	249	1.228.170.900, 00	
1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
	Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	115	58.460.628	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	115	76.693.000,00	
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	7	146.151.570	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	7	201.320.000,0 0	
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	Kabupate n Bolaang Mongond	3	175.381.885	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	Kabupate n Bolaang Mongond	3	98.536.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
	Pendidikan yang dilaksanakan	ow Selatan			Pendidikan yang dilaksanakan	ow Selatan			
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	233.842.513	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	600.000.000,00	
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	1.169.212	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	233.842.513	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	750.000.000,00	
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	45	29.230.313	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	45	37.350.000,00	
1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	2800	196.427.711	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	2800	285.000.000,0 0	
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi	Jumlah Perpustakaan	Kabupate n	0	-	Jumlah Perpustakaan	Kabupate n	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bolaang Mongond ow Selatan			Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bolaang Mongond ow Selatan			
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	10.522.912	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	9.000.000,00	
1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	50	116.921.256	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	50		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
	Pendidikan yang dilaksanakan				Pendidikan yang dilaksanakan				
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1250	221.726.548	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1250	333.762.000,0 0	
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
	Telah Direhabilitasi				Telah Direhabilitasi				
1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	146.151.570	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	5	8.228.500,00	
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan				1.661.361.112				1.903.161.478	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	400	584.606.285	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	400	584.606.285,0 0	
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	131.536.413	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	120.000.000,0 0	
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	87.690.942	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	88.910.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
	Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetara an	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Mengelola Dana BOP	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	4	405.500.457	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Mengelola Dana BOP	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	4	405.500.457,0 0	
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	4	1.880.093	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	4		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang	Kabupaten Bolaang Mongondow	0	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
	pendidikan yang dilaksanakan	ow Selatan			pendidikan yang dilaksanakan	ow Selatan			
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	116.921.256	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	117.000.000,00	
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	29.230.313	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	29.380.000,00	
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	58.460.628	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	58.696.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
perundungan, kekerasan, dan intoleransi	perundungan, kekerasan, dan intoleransi	ow Selatan			perundungan, kekerasan, dan intoleransi	ow Selatan			
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang mendapat sertifikat kompetensi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang mendapat sertifikat kompetensi	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Kabupate n Bolaang Mongond	0	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Kabupate n Bolaang Mongond	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Kreativitas Peserta Didik	Akademik dan Non Akademik	ow Selatan			Akademik dan Non Akademik	ow Selatan			
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	250	58.460.628	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	250	60.480.000,00	
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500	35.076.376	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500	50.000.000,00	
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	40	116.921.256	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	40	352.992.500,0 0	
1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow	0	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
		ow Selatan				ow Selatan			
1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	50	29.230.313	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	50	29.700.236,00	
1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang	Jumlah Ruang Pusat Sumber	Kabupate n	0	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber	Kabupate n	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Bolaang Mongondow Selatan			Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Bolaang Mongondow Selatan			
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	5.846.152	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	5.896.000,00	
1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	Kabupaten Bolaang	0	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	Kabupaten Bolaang	0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Guru/Kepala Sekolah/TU	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Mongondow Selatan			Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Mongondow Selatan			
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				275.110.318				276.865.000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru		16	275.110.318	Indeks Pemerataan Guru		16	276.865.000	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		53		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		53		
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik				275.110.318				276.865.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	194	175.110.318	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	194	176.799.000,0 0	
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	100.066.000,0 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				153.712.775				153.500.000	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		5	153.712.775	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		5	153.500.000	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				153.712.775				153.500.000	
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	Kabupaten Bolaang Mongond	10	100.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	Kabupaten Bolaang Mongond	10	100.000.000,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Pemajuan Kebudayaan	Pengembangan, Pemanfaatan	ow Selatan			Pengembangan, Pemanfaatan	ow Selatan			
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	275	53.712.775,00	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	275	53.500.000,00	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				246.408.750				246.381.000	
Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		90	246.408.750	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		90	246.381.000	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		90		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		90		
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar				206.408.750				206.398.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	6	50.000.000	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	6	50.008.000,00	
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	100.000.000	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	1	99.987.000,00	
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	2	56.408.750	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	2	56.403.000,00	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				40.000.000,00				39.983.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	40.000.000,00	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	39.983.000,00	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				80.000.000				80.000.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum		50	80.000.000	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum		50	80.000.000	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				80.000.000				171.847.240	
2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	25	40.000.000	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	25	45.906.120,00	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catat an Penti ng
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerj a Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	
2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	40.000.000	Jumlah Layanan Operasional Museum	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	125.941.120,0 0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Tembok dan Pembuatan Paving Blok SDN Dayow 300 m	Dayow	300 Meter	7 Orang	Sesuai dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Pagar Keliling SD Pidung 150 m	Pidung	150 Mete	10 Orang	Sesuai dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah
3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Rehabilitasi Rumah Dinas Guru 4 unit	Dayow	1 unit	10 Orang	Sesuai dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Lanjutan Pagar Sekolah Dasar 300m	Botuliodu	100 Meter	10 Orang	Sesuai dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah
5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Pembangunan	Botuliodu	1 unit	3 Orang	Sesuai dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah

	Rumah Dinas Guru (RDG) 1 unit				
6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG)	Pakuku Jaya	1 Unit	10 Orang	Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembuatan Pagar Paud/SD	Pakuku Jaya	1 unit	11 Orang	Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025** tentang **Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026**, disampaikan telaahan kebijakan nasional yang menjadi acuan penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026** sebagai berikut.

RKP Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan kerangka pendanaan, serta menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing. Dokumen ini berfungsi untuk mengoperasionalkan sasaran RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 pada tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan isu strategis nasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan nasional ini menjadi rujukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 selaras dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya **Prioritas Nasional Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Hal ini meliputi peningkatan akses pendidikan yang merata, penguatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Sinkronisasi Renja Dinas dengan RKP 2026 dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional, serta forum koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan

kementerian/lembaga terkait. Proses ini memastikan keterpaduan perencanaan, keterukuran indikator kinerja, dan konsistensi pendanaan antara APBD dan APBN.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 harus mengacu pada arahan Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, dengan memperhatikan:

1. **Keselarasan sasaran dan indikator kinerja** daerah dengan target nasional pada RKP 2026.
2. **Integrasi program prioritas** pendidikan dan kebudayaan ke dalam kerangka pendanaan pusat dan daerah.
3. **Penguatan partisipasi pemangku kepentingan** dalam perumusan kebijakan, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan komunitas budaya.
4. **Penggunaan data dan analisis evidence-based** dalam menetapkan prioritas dan target tahunan.

Telaahan ini menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, sehingga sejalan dengan visi pembangunan nasional dan tetap responsif terhadap kebutuhan lokal dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas sesuai RKP 2026 (Permen PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2025):

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Prioritas Nasional	Program Prioritas (RKP 2026)
Program Pengelolaan Pendidikan	PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Prioritas Nasional	Program Prioritas (RKP 2026)
	investasi, hilirisasi, dan pengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
	PN 6 – Membangun kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial	Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Dasar Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PN 6 – Membangun kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial	Peningkatan Kapasitas SDM Daerah dan Pemerataan Mutu Pendidikan
	PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, termasuk Guru dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Kebudayaan	PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas	Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
	PN 5 – Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Promosi, Investasi, dan Ekspor Produk Budaya dan Industri Kreatif
Program Pelestarian Cagar Budaya	PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas	Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
	PN 6 – Membangun	Penguatan

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Prioritas Nasional	Program Prioritas (RKP 2026)
	kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial	Identitas dan Nilai Lokal melalui Pelestarian Cagar Budaya
Program Pengelolaan Museum	PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas	Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
	PN 6 – Membangun kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial	Pemantapan Ketahanan Sosial dan Pendidikan Sejarah melalui Museum

Pembangunan bidang pendidikan dalam RKP Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing untuk menjawab tantangan transformasi pendidikan di era digital dan masyarakat berpengetahuan. Arah pembangunan ini menekankan pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21, penguatan kompetensi pendidik, pelestarian nilai budaya, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025–2029, Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memfokuskan program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh sasaran pembangunan yang dirumuskan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta dituangkan berdasarkan kerangka *Pohon Kinerja* yang telah ditetapkan.

Tujuan

Mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, bermutu, berkarakter, serta berakar pada nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung transformasi sosial dan peningkatan daya saing daerah.

Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pemerataan layanan pendidikan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- o **Indikator Kinerja:** Indeks SPM Pendidikan.

2. Sasaran 2

Penguatan budaya melalui partisipasi aktif masyarakat.

- o **Indikator Kinerja:** Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dengan perumusan tujuan dan sasaran tersebut, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga setiap kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pelestarian budaya daerah, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2026
1.	Mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, bermutu, berkarakter, serta berakar pada nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung transformasi sosial dan peningkatan daya saing daerah	Meningkatnya kualitas pemerataan layanan pendidikan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks SPM Pendidikan	57,25
		Penguatan Budaya melalui Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah	22.40

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan akses pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pendidikan. Di bidang kebudayaan, tantangan terbesar adalah kurangnya dokumentasi dan pengelolaan aset budaya, rendahnya kesadaran masyarakat akan pelestarian warisan budaya, serta keterbatasan sumber daya pengelola museum dan cagar budaya.

Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap penguatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya, perkembangan teknologi yang memungkinkan inovasi dalam pembelajaran, serta potensi besar sumber daya budaya daerah yang dapat dioptimalkan sebagai identitas dan kekuatan daya tarik daerah.

Namun, pelaksanaan kebijakan juga dihadapkan pada hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, distribusi tenaga pendidik yang belum optimal, rendahnya kapasitas manajerial sebagian satuan pendidikan, dan kurangnya sinergi lintas sektor

dalam pelestarian budaya.

Dengan mempertimbangkan tantangan, hambatan, dan peluang yang ada, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan, memperkuat tata kelola kelembagaan pendidikan dan kebudayaan, serta melestarikan dan memanfaatkan kekayaan budaya daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan adalah tercapainya layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh jenjang, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terlestarikannya warisan budaya daerah secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan program dan kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

1. 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendidikan

1. 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4. Program Pengembangan Kebudayaan

1. 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2. 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Permuseuman

1. 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Seluruh program dan kegiatan ini merupakan respons strategis terhadap permasalahan aktual sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pendidikan yang bermutu, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan identitas dan kebanggaan daerah melalui pelestarian budaya. Pelaksanaan yang konsisten dan terukur dari program-program ini menjadi kunci pencapaian sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T-C-32) berikut:

Tabel 3.3 (T-C-32)

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				92.369.512.995	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			94.678.750.820	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.45	92.369.512.995	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3.46	94.678.750.820	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				91.406.555.717	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			93.691.719.610	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1010	91.351.555.717 ,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1015	93.635.344.6 10	
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	55.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	56.375.000	
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				90.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			92.250.000	
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	90.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		6	92.250.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			20.500.000	
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	20.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.957.278	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			402.781.210	
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kabupaten Bolaang Mongondow	12	55.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		12	56.375.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	12	337.957.278,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		12	346.406.210	
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				460.000.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			471.500.000	
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	9	300.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		9	307.500.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	10.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	10.250.000	
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	100.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	102.500.000	
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	50.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	51.250.000	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				52.654.023.869	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya			53.970.374.466	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Iklm Kebinekaan SMP		71.00	52.654.023.869	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		72.00	53.970.374.466	
	Iklm Inklusivitas SD		61.10		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		63.60		-
	Iklm Inklusivitas SMP		58.32		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		60.72		-
	Iklm Keamanan SD		72.47		[DANA KHUSUS] - DAU yang		73.37		-

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			-	
	Iklm Keamanan SMP		67.90				69.40		
	Iklm Kebinekaan SD		71.47				72.47		
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD		30.99				31.99		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD		95.58		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		100	-	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		48.94		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		51.44	-	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		48.45		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		51.35	-	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		57.78		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		58.88	-	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan			-	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		55.16		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		56.16		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		100		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		100		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		100		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang		100		[DANA KHUSUS] - DAU yang		100		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	berpartisipasi dalam pendidikan dasar				Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			-	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar		100				100		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100				100		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				27.636.901.056	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya			28.327.823.582	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	705.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	722.625.000	
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	-	
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bolaang Mongondow	28	2.240.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		5	2.296.000.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang Telah Dibangun	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	-	
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	-	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	-	
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	750	844.937.500,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		750	866.060.938	
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	295.268.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	302.649.700	
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	504.952.056,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		2	517.575.857	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	365	316.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		438	323.900.000	
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	125	1.080.000.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		135	1.107.000.000	
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	100	843.515.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		100	864.602.875	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	911.607.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	934.397.175	
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	6.733.740.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	6.902.083.500	
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	319.240.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	327.221.000	
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan	Jumlah Ruang Laboratorium	Kabupaten Bolaang Mongond	2	235.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		2	240.875.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Laboratorium Sekolah Dasar	Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	470.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	481.750.000	
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	91.838.500,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	94.134.463	
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	25.140.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		6	25.768.500	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	540.200.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	553.705.000	
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	66.698.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		7	68.365.450	
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	159.585.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	163.574.625	
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	1.200.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		7	1.230.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	360.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	369.000.000	
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	5.800.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	5.945.000	
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73000	1.205.712.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73000	1.235.854.800	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3500	1.650.158.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3500	1.691.411.95 0	
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	601.500.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	3.170.000.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	3.249.250.00 0	
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	365	1.377.990.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		365	1.412.439.75 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan yang dilaksanakan				ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73	12.320.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	12.628.000	
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	2.605.500.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	2.670.637.500	
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	235.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	240.875.000	
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	Kabupaten Bolaang Mongond	81	29.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		81	29.725.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Menerima Biaya Personil Peserta Didik	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	73		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		73	-	
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				12.248.527.050	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			12.554.740.226	
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		2	-	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bolaang Mongondow	9	960.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		1	984.000.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catata n Pentin g	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterang an
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaia n Progra m	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaia n Progra m	KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang Telah Dibangun	ow Selatan			Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	10	210.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan		10	215.250.000	
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan		0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	77	1.015.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	1.040.375.000	
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500	844.698.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		500	865.815.450	
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	250.070.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	256.321.750	
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bolaang Mongondow	1		[DANA KHUSUS] - DAU yang		1	-	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang Dilaksanakan Pemeliharaan	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	81	37.500.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		81	38.437.500	
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	105	501.516.550,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		105	514.054.464	
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	55	480.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		65	492.000.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	80	673.401.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Pendidikan		80	690.236.025	
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	783.889.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Pendidikan		21	803.486.225	
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	3.009.270.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Pendidikan		21	3.084.501.75 0	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	176.803.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21	181.223.075	
1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	6.237.500,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21	6.393.438	
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	4	25.160.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		4	25.789.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	283.557.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21	290.645.925	
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	50.535.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		7	51.798.375	
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	74.501.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	76.363.525	
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Kabupaten Bolaang Mongond	1	1.200.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		1	1.230.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik yang terfasilitasi	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	4.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21	4.100.000	
1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	6.160.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21	6.314.000	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	160.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	164.000.000	
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	105	475.033.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		105	486.908.825	
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21000	827.298.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21000	847.980.450	
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2000	932.698.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		2000	956.015.450	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	160.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	164.000.000	
1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Khusus yang Telah Direhabilitasi	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	-	
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	300.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	307.500.000	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				10.865.434.285	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			11.137.070.142	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	2.000.000.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	2.050.000.000	
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	400.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	410.000.000	
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	60	69.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		60	70.725.000	
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	376.290.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		4	385.697.250	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	81	35.250.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		81	36.131.250	
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	35	300.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		50	307.500.000	
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	150	845.250.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		150	866.381.250	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	115	1.623.143.885, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		120	1.663.722.482	
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	115	1.588.440.000, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		120	1.628.151.000	
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	249	1.228.170.900, 00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		259	1.258.875.173	
1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
		ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	115	76.693.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		120	78.610.325	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	201.320.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		7	206.353.000	
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	98.536.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	100.999.400	
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	600.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	615.000.000	
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		2	-	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	750.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	768.750.000	
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan	Jumlah Perpustakaan	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Perpustakaan Sekolah	Sekolah yang Telah Dibangun	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	45	37.350.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		45	38.283.750	
1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2800	285.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2800	292.125.000	
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	9.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	9.225.000	
1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	50		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		50	-	
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
		ow Selatan			Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1250	333.762.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1250	342.106.050	
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Khusus yang Telah Dibangun	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	8.228.500,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	8.434.213	
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.903.161.478	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			1.950.740.515	
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	400	584.606.285,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		400	599.221.442	
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	120.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		30	123.000.000	
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	Kabupaten Bolaang Mongondow	15	88.910.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		15	91.132.750	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	4	405.500.457,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		6	415.637.968	
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	4		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		4	-	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan				ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten Bolaang	0		[DANA KHUSUS] -				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Mongondow Selatan			DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	117.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	119.925.000	
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	29.380.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	30.114.500	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	58.696.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	60.163.400	
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	250	60.480.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		300	61.992.000	
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500	50.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		500	51.250.000	
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala	Kabupaten Bolaang Mongond	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	40	352.992.500,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		40	361.817.313	
1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	50	29.700.236,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang Dilaksanakan Pemeliharaan	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	5.896.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	6.043.400	
1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	-	
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya		0		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				276.865.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			283.786.625	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru		16	276.865.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		17	283.786.625	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		53		[DANA KHUSUS] - DAU yang		55		

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				276.865.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			283.786.625	
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	194	176.799.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		194	181.218.975	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	100.066.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	102.567.650	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				153.500.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			157.337.500	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		5	153.500.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	157.337.500	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				153.500.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			157.337.500	
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	100.000.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	102.500.000	
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	275	53.500.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		280	54.837.500	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				246.381.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya			252.540.525	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		90	246.381.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		90	252.540.525	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		90		[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		90		
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				206.398.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			211.557.950	
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar	Kabupaten Bolaang Mongond	6	50.008.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang		7	51.258.200	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Budaya yang Didaftarkan	ow Selatan			Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	99.987.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0		
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	56.403.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		2	57.813.075	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				39.983.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			40.982.575	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	39.983.000,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3	40.982.575	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				80.000.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			82.000.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum		50	80.000.000	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		60	82.000.000	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				171.847.240	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya			176.143.421	

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TAHUN 2026					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Keterangan
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
					ya Bidang Pendidikan				
2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	25	45.906.120,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		26	47.053.773	
2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	125.941.120,00	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10	129.089.648	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan, peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan. Penyusunan ini berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Renstra Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Permasalahan yang ditemukan pada periode sebelumnya, seperti keterbatasan sarana prasarana pendidikan, pemerataan distribusi guru, keterbatasan kompetensi pendidik, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya, menjadi dasar perumusan arah kebijakan program dan kegiatan Tahun 2026. Di sisi lain, adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perkembangan teknologi, serta potensi budaya lokal menjadi peluang strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tantangan yang dihadapi meliputi dinamika kebutuhan pendidikan abad 21, tuntutan peningkatan kualitas layanan, dan perlunya adaptasi terhadap perkembangan kebijakan nasional, sedangkan hambatan yang perlu diantisipasi antara lain keterbatasan anggaran, ketimpangan wilayah, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2026 adalah meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan, meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaganya kelestarian dan berkembangnya kebudayaan daerah. Sasaran yang hendak diraih mencakup peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, peningkatan indeks mutu pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta meningkatnya jumlah cagar budaya dan karya budaya yang terkelola secara baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung

prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 disusun secara sistematis untuk menjawab kebutuhan sektor pendidikan dan kebudayaan, serta menjadi instrumen operasional dalam mencapai target kinerja perangkat daerah. Daftar lengkap program dan kegiatan tersebut telah tercantum pada Bab III Tabel 3.1 yang memuat *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026* serta *Prakiraan Maju Tahun 2027*. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026, yang meliputi:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
7. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
8. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
9. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
10. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
11. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
12. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
13. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
14. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat. Alokasi anggaran disusun secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja, serta kemampuan keuangan daerah.

Rencana kerja dan pendanaan ini diharapkan menjadi pedoman bagi

seluruh pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut akan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Penyusunan Renja ini berlandaskan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan dapat lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari tantangan, hambatan, maupun peluang yang ada, sehingga diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi dari seluruh pihak terkait, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat secara umum. Kerja sama yang solid akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter peserta didik, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Akhirnya, besar harapan kami agar Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang bermanfaat, sekaligus memandu setiap langkah nyata dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berbudaya.

Demikian untuk dilaksanakan.

B. DINAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Saat ini pembangunan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih dihadapkan pada isu-isu yang masih belum terselesaikan antara lain :

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sehingga perlu lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah tingginya AKI dan AKB, data tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk salah satu yang tertinggi AKI dan AKB di Sulawesi Utara.
2. Permasalahan kekurangan gizi, terutama balita pendek (stunting), dimana berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting sebesar 33% Tahun 2023.
3. Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dilain pihak angka kesakitan dan kematian yang disebabkan penyakit tidak menular cenderung meningkat termasuk masalah kesehatan jiwa semakin meningkat.
4. Rendahnya cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) 78,8% dan desa UCI (Universal Child Immunization) hanya 44,4% tahun 2024.

5. Masih rendahnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan lintas sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya.
6. Mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut belum optimal, karena belum terpenuhinya semua sarana dan prasarana serta alat kesehatan sesuai standar.
7. Kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan di FKTP belum terpenuhi sesuai standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib di FKTP. Hal ini diakibatkan oleh tidak meratanya penempatan tenaga kesehatan di FKTP berdasarkan standar kebutuhan sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib di FKTP.

Untuk mengatasi isu-isu kesehatan diatas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka harus dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantikinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya.

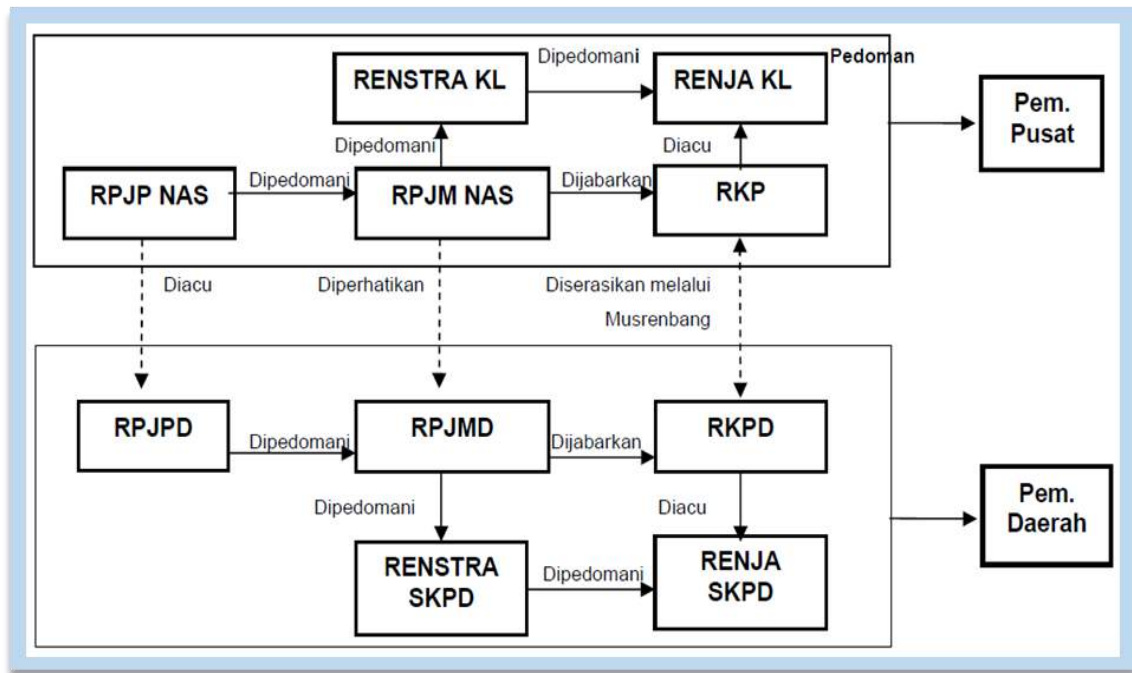
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1.
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan gambar diatas bahwa dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten dan APBN.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Kesehatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah

- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
 24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728);
 25. Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang kesehatan.
- b. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- c. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026.
- d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.
- e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2026 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 maupun dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi 4 (empat) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun berjalan yakni anggaran tahun 2024 dengan jumlah total anggaran Rp 114.485.391.153,- (*Seratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) terurai dalam 5 program, 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai target atau dengan kata lain lebih baik lagi dari pencapaian tahun sebelumnya, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 dan capaian Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 dapat dilihat **pada Tabel 2.1.**

Tabel 2.1 T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket
										I		II		III		IV								
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.046.365.225		0		57.046.365.225		121.580.214.777		224.990.305.247		129.658.824.552		254.327.917.492		730.557.262.068		730.557.262.068		1.280,64	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			57.046.365.225		0		57.046.365.225		121.580.214.777		224.990.305.247		129.658.824.552		254.327.917.492		730.557.262.068		730.557.262.068		1.280,64	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan (Skor)	85	36.796.722.925	91,11	0	4	36.796.722.925	0	117.153.594.153	0	122.122.708.754	0	91.814.916.777	3,29	104.032.992.942	3,29	435.124.212.626	94,4	435.124.212.626	54,25	1.182,51	
			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Skor)	32,90		0		73		0		0		0		0		0		0		0		
			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan (Skor)	70		66,9		68		0		0		0		67		67		133,9		99,19		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	8	35.875.814.432	11	0	11	35.875.814.432	11	114.042.829.409	11	116.012.620.471	11	88.385.805.475	11	96.847.999.695	11	415.289.255.050	11	415.289.255.050	100	1.157,57	
			Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang)	474		382		500		440		440		436		436		436		436		100		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	474	35.844.711.932	0	0	500	35.844.711.932	440	113.996.209.409	440	115.853.284.971	436	88.288.915.475	436	96.497.386.695	436	414.635.796.550	436	414.635.796.550	100	1.156,76	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	31.102.500	1	0	1	31.102.500	1	46.620.000	1	159.335.500	1	96.890.000	1	350.613.000	1	653.458.500	1	653.458.500	100	2.100,98	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)	1	18.600.000	11	0	11	18.600.000	11		0	11	298.940.000	11	47.750.000	11	913.300.000	11	1.259.990.000	11	1.259.990.000	100	6.774,14
			Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	11		11		11		11		11		11		11		11		11		100		
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	18.600.000	11	0	11	18.600.000	11		0	11	298.940.000	11	47.750.000	11	913.300.000	11	1.259.990.000	11	1.259.990.000	100	6.774,14
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	249.942.543	100	0	100	249.942.543	100	567.120.900	100	908.813.123	100	398.150.200	100	93.146.850	100	1.967.231.073	100	1.967.231.073	100	787,07	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	32	6.454.543	5	0	2	6.454.543	2		0	2	20.975.850	2	2.500.000	2	37.804.350	2	61.280.200	2	61.280.200	100	949,41
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	73	243.488.000	30	0	43	243.488.000	10	567.120.900	10	887.837.273	16	395.650.200	6	55.342.500	42	1.905.950.873	72	1.905.950.873	98,63	782,77	

1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100	404.590.130	100		0	100	404.590.130	100	2.487.843.844	100	3.832.690.330	100	2.506.223.102	100	5.265.342.897	100	14.092.100.173	100	14.092.100.173	100	3.483,06	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	100.022.500	0		0	12	100.022.500	3	282.068.844	3	326.220.630	3	223.883.102	3	451.706.897	12	1.283.879.473	12	1.283.879.473	100	1.283,59	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	304.567.630	0		0	12	304.567.630	3	2.205.775.000	3	3.506.469.700	3	2.282.340.000	3	4.813.636.000	12	12.808.220.700	12	12.808.220.700	100	4.205,38	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen)	100	247.775.820	100		0	100	247.775.820	100	55.800.000	100	1.069.644.830	90	476.988.000	90	913.203.500	90	2.515.636.330	90	2.515.636.330	100	1.015,29	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	47.484.500	1		0	1	47.484.500	1	19.800.000	1	145.476.450	1	0	1	235.533.050	1	400.809.500	1	400.809.500	100	844,08	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	177.154.500	6		0	6	177.154.500	6	36.000.000	6	834.372.050	6	405.060.000	6	640.837.950	6	1.916.270.000	6	1.916.270.000	100	1.081,69	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	16.352.500	19		0	19	16.352.500	4	0	6	38.367.000	4	71.928.000	3	36.832.500	17	147.127.500	17	147.127.500	89,47	899,72	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	6.784.320	2		0	2	6.784.320	2	0	2	51.429.330	2	0	2	0	2	51.429.330	2	51.429.330	100	758,06	
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (Persen)	90	16.892.867.500	0		0	90	16.892.867.500	22,89	4.426.620.624	20,58	84.576.259.943	19	28.000.394.177	15,43	133.171.920.150	77,9	250.175.194.894	77,9	250.175.194.894	86,56	1.480,95
		Cakupan Penanganan KLB <24 Jam (Persen)	100		0			100		25		25		0		0		50		50		50		
		Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 1 (Persen)	0		0			0		0		0		0		0		0		0		0		
		Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 2 (Persen)	0		0			0		0		0		0		0		0		0		0		
		Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		14,8		55		29,5		0,7		100		100		100		
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		31,4		25		29,1		14,5		100		100		100		
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		20,2		26,2		19,7		30,6		96,7		96,7		96,7		
		Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		17,4		34		3,8		35,7		90,9		90,9		90,9		
		Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		18,4		29,5		2,6		32,2		82,7		82,7		82,7		
		Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (Persen)	100		0			100		39,3		40		12,5		8,2		100		100		100		
		Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		39,3		40		12,5		8,2		100		100		100		
		Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		22		38,5		30,2		9,3		100		100		100		
		Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		21,8		39,7		7,5		31,0		100,0		100,0		100,0		
		Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		20,3		29		23,6		22,6		95,5		95,5		95,5		
		Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen)	100		0			100		13,6		20,4		52,5		13,5		100,0		100,0		100,0		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar (Persen)	90	3.018.716.000	0		0	78	3.018.716.000	0	816.738.000	0	6.993.759.896	0	7.704.600.112	78	54.360.427.944	78	69.875.525.952	78	69.875.525.952	100	2.314,74	

		Persentase Fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi (Persen)	100		100		100		0		0		0		100		100		100		100	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	6	1.620.480.000	0	0	6	1.620.480.000	0	0	0	0	6	0	0	40.174.449.800	6	40.174.449.800	6	40.174.449.800	100	2.479,17
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	300	57.236.000	0	0	300	57.236.000	0	0	0	0	0	0	300	507.860.226	300	507.860.226	300	507.860.226	100	887,31
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	1.322.020.000	0	0	2	1.322.020.000	1	816.738.000	0	6.935.219.896	1	7.704.600.112	0	13.633.837.918	2	29.090.395.926	2	29.090.395.926	100	2.200,45
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Kali)	4	18.980.000	0	0	4	18.980.000	1	0	1	58.540.000	1	0	1	44.280.000	4	102.820.000	4	102.820.000	100	541,73
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan (Persen)	100	13.591.388.000	100	0	100	13.591.388.000	100	3.609.882.624	100	76.751.875.248	100	19.414.237.265	100	77.343.188.844	100	177.119.183.981	100	177.119.183.981	100	1.303,17
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.372	130.641.000	0	0	1.372	130.641.000	252	0	219	158.051.200	222	0	441	32.400.000	1.134	190.451.200	1.134	190.451.200	82,65	145,78
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.263	42.000.000	0	0	5.263	42.000.000	1.651	0	1.802	122.403.100	1.045	0	765	138.622.400	5.263	261.025.500	5.263	261.025.500	100	621,49
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.117	42.000.000	0	0	6.117	42.000.000	2.127	0	1.848	58.032.000	1.951	0	140	261.882.000	6.066	319.914.000	6.066	319.914.000	99,17	761,7
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.221	58.094.000	1210	0	1.221	58.094.000	166	0	203	20.221.200	687	269.669.513	119	195.494.144	1.175	485.384.857	1.175	485.384.857	96,23	835,52
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	215.667.000	1	0	1	215.667.000	1	0	1	0	1	9.360.000	1	321.130.800	1	330.490.800	1	330.490.800	100	153,24
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	47.000.000	1	0	1	47.000.000	1	0	1	245.700.000	1	27.000.000	1	1.466.064.000	1	1.738.764.000	1	1.738.764.000	100	3.699,5
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	252.674.000	1	0	1	252.674.000	1	0	1	193.887.000	1	157.352.000	1	702.082.000	1	1.053.321.000	1	1.053.321.000	100	416,87

1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	102.100.000	1	0	1	102.100.000	1	0	1	37.770.000	1	72.930.000	1	192.960.000	1	303.660.000	1	303.660.000	100	297,41	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	1.180.986.000	2	0	1	1.180.986.000	1	0	1	1.789.790.880	1	411.675.920	1	1.212.079.500	1	3.413.546.300	1	3.413.546.300	100	289,04	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	10.963.715.000	1	0	1	10.963.715.000	1	3.609.882.624	1	74.024.625.968	1	18.294.191.832	1	72.270.612.000	1	168.199.312.424	1	168.199.312.424	100	1.534,15	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	100.000.000	1	0	1	100.000.000	1	0	1	101.393.900	1	119.958.000	1	346.057.000	1	567.408.900	1	567.408.900	100	567,41	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	171.751.000	1	0	1	171.751.000	1	0	1	0	1	33.350.000	1	88.155.000	1	121.505.000	1	121.505.000	100	70,74	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	9	115.080.000	9	0	9	115.080.000	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	100	0	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	9	169.680.000	9	0	9	169.680.000	9	0	9	0	9	18.750.000	9	115.650.000	9	134.400.000	9	134.400.000	100	79,21	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	282.763.500	1	0	1	282.763.500	0	0	1	830.624.799	0	881.556.800	0	1.468.303.362	1	3.180.484.961	1	3.180.484.961	100	1.124,79	
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Unit)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	282.763.500	0	0	1	282.763.500	0	0	1	830.624.799	0	881.556.800	0	1.468.303.362	1	3.180.484.961	1	3.180.484.961	100	1.124,79	
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar (Persen)	65	3.106.373.800	0	0	65	3.106.373.800	0	0	0	18.126.283.650	0	9.626.193.598	78	15.808.564.800	78	43.561.042.048	78	43.561.042.048	120	1.402,31
		Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar (persen)	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	78	78	78	78	78	78	97,5			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan (Kali)	2	2.349.082.900	2	0	2	2.349.082.900	0	0	1	16.847.314.650	1	7.123.518.750	0	13.015.170.700	2	36.986.004.100	2	36.986.004.100	100	1.574,49	
		Jumlah Puskesmas SDM yang memenuhi Standar (Puskesmas)	9	0	5	9	4	0	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100			
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	265	2.334.000.900	155	0	155	2.334.000.900	88	0	88	16.769.115.750	88	6.611.454.500	88	11.669.339.050	88	35.049.909.300	88	35.049.909.300	100	1.501,71	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	15.082.000	1	0	1	15.082.000	0	0	1	78.198.900	0	512.064.250	0	1.345.831.650	1	1.936.094.800	1	1.936.094.800	100	12.837,12	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi (Kali)	2	757.290.900	0	0	2	757.290.900	0	0	1	1.278.969.000	1	2.502.674.848	0	2.793.394.100	2	6.575.037.948	2	6.575.037.948	100	868,23	
		Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi (Orang)	60	80	60	0	0	30	30	30	30	0	60	60	60	60	60	60	60	100			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	80	757.290.900	60	0	60	757.290.900	0	0	30	1.278.969.000	30	2.502.674.848	0	2.793.394.100	60	6.575.037.948	60	6.575.037.948	100	868,23	

4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESBATHAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pemenuhan Obat-obatan (Persen)	100	250.401.000		0	100	250.401.000	20	0	21	165.052.900	25	217.320.000	33	1.314.439.600	99	1.696.812.500	99	1.696.812.500	99	677,64
			Cakupan Pemenuhan Vaksin (Persen)	100			100		22	20	19	38	99	99	99	99							
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi (Persen)	100	146.493.000	100	0	100	146.493.000	58	0	65	0	80	217.320.000	81	222.310.000	81	439.630.000	81	439.630.000	100	300,1
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	146.493.000	1	0	1	146.493.000	0	0	0	0	0	217.320.000	1	222.310.000	1	439.630.000	1	439.630.000	100	300,1
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha (Kali)	4	103.908.000	2	0	4	103.908.000	1	0	1	165.052.900	1	0	1	1.092.129.600	4	1.257.182.500	4	1.257.182.500	100	1.209,9
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	38	103.908.000	24	0	38	103.908.000	3	0	6	165.052.900	10	0	6	1.092.129.600	25	1.257.182.500	25	1.257.182.500	65,79	1.209,9
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
					57.046.365.225		0		57.046.365.225		121.580.214.777		224.990.305.247		129.658.824.552		254.327.917.492		730.557.262.068		730.557.262.068		
																	90,71	1.280,64			91,53	1.280,64	
																	Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi	

Dilihat dari Tabel TC 29, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dimana terdapat 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Pada tahun 2024 terdapat 2 indikator program yang telah mencapai target (50%), sementara 2 program belum mencapai target (50%); 8 indikator kegiatan telah mencapai target (66,7%) dan 4 kegiatan belum mencapai target (33,3%); 27 indikator sub kegiatan telah mencapai target (77,1%) dan 8 indikator sub kegiatan belum mencapai target (22,9%)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target
Kinerja yang direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran administrasi keuangan yang dibayarkan seluruhnya yaitu gaji dan tunjangan serta honorarium pengelola keuangan dengan tepat waktu selain itu juga tersedianya surat keputusan (SK) Bupati/Kepala Dinas sebagai data dukung untuk dilakukan pencairan dana tersebut.
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dokumen Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik karena didukung adanya honorarium bagi pengelola barang milik daerah.
3	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait program kesehatan
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil	- Terlaksananya pelayanan kesehatan pada ibu hamil secara maksimal - Tersedianya rumah tunggu kelahiran

No	Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
		bagi ibu hamil yang beresiko tinggi
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya posyandu lansia setiap desa
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Sudah terlatihnya SDM untuk petugas pengelola Tuberculosis - Tersedianya insentif bagi petugas laboratorium dalam pemeriksaan Slide Tuberculosis
7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	- Tersedia anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer kesehatan - Sebagian THL kesehatan lulus dalam seleksi penerimaan pegawai maupun PPPK
8	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Terlaksana pengawasan terhadap produksi makanan minuman tingkat rumah tangga - Terlaksana kegiatan sosialisasi terkait pentingnya keamanan pangan pada bahan yang digunakan dalam produksi makanan minuman tingkat rumah tangga

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan Dan Faktor-Faktor Penghambatnya

No	Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Adanya indiscipliner pegawai sehingga terjadi penahanan gaji dan pemotongan tunjangan kinerja

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Adanya peralatan kantor AC yang rusak berat sehingga tidak lagi dilakukan pemeliharaan
3	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penggunaan anggaran bukan hanya pada kegiatan rapat koordinasi tetapi membiayai kegiatan lain
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil	Pernikahan dini, faktor budaya setempat
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Usia Lanjut yang tidak mampu lagi berjalan sehingga tidak datang secara rutin dalam pemeriksaan kesehatan
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Adanya kekosongan alat dalam pelaksanaan kesehatan bagi terduga TB sesuai standar
7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	- Adanya mutasi dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
8	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Belum semua pelaku industri rumah tangga mengetahui pentingnya keamanan pangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka urusan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acuan dalam

menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, dan IKU (Indikator Kinerja Utama) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan laporan hasil kinerja (LKJiP) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dan analisis kinerja Dinas Kesehatan yang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta analisis kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditentukan targetnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Angka Kematian Ibu	IKU		290/100.000KH	287/100.000KH	284/100.000KH	191/100.000KH	188/100.000KH	185/100.000KH	293/100.000 KH	265/100.000 KH	263,6/100.000KH	587,7/100.000KH	188/100.000KH	185/100.000KH	Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat kematian ibu
2	Angka Kematian Bayi	IKU		18,5/1.000KH	17,6/1.000KH	16,6/1.000KH	15/1.000KH	14,6/1.000KH	13/1.000KH	12/1.000 KH	7,9/1.000 KH	9,7/1.000 KH	7,8/1.000 KH	14,6/1.000KH	13/1.000KH	Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat kematian bayi
3	Indeks Kesehatan Keluarga	IKU		0,09	0,2	0,4	0,6	0,7	>0,8	0,09	0,12	0,11	0,12	0,7	>0,8	Capaian IKU ini belum mencapai target, kegiatan penilaian keluarga sehat tidak ada lagi penganggarannya
4	Persentase Stunting	IKU		0,02%	6,25%	6%	5,80%	5%	4,85%	0,05%	0,20%	2,97%	1,96%	5%	4,85%	Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat balita stunting
5	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular	IKU		20%	22%	25%	28%	30%	32%	17%	17,3%	13,3%	15,25%	30%	32%	Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat jumlah kasus penyakit yang tinggi
8	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk		IKK	2,05%	2,08%	2,10%	2,12%	2,31%	2,35%	2,26%	2,0%	2,41%	2,6%	2,31%	2,35%	Capaian IKK ini sudah mencapai target
9	Persentase RS Rujukan Kabupaten yang Terakreditasi		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Capaian IKK ini sudah mencapai target karena RSUD Kabupaten yang ada sudah reakreditasi

10	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%	74,7%	91,0%	82,7%	100%	100%	Capaian SPM ini belum mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik belum terpenuhi
11	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%	91,4%	99,1%	98,5%	100%	100%	Capaian SPM ini belum mencapai target, masih terdapat persalinan diluar Faskes
12	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	99,2%	99,0%	99,4%	100%	100%	Capaian SPM ini belum mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik belum terpenuhi
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi
14	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi
15	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 tahun s/d 29 tahun) Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	83%	60%	100%	100%	Capaian SPM ini belum mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik belum terpenuhi
16	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi serta tersedianya posyandu lansia di setiap desa
17	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi serta tersedianya posbindu disetiap desa
18	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi serta tersedianya posbindu disetiap desa
19	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi
20	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,3%	100,0%	100,0%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi
21	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi

Hasil pencapaian SPM sesuai tabel 2.4 diatas dapat dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu :

1. Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Balita, Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga TB dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, capaian SPM ini telah mencapai target yang didukung dengan standar kualitas ketersediaan logistik terpenuhi.
2. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, capaian SPM ini belum mencapai target, standar kualitas ketersediaan logistik belum terpenuhi.

Persentase rata-rata capaian SPM secara keseluruhan tahun 2024 adalah 95% mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 97,6%, walaupun belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- masih tingginya kematian ibu hamil
- masih adanya persalinan yang dilakukan di rumah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersalin di faskes
- masih adanya dukun bersalin yang melakukan praktek persalinan di rumah
- adanya rangkap jabatan/program sehingga tdk dapat fokus pada pelayanan dan program
- belum ada aturan yang mengikat terkait persalinan tidak boleh dilakukan di rumah
- belum semua wilayah Puskesmas memiliki jaringan internet

- sebagian tenaga kesehatan belum terlatih penanganan kesehatan jiwa dan pasien ODGJ ada yang sudah meninggal
Dari 8 Puskesmas hanya 1 Puskesmas yang sudah terlatih tatalaksana program kesehatan jiwa
- tidak semua obat kesehatan jiwa tersedia di gudang farmasi Kabupaten

2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Belum terpenuhinya sarana prasarana dan alat kesehatan di FKTP dan Instalasi Farmasi Kabupaten	Terbatasnya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di FKTP dan Instalasi Farmasi Kabupaten
Kesenjangan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil	Distribusi SDM Kesehatan yang Belum Merata
Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang belum memiliki STR /SIP	Tenaga kesehatan dan Tenaga Medis wajib memenuhi kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan

Permasalahan	Hambatan
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1561/2024.
Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan yang belum memadai	Terdapat kesenjangan antara kualitas SDMK yang ada dengan standar yang dibutuhkan
Skrining deteksi dini usia produktif tidak mencapai target SPM	Tidak Optimalnya Pelaksanaan Posyandu Prima
Angka penemuan kasus baik penyakit menular dan tidak menular masih sangat rendah	Kurang dukungan dari Pemerintah dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat
Masih adanya pemasangan, meningkatnya kasus Orang dengan gangguan Jiwa / Berat, Bunuh diri dan Gangguan Mental Emosional	Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan (logistik maupun alkes yang digunakan dalam kegiatan deteksi dini)
Terjadi KLB atau peningkatan Kasus Penyakit Menular Seperti DBD	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan Kesehatan secara dini dan berkala
Keterlambatan Pelaporan baik secara online dan offline	Stigma dan Diskriminasi yang membuat enggan untuk melakukan tes atau mendapatkan pengobatan yang tepat dan ketakutan akan diskriminasi menghalangi upaya pencegahan dan penanganan yang efektif
Tidak optimalnya pemberian imunisasi pada usia anak bayi, balita, usia sekolah dan wanita usia subur.	Adanya Kekosongan Vaksin beberapa Antigen seperti (DPT-HB-Hib, Polio dan Rotavirus) Tingkat Kepercayaan Masyarakat menurun karena adanya Hoaks Pasca Covid 19), tempat penyimpan vaksin tidak berfungsi baik, terbatasnya Refrigerator di Dinkes dan PKM, tidak ada Biaya pemeliharaan Rantai dingin terutama sparepart Refrigerator yg rusak ringan, Jurim yang belum berani melakukan Suntikan Ganda pada sasaran karena ketidakpercayaan diri dan takut orang

Permasalahan	Hambatan
	tua yang tidak mengijinkan.
Belum optimalnya kolaborasi dengan program lain dalam pelaksanaan skrining sehingga kurang efektif dan efisien	Perubahan Musim dan peralihan cuaca yang tidak menentu sehingga meningkatkan populasi nyamuk (DBD)
Petugas rangkap kerja	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pencegahan DBD misalkan pelaksanaan PSN secara rutin
Belum ada kerjasama lintas program dan atau lintas sektor terkait penanggulangan TBC	Belum ada RAD (rencana aksi daerah) penanggulangan TBC dan Tim percepatan penanggulangan TBC
Sudah berakhirnya masa garansi pemeliharaan mesin TCM	Keterlambatan diagnosis dan pengobatan : gejala TBC yabg sering diabaikan atau disalahartikan sebagai penyakit lain menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan sehingga meningkatkan risiko penularan kepada orang lain
Skrining deteksi dini usia produktif tidak mencapai target SPM	Akses terbatas terhadap layanan kesehatan hal ini menghambat deteksi dini dan pengobatan HIV /Aids sehingga infeksi tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan baik
Angka Kematian Ibu tertinggi	Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya ibu hamil untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara rutin di Posyandu.
Kurangnya Capaian Kunjungan Kehamilan (K1), (K4), (K6)	Terdapat Resiko Tinggi dalam Kehamilan serta standar Pemeriksaan ibu hamil tidak terpenuhi
kurangnya partisipasi lansia dan keluarga pada program kunjungan kesehatan lansia	Terdapat Persalinan Non Nakes

Permasalahan	Hambatan
kurangnya jumlah SDM yang terlatih	Masih banyaknya keluarga dan para lansia yang tidak memeriksa kesehatan ke fasilitas kesehatan secara berkala
Pelaksanaan survei kualitas air minum rumah tangga belum maksimal, belum semua desa menjadi desa STBM, Puskesmas belum memiliki cold storage	Jumlah tenaga kesehatan dan kader yang belum mendapatkan pelatihan khusus yang memadai untuk menangani masalah kesehatan dan kebutuhan lansia
Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pj program pada pelaporan aplikasi sitko online	Belum adanya anggaran untuk tersedianya bahan penunjang pemeriksaan kualitas baku mutu air
Upaya Promosi Kesehatan	Beban kerja yg berlebihan termasuk lingkungan kerja fisik, kimia, biologis ergonomis dan faktor psikososial dan kondisi tempat itu sendiri
Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	Rendahnya cakupan masyarakat ber-PHBS serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS, keterbatasan sumber daya lingkungan yang kurang mendukung
Masih Tedapat Masalah Status Gizi Balita	Akses Layanan kesehatan yang terbatas, kepercayaan budaya, dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan bayi yang tepat
Kurangnya Capaian Kunjungan Kehamilan (K1), (K4), (K6)	Kurangnya asupan makanan bergizi, infeksi penyakit, gangguan pencernaan dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi, faktor ekonomi keluarga yang minim dan kurangnya akses terhadap sanitasi yang baik

Selain itu, permasalahan dan hambatan yang muncul selama Tahun 2024, Dinas Kesehatan juga memiliki beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6**Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024**

Peluang	Tantangan
Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan pencapaian program kesehatan	Mendorong peran serta masyarakat dan seluruh komponen dalam pembangunan kesehatan
Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber untuk pelaksanaan Program	Kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia Kesehatan)
Peningkatan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan Pendukung Fasilitas kesehatan	Diharapkan dapat memenuhi dan meningkatkan kinerja dan kualitas jenis pelayanan kesehatan
Ketersediaan SDM di FKTP dan Instalasi Farmasi Kabupaten yang sudah terlatih	Diharapkan dapat menjawab pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu
Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan diberbagai daerah termasuk daerah terpencil	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan terutama pada daerah pedesaan dan terpencil
Transformasi digital membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen SDM melalui penggunaan system informasi dan teknologi yang terintegrasi seperti SISDMK dan MPPD untuk pengurusan SIP	Penggunaan aplikasi Plataran Sehat di Satu Sehat SDM dan aplikasi MPPD yang terintegrasi untuk pengajuan SKP dan SIP (Surat Izin Praktek) untuk tenaga kesehatan yang wajib SIP
Adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang difasilitasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, membuka peluang bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan	Perlu adanya upaya berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas SDM yang merata
Ketersediaan dana DAU Spesific Grand dan DAK	Merubah paradigma masyarakat tentang deteksi dini dan penyakit menular tertentu seperti TB kusta dan HIV

Peluang	Tantangan
Tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat	Merubah paradigma masyarakat tentang deteksi dini dan penyakit menular tertentu seperti TB kusta dan HIV
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa di FKTP lewat Pelatihan dan Koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinsos, Aparat Desa, dan Keluarga	Menghilangkan Stigma dan Diskriminasi terhadap kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pemasungan dan dapat memilih berobat di fasilitas kesehatan.
Penyebaran informasi dan edukasi tentang imunisasi lebih ditingkatkan baik media sosial dan penyuluhan tentang imunisasi, penggunaan media Sosial dapat membentuk grup ibu-ibu yang peduli imunisasi dan penyebaran informasi tercepat serta dapat mengevaluasi cakupan secara berkala	Mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya Imunisasi pada Bayi dan balita, Jurim dapat dengan profesional melakukan suntikan ganda
Meningkatkan program pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan atau kader terlatih untuk memberikan dukungan dan bimbingan selama kehamilan	Merubah paradigma masyarakat tentang deteksi dini dan penyakit menular tertentu seperti TB kusta dan HIV
Meningkatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Menghimbau Masyarakat untuk peduli pada pemeriksaan dan deteksi dini Resiko pada kehamilan dan persalinan
Meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai program seperti pelayanan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan dukungan ekonomi	Melakukan Kerja Sama Lintas Sektor, meningkatkan mitra antara Nakes-Tokoh Masyarakat atas Kepercayaan Masyarakat terutama pada persalinan non nakes
Memperkuat jejaring antara lansia, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah dalam mendukung kesejahteraan lansia	Merubah paradigma tentang pentingnya pemeriksaan dini kehamilan

Peluang	Tantangan
Masalah kesehatan lingkungan bisa teratasi sebagian	Keterbatasnya anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan lansia, keterbatasannya tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan lansia
Kesehatan kerja dan olahraga dapat terlaksana dengan baik	Beberapa daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan lansia
Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat dengan adanya kerjasama pemerintah lintas sektor untuk mendukung penyuluhan ataupun sosialisasi dari tenaga kesehatan	Perubahan perilaku dan kebutuhan lansia sehingga program yang diselenggarakan dapat relevan dan efektif serta peran keluarga sangat penting dalam mendukung kesejahteraan lansia
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan anak, dan intervensi tepat sasaran	Menganggarkan belanja alat pemeriksaan air
Meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pola asuh dan pemberian makan anak yang baik dan seimbang	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi
2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

4. Pemenuhan capaian program pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan
5. Pemenuhan akan kebutuhan SDMK sesuai standar
6. Peningkatan Kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.7

**Tabel 2.7 T.C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	12	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	52.037.137.105			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	52.681.038.166		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	450 Orang	46.744.832.740	SEMUA KECAMATAN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	630 Orang	46.744.832.740	SEMUA KECAMATAN	
1.2		Jumlah Laporan Keuangan	8 Laporan			Jumlah Laporan Keuangan		8 Laporan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	46.648.533.790			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	46.648.533.790		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96.298.950			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96.298.950		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dokumen	144.990.000	SEMUA KECAMATAN		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dokumen	144.990.000	SEMUA KECAMATAN	
1.3		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	11 Laporan			Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD		11 Laporan				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	144.990.000			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	144.990.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti	100%	768.999.000	SEMUA KECAMATAN		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti	100%	1.030.490.170	SEMUA KECAMATAN	
1.5		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		90%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	50.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	50.002.170	Penambahan Pagu	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600.275.000	Penambahan Pagu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.999.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	380.213.000	Penambahan Pagu	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Yang diadakan	30 Unit	25.500.000	SEMUA KECAMATAN		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Yang diadakan	30 Unit	25.641.000	SEMUA KECAMATAN	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	4 unit	14.541.000	Penambahan Pagu	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.500.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	11.100.000	Penambahan Pagu	

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	3.116.728.665	SEMUA KECAMATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	3.094.213.756	SEMUA KECAMATAN	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	678.097.500		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	12 Laporan	684.397.500		Penambahan Pagu
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.438.631.165		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.409.816.256		Pengurangan pagu
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	1.236.086.700	SEMUA KECAMATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	1.640.870.500	SEMUA KECAMATAN	
		Jumlah Barang yang Dipelihara	0 Unit				Jumlah Barang yang Dipelihara	0 Unit			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	269.784.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	2 unit	83.790.000		Pengurangan pagu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	700.887.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	1.108.890.500		Penambahan Pagu
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	264.225.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	50 unit	250.000.000		Pengurangan pagu
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.190.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	198.190.000		Penambahan Pagu
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1,80%	18.491.977.440		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1,80%	34.593.556.936		
		Angka Kematian Ibu (AKI)	188 per 100.000 KH				Angka Kematian Ibu (AKI)	188 per 100.000 KH			
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar	80%	6.477.098.880	SEMUA KECAMATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar	80%	11.288.900.700	SEMUA KECAMATAN	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	-		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	4.811.801.820		
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	500.000.000		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	500.000.000		

	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.506.700.000			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.506.700.000		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	250.000.000			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	250.000.000		
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.045.398.880			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.045.398.880		
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	120 Unit	50.000.000			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	120 Unit	50.000.000		
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Paket	125.000.000			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Paket	125.000.000		
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan	10 Unit	11.802.878.110	SEMUA KECAMATAN		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang Dilayani	10 Unit	23.127.229.786	SEMUA KECAMATAN	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1135 orang	525.854.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1135 orang	525.854.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1018 orang	52.410.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	967 orang	52.410.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1015 orang	50.000.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1079 orang	50.000.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5261 orang	50.000.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3202 orang	50.000.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1057 orang	350.890.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10868 orang	350.890.000		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.107 orang	50.000.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41860 orang	50.000.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6560 orang	77.120.450			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6376 orang	77.120.450		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5041 orang	50.000.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4354 orang	50.000.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1183 orang	50.000.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 orang	50.000.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 orang	130.176.450			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 orang	130.176.450		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1241 orang	195.043.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1034 orang	195.043.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1651 orang	64.400.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1023 orang	64.400.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	-			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	30.000.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	-			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.558.857.500		Penambahan Pagu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	140.994.450			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	80.594.000		Pengurangan Pagu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	371.844.450			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	356.784.000		Pengurangan Pagu
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	307.020.800			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	277.137.000		Pengurangan Pagu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	46.878.350			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	45.678.000		Pengurangan Pagu
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	772.939.550			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	721.494.000		Pengurangan Pagu
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	6.855.728.225			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	16.692.447.886		Penambahan Pagu

	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	25 Paket	30.000.000			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	25 Paket	30.000.000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dokumen	1.030.802.500			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dokumen	1.087.753.500		Penambahan Pagu
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	30.000.000			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	30.000.000		
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	29.860.000			Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	29.860.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9 Dokumen	123.446.100			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9 Dokumen	123.651.000		Penambahan Pagu
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	9 Dokumen	190.932.000			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	9 Dokumen	190.942.000		Penambahan Pagu
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	150 orang	29.934.540			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	150 orang	29.934.500		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	96.603.245			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	96.202.500		Pengurangan Pagu
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	212.000.450	SEMUA KECAMATAN		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	177.426.450	SEMUA KECAMATAN	
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	5 Unit					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	5 Unit			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	212.000.450			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	177.426.450		Pengurangan Pagu

III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar	80%	3.306.086.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar	80%	1.491.645.500		
		Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar	65%				Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar	65%			
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan	2 Kali	2.886.086.000	SEMUA KECAMATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan	2 Kali	1.113.307.500	SEMUA KECAMATAN	
		Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM yang memenuhi Standar	6 Unit				Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM yang memenuhi Standar	6 Unit			
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	217.000.000		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	217.000.000		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	265 Orang	2.669.086.000		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 Orang	896.307.500		Pengurangan pagu
###	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi	60 Orang	420.000.000	SEMUA KECAMATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi	25 Orang	378.338.000	SEMUA KECAMATAN	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi	2 Kali				Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi	2 Kali			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	420.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	378.338.000		Pengurangan Pagu
IV.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin	100%	610.000.000		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin	100%	610.000.000		
		Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin	100%				Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin	100%			
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	12 Kali	110.000.000	SEMUA KECAMATAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	12 Kali	110.000.000	SEMUA KECAMATAN	
		Jumlah Ijin yang terbit	4 Sarana				Jumlah Ijin yang terbit	4 Sarana			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	110.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	110.000.000		

4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi	100%	180.000.000	SEMUA KECAMATAN		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi	100%	180.000.000	SEMUA KECAMATAN	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	180.000.000			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	180.000.000		
4.4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha	4 Kali	320.000.000	SEMUA KECAMATAN		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha	4 Kali	320.000.000	SEMUA KECAMATAN	
	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	320.000.000			Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	320.000.000		
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS	75%	114.435.350			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS	75%	114.996.000		
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan UKBM	1 Jenis	114.435.350	SEMUA KECAMATAN		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan UKBM	1 Jenis	114.996.000	SEMUA KECAMATAN	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	114.435.350			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	114.996.000		Penambahan Pagu
				74.559.635.895						89.491.236.602		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada **tabel 2.8**.

Tabel 2.8 T.C 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				
1	Pengembangan Puskesmas	Desa Meyambanga	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Diakomodir dengan penyesuaian
		Desa Motandoi	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Diakomodir dengan penyesuaian
		Desa Deaga	1 unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Diakomodir dengan penyesuaian
		Desa Linawan	1 unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Diakomodir dengan penyesuaian
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	RSUD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6 unit	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Diakomodir dengan penyesuaian

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026 yang perlu disinergikan dalam RKPD di tingkat daerah dengan arah kebijakan yaitu penguatan sumber daya manusia dan daya saing daerah, reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, ketahanan pangan, energi dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif serta pengembangan wilayah dan pengurangan kesenjangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk bidang kesehatan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai upaya di bidang kesehatan. RPJMN ini menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Fokus Utama RPJMN 2025-2029 Bidang Kesehatan :

1. **Peningkatan Kualitas SDM:** Kesehatan merupakan pilar penting dalam mewujudkan SDM berkualitas, yang tercermin dalam tiga pilar pembangunan: layanan dasar, pembentukan modal manusia, dan modal sosial budaya.
2. **Penyediaan Layanan Kesehatan Dasar:** RPJMN menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang inklusif, memperhatikan gender dan seluruh kelompok masyarakat.
3. **Pengendalian Penyakit:** Fokus pada pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.

4. **Penguatan Pelayanan Kesehatan:** Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan.
5. **Peningkatan Gizi Masyarakat:** Upaya perbaikan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak.
6. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat:** Peningkatan usia harapan hidup sehat dan penurunan angka kematian ibu dan anak.
7. **Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak:** Penurunan angka kematian ibu dan prevalensi stunting.
8. **Penguatan Promosi Kesehatan:** Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat.
9. **Pemerataan Tenaga Kesehatan:** Distribusi tenaga kesehatan yang merata ke seluruh wilayah.
10. **Peningkatan Kemandirian Perbekalan Kesehatan:** Peningkatan produksi dan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri.

Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029, dimana Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengusulkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Prevalensi Stunting
3. Peningkatan Cakupan Imunisasi
4. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang dijabarkan dalam 5 prioritas nasional (PN) dan berpedoman pada 6 arah kebijakan antara lain :

Tabel 3.1
Prioritas Nasional (PN) dan Arah Kebijakan dalam RKP
Tahun 2026

NO	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan
1.	Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi	1. Peningkatan produksi pangan melalui optimalisasi bulog dan lumbung pangan, pengembangan energi baru terbarukan serta peningkatan kualitas air
2.	Ekonomi Produktif dan Inklusif	2. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif serta pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM
3.	Pembangunan manusia	3. Pengurangan Kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar dan penguatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
4.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah	4. Penguatan Konektivitas dan kemaritiman serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
5.	Transformasi Digital	5. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung berbagai sektor pembangunan termasuk pendidikan dan ekonomi
6.	Peningkatan kualitas lingkungan	6. Fokus pada pengelolaan sampah, pengembangan energi bersih dan pelestarian lingkungan hidup

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 juga telah dirumuskan prioritas pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia
2. Pengembangan agrobisnis
3. Pengembangan pariwisata
4. Infrastruktur
5. Peningkatan tata kelola Pemerintahan
6. Penanggulangan kemiskinan
7. Peningkatan daya saing

Berdasarkan 7 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang diperluas serta upaya penurunan stunting melalui gerakan TP PKK. Adapun indikator kinerja utama yang menjadi target pembangunan daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan gratis
2. Penurunan Kasus TBC
3. Pembangunan Rumah Sakit lengkap

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Berdasarkan misi ketiga Bupati Bolaang Mongondow Selatan yaitu “Transformasi Sosial melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, Berakhlak dan Berdaya Saing”, dimana tertuang didalamnya tentang tujuan dan sasaran strategis urusan kesehatan yaitu dengan tujuan “Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing di Tahun 2030” dan dengan 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau
3. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah **“Inovasi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah yang Berdaya Saing”**.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing di Tahun 2030	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	200/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7,5/1.000 KH
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	19%
		Presentase DAM (Depot Air Minum) Isi Ulang yang Melakukan Pemeriksaan Kualitas Air Minum	100%
	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100%
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%
		Cakupan Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	90%

		Cakupan Orang dengan Tuberculosis / Kasus (Treatment Coverage)	90%
	Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang memenuhi standar di fasilitas kesehatan	79%
		Cakupan peningkatan Kompetensi SDM dibidang kesehatan	100%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Target Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari MDGs, terdapat 4 (empat) target SDGs yang berhubungan dengan Kesehatan

- Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua disegala usia (SKN)
- Tujuan 4 : Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (akses kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana)
- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (sanitasi dan air bersih)

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menjadi salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan Dinas Kesehatan. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditujukan untuk meningkatkan capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.

3. Pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

Penanggulangan Kemiskinan melalui program jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) dengan menganggarkan premi asuransi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

b. Uraian garis besar rekapitulasi mengenai program dan kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, untuk mengakomodir sebanyak 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) (9 Puskesmas dan 1 RSUD), 3 (tiga) Bidang dan Sekretariat Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

1. Pengembangan Puskesmas
2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Pengembangan Rumah Sakit
4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
6. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia

Lanjut

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
19. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
20. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
21. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
22. Operasional Pelayanan Puskesmas
23. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
24. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
25. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
26. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Gangguan Kejiwaan
27. Pengelolaan Pelayanan Imunisasi

- 28. Pengelolaan Pelayanan Reproduksi
- 29. Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
- 30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- 1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk

Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

5.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

c. Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal

Berdasarkan tabel 2.7 terdapat pengurangan dan penambahan anggaran program dan kegiatan pada renja Dinas Kesehatan tahun 2026. Berikut program kegiatan yang terdapat pengurangan anggaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
 - 2.1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
 - 3.1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Sedangkan program kegiatan yang terdapat penambahan
anggaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
 - 2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 3.1 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3.2 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
 - 3.3 Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 4.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah rekapitulasi program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				85.245.844.070,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				45.485.605.782,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.29	3.45	45.485.605.782,00	1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	7.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	3.500.000,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	3.500.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43.146.063.662,00		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	603	633	43.146.063.662,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi	1	1			

1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.083.163.662,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	603	633	43.083.163.662,00		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				62.900.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1	62.900.000,00		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				73.010.000,00		
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	73.010.000,00		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				73.010.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	73.010.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.832.000,00		
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	2.832.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data	1	1			
1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.515.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	1.515.000,00		
1.02.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				1.317.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data	1	1	1.317.000,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.400.000,00		
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	5	5	57.400.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	15	15			
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.100.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	15	45.100.000,00		

1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.300.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	12.300.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				958.750.000,00		
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	958.750.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1			
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	3.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				750.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	750.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				955.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	955.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				265.100.120,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	265.100.120,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2	2			
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	250.000.000,00		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.210.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	9.210.000,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.330.120,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	2.330.120,00		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.560.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	3.560.000,00		

1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				649.000.000,00		
Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1	1	649.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	130.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				519.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	519.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.450.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	294.450.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	38.000.000,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				245.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	245.000.000,00		

1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.120.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	5.120.000,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.230.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1.230.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	5.100.000,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				32.000.000,00		
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	4	32.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				32.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	4	32.000.000,00		

1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				32.454.700.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	32.454.700.000,00	1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	98.89	100			
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100			
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100			
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87.32	100			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	89.7	100			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.41	100			
	Angka Kematian Ibu (AKI)	587.7	188			
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88.64	100			

1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000.000,00		
Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	1	20.000.000.000,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	125	130			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	34	30			
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	216	216			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	2			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	1			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	1			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	9	1			
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	4			
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	1			

	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	1			
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	1			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				1.700.000.000,00		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1	1.700.000.000,00		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				2.800.000.000,00		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	9	1	2.800.000.000,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.000.000.000,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	2	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	1	350.000.000,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				2.500.000.000,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	4	2.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				500.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	1	500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				250.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	1	250.000.000,00		

1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				330.000.000,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	1	330.000.000,00		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				120.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	1	120.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	34	30	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				850.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	125	130	850.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	1	750.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				7.500.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	1	7.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				350.000.000,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	216	216	350.000.000,00		

1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.359.700.000,00		
Jumlah Layanan Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5150	5414	12.359.700.000,00		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2011	2156			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1150	1200			
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	1			
	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1	1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	1			

	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10	10			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1065	1100			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1346	1370			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9	9			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	63	63			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	261	305			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	3			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1812	1482			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	9			

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63	63			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200	1000			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7200	7000			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18000	25000			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1150	1200			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				50.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1346	1370	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				50.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1065	1100	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				50.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1150	1200	50.000.000,00		

1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				50.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5150	5414	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				50.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2011	2156	50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				50.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18000	25000	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7200	7000	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200	1000	50.000.000,00		

1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63	63	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1812	1482	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	3	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				10.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	1	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				55.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	55.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	250.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				15.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	15.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				11.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	63	63	11.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				300.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	2	300.000.000,00		

1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10.789.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	10.789.000.000,00		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				7.500.000,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1150	1200	7.500.000,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				25.000.000,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5.500.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	1	5.500.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				5.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				25.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				35.000.000,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10	10	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5.500.000,00		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	5.500.000,00		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				5.500.000,00		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1	5.500.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5.500.000,00		

Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	5.500.000,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				15.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	261	305	15.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				15.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9	9	15.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				10.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	9	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				15.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	15.000.000,00		
1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				35.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	1	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				10.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	1	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				5.200.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1	5.200.000,00		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				60.000.000,00		
Jumlah Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	60.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				60.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	60.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		
Jumlah Ijin yang Terbit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				35.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	1	35.000.000,00		

1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				6.984.048.995,00		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	0	77	6.984.048.995,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				1.300.000.000,00		
Jumlah Ijin yang terbit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	1.300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1			
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				500.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	500.000.000,00		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				800.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	800.000.000,00		

1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				4.470.000.000,00		
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM yang memenuhi Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	10	4.470.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	10			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	61	64			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.200.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	10	1.200.000.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				2.270.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	61	64	2.270.000.000,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	10	1.000.000.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.214.048.995,00		
Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	422	747	1.214.048.995,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.214.048.995,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	422	747	1.214.048.995,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				289.052.182,00		
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi	100	100	289.052.182,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50.000.000,00		
Jumlah Ijin yang terbit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8	10	50.000.000,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8	10	50.000.000,00		

1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				139.000.000,00		
Jumlah Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30	30	139.000.000,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				139.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30	30	139.000.000,00		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				25.000.000,00		
Jumlah Sertifikat Laik Higiene yang Terbit untuk Tempat Pengelolaan Makanan (Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga dan Depot Air Minum)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	25.000.000,00		

1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				25.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	25.000.000,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				75.052.182,00		
Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	40	75.052.182,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				75.052.182,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	40	75.052.182,00		

1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				32.437.111,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	0	35	32.437.111,00	1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.337.111,00		
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	4	10.337.111,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10.337.111,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	4	10.337.111,00		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.100.000,00		
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	2	12.100.000,00		

1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12.100.000,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	2	12.100.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	2	10.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	2	10.000.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 merupakan rencana kerja keseluruhan termasuk Unit Perangkat Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas (9 Puskesmas) dan RSUD. Adapun jumlah pagu anggaran yang dianggarkan untuk Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp 89.491.236.602,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Rupiah) yang terdiri dari 5 program dan 16 kegiatan.

Dalam rangka mencapai target-target kinerja Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam bidang kesehatan, telah disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya yaotu kegiatan-kegiatan untuk tetap menjaga keberlangsungan capaian program dan kegiatan-kegiatan dan untuk meningkatkan cakupan program. Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan utama dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menjaga agar Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan teteap terpenuhi, sehingga diharapkan program dan kegiatan ini dapat terlaksana dan teranggarkan secara maksimal pada tahun 2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. T.C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun n	Pagu Dana Tahun n	Ket
		7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	52.681.038.166	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	630 Orang	46.744.832.740	
		Jumlah Laporan Keuangan	8 Laporan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	603 orang	46.648.533.790	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96.298.950	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dokumen	144.990.000	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	11 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	144.990.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1.030.490.170	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	50.002.170	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600.275.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	380.213.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Yang diadakan	30 Unit	25.641.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	4 unit	14.541.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	11.100.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	3.094.213.756	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	12 Laporan	684.397.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.409.816.256	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	1.640.870.500	
		Jumlah Barang yang Dipelihara	0 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	2 unit	83.790.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	1.108.890.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	50 unit	250.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	198.190.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1,80%	34.593.556.936	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	188 per 100.000 KH		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar	80%	11.288.900.700	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	4.811.801.820	
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	500.000.000	

	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.506.700.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.045.398.880	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	120 Unit	50.000.000	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Paket	125.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang Dilayani	10 Unit	23.127.229.786	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1135 orang	525.854.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	967 orang	52.410.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1079 orang	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3202 orang	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10868 orang	350.890.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41860 orang	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6376 orang	77.120.450	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4354 orang	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 orang	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 orang	130.176.450	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1034 orang	195.043.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1023 orang	64.400.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	30.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.558.857.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	80.594.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	356.784.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	277.137.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	45.678.000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	721.494.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	16.692.447.886	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	25 Paket	30.000.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dokumen	1.087.753.500	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	30.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	29.860.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9 Dokumen	123.651.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	9 Dokumen	190.942.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	150 orang	29.934.500	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	96.202.500	

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	177.426.450	
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	5 Unit		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	177.426.450	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar	80%	1.491.645.500	
		Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar	65%		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan	2 Kali	1.113.307.500	
		Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM yang memenuhi Standar	6 Unit		
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	217.000.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 Orang	896.307.500	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi	25 Orang	378.338.000	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi	2 Kali		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	378.338.000	

	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin	100%	610.000.000	
		Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin	100%		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	12 Kali	110.000.000	
		Jumlah Ijin yang terbit	4 Sarana		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	110.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi	100%	180.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	180.000.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha	4 Kali	320.000.000	
	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	320.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS	75%	114.996.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan UKBM	1 Jenis	114.996.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	114.996.000	
				89.491.236.602	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat terangkan yaitu :

1. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
2. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota.
3. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu perlu penambahan anggaran dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam rangka mencapai target-target kinerja Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam bidang kesehatan, telah disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya yaitu kegiatan-kegiatan untuk tetap menjaga keberlangsungan capaian program dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan cakupan program, dimana perkiraan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kegiatannya yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kegiatannya yaitu:
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN kegiatannya yaitu:
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah.
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN kegiatannya yaitu:
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN kegiatannya yaitu:
 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan ini merupakan Program dan kegiatan yang utama dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menjaga agar Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tetap terpenuhi, sehingga diharapkan Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dan teranggarkan secara maksimal pada tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memuat program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu penyusunan rencana kerja ini memperhatikan rencana kerja perangkat daerah lintas sektor dalam pembangunan kesehatan di daerah.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan, sebagian telah mencapai target namun sebagian belum sesuai dengan harapan. Untuk itu hal-hal yang masih memerlukan banyak perhatian adalah mengenai :

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sehingga perlu lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah tingginya AKI dan AKB, data tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk salah satu yang tertinggi AKI dan AKB di Sulawesi Utara.
2. Permasalahan kekurangan gizi, terutama balita pendek (stunting), dimana berdasarkan data Survey Gizi Indonesia (SGI) angka stunting sebesar 33% Tahun 2023.

3. Beban ganda penyakit dimana penyakit menular masih muncul sedangkan tidak menular semakin meningkat dan masalah kesehatan jiwa semakin meningkat.
4. Rendahnya cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) 78,8% dan desa UCI (Universal Child Immunization) hanya 44,4% tahun 2024.
5. Masih rendahnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan Lintas Sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya.
6. Akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang belum optimal.

Terdapat hal-hal yang penting juga dan belum dapat terangkakan yaitu :

1. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
2. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota.
3. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu perlu penambahan anggaran dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Tujuan penyusunan dan penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam Renja Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kesehatan tahun 2026 perlu dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang-bidang.
2. Renja Dinas Kesehatan tahun 2026 difokuskan pada pencapaian target-target indikator SPM dan SDG's.
3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2026 diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN.
5. Proses penyusunan Renja harus memperhatikan/berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas.
6. Renja Dinas Kesehatan tahun 2026, menjadi acuan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana tindak lanjut

Berdasarkan hasil analisis evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2024 (TC.29) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka perlu dilaksanakan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan mutu sumber daya manusia Kesehatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.
2. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor agar dapat menunjang kegiatan rutin kantor serta anggaran dalam pemeliharaan peralatan kantor.
3. Menyediakan anggaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan (rujukan).
4. Menyediakan anggaran dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan yang sudah

terintegrasi baik sarana, sumber daya manusia kesehatan yang terlatih serta penyediaan dana dalam mendukung penggunaan sistem informasi melalui kerjasama dengan pihak eksternal.

5. Menyediakan anggaran dalam meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai standar.
6. Melaksanakan upaya promosi kesehatan yang lebih optimal.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai keberhasilan pelayanan kesehatan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini dapat dicapai apabila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum /lintas bidang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PUTR Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Melakukan sinkronisasi serta menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan mengutamakan pengaruh isu strategis pada tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai acuan bagi Dinas PUTR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dan menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUTR, tujuan dan sasaran Renja Dinas PUTR berdasarkan Renstra DPUPR serta rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUTR pada tahun 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUTR disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan serta lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi Peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja tahun 2024 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 triwulan IV. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Selama tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 9 Program, 15 kegiatan dan 35 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 82.825.054.367,00,- dan terealisasi 81.704.282.550,00,- atau sebesar 98.65%, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan

capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,89 atau Sangat Baik.

Adapun besaran anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 3.893.078.494,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.697.603.522,- atau 94,98%, program ini sendiri terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan hasil 35 orang yang menerima gaji dan 1 dokumen laporan keuangan dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.495.821.977,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.316.932.612 atau 94,88%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran 35 orang yang menerima gaji dan tunjangan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.467.661.977,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.288.772.612,- atau 94,84%; dan
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan keluaran 1653 dokumen dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.160.000,- atau 100%;
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan hasil 2 dokumen perencanaan BMD dan 1 laporan BMD dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

23.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan keluaran 1 laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan hasil 65% Administrasi umum PD dipenuhi dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.069.770,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.949.300,- atau 99,85%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan, yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan keluaran 1 paket dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.115.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.082.000,- atau 98,92%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan keluaran 15 Laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.954.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.867.300,- atau 99,89%.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan hasil 5 unit BMD yang diadakan dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.210.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.578.000,- atau 98,74%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan keluaran 5 Unit dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 50.210.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.578.000,- atau 98,74%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan hasil 100% jasa penunjang kantor dapat dipenuhi dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.595.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 183.763.400,- atau 95,41% kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan keluaran 12 laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.664.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.889.400,- atau 86,22%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan keluaran 12 laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.931.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.874.000,- atau 99,96%.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan hasil barang milik daerah dalam kondisi baik dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.980.210,- atau 86,53%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,

dengan keluaran 1 unit dan mendapatkan alokasi anggaran 51.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.980.210,- atau 86,3%

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan irigasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang bermuara pada peningkatan produksi sektor pertanian, namun untuk capaian tahun 2024 belum dapat diukur dikarenakan belum tersedianya data.

Capaian Kinerja dari program ini adalah 72% luas daerah irigasi yang dilayani, adapun besaran anggaran untuk program Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebesar Rp. 8.366.518.902,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.208.645.098,- atau 98,11%, program ini sendiri terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar 5.374.209.902,- dan terealisasi sebesar 5.256.509.794,- atau 97,81%, Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan :
 - Pembangunan Tanggul Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.132.106.000,- dengan realisasi Rp. 1.131.119.000,- atau 99,91%.
 - Rehabilitasi Bendungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.529.946.000,- dengan realisasi Rp. 2.413.347.000,- atau 95,39%
 - Normalisasi / Restorasi Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.157.902,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.712.043.794,- atau 99,99%.
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar 2.992.309.000,- dan terealisasi sebesar 2.952.135.304,- atau 98,66, Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan, yaitu :

- Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.465.000,- dengan realisasi Rp. 787.542.450,- atau 98,51%.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.568.000 dengan realisasi Rp. 992.566.000,- atau 98,81%.
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi terhadap 20 Daerah Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.188.276.000,- dengan realisasi Rp. 1.172.026.854,- atau 98,63%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan, dengan capaian indikator Cakupan SPAM dan jaringannya dalam kondisi baik sebesar 62.38 %.

Adapun besaran anggaran untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah sebesar Rp. 19.302.644.645,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.038.639.661,- atau 98,63%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah SPAM yang dipelihara sebanyak 27 dan SPAM yang dibangun sebanyak 4 dengan rincian anggaran sebesar Rp. 19.302.644.645,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.038.639.661,- atau 98,63%, kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan, yaitu :
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan keluaran 1 dok, adapun alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 471.558.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 430.938.841,- atau 91,39%.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan keluaran 300 SR adapun alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 17.599.588.087,- dan terealisasi sebesar Rp.

17.381.170.820,- atau 98,76%.

- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan keluaran 4 Unit, adapun alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 682.968.558,- dan terealisasi sebesar Rp. 678.000.000,- atau 99,27%.
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 548.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 548.530.000,- atau 100%

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan akses masyarakat terhadap sanitasi layak yang berdampak pada penurunan angka stunting dan kemiskinan, dengan capaian indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 74.11%.

Adapun besaran anggaran untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah adalah sebesar Rp. 5.542.245.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.483.533.455,- atau 98,94%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. "Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota" dengan hasil 380 unit rumah tangga yang tersambung dengan sistem IPAL, adapun alokasi sebesar Rp. 5.542.245.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.483.533.455,- atau 98,94%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan, yaitu :
 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SAPLD) Terpusat Skala Pemukiman berbasis Masyarakat dengan keluaran 300 rumah tangga alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 5.495.805.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.447.533.455,- atau 99,12%.
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan keluaran 2 unit dan alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 46.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.000.000 atau 77,52%.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas drainase sehingga dapat berperan pada penurunan kejadian banjir, dengan capaian indikator Panjang Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun dalam kondisi baik sepanjang 3.973 Meter.

Adapun besaran anggaran untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah sebesar Rp. 969.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 962.593.850,- atau 99,30%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota”, dengan hasil 526 meter rincian anggaran sebesar 969.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 962.593.850,- atau 99,30%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan :
 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan keluaran 526 meter dan alokasi anggaran sebesar 969.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 962.593.850,- atau 99,30%

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan gedung, dengan capaian indikator Persentase Gedung daerah dalam kondisi baik sebesar 100%.

Adapun besaran anggaran untuk program penataan bangunan dan gedung adalah sebesar Rp. 2.738.612.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.545.665.293,- atau sebesar 92,95%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. ”Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung” dengan hasil 20 Ijin yang terbit rincian anggaran sebesar Rp. .738.612.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.545.665.293,- atau sebesar 92,95%, kegiatan ini terdiri dari 5 subkegiatan:

- Pemeliharaan, Perawatan, Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota dengan keluaran 2 bangunan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 683.344.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 683.057.000,- atau sebesar 99,96%.
- Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan keluaran 0 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.674.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 00,00%.
- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota dengan keluaran 1 bangunan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.098.449.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.096.129.350,- atau sebesar 99,79%.
- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota dengan keluaran 1 bangunan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.871.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 489.553.000 atau sebesar 99,94%.
- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan keluaran 18 Dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.274.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 276.925.943,- atau sebesar 71,88%.

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Adapun besaran anggaran untuk program penataan bangunan dan lingkungannya adalah sebesar Rp. 2.584.049.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.527.355.913,- atau sebesar 97,81%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. " Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota", dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.584.049.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.527.355.913,- atau sebesar 97,81%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan :
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan

Kawasan Strategis lainnya dengan keluaran 2 lokasi dan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.199.074.000,- dengan realisasi Rp. 2.198.373.000,- atau sebesar 99,97%.

- Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.975.750,- dengan realisasi Rp. 328.982.913,- atau sebesar 85,46%.

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga berperan dalam peningkatan perekonomian di daerah, dengan capaian indikator Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 205,99 km.

Adapun besaran anggaran untuk program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp. 38.465.356.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.351.943.754,- atau 99,71%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan jalan Kabupaten/kota dengan hasil 2 km jalan yang dibangun, 10,397 km jalan yang direkonstruksi, 106,90 km jalan yang dirawat, 1 unit jembatan yang dibangun dan 255 meter jembatan yang dirawat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.465.356.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.351.943.754,- atau 99,71%, kegiatan ini terdiri dari 5 subkegiatan yaitu :
 - Pembangunan Jalan, dengan keluaran 2 km jalan yang dibangun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.989.362.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.362.000 atau 100,00%
 - Rekonstruksi Jalan, dengan keluaran 10,397 km jalan yang direkonstruksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.486.768.900 dan terealisasi sebesar Rp. 33.399.392.204,- atau 99,74%.
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan keluaran 255 meter panjang jembatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 99.789.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.799.550,- atau 95,00%.

- Pembangunan Jembatan, dengan keluaran jembatan sejumlah 1 unit yang dibangun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.441.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.441.000 atau 100%.
- Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan keluaran 106,94 km panjang jalan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.789.996.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.768.949.000,- atau 99,25%.

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Hasil yang diharapkan adalah persentase wilayah yang tersusun perencanaan tata ruang sebesar 77% sedangkan realisasi sebesar 50% , adapun besaran anggaran untuk program penyelenggaraan penataan ruang adalah sebesar Rp.

963.210.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.302.004,- atau 92,22%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. "Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota" dengan hasil 3 Dokumen-dokumen pendukung dan alokasi sebesar Rp. 963.210.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.302.004,- atau 92,22%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi

Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan keluaran

dan alokasi sebesar Rp. 963.210.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.302.004,- atau 92,22%.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan								
1	01			Bidang Urusan								
1	01	01		Program								
1	01	01	01	Kegiatan.....								
1	01	01	02	Kegiatan.....								
1	01	01	03	Dst....								
1	01	02		Program								
1	01	02	01	Kegiatan.....								
1	01	02	02	Kegiatan.....								

1	01	02	03	Dst									
1	01	03		Program									
1	01	03	01	Kegiatan.....									
1	01	03	02	Kegiatan.....									
1	01	03	03	Dst									

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah *)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA

Selama periode 2021-2024, pengelolaan SDA secara umum ditunjukkan dari tercapainya sasaran-sasaran untuk meningkatkan produksi pangan, ketahanan air dan pengurangan resiko bencana.

Secara langsung penyebab bencana banjir berasal dari banyak hal, dan salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sumber daya air, perkembangan desa yang mengalami banjir tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah desa yang mengalami banjir dan korban Tahun 2022-2024

Tahun	Banjir		
	Desa Terdampak	Jumlah Korban	Korban Jiwa
2022	13	1.176	1
2023	-	4.059	1
2024	54	19.397	-
Total	67	24.623	2

Sumber : BPBD Kab. Bolsel

Dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, kondisi saluran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan karena terjadinya bencana banjir pada tahun 2020-2021. Data di tahun 2021 Luas daerah yang mampu dialiri infrastruktur irigasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas 3.254 ha dari luas irigasi kabupaten yang tercatat seluas 4.769ha atau sebesar 68,23%, tabel berikut menjelaskan perkembangan luas irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016-2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2....
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persen)	57	72,43	68,14	66,23
Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	n/a	n/a	n/a	21,35

Jumlah Sungai	72	72	72	72

Sumber: LPPD/LKjIP Dinas PUTR Tahun 2021-2024

2.2.2. Penyelenggaraan Jalan

Selama periode 2021-2024 penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dalam mendukung perkonomian daerah.

Total Panjang jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sepanjang 455,21 km, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2....
Perkembangan jalan Kabupaten Tahun 2021-2024

Kondisi Jalan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Baik	45,16	44,32	41,09	43,30
Sedang	0,49	8,34	1,48	0,98
Rusak Ringan	28,27	28,23	45,05	43,90
Rusak Berat	26,08	26,60	12,38	11,81

2.2.3. Penyelenggaraan Drainase

Selama periode 2021-2024 penyelenggaraan drainase meliputi pembangunan serta pemeliharaan drainase / gorong-gorong yang secara umum ditujukan pada peningkatan infrastruktur dalam menurunkan angka resiko bencana banjir, dengan kondisi terakhir Panjang total drainase di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kondisi baik sepanjang 3.973 meter dari total panjang 4.440 meter, Gambaran perkembangan drainase tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2....

Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2021

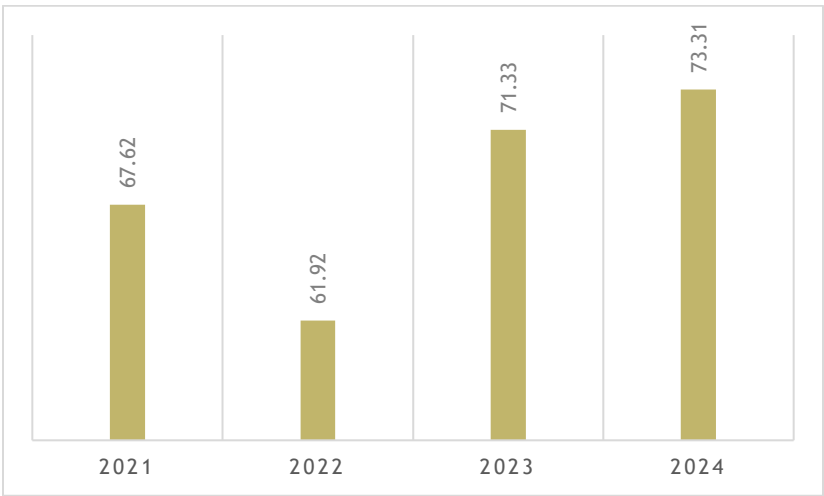
Indikator	2021	2022	2023	2024
Drainase dalam Kondisi Baik	86,81	89,48	89,48	n/a

Sumber : LKjIP Dinas PUTR

2.2.4. Penyediaan Akses Sanitasi

Selama periode 2021-2024 penyediaan akses sanitasi meliputi pembangunan serta pemeliharaan akses sanitasi masyarakat yang secara umum ditujukan dalam menurunkan angka kemiskinan daerah yang masih tinggi, kondisi terakhir tahun 2024 capaian akses masyarakat terhadap sanitasi layak adalah sebesar 56,70%, dengan perkembangan sebagai berikut :

Grafik 2. ...
Perkembangan Cakupan Layanan Sanitasi Tahun 2021-2024

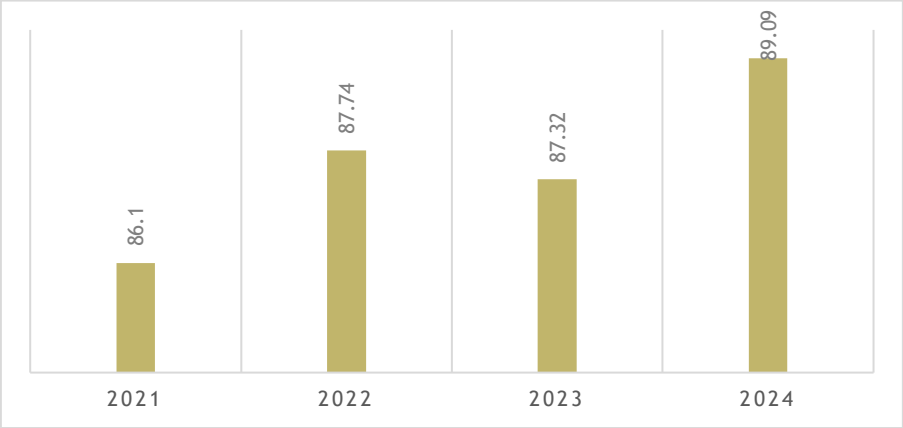


Sumber data : BPS Sulawesi Utara

2.2.5. Penyediaan Akses Air Bersih (Air Minum)

Selama periode 2021-2024 penyediaan akses air bersih/air minum meliputi pembangunan serta pemeliharaan akses air bersih masyarakat yang secara umum ditujukan dalam menurunkan angka kemiskinan daerah yang masih tinggi, kondisi terakhir cakupan layanan air bersih Kabupaten Bolaang Selatan tahun 2024 sebesar 89,09%, Adapun rincian perkembangan cakupan layanan air bersih di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 2. ...
Perkembangan Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2021-2024



2.2.6. Pengelolaan Tata Ruang

Pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 dan sementara dilaksanakan perubahan.

Sementara dari segi ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2021 – 2024

Tahun	Jumlah Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi Rencana Peruntukan RTRW
2021	4	4
2022	8	8
2023	0	0
2024	6	6

Sumber: DPUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persen)		√					68,14	66,23			
	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		√					n/a	21,35			
	Tingkat Kemantapan Jalan		√									
	Drainase dalam Kondisi Baik		√					89,48	n/a			
	Cakupan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	√		100	100	100	100	71,33	73,31			
	cakupan layanan air bersih	√		100	100	100	100	87,32	89,09			
	Jumlah ketaatan terhadap RTRW							0	6			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, Solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strategis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pelayanan daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan SDG's; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Beberapa isu perangkat daerah, yaitu :

1. Masih Adanya Jaringan Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat
2. Masih Rendahnya Akses Air Minum Layak dan aman Masyarakat yang dalam hal ini belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Masih Rendahnya Akses Sanitasi Layak dan aman Masyarakat yang dalam hal ini belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Penanganan Banjir dan Pencegahan Longsor melalui pembangunan tebing dan pembangunan drainase;
5. Masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh irigasi menyebabkan masih banyaknya wilayah sawah tadah hujan;
6. Perkembangan Penataang Ruang dan Wilayah;

7. Kualitas bangunan Gedung dan banyaknya instansi pemerintah yang belum memiliki Gedung kantor; dan
8. Percepatan dokumen perubahan RTRW yang sesuai dengan kebutuhan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas Pembangunan, program, kegiatan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2...
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						Lembar.....dari.....					
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	0,5	8.400.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	0,5	9.491.838.615,43	
			Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	25				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	25		
			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	35				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	35		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6.000.233.815,43	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.400.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.491.604.800	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Kapasitas Air Baku	0,33	9.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Kapasitas Air Baku	0,33	11.139.645.500	
			Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kot					Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kot			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				9.500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				11.139.645.500	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	2,5	5.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	2,5	6.530.912.555	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.530.912.555	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik	90,5	2.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik	90,5	2.000.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Bangunan Gedung dalam kondisi Baik	100	4.070.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Bangunan Gedung dalam kondisi Baik	100	9.378.708.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4.070.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				9.378.708.000	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Tingkat Kemantapan Jalan	52	21.805.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Tingkat Kemantapan Jalan	52	35.049.737.073	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				21.805.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				35.049.737.073	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100	1.900.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100	3.199.607.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.900.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				3.199.607.000	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.583.493.298	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	3.968.044.553	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.028.460.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.348.965.647	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				121.633.298	Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.558.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				108.841.050	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				268.439.856	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.240.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Desa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain usulan yang berasal dari Desa. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mendukung pokok-pokok pikiran dewan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2..
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UMAR LANGANAWA, S.T	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
2	PATRIS MAHANGGI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
3	APRIS RUHBAN S.Psi	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
4	APRIS RUHBAN S.Psi	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
5	NEHRU OINTU	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
6	NEHRU OINTU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
7	PAHRIN KAMARU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
8	HAIRUN NAUS M.Pd	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	HAIRUN NAUS M.Pd	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
10	SUPARJAN BOTUTIHE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
11	SUPARJAN BOTUTIHE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
12	HERMAN BOTUTIHE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
13	HERMAN BOTUTIHE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
14	HERMAN BOTUTIHE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
15	SISMAN MOOTALU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
16	SISMAN MOOTALU	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
17	AKRIS PAKAYA	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	Dikembalikan	
18	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
19	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
20	SISMAN MOOTALU	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
21	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
22	RONAL SAINI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
23	YAMIN TANGAHU	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
24	YAMIN TANGAHU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
25	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
26	YAMIN TANGAHU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Verifikasi TAPD	
27	YAMIN TANGAHU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
28	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
29	RUSWAN LAMANAW	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
30	AKRIS PAKAYA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
31	RUSWAN LAMANAW	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
32	RUSWAN LAMANAW	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Verifikasi TAPD	
33	RUSWAN LAMANAW	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dikembalikan	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan	Verifikasi TAPD	
35	AKRIS PAKAYA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
36	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
37	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/penyediaan fasilitas umum lainnya	Dikembalikan	
38	KASRAN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
39	KASRAN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
40	KASRAN PAPUTUNGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
41	SUFANDI BURHAN	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Dikembalikan	
42	SUFANDI BURHAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
43	ARISTOTELES WATULANGKOW	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
44	ARISTOTELES WATULANGKOW	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
45	ARISTOTELES WATULANGKOW	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
46	MASRI DILAPANGA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
47	MASRI DILAPANGA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
48	MATULENDE GENOS	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
49	MATULENDE GENOS	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
50	RUSDI MAMONTO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
51	RUSDI MAMONTO	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	Verifikasi TAPD	
52	WILMAR P. KENI, S.Th	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
53	HAMRIN ABBAS	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
54	HAMRIN ABBAS	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
55	MUKHTAR DAMOPOLII	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
56	HAMRIN ABBAS	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
57	MUKHTAR DAMOPOLII	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
58	MUKHTAR DAMOPOLII	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	RAMLAH BERAHIMA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
60	RAMLAH BERAHIMA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
61	RAMLAH BERAHIMA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
62	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
63	AKRIS PAKAYA	Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan	Dikembalikan	
64	DEDI BONDE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
65	DEDI BONDE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
66	DEDI BONDE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
67	DEDI BONDE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
68	DEDI BONDE	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
69	MASNI PILOMONU	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
70	MASNI PILOMONU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
71	RUSTAM MAHMUD	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
72	RUSTAM MAHMUD	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
73	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
74	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
75	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
76	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
77	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
78	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
79	FELMA PAPUTUNGAN	Penyediaan Jamban Masyarakat	Verifikasi TAPD	
80	FELMA PAPUTUNGAN	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
81	FELMA PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
82	FELMA PAPUTUNGAN	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	Verifikasi TAPD	
83	AMIRUDIN MAKALALAG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	AMIRUDIN MAKALALAG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
85	AMIRUDIN MAKALALAG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
86	AMIRUDIN MAKALALAG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
87	AMIRUDIN MAKALALAG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
88	RONY ADJAMI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
89	RONY ADJAMI	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
90	SIRTON RAUF	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
91	SIRTON RAUF	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
92	SIRTON RAUF	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
93	SIRTON RAUF	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
94	MUSANIF M. BONDE, SP	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
95	MUSANIF M. BONDE, SP	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
96	HIMRAN LAINGO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
97	HIMRAN LAINGO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
98	HIMRAN LAINGO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
99	HIMRAN LAINGO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
100	HIMRAN LAINGO	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
101	HIMRAN LAINGO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	
102	HIMRAN LAINGO	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
103	RUSYANAH	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
104	RUSYANAH	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
105	IDRIS BAD'AMAN	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
106	IDRIS BAD'AMAN	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi TAPD	
107	IDRIS BAD'AMAN	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan/Rehabilitasi IPAL Komunal	Verifikasi TAPD	
108	ZULKIFLI LATEMBO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109	ZULKIFLI LATEMBO	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi TAPD	
110	ZULKIFLI LATEMBO	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan/Rehabilitasi IPAL Komunal	Verifikasi TAPD	
111	ZULKIFLI LATEMBO	Penyediaan Jamban Masyarakat	Verifikasi TAPD	
112	HITLER GINTULANGI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
113	HITLER GINTULANGI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
114	HITLER GINTULANGI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
115	HITLER GINTULANGI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
116	HITLER GINTULANGI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
117	HITLER GINTULANGI	Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan	Verifikasi TAPD	
118	HITLER GINTULANGI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
119	HITLER GINTULANGI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
120	YAYAN KULIATI, S.Sos	Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan	Dikembalikan	
121	YAYAN KULIATI, S.Sos	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
122	YAYAN KULIATI, S.Sos	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
123	MARHARITA PATONAUNG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
124	MARHARITA PATONAUNG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
125	MARHARITA PATONAUNG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
126	RONAL MOODUTO,.S.AP	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
127	RONAL MOODUTO,.S.AP	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Dikembalikan	
128	RONAL MOODUTO,.S.AP	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
129	RONAL MOODUTO,.S.AP	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
130	SAHRIL FADLI TOI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
131	SAHRIL FADLI TOI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dikembalikan	
132	SAHRIL FADLI TOI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
133	SAHRIL FADLI TOI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
134	SAHRIL FADLI TOI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
135	MOH ABD MASNUN LAISA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dikembalikan	
136	MOH ABD MASNUN LAISA	Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan	Verifikasi TAPD	
137	RONI ADJIM	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
138	RONI ADJIM	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi Perangkat Daerah	
139	RONI ADJIM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
140	RONI ADJIM	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
141	ALBERT TONTOLI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
142	ALBERT TONTOLI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
143	ALBERT TONTOLI	Normalisasi Sungai	Verifikasi TAPD	
144	ALBERT TONTOLI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
145	OWAN LASELO	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
146	OWAN LASELO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
147	OWAN LASELO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
148	SUTOYO DJAHILA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
149	SUTOYO DJAHILA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi Perangkat Daerah	
150	RIZAL HAMZAH	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi Perangkat Daerah	
151	NOLVIAN TI KASIM	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi Perangkat Daerah	
152	RIDWAN MOHA	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
153	RIDWAN MOHA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
154	BOBI NUPULO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
155	NOLVIAN TI KASIM	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
156	BOBI NUPULO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
157	BOBI NUPULO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
158	BOBI NUPULO	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
159	BOBI NUPULO	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
160	SUKRI TULIABU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi Perangkat Daerah	
161	HENDRIK AMU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
162	DETI MOKOAGOW	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
163	HENDRIK AMU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
164	DETI MOKOAGOW	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
165	HUSEN BILONDATU	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
166	SIRADJUDIN YUSUF	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
167	SIRADJUDIN YUSUF	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
168	SIRADJUDIN YUSUF	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
169	SIRADJUDIN YUSUF	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
170	SIRADJUDIN YUSUF	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
171	HAMDAN MANYO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
172	HAMDAN MANYO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
173	HAMDAN MANYO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
174	HANAFI TOBUHU	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
175	HANAFI TOBUHU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
176	HANAFI TOBUHU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi Perangkat Daerah	
177	HANAFI TOBUHU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
178	HANAFI TOBUHU	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
179	HANAFI TOBUHU	Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan	Verifikasi Perangkat Daerah	
180	ARSON K. IMRAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
181	ARSON K. IMRAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
182	REFLI MELI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
183	REFLI MELI	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184	REFLI MELI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
185	REFLI MELI	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi TAPD	
186	SYAMSUL HASAN,SE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
187	AMRUDIN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
188	AMRUDIN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
189	AMRUDIN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
190	AMRUDIN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
191	AMRUDIN PODOMI	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
192	RUSLIN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi TAPD	
193	RUSLIN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
194	RUSLIN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud	Verifikasi Perangkat Daerah	
195	RUSLIN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
196	NOVITASARI MOKOAGOW, A.Md.Keb	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
197	NOVITASARI MOKOAGOW, A.Md.Keb	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
198	REPLAN PODOMI	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
199	REPLAN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
200	SADIPON MONGILONG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi Perangkat Daerah	
201	SADIPON MONGILONG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
202	RIDWAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi TAPD	
203	RAHJUN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
204	RAHJUN PODOMI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
205	RAHJUN PODOMI	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi TAPD	
206	AHMADI NUNTUNG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi Perangkat Daerah	
207	AHMADI NUNTUNG	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	Verifikasi TAPD	
208	AHMADI NUNTUNG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
209	AHMADI NUNTUNG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
210	AHMADI NUNTUNG	Pengelolaan Sumber Daya Air	Verifikasi TAPD	
211	PATMI MODEONG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
212	PATMI MODEONG	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
213	ZULKIFLI LATEMBO	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
214	ZULKIFLI LATEMBO	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
215	LA ODE KIPAR PABELA	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi Perangkat Daerah	
216	LA ODE KIPAR PABELA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
217	LA ODE KIPAR PABELA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
218	LA ODE KIPAR PABELA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
219	HAJAR LAIYA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
220	HAJAR LAIYA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
221	HAJAR LAIYA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
222	AWENG KAMARU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
223	AWENG KAMARU	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
224	AWENG KAMARU	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
225	AWENG KAMARU	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Verifikasi Perangkat Daerah	
226	AWENG KAMARU	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
227	SUHARTO DJUBAIR ENTE	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
228	SUHARTO DJUBAIR ENTE	Pembangunan/peningkatan Irigasi	Verifikasi TAPD	
229	SULEMAN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
230	SULEMAN PAPUTUNGAN	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
231	NARLIS MOHI	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas air minum	Verifikasi TAPD	
232	NARLIS MOHI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
233	NARLIS MOHI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	

NO	PENGUSUL	USULAN	STATUS	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
234	NARLIS MOHI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
235	NARLIS MOHI	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
236	UMAR BASALAMA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
237	UMAR BASALAMA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Verifikasi TAPD	
238	UMAR BASALAMA	Pembangunan/penyediaan fasilitas umum lainnya	Verifikasi Perangkat Daerah	
239	AZIS AHYAR	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Verifikasi Perangkat Daerah	
240	AZIS AHYAR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi TAPD	
241	RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Pd	Perbaikan dan Peningkatan Ruas Jalan	Usulan disetujui	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Nasional 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran :

- 1. Meningkatnya kinerja dan kualitas infrastruktur serta pendukungnya dalam menunjang perkembangan perkonomian daerah;**
- 2. Meningkatnya Akses terhadap air minum dan sanitasi layak dalam menurunkan angka kemiskinan;**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGKAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2026**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	-				75.00 Persen 75 Persen 100 %	55.240.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	-	-	60.000.000,00		
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	-				0.5 Persen 25 Persen 35 Persen	9.491.838.615,43						-		10.050.000.000,00	
						[Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi]																

[illegible]

[illegible]

							Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Irigasi		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						[Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi]	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	33 5 55	0 21.35 29.08	0 22.50 30	0.5 25 35	9.491.838.615,43							10.050.000.000,00	
							Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob													
							Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir													
	1	03	02	2.02	0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air														
							Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi				1 Dokumen	391.604.800,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Irigasi		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					10 Liter/ Detik	7.000.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SII UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara					1 Unit	435.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SII UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															

[illegible]

							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				0 Unit	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumuta, Trans Patoa	-	-	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	-			90.5 Persen	2.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
						[Meningkatkan Kualitas Sistem Drainase]														
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Panjang Drainase / Gorong-gorong yang dibangun dalam kondisi baik Panjang Drainase / Gorong-gorong yang direhab dalam kondisi baik	-			4.4 km 5177 Meter 5177 Meter	2.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Masyarakat	-	2.000.000.000,00	

	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan															
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					200 M	2.000.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
						[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100	0	100	100	9.378.708.000,00								4.080.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	9.378.708.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemantapan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Teknologi Mulai Dari Desa Seluruh Kecamatan	Masyarakat	-	4.080.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Panjang jembatan yang dibangun				1 Meter	1.590.794.923,80	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	-			100 Persen	3.199.607.000,00						-	0,00	
						[Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100	100	100	100	3.199.607.000,00							0,00	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Rasio ketaatan terhadap RTRW	-			4.00 Kali 100 %	3.199.607.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	0,00	
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.199.607.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

															Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berperan serta mendukung visi misi Bupati terpilih dengan misi : **“Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan Dengan Sarana Prasarana Berkualitas Dan Berkesinambungan”** dengan prioritas pembangunan: “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan. Untuk program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten

Prioritas Kabupaten	Program Dinas PUTR	Anggaran
Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan sumber Daya air (SDA)	9.491.838.615
	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan air minum	11.139.645.500
	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air limbah	6.530.912.555
	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	2.000.000.000
	Program penyelenggaraan jalan	35.049.737.073

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian pembangunan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

D. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) PD.

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA DISPERKIMTAN Tahun 2026 harus selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan turunannya.

RENJA PD merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

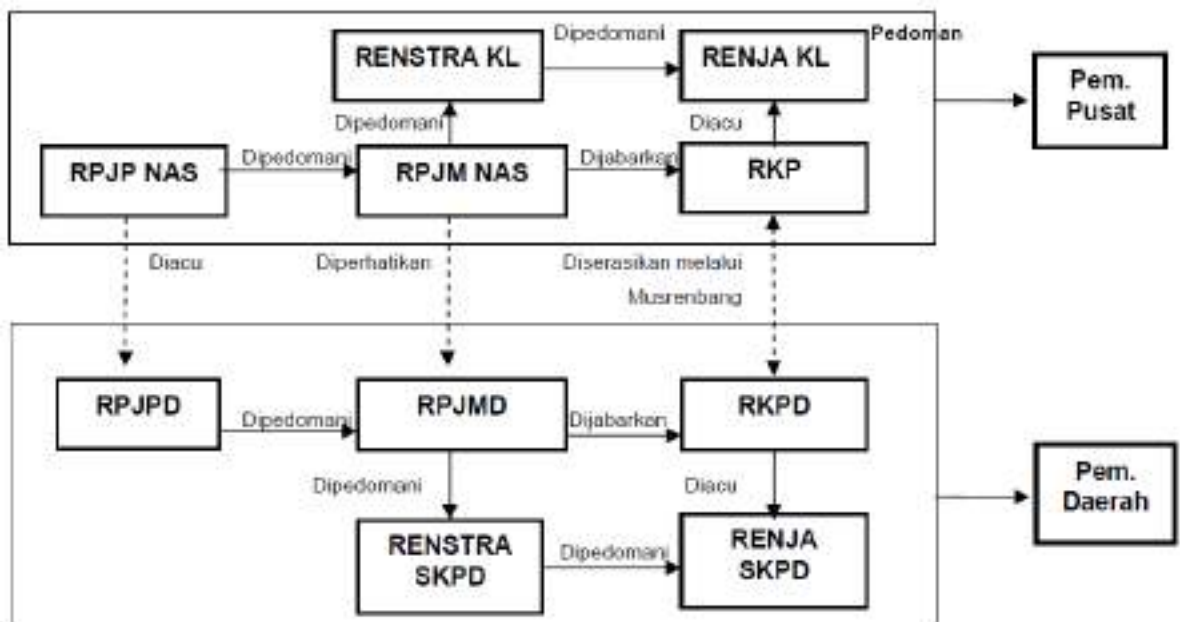
1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;

- 2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
- 3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTAN secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, yaitu dalam pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti stimulan pemenuhan kebutuhan rumah menuju layak huni didukung dengan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun RENJA DISPERAKIMTAN Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RENJA DISPERKIMTAN Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/ kegiatan.

Gambar 1
Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan RENJA DISPERAKIM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RENJA DISPERAKIM Tahun 2024 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disperakim Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Secara umum, tujuan dari disusunnya RENWAL RENJA DISPERAKIM Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah:

1. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan DISPERAKIM
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2026; dan
4. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Disperakim dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Ranwal Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPERAKIM TAHUN 2024

Bab ini memuat rewiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Tahun 2025 dan perkiraan capaian Tahun 2026, mengacu pada APBD Tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi RENSTRA PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, serta tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERKIMTAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja DISPERAKIMTAN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan dengan melihat indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni RENSTRA DISPERAKIMTAN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022–2026 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja perangkat daerah . Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Disperakimtan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

DISPERKIMTAN pada Tahun 2021 evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian pada indikator kinerja Tujuan, ada beberapa indaktor yang teridentifikasi melalui pemisahan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Dan Kawasan Pemukiman (PUPRPPKP) kemudian menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan terdapat 11 Program/Kegiatan yang memenuhi target (*Terlihat Pada Tabel 2.1*), sedangkan yang tidak memenuhi target ada 8 Program/Kegiatan (*Terlihat Pada Tabel 2.2*), sebagaimana tercantum dalam berikut ini :

Tabel 2.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan keuangan
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sesuaiinya perhitungan penguluaran dengan target gaji ASN
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan kepegawaian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Pelaksanaan bimtek sesuai dengan peruntukan-nya
5,	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penggunaanya peralatan sudah sesuai dengan peruntukannya
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan kepengurusan barang
7	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan
8	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah printer dan laptop diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tempat tinggal yang dilengkapi dengan PSU masyarakat Desa Pakuku
10	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan penyelenggaraan PSU Perumahan
11	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kurang optimalnya penggunaan sumber daya manuasia
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kurangnya pegawai yang menguasai pada bidangnya atau penempatan tidak sesuai dengan basic disiplin ilmunya
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengurangan kegiatan yang dilaksanakan secara offline akibat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
		Efisiensi anggaran
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengurangan anggaran yang digunakan pada refocusing
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Refocusing anggaran berdampak pada pengoptimalisasi gaji Honor ASN dan Tenaga Harian Lepas
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kurangnya jumlah personel dalam urusan pelayanan mediasi
7	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya jumlah personel dalam urusan pelayanan mediasi
8	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kurangnya jumlah personel dalam urusan pelayanan mediasi

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.4(T29)

Tabel 2.4 (TC 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	85poin	86poin	74poin	73poin	98%	0poin	159poin	187%
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	73poin	72poin	85poin	85poin	100%	74poin	231poin	316%
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	73poin	84poin	74poin	73poin	98%	74poin	255poin	349%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	17	-	22	22	100%	17	39	229%
		Jumlah Laporan Keuangan	1	-	12	12	100%	1	13	13%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	-	22	22	100%	17	39	229%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	-	100	100	100%	100	200 Dok	200%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	1		12	12	100%	1	13	
		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dok	-	2	2	100%	1 Dok	3Dok	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	-	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	8 Dok	200%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	18%	-	-	-	-	19%	19%	105%
1.04.01.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan Kualitas Kawasannya	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.04.01.2.02.01	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	-	-	-	-	-	0%	0%
1.04.01.2.02.02	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.04.01.2.02.03	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	3 Lokasi	-	-	-	-	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
1.04.01.2.02.05	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	18%	0%	18%	0%	0%	18%	0%	0%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	1 Keg	0 keg	-	-	-	1 Keg	0 Keg	0%
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	1 Keg	0 keg	-	-	-	1 Keg	0 Keg	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	52.73%	-	-	-
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	52.73%	-	-	-
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanah sengketa yang terselesaikan	10 Sengketa	0 Sengketa	55 Sengketa	29 Sengketa	52.73%	-	-	-
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah sengketa yang terselesaikan	10 Sengketa	0 Sengketa	-	-	-	-	-	-
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	63%	60.71%	-	-	-	61%	60.71%	96.36%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SK Bupati tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ absentee	Ada	Ada	-	-	-	-	-	-
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dan tercapainya ketertiban umum	1 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-	-
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	58%	-	-	-	-	-	-
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang/lahan kosong yang diinventarisasi	150 Lahan	26 lahan	-	-	-	-	-	-
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	150 Lahan	15 lahan	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperkimtan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa;

1. Pada Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap hunian Yang Layak dan Terjangkau dengan target 59,81 %, tercapai 59,81%, perhitungan ini berdasarkan Jumlah unit rumah yang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 8.914 (302 unit tahun ini) dibagi dengan Jumlah unit rumah Kab/Kota sebanyak 16.251 Unit. Capaian 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh perencanaan yang baik yang didasarkan pendataan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bakida.
2. Pada Indikator Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan target 0%, tercapai 0% perhitungan ini berdasarkan Tidak adanya jumlah sengketa tanah garapan Yang di tangani untuk pengaduan sengketa tanah garapan. Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut :

TABEL 2.5 (TC 30)
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN

No	Indikator	SPM/Standar t Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		✓	100	100	100	100	100	-	100	100	Target tercapai 100% di 2024 dan diproyeksikan stabil. Dan Perlu dipastikan keberlanjutan anggaran dan kesiapan penanganan darurat.
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani		✓	23,33	33	36	39	23,33	-	36	39	Target Naik dari 23,33% (2024) ke 39% (2027) Realisasi 2024 23,33% Progres bertahap, tetapi target 2025 (33%) belum diproyeksikan. Ini Memerlukan strategi percepatan dan validasi data lapangan.
3.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		✓	86,9	90	95	100	86,9	-	95	100	Target Naik dari 86,9% (2024) ke 100% (2027) Realisasi di 2024 86,9% ✓ Proyeksi 95% (2026), 100% (2027) Ini Menunjukkan Kinerja cukup baik, progres bertahap. Perlu kolaborasi dengan pengembang dan evaluasi kualitas PSU.

4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)		✓	100	100	100	100	100	-	100	100	Taregt 100 unit/tahun Realisasi 100 Proyeksi Stabil 100 per tahun Target tercapai, namun perlu evaluasi kualitas intervensi dan data RTLH agar tepat sasaran.
5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		✓	100	100	100	100	100	-	100	100	Sangat baik, tetapi harus dijaga kualitas mediasi dan dokumentasi hukum yang kuat.
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat		✓	100	100	100	100	100	-	100	100	Target tercapai, penting menjaga validitas data dan transparansi proses distribusi lahan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
<u>A. FAKTOR INTERNAL</u> 1. Keterbatasan Anggaran Operasional dan Belanja Modal Masalah: Anggaran belanja pembangunan sering kali tidak mencukupi untuk membiayai program prioritas seperti penanganan permukiman kumuh, PSU, dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).	- Ketergantungan tinggi pada DAK dan APBN. - Alokasi APBD tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan. - Skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, dll.) belum optimal.
2. Kualitas dan Kuantitas SDM yang Belum Memadai Masalah: Kekurangan tenaga teknis seperti ahli perencanaan, pertanahan, infrastruktur, dan sosial masyarakat.	-Tidak semua daerah punya formasi ASN teknis sesuai kebutuhan. -Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis berkelanjutan. -Kurangnya regenerasi tenaga fungsional.
3. Data Perumahan dan Permukiman Tidak Akurat/Terpadu Masalah: Tidak tersedia data real-time dan berbasis spasial untuk rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan aset tanah.	-Lemahnya koordinasi antar PD (dengan Bappeda, Dinas Dukcapil, ATR/BPN, dsb.). -Minimnya pemanfaatan sistem informasi berbasis GIS. -Data tidak diperbarui secara berkala atau manual.
4. Koordinasi Internal dan Perencanaan Program Lemah Masalah: Ketidakterpaduan antarbidang (perumahan, PSU, pertanahan)	-Perencanaan tidak terintegrasi lintas sektor. -Banyak usulan program tanpa basis data dan analisis kebutuhan yang kuat.

menyebabkan program tumpang tindih atau tidak sinkron.	-Keterbatasan forum koordinasi internal dan lintas perangkat daerah.
<u>B. FAKTOR EKSTERNAL</u> 1. Laju Urbanisasi dan Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi • Masalah: Kebutuhan akan hunian dan infrastruktur permukiman meningkat pesat, melebihi kapasitas penyediaan.	-Lahan terbatas di wilayah perkotaan. -Pertumbuhan kawasan kumuh baru tak terkendali. -Penduduk pendatang tidak terdata dengan baik.
2. Tingginya Jumlah Hunian di Lahan Tidak Legal atau Belum Bersertifikat • Masalah: Banyak masyarakat tinggal di atas tanah negara, lahan hutan, atau tanah wakaf yang belum jelas status hukumnya.	-Sulit dilakukan intervensi bantuan RTLH atau PSU. -Proses legalisasi aset tanah sangat panjang. -Kurangnya sinergi dengan BPN dan instansi vertikal.
3. Ketidaksesuaian Tata Ruang dengan Perkembangan Wilayah • Masalah: Pembangunan hunian dan permukiman sering melanggar RTRW atau belum ditetapkan dalam RDTR.	-Proses revisi RTRW lambat dan rumit. -Lemahnya penegakan regulasi tata ruang di daerah. -Pemanfaatan ruang informal tidak bisa langsung ditertibkan.
4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Rendah • Masalah: Banyak masyarakat belum terlibat aktif dalam pemeliharaan lingkungan, drainase, sanitasi, dan pelaporan data RTLH.	-Keterbatasan edukasi dan sosialisasi program pemerintah. -Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada swadaya. -Lemahnya kolaborasi dengan LPM, RT/RW, dan tokoh lokal.
5. Dinamika Regulasi dan Kewenangan Pemerintah Pusat • Masalah: Seringnya perubahan struktur kementerian, nomenklatur program, dan peraturan teknis pusat.	-Pemda kesulitan menyesuaikan dokumen perencanaan dan anggaran. -Terjadi duplikasi atau overlap kewenangan pusat-daerah. -Keterlambatan sosialisasi kebijakan baru dari pusat.

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.7
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan menempatkan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur sebagai salah satu prioritas penopang perekonomian dalam agenda pembangunan lima tahunan 2021 sampai 2026	Penguatan kelembagaan Kebutuhan sumber daya manusia yang memadai yang diprakasai oleh pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan pengalaman serta disiplin ilmu dalam urusan perumahan dan pertanahan dapat memperkuat pencapaian visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Perkembangan teknologi yang terkait dengan adanya satu data sebagai Big Data mengenai geospasial (BIG) yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	Anggaran, Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah terkait yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan belum meninvestasikan anggaran untuk kebutuhan system informasi berbasis teknologi GPS, tentang optimalisasi layanan penyediaan rumah dan sertifikat lahan bagi masyarakat
Pemisahan DISPERKIMTAN dari Dinas Induk DPUPRPPKP dalam rangka memaksimalkan program yang berhubungan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kebutuhan Sarana Gedung kantor Untuk menunjang pelayanan secara maksimal pada DISPERKIMTAN membutuhkan sarana dan prasarana penunjang Gedung Kantor untuk pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengurangan permukiman kumuh melalui Pemberian RTLH bagi

korban bencana dan Program Relokasi Nelayan, Pemberian Bantuan BSPS dan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas bagi Kawasan Permukiman.

2. Sosialisasi perlunya sertifikasi hak milik lahan bagi masyarakat
3. Optimalisasi kualitas layanan dengan ada aplikasi satu data dari BIG
4. Penambahan personil yang memadai dan menunjang Urusan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappelitbangda, Pemerintah Kabupaten Bolaamng Mongondow selatan, PD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan usulan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2026 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.4.1 sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Melaksanakan program Pemerintah Pusat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan RTLH bagi masyarakat yang tidak mampu;
3. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk percepatan peningkatan kualitas sarana dan presarana infrastruktur kawasan permukiman untuk pengurangan angka stunting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;dan
 - b. Pengembangan dengan jalan paving lingkungan; dan
 - c. Pencegahan kawasan banjir dengan drainase lingkungan dan Plat Duicker.
4. Meningkatkan pelayanan urusan pertanahan dengan sosialiasasi perlunya kepemilikan sertifikat lahan bagi masyarakat. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.8 (T-C 31)** berikut ini :

Tabel 2.8 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	3.010.558.284	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	2.753.892.780	
1a	Aminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21 1	1.938.316.000	Aminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	21 1	1.622.316.942	
1b	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	51.000.000,-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	42.000.000	
1c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 1	533.080.961	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 1	579.418.640	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
			Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 1 1 1				- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 1 1 1		
1d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmeritahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 5 1	277.968.975	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmeritahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 5 1	280.114.050	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
1e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 1	169.862.348	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 1	170.473.148	
1f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	40.330.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	59.570.000	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 % 40 %	159.763.996	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 % 40 %	151.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
2a	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 1	39.763.996	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 1	49.460.000	
2b	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi - Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 1	100.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi - Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 1	-	
2c	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	20.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	101.540.000	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	36 %	127.227.457	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	36 %	160.238.840	
3a	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	1 Laporan 1 Laporan	32.227.457	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	1 Laporan 1 Laporan	33.223.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
			Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum					Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum			
3b	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi - Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen 1 Kelompok Masyarakat 1 Dokumen	30.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi - Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen 1 Kelompok Masyarakat 1 Dokumen	48.315.840	
3c	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Dibawah 10 (Sepuluh) ha	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki - Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi - Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali - Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Unit Rumah 1 Dokumen 25Ha 25 Ha	65.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Dibawah 10 (Sepuluh) ha	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki - Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi - Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali - Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Unit Rumah 1 Dokumen 25Ha 25 Ha	78.700.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	23,60 % 100 % 90,58 %	2.025.173.110	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	23,60 % 100 % 90,58 %	4.421.410.295	
4a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki - Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh - Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25 Unit Rumah 30 Unit 100 org	2.025.173.110	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki - Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh - Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25 Unit Rumah 30 Unit 100 org	4.421.410.295	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	95 %	11.711.224.510	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	95 %	6.704.012.017	
5a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Dokumen 1 Laporan 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	11.711.224.510	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Dokumen 1 Laporan 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	6.704.012.017	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANA SERTIFIKASI,KLARIFI KASI,KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana	55		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANA SERTIFIKASI,KLARIFI KASI,KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana	55		
6a	Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Terlaksananya Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah	-	-	Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Terlaksananya Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah	-	-	
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	61.200.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	-	
7a	PenyelesaianSengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabuaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berta Acara 1 Dokumen	61.200.000	PenyelesaianSengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabuaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berta Acara 1 Dokumen	-	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	45.900.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	-	
8a	Penyelesaian Masalah Ganti kerugian Dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- umlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	45.900.000	Penyelesaian Masalah Ganti kerugian Dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- umlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	-	
9	PROGRAM REDTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah bidang tanah yang didistribusi - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria - Tersedianya Tanah Obyek Landreform	50 Bidang Tanah 50 Kepala Keluarga	204.000.000	PROGRAM REDTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah bidang tanah yang didistribusi - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria - Tersedianya Tanah Obyek Landreform	50 Bidang Tanah 50 Kepala Keluarga	-	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
			(TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	100 %				(TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	100 %		
9a	Penetapan Subjek Dan Objek Redribusi tanah serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. - Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Berita Acara 1 Laporan 1 Dokumen	204.000.000	Penetapan Subjek Dan Objek Redribusi tanah serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. - Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Berita Acara 1 Laporan 1 Dokumen	-	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	55 %	331.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	55 %	-	
10a	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	316.500.000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	-	
10b	Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah kosong	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. - Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan 10 Berita Acara	15.000.000	Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah kosong	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. - Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan 10 Berita Acara	-	
11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100 %	53.168.296	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100 %	-	
11a	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	53.168.296	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	-	
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Presentasi luas lahan bersertifikat	9,51 %	519.328.841	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Presentasi luas lahan bersertifikat	9,51 %	323.910.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
12a	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	519.328.841	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	323.910.000	
	JUMLAH				18.249.044.494	JUMLAH				14.514.463.932,80	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Perumahan -Pendataan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau relokasi Program Kab / Kota -Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Bolaang Mongondow Selatan	Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah -terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota -Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	173	Di usulkan Pada APBD Provinsi
2	Program Kawasan Permukiman -Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman -Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasa dibawah 10	Bolaang Mongondow Selatan	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman - Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman - Terlaksananya Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasa dibawah 10	20 Surat Izin 3 Kawasan	Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi

	(sepuluh) Ha -Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha		- Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Kawasan	
3	Program Perumahan Dan Kwasan Permukiman Kumuh -Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kmuh Pada Daerah Kab / Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Meningkatnya Kualitias Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kmuh Pada Daerah Kab / Kota	217 Org Penerima Bantuan BSPS	Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum (PSU) -Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	Bolaang Mongondow Selatan	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman -Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	-Lampu PJU 83 unit Pinolosian -Meteran listrik 47 Unit pakuku jaya - 33 M pembangunan Jalan Kuliner Sondana -15 Titik pemasangan Lampu PJu -4 titik Penataan Lampu Lapangan Pinolosian -28 Titik Lampu PJU Posigadan - 26 M pembangunan Jalan (Paving Blok) Pinolosian -13 M Jalan Paving Sondana - 13 M Jalan Paving Blok Desa Pilolahunga -26 M jalan Paving Blok Desa Momalia - Penataan Lampu PJU Bolaang Uki	Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi

5	Program Penatagunaan Tanah -Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah kab/ Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah -Terlaksananya Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah kab/ Kota	400 Buah Patok Batas Tanah Penunjang Kegiatan PTSL	Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2026 mengusung tema “**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”. Tema ini menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan domestik, menghadapi tantangan global, dan mendorong pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat seluruhnya

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah

- 1. **Kedaulatan pangan dan energi:** optimalisasi Bulog, lumbung pangan (food estate), energi terbarukan (termasuk bauran etanol dan biodiesel), SPAM terintegrasi, serta pengelolaan sampahmengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 2. **Ekonomi produktif dan inklusif:** meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi dan digitalisasi sekolah (inkl. Sekolah Rakyat), peningkatan akses kesehatan (rumah sakit daerah, cek kesehatan), serta percepatan pendidikan.revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 3. **Deregulasi & kepastian hukum:** untuk iklim investasi yang kondusif.membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- 4. **Pertahanan semesta:** menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.
- 5. **Percepatan pertumbuhan ekonomi:** melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi.
- 6. **Pengentasan kemiskinan:** dengan program 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

dengan sasaran dan fokus antara lain :

Tabel 3.1
Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2026
1	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan:	- Klaster Kedaulatan Pangan & Energi: optimasi Bulog, food estate, bauran ethanol & biodiesel, energi terbarukan, SPAM hulu-hilir, pengelolaan sampah - Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: hilirisasi SDA, transformasi digital, riset & inovasi, koperasi desa Merah Putih, fiskal adaptif
2	Pengurangan Kemiskinan & Kesenjangan	Program “3 juta rumah”, Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi bantuan, renovasi sekolah, cek kesehatan, percepatan RS daerah, pembangunan SDM inklusif

3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: digitalisasi pendidikan, sekolah unggulan, program Sekolah Rakyat, MBG, akses kesehatan
4	Stabilisasi Makro & Ekonomi Daerah	Program fiskal adaptif, hilirisasi, investasi, stabilitas makroekonomi, kemudahan berbisnis, reformasi birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Perkim Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namasesuaidengantugaspokokdan fungsi

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari:

- a. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. Pemerataan pembangunan;
- d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar ketiga **“Pemerataan Pembangunan”** tersebut diimplementasikan salah satunya melalui **“Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”**, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan pada Perpres No 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional **Arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)** yang mengacu pada dokumen **RPJMN terbaru (2025–2029)** Adala Sebagai Berikut :

Arah Kebijakan Kementerian PKP Sesuai RPJMN 2025–2029

Merujuk pada materi internal Kementerian PKP, berikut garis kebijakan yang ditetapkan:

- **Program 3 Juta Rumah sebagai Program Strategis Nasional (PSN ke-75)**
 - o Fokus pada pembangunan dan renovasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - o Arah kuantitatif: peningkatan akses hunian layak, dari **65,25 % (2024)** menjadi **67 % (2025)** dan **74 % (2026)**.
- **Pendekatan “Gotong-Royong” dalam Program 3 Juta Rumah**
 - o Pembagian target:
 - **1 juta rumah di perkotaan,**
 - **1 juta di perdesaan,**
 - **1 juta di pesisir.**
 - o Model pelaksanaan: swadaya masyarakat, renovasi, pembiayaan mikro, CSR, anggaran desa/APBD, dan investasi luar negeri.
- **Tautan Kebijakan Makro dengan Sasaran Hunian Layak dan Berkelanjutan**
 - o Mengacu prioritas nasional RPJMN, fokus pada hunian yang layak, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.

- o Instrumen utama: integrasi penyediaan perumahan dengan prasarana umum (PSU) dan pendanaan MBR melalui FLPP, SBUM, BP2BT, SSB, serta pembangunan rumah susun, BSPS, rumah khusus, dan bantuan PSU.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2026, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 memuat kebijakan dan strategi untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan*”.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2026. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2026
1	Meningkat kan Akses Dan Keterjangk auan Penduduk Terhadap Rumah La yak Huni b erkelanjuta n, serta kepastian Hukum Hak atas Tanah	-Meningkatnya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	90,58 %
			Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	76,06 %
		- Meningkatkan Indeks kinerja pengelolaan pertanahan daerah	Indeks kinerja pengelolaan pertanahan daerah	100 %
			- Persentase aset tanah pemda yg bersertifikat	100 %

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2026
			- Persentase capaian target bidang PTSL	100 %
			- Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan	10 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan denganmempertimbangan Tujuan Rencana Kerja *“Meningkat kan Akses Dan Keterjangkauan Penduduk Terhadap Rumah La yak Huni b erkelanjuta n, serta kepastian Hukum Hak atas Tanah”*

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud Pada Tabel Di atas , maka pada tahun 2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan melaksanakan program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kegiatan Utama Dan Kegiatan Rutin

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah -Administrasi Umum Perangkat Daerah -Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang mendukung terwujudnya infrastruktur penunjang ekonomi daerah dan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana. Sehingga penunjang ekonomi daerah dan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas bias tercapai sesuai dengan sasaran.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4 (T-C-32) berikut :

Tabel 3.4 (TC 32)

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Cat
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huniPemerintah - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Cat
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota -Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumaha -Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot	Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan -Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumaha -Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukima	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) H - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PK - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pendataan dan Verifikasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Cat
	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Cat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bolaang Mongondow	-Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Cat
	Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Selatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Presentasi luas lahan bersertifikat		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kot	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur PERKIMTAN Berbasis bangunan Wilayah Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terletak berada di pesisir pantai

3.4 Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Dengan mengusung tema "*Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169

Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga Prinsip Pelaksanaan SDG's:

1. *Universality* – SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang

2. *Integration* – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
3. *No One Left Behind / Tidak Meninggalkan Satu Orangpun*
 - a). Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan
Pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan
 - b). Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan
 - c). Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup. Secara rinci SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 target.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kegiatan

Adapun Rencana Kegiatan Tahun 2026 terlihat pada Tabel 4.1 (TC 33)

Tabel. 4.1 (TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,45	2.753.892.780	DAU		3,46	3.191.191.781	
1.04.01.2.01	Aminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	21 1	1.622.316.942	DAU		22 1	2.054.614.960	
1.04.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	42.000.000	DAU		2	54.060.000	
1.04.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 1 1 1	579.418.640	DAU		1 Paket 1 1 1	565.065.820	

		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 1				1 1		
1.04.01.2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 5 1	280.114.050	DAU		1 5 1	294.647.114	
1.04.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 1	170.473.148	DAU		1 1	180.054.089	
1.04.01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2	59.570.000	DAU		2	42.749.798	
1.04.01.2.08	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 % 100 % 40 %	151.000.000	DAU		100 % 100 % 60 %	169.349.835	
1.04.01.2.09	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	-Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Jumlah Dokumen Data Rumah di	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 1	49.460.000	DAU		1 Dokumen 1 Dokumen	49.349.835	

		Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1.04.04	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	101.540.000	DAU		1 Laporan	20.000.000	
1.04.04.2.01	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	36 %	160.238.840	DAU		39 %	134.861.104	
1.04.05	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	33.223.000	DAU		1 Laporan	34.861.104	
1.04.05.2.01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen	48.315.840	DAU		1 Dokumen 1 Dokumen	30.000.000	
2.10.04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Dibawah 10 (Sepuluh) ha	- Jumlah Dokumen Data yang Terverifikasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	78.700.000	DAU		1 Dokumen	70.000.000	
2.10.04.2.01	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	- Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	23,60 % 100 % 90,58 %	4.421.410.295	DAU		23,70 % 100% 90,84	2.146.683.496	
2.10.05	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	25 Unit Rumah	4.421.410.295	DAU		25 Unit Rumah	2.146.683.496	

2.10.05.2.01	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	95 %	6.704.012.017	DAU		100 %	12.413.897.980	
2.10.08	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - umlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 lap 1 lokai 1 lokasi	6.704.012.017	DAU		1 lap 1 lokai 1 lokasi	12.413.897.980	
1.10.08.2.02	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentasi luas lahan bersertifikat	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9,51 %	323.910.000	DAU		9,71 %	550.488.572	
2.10.08	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 dokumen	323.910.000	DAU		1 Dokumen	550.488.572	
2.10.10.2.01			Kab. Bolaang Mongondow Selatan			DAU				
	JUMLAH				Rp.14.514.463.932,80	JUMLAH			Rp.18.606.472.768	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta ditambah lagi dengan sub urusan pemadam kebakaran, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, sehingga terjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun anggaran;

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2026, mengacu pada APBD Tahun 2026. Reviu hasil evaluasi dan realisasi RENSTRA PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta tujuan dan sasaran rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PERENCANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029. Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja tahunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan/atau realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dan perkiraan capaian tahun 2025 dapat disajikan pada tabel 2.1 (TC-29) sebagai berikut :

Tabel 2.1 (TC-29)

Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (skor)	3,45	83,06	85	98,42	116%	98,5	279,98	81,15
		Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (skor)	75	0	73	0	0	74	74	0,99
		Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja (Skor)	75	0	73	71,1	97%	74	145,1	1,93
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang)	17	191	14	14	100%	17	222	13,06
		Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	2	12	12	12	100%	2	26	13,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang/bulan)	588	190	173	175	101%	17	298	17,53
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	2	54	50	75	150%	100	229	114,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	1	2	4	4	100%	1	7	7,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)	1	2	1	1	100%	1	4	4,00
1.05.01.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4	4	4	100%	1	9	9,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100	100	100%	100	300	3,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	4	1	1	100%	1	6	6,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	7	2	2	100%	2	11	5,50
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	80	100	100	100%	100	280	2,80
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan (Unit)	1	5	0	0	0%	6	11	11,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	5	0	0	0	0%	6	6	1,20
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	5	5	0	0	0%	0	5	1,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100	100	100%	100%	201	2,01
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50	16	1	1	100%	100	117	2,34
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	4	4	100%	1	9	9
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	12	12	100%	100	212	2,12
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik (Persen)	100	100	100	100	100%	100	300	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1	1	1	1	100%	1	3	3
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	17	7	7	7	100%	7	21	1,24
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1	1	1	100%	1	3	3,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100%	100	300	3,00
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (persen)	100	100	100	100	100%	100	300	3,00
		Persentase Penanganan Perda (persen)	100	100	100	100	100%	100	300	3,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen)	100	100	100	100	100%	100	300	3,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani (kasus)	100	7	12	1	8%	12	20	0,2
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (kasus)	50	7	12	1	8,33%	12	20	0,4
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	1	1	0	0	0	0	1	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	87	87	0	0	0	0	87	100%
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan (perda)	2	0	2	2	100%	2	4	200%
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (laporan)	1	1	0	0	0,00%	1	2	200%
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (laporan)	1	1	0	0	0	1	2	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat PPNS (orang)	1	0	1	1	100%	0	1	100%
1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (laporan)	1	0	1	1	100%	0	1	100%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (menit)	15	10	60	22,5	37,50%	25	57,5	383%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota	Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100%	100	300	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	1	6	12	12	100%	12	30	30
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (kegiatan)	1	0	0	0	0	1	1	1
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (orang)	50	0	0	0	0	60	60	1,2

Berdasarkan hasil review pada tabel 2.1 (TC-29) diatas Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (skor)	85	98,42	116%	a. Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran b. Ketepatan menentukan indikator keluaran/hasil c. Kerjasama yang baik diantara anggota tim pelaksana program/ kegiatan.
		Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (skor)	73	0	0	
		Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja (Skor)	73	71,1	97%	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang)	14	14	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	12	12	100%	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	173	175	101%	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	50	75	150%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	4	4	100%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)	1	1	100%	
1.05.01.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	100%	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100%	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	100%	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	2	100%	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100	100%	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100%	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	100%	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100%	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik (Persen)	100	100	100%	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1	1	100%	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	7	7	100%	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1	100%	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan (persen)	100	100	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (persen)	100	100	100%	
		Persentase Penanganan Perda (persen)	100	100	100%	
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen)	100	100	100%	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani (kasus)	12	1	8%	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (kasus)	12	1	8%	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan (perda)	2	2	100%	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha (laporan)	0	0	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Faktor Pendukung
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (laporan)	0	0	0	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat PPNS (orang)	1	1	100%	
1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (laporan)	1	1	100%	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (menit)	60	22,5	37,5%	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota	Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani (persen)	100	100	100%	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	12	12	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Bolaang Mongondow Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan		☑	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		☑	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Cakupan Pelayanan Kasus Kebakaran dan Non Kebakaran		☑	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	☑	☑	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	10 menit	-	15 menit	15 menit	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Belum meratanya pelaksanaan sosialisasi penegakkan Perda	Keterbatasan penganggaran
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Keterbatasan SDM dan penganggaran
Jarak yang harus ditempuh ketika terjadi kebakaran	Keterbatasan SDM, mobil pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran

Selain itu, selama Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Tantangan	Peluang
■ Penegakan perda yang belum maksimal ■ Deteksi dini atas gangguan keamanan yang belum maksimal ■ Respond time pelayanan pemadaman kebakaran yang belum tercapai	● Adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah ● Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan penegakan perda
2. Melakukan pengawasan dan cegah dini gangguan keamanan dan ketertiban umum
3. Meningkatkan fungsi Satlinmas
4. Memaksimalkan pelayanan pemadaman kebakaran

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C 31) berikut ini:

Tabel 2.6 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.123.233.192					5.123.233.192	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Bolaang Mongondow Selatan	- Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100% 100% 100% 100%	1.987.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Bolaang Mongondow Selatan	- Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100% 100% 100% 100%	1.987.000.000	
3	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	4 Kasus	1.622.638.325	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	4 Kasus	1.622.638.325	
4	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan	2 Perda	92.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan	2 Perda	92.000.000	
5	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Pejabat PPNS	1 Orang	46.768.500	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Pejabat PPNS	1 Orang	46.768.500	
6	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bolaang Mongondow Selatan	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100% 100%	505.607.724	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bolaang Mongondow Selatan	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100% 100%	505.607.724	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani	100%	493.437.724	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani	100%	493.437.724	
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran	1 Kegiatan	12.170.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 Kegiatan	12.170.000	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	2.994.987.143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	2.994.987.143	
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan	- 49 Orang - 12 Laporan	1.795.223.367	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan	- 49 orang - 12 laporan	1.795.223.367	
11	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	- 2 dokumen - 4 laporan	7.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	- Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	- 2 dokumen - 4 Laporan	7.800.000	
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	428.139.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	Persenase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	428.139.000	
13	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah BMD Yang diadakan	39 Unit	402.645.840	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah BMD Yang diadakan	39 Unit	402.645.840	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	199.953.936	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	199.953.936	
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	- Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara	- 100% - 5 unit	161.225.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolaang Mongondow Selatan	- Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara	- 100% - 5 unit	161.225.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”** dengan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional
PN1	Memperkokok Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
PN2	Memantapkan sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
PN3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ekonomi kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
PN4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
PN5	melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri
PN6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
PN7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
PN8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029, yaitu Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke 2026
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Menurunnya Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Pelanggaran Perda	Persentase gangguan Trantibumlinmas yang dapat diatasi (SPM)	100%
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	100%

3.3 **Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan hasil pembahasan Desk urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					(Rp)				(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.123.233.192				4.988.154.479
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Bolsel	100% 100% 100% 100%	1.987.000.000	DAU		100% 100% 100% 100%	1.815.258.744
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Bolsel	4 Kasus	1.622.638.325	DAU		4 Kasus	1.000.000.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan	Bolsel	2 Perda	92.000.000	DAU		2 Perda	715.258.744
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pejabat PPNS	Bolsel	1 Orang	46.768.500	DAU		1 Orang	100.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bolsel	100% 100%	505.607.724	DAU		100% 100%	438.574.540
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani	Bolsel	100%	493.437.724	DAU		100%	170.000.000

[illegible]

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan Dasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.123.233.192	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Bolsel	100% 100% 100% 100%	1.987.000.000	DAU
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Bolsel	4 Kasus	1.622.638.325	DAU
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan	Bolsel	2 Perda	92.000.000	DAU
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pejabat PPNS	Bolsel	1 Orang	46.768.500	DAU
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bolsel	100% 100%	505.607.724	DAU
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani	Bolsel	100%	493.437.724	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Bolsel	1 Kegiatan	12.170.000	DAU
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bolsel	3,45	2.994.987.143	DAU
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan	Bolsel	- 49 Orang - 12 Laporan	1.795.223.367	DAU
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	Bolsel	- 2 dokumen - 4 laporan	7.800.000	DAU
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel	100%	428.139.000	DAU
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Yang diadakan	Bolsel	39 Unit	402.645.840	DAU
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Bolsel	100%	199.953.936	DAU
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara	Bolsel	- 100% - 5 unit	161.225.000	DAU

BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

F. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

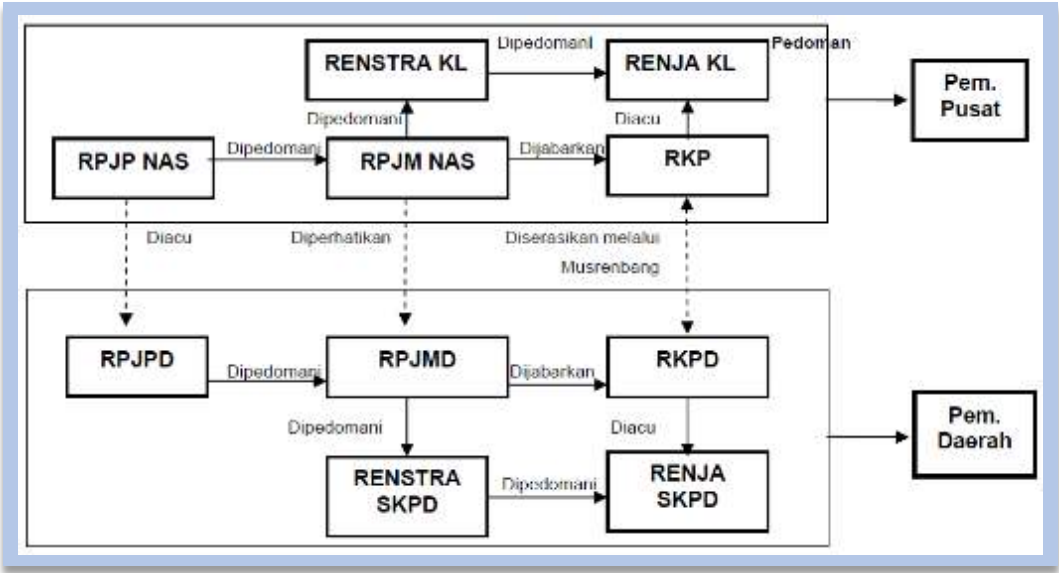
Bolaang Mongondow Selatan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026-2030 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor 989);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, proses penyusunan, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra PD, Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis BPBD

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan tahun berjalan (n-1), yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD yang sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang masih berlaku.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPBD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPBD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DANPENDANAAN BPBD

Berisi uraian tentang Jumlah Program dan Kegiatan sertaanggaran yang akan dilaksanakan secara berjenjang

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Seluruh pengajuan belanja terverifikasi dan terealisasi
	Administrasi Barang milik Daerah	Seluruh Laporan Penatausahaan terlaksana
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran sesuai dengan kebutuhan
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Anggaran sesuai dengan kebutuhan
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
II	Program Penanggulangan Bencana	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Anggaran sesuai dengan kebutuhan
	2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Anggaran tersedia melalui BTT

Tabel 2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
	1. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1. Minimnya anggaran

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata capaian target reformasi birokrasi	75	-	-	-	-			
		Indeks Perubahan Kepemimpinan	0	-	-	-	-			
		Nilai Pelaporan Pada Komponen Sakip Indeks Kelembagaan Indeks Kelembagaan	11,25	-	-	-	-			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
		Jumlah Laporan Laporan Pemanfaatan BMD	1 Dok	-	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	-	-	-	-	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12Lap	-	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	16 Orang		16 Orang	16 Orang	100%	16 Orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	-	16 Orang	16 Orang	100%	16 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	-	100 Lap	100 Lap	100%	100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	-	100%	-	-	100%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	-	-	5 Unit	-	-	5 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam yang diadakan	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor	100%	-	100%	-	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	100%	100%		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %		
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	100%	-	100%	83%	83%	100%		
	sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (per jenis bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, komunikasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	7 Kawasan	-	-	-	-	7 Kawasan		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	100 Unit	-	-	-	-	-		
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	81 Orang	-	81 Orang	81 Orang	100 %	-		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	25 Orang	-	-	-	-	-		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		-	-	-	-		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen)	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dok	-	-	-	-	-		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	10 Orang	-	-	-	-	1000 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen regulasi dasar penanggulangan bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		-	-	-	-		
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	JJumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 melalui Program Penanggulangan Bencana diperoleh Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Kejadian Bencana memiliki target 2 Kejadian
2. Jumlah Korban Jiwa memiliki target 0 Jiwa

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada **tabel T-C-30** sebagai berikut:

Tabel 4 (TC-30)

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kejadian Bencana	✓	✓	-	-	2	2	2	3	2	2	
2	Jumlah Korban Bencana	✓	✓	-	-	0	0	1	0	0	0	

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Pengkajian Risiko dan Perencanaan belum terpadu	Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran
Belum berkembangnya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran
Belum efektifnya pencegahan dan mitigas bencana	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana
Perlu perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	1. Kurangnya personil dalam pelaksanaan tugas pokok bidang kebencanaan 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai terutama kelengkapan peralatan operasional di lapangan
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran

Selain itu, selama Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan menempatkan Kebijakan Penanggulangan	<u>Kelembagaan</u> 1. Pemerintah Sulawesi Utara

Peluang	Tantangan
Bencana sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan lima tahunan 2026 sampai 2030	dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Dalam Negeri R.I mendorong 2. pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Badan PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota sebagai perangkat kerja utama dan pengendali layanan penanggulangan bencana. 3. Dari 15 kabupaten/kota yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Sulawesi Utara, dimana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) BPBD yang berbentuk kantor dengan tingkat eselonering II
Perkembangan teknologi yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang sangat pesat. Hal ini dipercaya dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana baik untuk kepentingan peningkatan kesadaran para pihak terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana	<u>Anggaran, Program dan Kegiatan</u> Seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan belum meninvestasikan anggaran untuk INDEKS RISIKO BENCANA dari total APBD. Konsekuensi dari rendahnya rate investasi tersebut adalah rendahnya kinerja layanan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut akan melanggengkan lingkaran tingginya risiko bencana dan keterbatasan kapasitas masyarakat serta pemerintah dalam menanggulangi bencana
Seiring terjadinya perubahan iklim global yang berdampak pada kehidupan di bumi, telah membuat pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan regulasi tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini akan sangat kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sensitif	<u>Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</u> 1. Fungsi sistem kendali operasi INDEKS RISIKO BENCANA sering terbentur dengan hirarkhi kewenangan; 2. Standar dan Prosedur Operasi yang belum tersedia secara lengkapnya terkait Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Peluang	Tantangan
kebencanaan	
Tingginya kepedulian dan partisipasi pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Negara TNI/POLRI maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana;	<u>Penyelenggaraan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik</u> 1. Kendali operasi penanganan darurat bencana yang masih bertumpu pada pembiayaan di tingkat provinsi dan bantuan APBN dari BNPB. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah terkait yang merupakan instansi terkait mengabaikan kewajiban menyelenggarakan layanan dasar wajib bidang ketertiban dan ketentraman umum (Tramtibum). 2. Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang tidak memadai menjadi hambatan dalam proses evakuasi korban bencana
Adanya kesadaran kolektif di internal pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan investasi pembangunan yang ramah lingkungan dan ramah pengurangan risiko bencana;	<u>Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</u> 1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara regular; 2. Kajian kerusakan dan kebutuhan pasca bencana 3. Kapasitas aparatur pelaksana penilaian kerusakan akibat bencana yang masih terpaku pada kerusakan objek fisik dan mengabaikan kerusakan pada sub sistem moral masyarakat dan atau psikologis korban bencana.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

2. Ketersediaannya sarana dan prasarana kebencanaan
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
3. Melaksanakan pergeseran pagu anggaran program dan kegiatan yang tidak mencukupi ke program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam.
4. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan bencana alam antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengembangan sistem penanggulangan bencana;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar logistik dan peralatan bencana;
 - c. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana;
 - d. Pengurangan resiko bencana;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - f. Mitigasi struktural;
 - g. Koordinasi penanganan Pascabencana;
 - h. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 7 (T-C 31)

Review terhadap Ranwal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.338.185.079	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolsel			600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolsel			8.535.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1.934.730	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.934.730	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	996.780	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	1.934.730	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	996.780	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	738.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	1.795.408.442	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	1.725.363.688	
			Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan	16 Orang				Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	16 Orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	7.947.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	7.850.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	1.787.460.942	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	1.717.513.688	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dok	16.540.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1 Dok	12.000.000	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
			Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	Lap				Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	Lap		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	16.540.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	12.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang		
			Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evaj ab	1 Dok				Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evaj ab	1 Dok		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai	1 Dok				Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai	1 Dok		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bolsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bolsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16 Paket	39.100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	217.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	350.573.650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Lap	281.149.554	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Lap	350.573.650	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5 Unit	48.840.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.549.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.840.000	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor	100%	158.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor	100%	69.578.591	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Lap	30.020.250	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Lap	42.140.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	1 Laporan	27.438.591	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	75.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	84.193.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	44.462.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	43.823.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	37.225.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	40.370.000	
			Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan					Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%		

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Bolsel	kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	714.046.700	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Bolsel	kesiapsiagaan terhadap bencana		1.390.415.700	
			Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				442.868.100	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			100 Orang	100.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				49.892.750	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			1 Dok	100.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				392.975.350	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bolsel	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	420.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bolsel	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	656.277.775	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan	1 Lap	50.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan	2 Lap	74.380.000	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
			jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya					jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya			
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bolsel	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bolsel	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	75.023.800	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki potensi untuk penanganan awal darurat bencana	81 Orang	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki potensi untuk penanganan awal darurat bencana	81 Orang	360.889.975	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bolsel	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesipsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman kabupaten/kota)	20 Orang	25.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bolsel	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesipsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman kabupaten/kota)	25 Orang	48.082.000	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	50.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	7 kawasan	97.902.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bolsel	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	175.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bolsel	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	189.636.900	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	3 Dok	5.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dok	69.970.900	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	10 Orang	49.716.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Orang	20.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Orang	69.950.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bolsel	Jumlah Dokumen Regulasi dasar penanggulangan bencana	1 Dok	50.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bolsel	Jumlah Dokumen Regulasi dasar penanggulangan bencana	1 Dok	99.773.000	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 Dok	30.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 Dok	49.792.000	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	50.000.000	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	49.981.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah *Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif* dengan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila dan HAM
- 2. Swasembada pangan, energi, dan air
- 3. Pengembangan ekonomi digital, hijau, dan biru
- 4. Pembangunan SDM dan kesetaraan gender
- 5. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
- 6. Pembangunan dari desa dan bawah
- 7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 8. Harmoni lingkungan dan budaya

BNPB menyelaraskan programnya dengan tema RKP nasional 2026: “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Dalam konteks kebencanaan, fokus BNPB mencakup:

Tabel 8

Fokus Penanggulangan Bencana dalam RKP Tahun 2026

Fokus RKP 2026
1. Penguatan Ketangguhan Masyarakat a. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di wilayah rawan b. Edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan berbasis komunitas c. Integrasi penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan desa
2. Modernisasi Sistem Peringatan Dini a. Peningkatan akurasi dan jangkauan sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi dan geologi b. Pemanfaatan teknologi geospasial dan data real-time
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana a. Pendekatan <i>Build Back Better</i> untuk pemulihan infrastruktur dan sosial-ekonomi b. Dukungan psikososial dan pemulihan mata pencaharian
4. Penguatan Koordinasi dan Tata Kelola a. Sinergi antara BNPB, BPBD dan pemerintah daerah b. Peningkatan kapasitas logistik dan sumber daya manusia kebencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat merumuskan kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar dapat berjalan sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah ***“Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing”*** .

Inovasi produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

1. Pemenuhan dan penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal;
3. Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, regulasi, penerapan manajemen resiko, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan SPBE.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut;

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	0,50
		Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana	140,20

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana;
2. Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.651.947.263
1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.535.900
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.934.730

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.934.730
1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	996.780
1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.934.730
1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	996.780
1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	738.150
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.725.363.688
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.717.513.688
1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.850.000
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah	12.000.000
1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000
1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.100.000
1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.100.000
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.573.650
1.5.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.573.650
1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.840.000
1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.840.000
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.578.591
1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.140.000
1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.438.591
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.193.250
1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	43.823.250

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Dinas Jabatan	
1.8.2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.370.000
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.390.415.700
2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	442868.100
2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49.892.750
2.1.2.Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	392.975.350
2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	656.277.775
2.2.1.Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	74.380.000
2.2.2.Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75.023.800
2.2.3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	97.902.000
2.2.4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	360.889.975
2.2.5. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	48.082.000
2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	189.636.900
2.3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	69.970.900
2.3.2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	49.716.000
2.3.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69.950.000
2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	99.773.000
2.4.1. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	49.792.000
2.4.2. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	49.981.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga koordinatif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan di bidang penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2026 beserta prakiraan maju di tahun 2027 dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Rata-rata capaian target reformasi birokrasi - Indeks Perubahan Kepemimpinan - Nilai Pelaporan Pada Komponen Sakip	Bolsel		2.338.185.079	APBD			2.318.955.796	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		APBD	1 Lap	8.535.900	APBD		1 Lap	600.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	1 Dok	1.934.730	APBD		1 Dok	100.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bolsel	1 Dok	1.934.730			1 Dok	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bolsel	1 Dok	996.780	APBD		1 Dok	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bolsel	1 Dok	1.934.730	APBD		1 Dok	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bolsel	1 Dok	996.780	APBD		1 Dok	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bolsel	1 Dok	738.150	APBD		1 Dok	100.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Bolsel	12 Lap	1.725.363.688	APBD	-	12 Lap	1.795.408.442	
		Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		16 Orang			-	20 Orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Bolsel	1 Dok	7.850.000	APBD	-	1 Dok	7.947.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bolsel	16 Orang	1.717.513.688	APBD	-	20 Orang	1.787.460.942	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	Bolsel	1 Dok	12.000.000	APBD	-	1 Dok	16.540.000	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD		Lap			-	Lap		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	1 Lap	12.000.000	APBD		1 Lap	16.540.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Bolsel	20 Orang	39.100.000	APBD	-	20 Orang	30.000.000	
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib		1 Dok			-	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai		1 Dok			-	1 Dok		

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bolsel	16 Paket	39.100.000	APBD		20 Paket	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Bolsel	100%	350.573.650	APBD		100%	281.149.554	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Bolsel	1 Lap	350.573.650	APBD		1 Lap	281.149.554	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bolsel	5 Unit	48.840.000	APBD		5 Unit	33.549.750	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bolsel	5 Unit	48.840.000	APBD		5 Unit	33.549.750	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor	Bolsel	100%	69.578.591	APBD		100%	80.020.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bolsel	1 Lap	42.140.000	APBD		1 Lap	30.020.250	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Bolsel	1 Lap	27.438.591	APBD		1 Lap	50.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Bolsel	100%	84.193.250	APBD		100%	81.687.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bolsel	1 Unit	43.823.250	APBD		1 Unit	44.462.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanyya	Bolsel	7 Unit	40.370.000	APBD		7 Unit	37.225.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Bolsel	100%	1.390.415.700	APBD		100%	1.038.334.200	
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Bolsel	100 %	442.868.100	APBD		100 %	100.000.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Bolsel	100 Orang	49.892.750	APBD		100 Orang	100.000.000	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Bolsel	1 Dok	392.975.350	APBD		1 Dok	150.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Bolsel	100%	656.277.775	APBD		100%	673.334.200	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat	Bolsel	2 Lap	74.380.000	APBD		2 Lap	55.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
		tinggalnya								
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Bolsel	100 Unit	75.023.800	APBD		100 Unit	50.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki potensi untuk penanganan awal darurat bencana	Bolsel	81 Orang	360.889.975	APBD		81 Orang	100.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman kabupaten/kota)	Bolsel	25 Orang	48.082.000	APBD		25 Orang	25.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		7 kawasan	97.902.000	APBD		7 kawasan	50.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bolsel	100%	189.636.900	APBD		100%	35.000.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Bolsel	1 Dok	69.970.900	APBD		1 Dok	5.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	Bolsel	10 Orang	49.716.000	APBD		10 Orang	10.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Bolsel	10 Orang	69.950.000	APBD		10 Orang	20.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi dasar penanggulangan bencana	Bolsel	1 Dok	99.792.000	APBD		1 Dok	80.000.000-	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Bolsel	1 Dok	50.000.000	APBD		1 Dok	30.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capai	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Bolsel	1 Kegiatan	49.792.000	APBD		1 Kegiatan	50.000.000	
Total					3.726.740.854				3.357.289.996	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan instansi Teknis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan Dasar sebagai upaya mendukung tercapainya Visi kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau corporate dalam hal ini instansi/lembaga pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan yang diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta implementasi Peraturan Menteri Sosial 7 tahun 2021 tentang **Atensi** meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI. Rencana strategis Dinas Sosial merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Karena itu Renja disebut juga sebagai “*manajemen strategis*”, yaitu strategi atau desain yang memuat sejumlah rencana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yang mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem proses bisnis serta waktu yang

diperlukan. Renja diperlukan untuk menjawab tantangan- tantangan atau tujuan yang ingin dicapai selama satu Tahun Anggaran.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyandang masalah kesejahteraan Sosial
6. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan Bencana Alam
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang Penanganan Fakir Miskin

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tim Penanggulangan Bencana Provinsi/Kabupaten Kota
9. Peraturan Menteri Sosial nomor 163/HUK/2017 tetang Program terpadau Program Penanganan fakir Miskin
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang perubahan data terpadu Program Penganan fakir Miskin
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2008 tentang pembentukan kanupaten Bolaang Mongondow Selatan di provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103.Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 1876);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Sosial tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2026.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 *latar Belakang*
- 1.2 *Dasar Hukum hukum*
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*
- 1.4 *Sistimatika penulisan*

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD*
- 2.2 *Analisis Kinerja pelayanan SKPD*
- 2.3 *Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi*
- 2.4 *Review terhadap rancangan Awal RKPD*
- 2.5 *Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEIATAN

- 3.1 *Telaah terhadp kebijakan Nasional*
- 3.2 *Tujuan dan Sasaran Renja SKPD*
- 3.3 *Program Kegiatan*

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSNAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2026 melalui analisis terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

2.1 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026 dan Capaian Renstra SKPD

Capaian kinerja RENJA SKPD yang difokuskan pada pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2026 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKA SKPD dan DPA SKPD tahun 2025. Di tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merencanakan dan melaksanakan 5 (Lima) program dan 10 (Dua Belas) Kegiatan, 14 (Dua Puluh Delapan) Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat baik terkait penanganan PMKS dan Pemberdayaan/pembinaan PSKS (urusan sosial / bidang sosial). Secara umum diperoleh bahwa hasil capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan hasil capaian secara umum yang diperoleh sebesar %. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dilihat presentasi realisasi anggaran pelaksanaan program kegiatan itu sendiri sebesar 93,2% terdapat selisih 3,54 % dari presentase tahun 2026 Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdiri Dari 5 (Lima) program, 1 (Satu) program rutin dan 4 (Empat) Program teknis yang menunjang pelayanan kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat (urusan sosial / bidang sosial).

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan bisa dilihat dari hasil pelaksanaan program/kegiatan (*Realisasi fisik*)

tersebut rata-rata telah mencapai angka persentase sebesar **41,2 %** karena semua target yang ada dicapai dengan baik dengan capaian penyerapan keuangan yang rata rata mencapai diatas **93,2%** maka capaian persentasi ini bisa dikatakan berhasil karena dari segi presentase realisasi fisik berbanding normal, hal ini dibuktikan dalam pemenuhan target kinerja 5 (Lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan Adapun realisasi secara umum keseluruhan program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,325,117,629	2,184,400,678	93,95
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2,325,117,629	2,184,400,678	93,,95
	- Penyediaan Gaji dan njangkan	2,316,318,629	2,178,600,678	93,97
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,799,000	7,800.000	88,65
	Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	14,200,000	14,20,0000	100
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,200,000	32.968.800	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237,655,750	235,035,368	98.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	7,409,250	5,239,766	70,72

	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230,246,500	229,795,600	99.80
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	25,307,612	24,764,123	97,85
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	25,307,612	24,764,123	97,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,408,550	248,556,650	97.43
	- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	250.408.550	248.556.650	99.26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	74,907,500	72,472,200	96,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	74,907,500	72,472,200	96,75
	Program Pembardayaan Sosial	253,248,750	248,250,000	98,03
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	253,248,750	248,250,000	98,03
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	253,248,750	248,,250,000	98,03
	Program Rehabilitasi Sosial	42,665,800	42,321,900	98,73
	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar	42,665,800	42,321,900	98,73

	panti			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainyabukan Korban HIV/AIDS dan Napza	42,865,800	42,321,900	98,73
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	931,058,880	784,508	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			
	1. Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten Kota	150.000.000	.80046.741	97.8
	2. Pengelolaan data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	146.539.780	132.042.398	90.1
	3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	675.120.000	576.270.000	85.4
	Program Penanganan Bencana	517.766.035	500.307.275	96.63
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	517.766.035	500.307.275	96.63
	1. Penyediaan Makanan	517.766.035	500.307.275	96.63

c. Dalam hal Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 tidak terdapat Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena : adanya kebijakan penguatan program/kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan PPKS, seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPA

tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) dengan menggunakan indikator capaian program. Dengan terpenuhinya target Renstra SKPD yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara langsung terwujud dalam meningkatnya fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan dalam hal ini PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di masyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap Penurunan Angka Kemiskinan, Menurunnya disparitas wilayah, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS) dapat tergali serta didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program / kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan P-APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program di tahun berjalan Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra yaitu melakukan percepatan penerapan pencapaian target SPM bidang Sosial.
- f. Secara mekanisme perencanaan Dinas Sosial telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang ada. hanya saja terdapat beberapa belanja pada kegiatan tertentu yang penyerapannya rendah dikarenakan alasan proposional dan kondisional yakni seperti yang diuraikan pada point c, sehingganya pada tahapan perencanaan Rencana Kerja Tahun 2026 mengingat adalah tahun terakhir pencapaian kinerja jika memungkinkan akan di usulkan kembali ketertinggalan target dari pada

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya pada sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

g. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disesuaikan dengan Renstra PD baik dari sasaran, program dan kegiatan serta anggaran yang masih bertumpu pada indikator tahun sebelumnya, adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026 disajikan dalam **tabel TC.29**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Untuk Analisis kinerja pelayanan SKPD khusus Dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merujuk pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial pada Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yakni Indikator Standar Pelayanan Minimal Yaitu 5 aspek yang merupakan kewenangan Daerah / Kabupaten Kota :

- 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti
- 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti
- 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti
- 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi Korban Bencana kabupaten/kota

Sebagaimana termuat dalam tabel TC 30 di bawah ini :

2.3 Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan fingsi dan tugas SKPD

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negative pada masyarakat diantaranya adanya kecenderungan semakin meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS). Disadari bahwa hal ini merupakan tantangan ke depan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Trend Isu strategis terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni berkenaan dengan pembangunan yang belum terlalu fokus kepada penanggulangan kemiskinan. Sehingga Dinas Sosial dalam menyikapi ini perlu dilakukan langkah-langkah konkrit terutama dan paling utama adalah meningkatkan kualitas Data Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas bantuan sosial serta ketepatan sasaran bantuan sosial sehingga bermuara pada peningkatan pendapatan yang merupakan salah satu aspek mempengaruhi tingkat kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan RKPD. Dengan penentuan prioritas pembangunan yaitu Menurunkan Angka Kemiskinan dengan menurunkan beban pengeluaran keluarga miskin dengan arah kebijakannya yaitu pemberian bantuan/stimulus lainnya yang memprioritaskan masyarakat miskin sebagai kelompok sasarannya. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan melalui berbagai Program/Kegiatan setiap tahunnya. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk selengkapnya review terhadap rancangan awal RKPD dapat di lihat pada ***Tabel TC.31***

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan sesuai tupoksi SKPD Provinsi tentunya lebih bersifat perbantuan terhadap Kabupaten / kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas termasuk didalamnya kepentingan pemerintah Kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas termasuk didalamnya kepentingan Pemerintahan Kab/kota kajian usulan Program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kab/Kota yang Langsung di tujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kab/Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Kota.dapat di lihat pada Tabel TC.32

BAB III

TUJUAN SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang Undang Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Dinas Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi misi Bupati Bolaang Mongondow Selatan di bidang sosial. Karena itu Visi Dinas Sosial selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2025-2029) akan mengemban visi pembangunan Daerah (Visi Bupati)

tahun 2025-2029.

Dalam Dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi menetapkan visi **"MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SULAWESI UTARA"**, dan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi ;

- Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan dalam pelayanan sosial;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
- Memelihara, Memperkuat Ketahanan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial.
- Mengembangkan Prakarsa dan Peran serta masyarakat untuk usaha kesejahteraan Sosial.
- Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas ditetapkanlah tujuan untuk menjadi fokus penacapaian kinerja adalah ;
- Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan PPKS melalui aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan jaminan serta perlindungan PPKS.
- Meningkatkan kemandirian PPKS dalam rangka mencapai kesejahteraan;
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial, mitra sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dengan fokus penanganannya adalah ;

- **Kemiskinan**
- **Keterlantaran**
- **Kecacatan**
- **Keterpencilan**
- **Ketunaan sosial**

- **Korban bencana**
- **Korban tindak kekerasan, dan**
- **Eksplotasi dan diskriminasi**

Tantangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dihadapkan pada Permasalahan kemiskinan yang multi dimensi dimana kemiskinan tersebar dan tidak merata antar wilayah, Kemiskinan relatif antar rumah tangga/keluarga di suatu wilayah, kemiskinan di tingkat rumah tangga berbeda-beda, dari pengembangan SDM ditandai oleh kesadaran bersekolah dipedesaan masih rendah, kearifan dan pengetahuan lokal tidak selalu terjaga dan berkembang, pola hidup tidak sehat. Dari aspek infrastruktur masih belum teratasinya fasilitas air (minum dan baku), minimnya jalan pedesaan, penyediaan listrik dan pemukiman yang layak bagi masyarakat, disamping itu dari aspek ekonomi diversifikasi keahlian masih kurang, kekurangan tidak ada modal usaha, arus barang yang tidak lancar akibat buruknya infrastruktur dan kewirausahaan perlu penggalian dan pengembangan terhadap masyarakat. Merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, maka sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dalah PPKS/PMKS yang terdiri dari anak balita terlantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/ AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafiking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, korban bencana alam.

Pada Permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan kebijakan strategis dalam menghadapi kesenjangan permasalahan sosial dan untuk menghadapi hal kedepan akan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi dengan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama fakir miskin serta pemenuhan kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut merupakan upaya mewujudkan perbaikan atas suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan bangsa ini agar menjadi Lebih baik dan meningkat kesejahteraannya terutama masyarakat miskin PPKS. Hal ini juga akan terwujud manakala terdapat keseimbangan prioritas pembangunan yakni pada sisi ekonomi, sosial maupun sisi budaya yang ada pada masyarakat dan bangsa ini. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang harus diwujudkan secara bersama-sama, sehingga akan berdampak pada perbaikan tata kehidupan dan penghidupan bangsa. Pembangunan yang

dilaksanakan tidak akan berdampak positif apabila salah satu dari ke tiga sisi tersebut (ekonomi, sosial, budaya) dalam kondisi yang tidak sehat. Untuk itu perbaikan pada sisi ekonomi diperlukan suatu pranata sosial yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan dan berpihak pada masyarakat miskin yang dibangun atas azas kebersamaan dan gotong royong. Pada sisi sosial lebih diarahkan dalam menumbuhkan kembangkan nilai tanggung jawab, rasa kepedulian sosial dan ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginal seperti diantaranya kelompok masyarakat yang kurang beruntung, kelompok rentan dan kelompok yang karena kondisi fisik dan mentalnya masih belum mampu untuk melakukan peran-peran sosialnya, serta kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Disadari bahwa hal ini merupakan tantangan ke depan yang semakin berat, dan jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kondisi diatas merupakan isu aktual khususnya di bidang kesejahteraan sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana penjelasan di atas sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pelaksanaannya menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan sosial, dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang ada, demi terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta mengimplementasikan sebagaimana trend Program ATENSI Kementerian Sosial saat ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 7 tahun 2021 tentang **Atensi** meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan dan sasaran rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan penanganan permasalahan Sosial yakni Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sejak Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 7 tahun 2021 tentang **Atensi** meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI serta meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha sebagai Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tujuan dan sasaran rencana kerja (renja) tahun 2026 dapat dilihat pada rumusan program Kegiatan yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut sebagaimana yang telah diproyeksikan pada Rencana Kerja Tahun 2026.

dayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yaitu “**Yaitu “Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, Berakhlak dan Berdaya Saing”**. “

Misi pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial pada hakekatnya adalah perwujudan dari tujuan untuk mengsejahterakan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masyarakat yang rentan dan kurang beruntung lainnya.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memberi kontribusi program dan kegiatan terhadap Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengentasan fakir miskin, Selain itu juga program pemberdayaan sosial berbasis keluarga akan lebih ditingkatkan baik dalam segi kualitas maupun jumlah sasarannya. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa semakin banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang di jalanan adalah akibat disfungsi sosial keluarga. Maka dari itu sinergitas program rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga akan memberikan dampak yang positif terhadap penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang terlantar. Sedangkan dilihat dari urusan wajib Pelayanan dasar Dinas Sosial dalam pelayanan kepada publik (urusan sosial / bidang sosial) dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya di tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan melaksanakan 5 (Lima) Program Prioritas dan sekiranya ada 12 (Sepuluh Kegiatan) Kegiatan prioritas serta 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan di urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaKabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. RENJA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan Renstra Dinas Sosial dalam menunjang Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, serta target dan sasaran pembangunan yang diformulasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, RENJA Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa

memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).
5. Renja Dinas Sosial Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Sebagai pedoman dan penyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun berikutnya sehingga ada keselarasan dan benang merah dari setiap dokumen yang diformalkan dalam kaitan dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang penyusunannya secara berjenjang.

Akhirnya semoga Dokumen Renja tahun 2026 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

H. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Pangan, 2012 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pemenuhan konsumsi pangan di tingkat Rumah Tangga dalam menanggulangi kerawanan pangan merupakan tema sentral dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Dalam kaitan inilah masalah ketahanan pangan menjadi penting untuk diagendakan. Perhatian terhadap peningkatan ketahanan pangan (*Food Security*) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan Ketahanan Pangan sosial (*social security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*Nasional Security*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja OPerangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPerangkat Daerah

khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

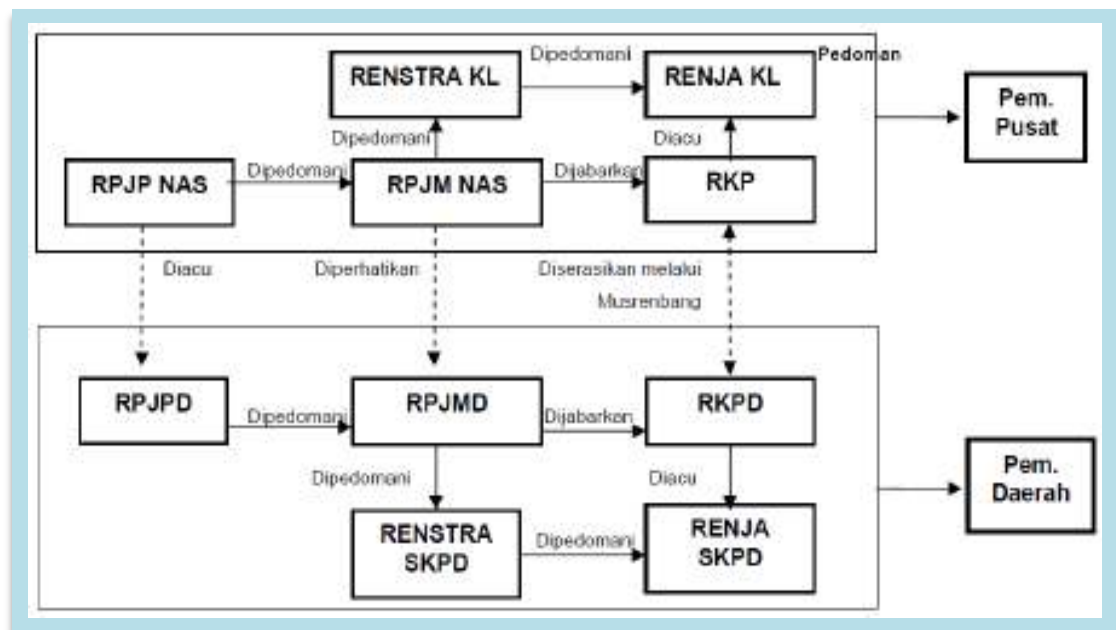
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang no 5 tahun 2000 tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
- 7 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10 Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 162);

- 22 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 23 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

- 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32 Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
- 34 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2025-2045;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
- 37 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
- 38 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
- 39 Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026:

1. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
3. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah;
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

- pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
6. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Provinsi/Kabupaten/Koya, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan*

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan tahun berjalan (n-1), yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah yang sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang masih berlaku.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Berisi uraian tentang Jumlah Program dan Kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan secara berjenjang

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapainya tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029 yang merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029.

Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan awalnya merupakan bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dipisahkan pada tahun 2022. Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari satu sekretariat dan dua bidang yang Mempunyai 5 Program dan 17 Kegiatan.

Adapun hasil RENJA Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan. Seacara rinci hasil kegiatan tahun 2025 disajikan dalam tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 mengacu pada permendagri No. 90 Tahun 2019 yang nomenklatur Program, kegiatan hingga sub kegaitan berubah

total jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 (T-C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	100							
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang disediakan	100%	-	0	0	0	0		
	- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	11 Unit	-	0	0	0	4		
	- Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	Jumlah Lantaijemur yang Tersedia	11 Unit	-	0	0	0	4		
	- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	-	0	0	0	0		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	100 Laporan	-	0	0	0	100		
	- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	3 Dokumen	-	0	0	0	1		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	84,8	76,9	84,5	77,7	91,95	86		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah	303 Kegiatan	-	1	-	-	8		

	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
	- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 Dokumen	-	1	-	-	1		
	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	28 Laporan	-	1	-	-	0		
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	300 Laporan	-	0	-	-	0		
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	21 Dokumen	1	1	1	100	0		
	- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit -	-	0	-	-	0		
	- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	-	0	-	-	0		
	- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	243 Keluarga	-	0	-	-	0		
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	10 Ton	27,795	10	32,280	100	10		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14 Laporan	1	1	1		1		
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5 Dokumen	-	1	-	-	1		
	- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Ton	27,795	10	172	100	10		
	- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	50 Ton	-	10	-	-	27		
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Kebijakan Harga Minimum Pangan Lokal	5 Dokumen	-	1	-	-	1		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	100 Laporan	1	20	1	5	20		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan	5	1	1	1	100	1		
	- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen	1	1	1	100	1		

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	-	1	1	100	1		
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	35 Laporan	1	7	1	14,28	7		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Wilayah Rentan Pangan	8,64	24,69	0	14,81	85,19	0		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Rentan Pangan	5 Dokumen	1	1	1		1		
- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	5 Dokumen	1	1	1		1		
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prsentase Penanganan Keeraawanan Pangan	100	75,31	82,79	85,19	100			
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	-	-	1	-	1		
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1	-	-	-	1		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Kasus Keracunan Pangan	0	0	0	0	-	0		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengawasan Keamanan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan	100 Persen	-	100	-		100		
- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	5 Dokumen	1	1	1	100	1		
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	-	100	-	0	100		
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota segar	0	-	1	-	0	1		
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	-	1	-	0	1		
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	1	-	1	-	0	1		

	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah KabKota	Kabupaten/Kota								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan pangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton/Tahun		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persen)	89	100	100	100	66,58	-	100	100	
2	Score PPH Konsumsi		Skor Pola Pangan Harapan	86	85,5	85,6	85,7	77,7	-	85,6	85,7	
3	Jumlah Wilayah Rentan Pangan (Persen)		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	24,69	14,81	13,58	12,34	14,81	-	13,58	12,34	
4	Jumlah Kasus Keracunan Pangan (Persen)		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persen)	0	100	100	100	0	-	100	100	

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, indikator Persentase Jumlah Cadangan Pangan terealisasi sebesar 66,58 persen dari target sebesar 89 persen. Capaian ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya penguatan lumbung pangan serta distribusi pangan yang merata di seluruh wilayah. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga belum mencapai target, yaitu sebesar 77,7 dari target 86, sehingga diversifikasi konsumsi pangan, khususnya pemenuhan protein hewani, sayur, dan buah, masih perlu ditingkatkan melalui program dan intervensi yang tepat sasaran.

Sementara itu, indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan menunjukkan hasil yang positif, yakni sebesar 14,81 persen dibandingkan target sebesar 24,69 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa wilayah rentan pangan berhasil ditekan lebih rendah daripada yang direncanakan. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas program penanganan kerawanan pangan yang telah dilaksanakan, sehingga upaya yang sama perlu dipertahankan bahkan diperluas untuk menjaga tren penurunan ini secara berkelanjutan.

Pada indikator Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan, realisasi Tahun 2024 masih sebesar 0 persen sesuai target awal. Namun demikian, mulai Tahun 2025 ditetapkan target yang lebih tinggi, yaitu sebesar 100 persen, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengujian mutu pangan segar secara menyeluruh. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan persentase daerah rentan pangan, tetapi masih diperlukan peningkatan signifikan pada aspek ketersediaan cadangan pangan, keragaman

konsumsi pangan, dan pemenuhan standar keamanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangatlah strategis dengan beberapa permasalahan, Hambatan, Peluang dan Tantangan yang di hadapi. Dibawah ini adalah Tabel Permasalahan dan Hambatan serta Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama ini :

Tabel 2.3 Permasalahan Dan Hambatan

Permasalahan	Hambatan
Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal	- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. - Terbatasnya variasi pangan lokal yang tersedia di pasaran. - Harga pangan bergizi relatif lebih mahal dibanding pangan pokok berkarbohidrat tinggi. - Minimnya kampanye edukasi konsumsi pangan bergizi di tingkat rumah tangga.
Perlunya peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Terbatasnya fasilitas uji mutu dan laboratorium keamanan pangan. - Rendahnya penerapan standar keamanan pangan oleh produsen kecil. - Pengawasan dan monitoring distribusi pangan belum optimal. - Minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang standar mutu pangan.
Rendahnya kapasitas produksi lokal	- Lahan pertanian produktif semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. - Keterbatasan modal dan teknologi pertanian modern. - Ketergantungan pada musim tanam tertentu sehingga produksi tidak merata sepanjang tahun. - Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas petani dan nelayan
Kurangnya ketersediaan cadangan pangan	- Cadangan pangan daerah belum dikelola secara optimal. - Fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan terbatas. - Tidak adanya sistem peringatan dini dan manajemen stok yang memadai. - Fluktuasi harga pangan yang memengaruhi kemampuan pemerintah melakukan pengadaan cadangan.

Adapun dampak dari permasalahan ini terhadap pencapaian visi dan misi Bupati adalah :

2. **Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal** berdampak pada rendahnya kualitas gizi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kesehatan dan produktivitas penduduk. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian unggul, dan sehat. Dampak tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menekankan kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, serta melemahkan misi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.
3. **Perlunya peningkatan mutu dan keamanan pangan** berimplikasi pada terjaganya kesehatan masyarakat dan daya saing produk pangan lokal. Pangan yang tidak memenuhi standar meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan mengurangi kepercayaan pasar, sehingga menghambat pencapaian SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Kondisi ini juga bertentangan dengan misi daerah untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, dan berdaya saing, serta menghambat visi daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
4. **Rendahnya kapasitas produksi lokal dan kurangnya ketersediaan cadangan pangan** menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan krisis distribusi. Situasi ini menghambat pencapaian SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) karena kemandirian pangan melemah dan ketahanan terhadap bencana berkurang. Dampak tersebut juga mengancam stabilitas sosial, menurunkan kesejahteraan, dan bertentangan dengan misi daerah untuk mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu Bidang Ketahanan Pangan menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.4
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
- Dukungan program nasional Peningkatan Ketahanan Pangan dan bantuan pangan dari pusat - Potensi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan lokal dan bergizi - Perkembangan teknologi pertanian dan pengolahan pangan	- Perubahan iklim yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan - Ketergantungan terhadap pasokan pangan luar daerah - Fluktuasi harga pangan nasional dan global Potensi kerawanan pangan musiman di wilayah tertentu

Berdasarkan analisis peluang, tantangan, masalah, dan hambatan, setiap program ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Pada program **Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya dukungan program nasional peningkatan ketahanan pangan beserta bantuan dari pemerintah pusat, serta perkembangan teknologi pertanian dan pengolahan pangan. Namun, program ini dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan serta ketergantungan terhadap pasokan pangan luar daerah. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya kapasitas produksi pangan lokal, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana produksi serta akses terhadap teknologi tepat guna.

Program **Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** memiliki peluang melalui potensi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan bergizi. Tantangan yang dihadapi adalah fluktuasi harga pangan nasional dan global yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Masalah yang perlu diatasi adalah masih rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal, dengan hambatan berupa rendahnya pemanfaatan

dan pengolahan pangan lokal oleh masyarakat.

Sementara itu, pada program **Penanganan Kerawanan Pangan**, peluang yang tersedia berasal dari dukungan program nasional dan bantuan pangan dari pusat. Tantangan yang harus diantisipasi adalah potensi kerawanan pangan musiman di wilayah tertentu, dengan masalah utama berupa kurangnya ketersediaan cadangan pangan. Hambatan yang dihadapi mencakup distribusi pangan yang belum merata serta keterbatasan cadangan pangan darurat. Adapun program **Pengawasan Keamanan Pangan** memiliki peluang melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta dalam edukasi keamanan pangan. Tantangannya mencakup dampak perubahan iklim terhadap kualitas pangan, sementara masalah yang ada adalah perlunya peningkatan mutu dan keamanan pangan. Hambatannya terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana laboratorium pengujian pangan. Dengan memahami keterkaitan ini, setiap program dapat diarahkan pada strategi yang lebih tepat untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama ini, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konsumsi pangan lokal yang bergizi dan beragam di masyarakat, sehingga memerlukan penguatan promosi dan edukasi gizi seimbang berbasis pangan lokal;
2. Tersedianya sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan pengawasan pangan daerah
3. Meningkatnya pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal untuk mendukung produksi pangan yang berkelanjutan, efisien, dan tangguh terhadap iklim
4. Tersedianya penguatan sistem cadangan pangan daerah untuk antisipasi kerawanan pangan dan bencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan RKPD.

RKPD Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan – kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu melakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pangan. Pada Tabel 2.5 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 ini, diperlukan:

1. Perlu mempertimbangkan alokasi yang realistis untuk menjawab kelemahan seperti rendahnya cadangan pangan, kapasitas produksi lokal, dan diversifikasi konsumsi pangan
2. Struktur Perencanaan yang Terarah yang Berdasarkan pedoman perencanaan daerah, RKPD harus mencakup evaluasi, kerangka ekonomi–keuangan, prioritas pembangunan, dan rencana kegiatan serta pendanaannya

Tabel 2.5 (T-C.31).
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		4	8	9	3		4	8	9
	DINAS KETAHANAN PANGAN				3.309.789.885,00					8.826.473.822,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			3.309.789.885,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			8.826.473.822,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			3.309.789.885,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			8.826.473.822,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			2.691.574.671,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			2.879.384.897,00
	[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	2.691.574.671,00	[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	2.879.384.897,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	2.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	4.150.390,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.150.390,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	1.511.683.231,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	1.767.063.489,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan	1.503.883.231,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan	1.756.363.489,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	7.800.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	10.700.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	16.200.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	12.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	16.200.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	12.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	13.986.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	97.205.250,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	13.986.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	10.421.250,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	241.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	2 Orang	86.784.000,00
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	31.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	293.378.260,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	17 Laporan	210.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	61.900.260,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	807.903.440,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	17 Laporan	231.478.000,00
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit	549.409.990,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	600.629.880,00
	Pengadaan Mebel	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0	5 0	83.779.450,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit	365.190.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	174.714.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Unit	77.264.880,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	55.989.200,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	158.175.000,00
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	10.989.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	57.971.228,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	45.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	10.989.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	42.812.800,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	46.982.028,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	42.812.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	46.986.400,00
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	46.986.400,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	46.986.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			0,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			418.187.400,00
	[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100	0,00	[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100	418.187.400,00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan</i>	60.00 Persen	0,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan</i>	60.00 Persen	418.187.400,00
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah</i>	1 unit	0,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah</i>	1 unit	418.187.400,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Kabupaten/Kota yang tersedia</i>					<i>Kabupaten/Kota yang tersedia</i>		
2,	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			471.400.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			4.880.045.475,00
	[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Skor Pola Pangan Harapan	85.6	471.400.000,00	[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Skor Pola Pangan Harapan	85.6	4.880.045.475,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah</i>	7.00 Kali	203.900.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah</i>	7.00 Kali	4.527.995.250,00
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0	7 0	188.800.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>	1 laporan	4.477.715.250,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	1 Laporan	15.100.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	1 Laporan	50.280.000,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	137.500.000,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	201.917.000,00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0	10 0	137.500.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	1 Ton	201.917.000,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	130.000.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	150.133.225,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	1 Dokumen	30.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	1 Dokumen	29.793.595,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	BOLAANG MONGONDOW SELATAN				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	100.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman</i>	1 Laporan	120.339.630,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
								<i>Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>		
3,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			96.815.214,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			239.722.500,00
	[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	13,58%	96.815.214,00	[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	13,58%	239.722.500,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	29.715.214,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	125.932.500,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 Dokumen	29.715.214,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 Dokumen	125.932.500,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	67.100.000,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	113.790.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	1 Laporan	12.100.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	1 Laporan	77.760.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	-	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	96.815.214,00	-	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	239.722.500,00
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	55.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>	1 Dokumen	36.030.000,00
4,	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			50.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	BOLAANG MONGONDOW SELATAN			409.133.550,00
	[Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan	100 86	50.000.000,00	[Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan	100 86	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	50.000.000,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	409.133.550,00
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	BOLAANG MONGONDOW SELATAN					BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>	1 Dokumen	370.116.000,00
1	3	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	4	8	9	[Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan]	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan	100 86	409.133.550,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	1 Dokumen	50.000.000,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN			
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN			3.309.789.885,00		BOLAANG MONGONDOW SELATAN	<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	1 Dokumen	39.017.550,00
										8.826.473.822,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrembang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke OPerangkat Daerah Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke OPerangkat Daerah, dibandingkan pada saat forum musermbang. Hal ini disebabkan karena kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih banyak merupakan bantuan stimulan, bersifat inisiasi, karena secara struktur kelembagaan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih cenderung kepada fungsi koordinatif. Usulan Rincian usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang pada tahun 2023 tidak ada (Tabel T-C.32)

Tabel 2.6 (T-C-32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2026 mengusung tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema ini menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan domestik, menghadapi tantangan global, dan mendorong pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat seluruhnya. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah

1. **Kedaulatan pangan dan energi:** optimalisasi Bulog, lumbung pangan (food estate), energi terbarukan (termasuk bauran etanol dan biodiesel), SPAM terintegrasi, serta pengelolaan sampah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **Ekonomi produktif dan inklusif:** meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi dan digitalisasi sekolah (inkl. Sekolah Rakyat), peningkatan akses kesehatan (rumah sakit daerah, cek kesehatan), serta percepatan pendidikan, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
3. **Deregulasi & kepastian hukum:** untuk iklim investasi yang kondusif, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. **Pertahanan semesta:** menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.
5. **Percepatan pertumbuhan ekonomi:** melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi.
6. **Pengentasan kemiskinan:** dengan program 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Tabel 3.1
Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2026
1	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan:	- Klaster Kedaulatan Pangan & Energi: optimasi Bulog, food estate, bauran ethanol & biodiesel, energi terbarukan, SPAM hulu-hilir, pengelolaan sampah - Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: hilirisasi SDA, transformasi digital, riset & inovasi, koperasi desa Merah Putih, fiskal adaptif
2	Pengurangan Kemiskinan & Kesenjangan	Program “3 juta rumah”, Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi bantuan, renovasi sekolah, cek kesehatan, percepatan RS daerah, pembangunan SDM inklusif
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: digitalisasi pendidikan, sekolah unggulan, program Sekolah Rakyat, MBG, akses kesehatan
4	Stabilisasi Makro & Ekonomi Daerah	Program fiskal adaptif, hilirisasi, investasi, stabilitas makroekonomi, kemudahan berbisnis, reformasi birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan tabel RKP 2026 pada gambar, telaahan terhadap kebijakan nasional dan keterkaitannya dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

Pada fokus *Klaster Kedaulatan Pangan & Energi*, poin-poin seperti optimalisasi peran Bulog, pengembangan *food estate*, serta bauran energi terbarukan sangat relevan dengan tugas Dinas Ketahanan Pangan, terutama dalam memastikan ketersediaan, distribusi, dan kemandirian pangan daerah. Upaya ini selaras dengan program “Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan” serta “Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.” Sementara itu, *Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif* yang mencakup hilirisasi SDA dan penguatan koperasi desa juga dapat didukung melalui pengembangan usaha pangan lokal berbasis potensi daerah.

2. Pengurangan Kemiskinan & Kesenjangan

Program “Makan Bergizi Gratis (MBG)” dan digitalisasi bantuan pangan merupakan bagian yang langsung terkait dengan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. MBG sejalan dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat dan penanggulangan kerawanan pangan, sedangkan digitalisasi bantuan dapat mempercepat dan mempertegas sasaran distribusi pangan secara tepat. Peningkatan akses gizi dan keamanan pangan pada kelompok rentan juga menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan misi pengurangan kesenjangan.

3. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Fokus pada MBG, sekolah unggulan, dan akses kesehatan memiliki keterkaitan tidak langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan, khususnya pada aspek pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik. Program ini mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, sehingga relevan dengan agenda peningkatan kualitas SDM melalui intervensi gizi dan edukasi konsumsi pangan lokal bergizi.

4. Stabilitas Makro & Ekonomi Daerah

Walaupun fokus pada kebijakan fiskal dan reformasi birokrasi lebih bersifat makro, Dinas Ketahanan Pangan tetap berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan stabilisasi harga bahan pokok. Langkah ini berkontribusi langsung terhadap stabilitas makroekonomi melalui pengendalian komoditas pangan strategis.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2026, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 memuat kebijakan dan strategi untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan***".

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2026. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat"

Dengan Indikator Tujuan :

Indeks Ketahanan Pangan

Sedangkan Sasaran Strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

" Meningkatkan ketersediaan, keanekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan guna mencegah serta menanggulangi kerawanan pangan secara berkelanjutan. "

Dengan Indikator Sasaran Sebagai Berikut :

- 1. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).**
- 2. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)**
- 3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of**

Undernourishment)

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Bolaang
Mongondow Selatan tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, keanekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan guna mencegah serta menanggulangi kerawanan pangan secara berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	67,48
			Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	85,6
			Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	84,6
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment	5,4

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Ketaahanan Pangan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Ketahanan

Pangan menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan tujuan rencana kerja “***Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat***”

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Melaksanakan 5 program termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.3
Program dan Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan tahun 2026

NAMA PROGRAM		PAGU ANGGARAN
1. PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	2.879.384.897,00
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		418.187.400,00
3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN		4.880.045.475,00
4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		239.722.500,00
5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		409.133.550,00

Tabel 3.4 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		8	9	11	14	15	16
	DINAS KETAHANAN PANGAN				8.826.473.822,00				3.012.718.997,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.826.473.822,00				3.012.718.997,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				8.826.473.822,00				3.012.718.997,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.879.384.897,00			-	2.308.500.000,00
	[Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.45	2.879.384.897,00	-	-	-	2.308.500.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4.150.390,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	2.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	4.150.390,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		2.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	1.767.063.489,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	1.608.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		12 Orang/bulan	1.756.363.489,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		1.600.000.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		1 Dokumen	10.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		8.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	12.000.000,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	17.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		2 Laporan	12.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		17.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	97.205.250,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	14.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		1 Paket	10.421.250,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		14.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>		2 Orang	86.784.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	293.378.260,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	333.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		2 Paket	61.900.260,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		33.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		17 Laporan	231.478.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		300.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	600.629.880,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	230.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>		2 Unit	365.190.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		30.000.000,00
	Pengadaan Mebel								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		3 Unit	77.264.880,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		20.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		3 Unit	158.175.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		180.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	57.971.228,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	59.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	10.989.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	46.982.028,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		47.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	46.986.400,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	45.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		1 Unit	46.986.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		45.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
2,	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				418.187.400,00			-	64.218.997,00
	[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		100	418.187.400,00	-	-	-	64.218.997,00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan</i>		60.00 Persen	418.187.400,00		-	-	64.218.997,00
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia</i>		1 unit	418.187.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		64.218.997,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
3,	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				4.880.045.475,00			-	477.500.000,00
	[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan		85.6	4.880.045.475,00	-	-	-	477.500.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah</i>		7.00 Kali	4.527.995.250,00		Masyarakat	-	207.000.000,00
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>		1 laporan	4.477.715.250,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat		190.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis								
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis		1 Laporan	50.280.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat		17.000.000,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-		-	201.917.000,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	138.000.000,00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>		1 Ton	201.917.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		138.000.000,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-		-	150.133.225,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	132.500.000,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
		<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>		1 Dokumen	29.793.595,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		32.500.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>		1 Laporan	120.339.630,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		100.000.000,00
4,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				239.722.500,00			-	102.500.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
	[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		13,58%	239.722.500,00	-	-	-	102.500.000,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-		-	125.932.500,00		Dinas Ketahanan Pangan	-	30.000.000,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
		<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>		1 Dokumen	125.932.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Ketahanan Pangan		30.000.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	113.790.000,00		Masyarakat	-	72.500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>		1 Laporan	77.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat		15.000.000,00
	-	-		-	239.722.500,00	-	-	-	102.500.000,00
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>		1 Dokumen	36.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat		57.500.000,00
5,	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				409.133.550,00			-	60.000.000,00
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			409.133.550,00				60.000.000,00
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		1 Dokumen	370.116.000				0
		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan		100 Persen	409.133.550,00				60.000.000,00
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							
		<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan</i>		1 Dokumen					60.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>segar asal tumbuhan</i>							

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD, RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional. Fokus rencana kerja diarahkan pada penguatan kedaulatan pangan melalui optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah, peningkatan produksi diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar. Kegiatan prioritas mencakup pengelolaan lumbung pangan masyarakat, Sosialisasi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman, Gerakan Pangan Murah Bersubsidi, pelatihan kelompok wanita tani dalam pengembangan pangan lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga, stok, dan distribusi pangan.

Pendanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan bersumber dari APBD Kabupaten. Alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, antara lain untuk penguatan sarana dan prasarana pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), penanggulangan kerawanan pangan darurat, serta penelitian dan inovasi pengolahan pangan lokal. Pendekatan pendanaan dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan keberlanjutan program, keterukuran hasil, serta dampaknya terhadap peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pendanaanya terlihat pada tabel 4.1 TC.33 sebagai berikut :

Tabel. 4.1 TC.33 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN
								PAGU INDIKATIF (Rp)	I	LOKAS	SUMBE R DANA	PRIORITAS NASIONA L	DAERA H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS KETAHANAN PANGAN						8.826.473.822,00					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.826.473.822,00					
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						8.826.473.822,00					
1,	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.879.384.897,00					
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.70	-	-	3.45	2.879.384.897,00	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.150.390,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.150.390,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.767.063.489,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bula n	1.756.363.489,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	10.700.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	I	LOKAS	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
												NASIONA L		DAERA H
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	97.205.250,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.421.250,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	86.784.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaa n SPBE	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	293.378.260,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	61.900.260,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	231.478.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	600.629.880,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaa n SPBE	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	365.190.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaa n SPBE	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	77.264.880,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	158.175.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.971.228,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.989.200,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46.982.028,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.986.400,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46.986.400,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
2,	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						418.187.400,00					
		[Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100	66,58	100	100	418.187.400,00	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	-			60.00 Persen	418.187.400,00			-	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	-
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	418.187.400,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
3,	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						4.880.045.475,00					
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan	86	77.7	85.5	85.6	4.880.045.475,00	-	-	-	-	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah	-			7.00 Kali	4.527.995.250,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarakat
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	4.477.715.250,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiriria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarak at
	2.09.03.2.01.001 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	50.280.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarak at

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	201.917.000,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Ton	201.917.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	150.133.225,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.04.000 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	29.793.595,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	120.339.630,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
4,	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						239.722.500,00					
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8,64%	14.81	14.81	13,58%	239.722.500,00	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	125.932.500,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.01.000 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan											
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	125.932.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	113.790.000,00			Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarakat
	2.09.04.2.02.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota											
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	77.760.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarakat

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
		-	-	-	-	-	-	239.722.500,00	-	-	-	-	-
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi											
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	36.030.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Masyarakat
5,	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						409.133.550,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	409.133.550,00			-	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	370.116.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
											NASIONA L	DAERA H	
		[Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan]	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan	100 86	0 77.7	100 87	100 86	409.133.550,00	-	-	-	-	-
	2.09.05.2.01.000 9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	39.017.550,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	J U M L A H							8.826.473.822,0 0					

BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan 1 (Satu) tahunan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dengan alasan tertentu, sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Demikian Rencana Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dibuat dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas

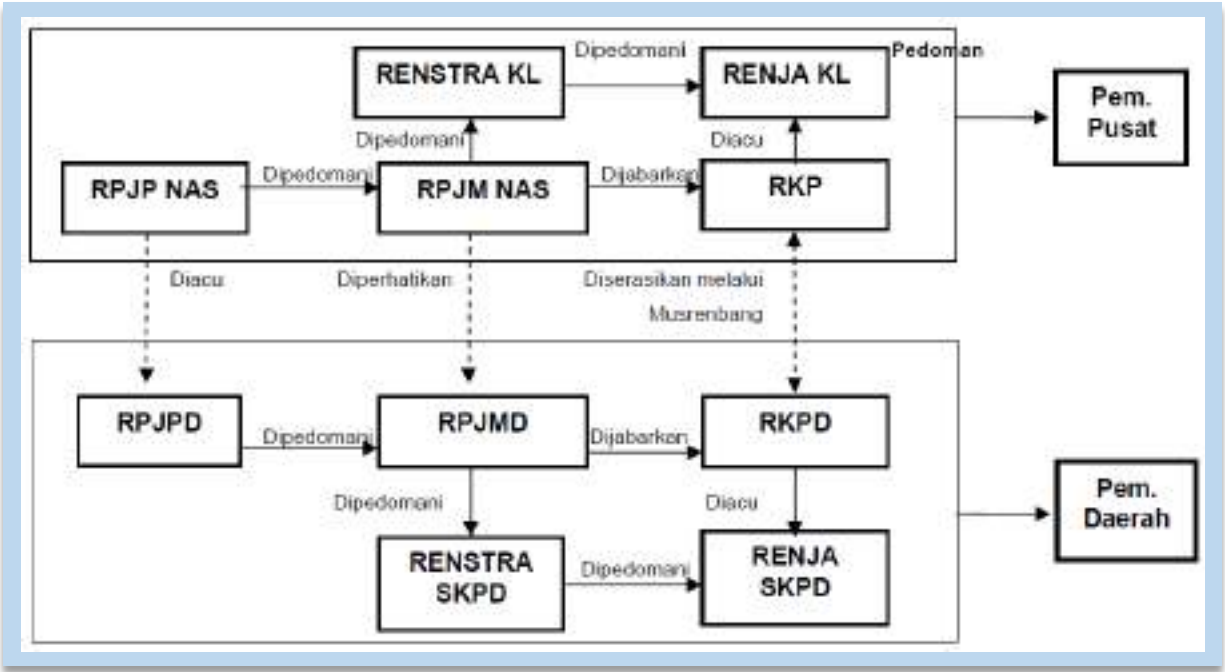
Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
 24. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional PD;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan lingkungan hidup;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya anggaran yang memadai
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya anggaran yang memadai
3	Pogram Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tersedianya anggaran yang memadai
4	Program Pengelolaan Persampahan	Tersedianya anggaran yang memadai

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	-	Tdk ada faktor yang menghambat

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Sungai dengan indeks pencemaran air “Cemar ringan”		52.22	33.30	33.00	99,9	33.30	33.00	99.9
2.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3		n.a	50	26	52	50	25	50
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan		25	n.a	n.a	n.a	70	15	21.43
4.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani		36.33	30.68	42.37	138	30.68	30.68	100
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat DLH		74.07	85	85	85	85		

Tabel 2.3 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%							
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3							
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2							
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1							
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1							
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%							
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	64.05							

		Indeks Kualitas Udara	93.15							
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2							
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1							
	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	9							
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Ketahanan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	80							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10							
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10							
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan								
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)								
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	4							

		Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada								
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	25							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1							
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4							
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1							

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD	19							
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	umlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	18							
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4							
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4							
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	1							
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD	54							
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1							

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2							
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1							
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60							
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	12							
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6							
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6							
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1							

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2							
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa

1. Pada Indikator Indeks Kualitas Air dengan target 64, realisasi 63,33 mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2023, yakni 52,22 hal ini disebabkan ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi. Beberapa penyebab utamanya pengurangan beban pencemaran domestik, pengurangan limpasan pertanian (penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih bijak dan sesuai dosis, penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi erosi tanah dan limpasan, pengembangan area penahan di sekitar badan air), rehabilitasi ekosistem air, peningkatan kesadaran Masyarakat dan partisipasi, pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan debit air.
2. Pada Indikator Indeks Kualitas Udara, dengan target 93 dan realisasi 93,04 mengalami sedikit penurunan capaiannya dari tahun 2023 yakni 97.04. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, baik yang berasal dari aktivitas manusia seperti transportasi/lalu lintas, industry, pembakaran biomassa dan limbah, aktivitas domestik dan komersial, maupun faktor alam seperti kondisi cuaca dan karakteristik geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi penyebaran dan penumpukan.
3. Pada Indikator Kualitas Tutupan Lahan dengan target 88,5 realisasi 87,54 mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2023 yakni 87,2.
4. Pada Indikator Presentase timbunan sampah yang ditangani dengan target 88% realisasi 42,37%, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 36% dan mengalami penurunan dari tahun 2022 hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah rumah

tangga serta ketercukupan anggaran Program/kegiatan yang masih minim. Agar hal ini bisa tercapai sesuai target, perlu banyak inovasi didaerah dan perlu studi tiru ke daerah lain agar presentase timbunan sampah bisa meningkat.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
1	Indeks Kualitas Air		√		60	62	64		56,67	52,22	63,33	66	67	
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		√		87	87,2	88,5		87,01	87,1	87,54	88,80	89	
3	Indeks Kualitas Udara		√		93	93	93		95,00	97,04	93,04	93,20	93,50	
4	Presentase timbunan sampah yang ditangani		√		86	87	88		71	36	42,37			

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Belum terpenuhinya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Keterbatasan anggaran yang tersedia.
Belum maksimalnya penanganan sampah kabupaten	Keterbatasan SDM dan penganggaran
Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki ijin/rekomendasi lingkungan	Rendahnya minat Masyarakat untuk mengurus rekomendasi lingkungan
Belum optimalnya pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	SDM yang belum kompeten dan belum sesuai dengan bidang ilmu
Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengaduan Masyarakat	1. Rendahnya Sumberdaya ASN yang mau mengikuti Diklat/pelatihan Pejabat Pengawas 2. Keterbatasan anggaran yang tersedia

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan pendanaan dari pusat dan lembaga donor lainnya	Persaingan dengan daerah lain
Peluang pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan di daerah	Perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, abrasi)
Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan lingkungan	Anggaran yang tersedia cukup banyak

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka

isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Eksploitasi sumber daya alam.
2. Kearifan lokal dan zonasi ecoregion
3. Sinergisitas antar sektor
4. Perubahan iklim dan bencana
5. Sistem pengelolaan sampah yang layak dan berkelanjutan
6. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
7. Kewenangan penegakan hukum

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.7 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Bolssel	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	Rp. 617.166.500,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Bolssel	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	Rp. 617.166.500,00	
	<i>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>	<i>3</i>	<i>Rp. 353.900.500,00</i>	<i>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>	<i>3</i>	<i>Rp. 353.900.500,00</i>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2	Rp. 353.900.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2	Rp. 353.900.500,00	
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun</i>	<i>1</i>	<i>Rp. 263.266.000,00</i>	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun</i>	<i>1</i>	<i>Rp. 263.266.000,00</i>	
1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Rp. 263.266.000,00	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Rp. 263.266.000,00	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bolssel	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Rp. 611.285.400,00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bolssel	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Rp. 611.285.400,00	
	<i>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Indeks Kualitas Air</i>	<i>64.05</i>	<i>Rp. 611.285.400,00</i>	<i>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Indeks Kualitas Air</i>	<i>64.05</i>	<i>Rp. 611.285.400,00</i>	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
			Indeks Kualitas Udara	93.15				Indeks Kualitas Udara	93.15		
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Rp. 311.092.400,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Rp. 311.092.400,00	
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Rp. 36.990.500,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Rp. 36.990.500,00	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab.Bolsel	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1	Rp. 98.314.500,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab.Bolsel	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1	Rp. 98.314.500,00	
4	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kab.Bolsel	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	9	Rp. 164.888.000,00	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kab.Bolsel	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	9	Rp. 164.888.000,00	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab.Bolsel	Meningkatnya Ketahuan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	80	Rp. 50.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab.Bolsel	Meningkatnya Ketahuan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	80	Rp. 50.000.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab.Bolsel</i>	<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	<i>10</i>	<i>Rp. 50.000.000,00</i>	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab.Bolsel</i>	<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	<i>10</i>	<i>Rp. 50.000.000,00</i>	
1	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab.Bolsel	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab.Bolsel	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10	Rp. 50.000.000,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bolsel	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Rp. 2.062.359.536,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab.Bolsel	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Rp. 2.062.359.536,00	
	<i>Kegiatan Pengelolaan Sampah</i>	<i>Kab.Bolsel</i>	<i>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</i>		<i>Rp. 2.062.359.536,00</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Sampah</i>	<i>Kab.Bolsel</i>	<i>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</i>		<i>Rp. 2.062.359.536,00</i>	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4	Rp. 26.236.000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4	Rp. 26.236.000,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Bolsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	25	Rp. 1.774.983.536.00	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Bolsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	25	Rp. 1.774.983.536,00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Bolssel	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	Rp. 261.140.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab.Bolssel	1 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	Rp. 261.140.000,00	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bolssel	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	Rp. 2.366.790.661,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab.Bolssel	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	Rp. 2.366.790.661,00	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Bolssel</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>4</i>	<i>Rp. 5.913.500,00</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab.Bolssel</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>4</i>	<i>Rp. 5.913.500,00</i>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Rp. 986.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bolssel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Rp. 986.000,00	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 960.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bolssel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 960.000,00	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp. 990.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bolssel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp. 990.000,00	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp. 997.500,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp. 997.500,00	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 990.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 990.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 990.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 990.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD	19	Rp. 1.876.197.941,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD	19	Rp. 1.876.197.941,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp. 1.863.412.941.001,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp. 1.863.412.941.001,00	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165	Rp. 8.185.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165	Rp. 8.185.000,00	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 2.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 2.100.000,00	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	18	Rp. 2.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	18	Rp. 2.500.000,00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Rp. 12.830.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Rp. 12.830.000,00	
1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Rp. 12.830.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Rp. 12.830.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	1	Rp. 20.346.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	1	Rp. 20.346.000,00	
1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bolsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Rp. 20.346.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bolsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Rp. 20.346.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD	54	Rp. 302.526.500,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD	54	Rp. 302.526.500,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp. 2.941.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp. 2.941.500,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Rp. 11.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Rp. 11.100.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp. 9.490.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp. 9.490.000,00	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp. 278.995.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp. 278.995.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	12	Rp. 90.884.720,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	12	Rp. 90.884.720,00	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Rp. 35.244.720,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Rp. 35.244.720,00	
2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolssel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Rp. 55.640.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolssel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Rp. 55.640.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158	Rp. 7.620.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158	Rp. 7.620.000,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Rp. 1.480.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Rp. 1.480.000,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Rp. 6.140.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Rp. 6.140.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Rp. 126.677.538,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Rp. 126.677.538,00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Rp. 50.472.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Rp. 50.472.000,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bolssel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp. 43.880.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bolssel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp. 43.880.000,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bolssel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp. 3.682.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bolssel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp. 3.682.000,00	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolssel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Rp. 2.910.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolssel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Rp. 2.910.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Desa Toluaya	Presentase penanganan sampah yang tertangani	3 unit	Tempat Pembuangan Sampah
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Desa Pintadia	Presentase penanganan sampah yang tertangani	20 Unit	Tong Sampah
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Desa Sondana	Presentase penanganan sampah yang tertangani	4 unit	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Desa Deaga	Presentase penanganan sampah yang tertangani	-	Pembangunan Bak Sampah
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Desa Sakti	Presentase penanganan sampah yang tertangani	8 unit	Pembuatan Bak Sampah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025. Keempat pilar RPJMN ke-IV tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Kemenparekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda pertama: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “*Meningkatkan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”, dengan sasaran dan focus antara lain :

Tabel 3.1
Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2025
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	a. Sistem Jaminan Sosial b. Modernisasi Pertanian c. Pemerataan Pembangunan
2	Peningkatan kualitas SDm; Kesehatan dan Pendidikan	a. Sistem Kesehatan b. Pendidikan (sistem Pendidikan dan c. Pendidikan Karakter
3	Penanggulangan Pengangguran disertai peningkatan desent job	a.Penyediaan lapangan usaha

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2025
4	Mendorong pemulihan dunia usaha	a. Revitalisasi Pariwisata b. Pembangunan UMKM
5	Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan	a. Industrialisasi b. Riset dan Inovasi
6	Pembangunan rendah karbon dan respon terhadap perubahan iklim	a. Ekonomi Rendah Karbon b. Transisi Ekonomi
7	Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain: air bersih dan sanitasi	a. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi b. Infrastruktur Digita c. Infrastruktur Konektivitas
8	Pembangunan Ibukota Nusantara	a. Fasilitas dasar IKN

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencakup terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, serta mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan dokumen Rencana Strategis KLHK. Sasaran ini dijabarkan dalam beberapa aspek, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan, menjaga keberadaan dan manfaat hutan, serta peningkatan tata kelola dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan.

- Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan:**

KLHK bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang.

- Kesejahteraan Masyarakat:**

Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program-program seperti perhutanan sosial.

- Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian:**

KLHK berperan dalam mendukung visi Indonesia maju dengan memastikan pengelolaan lingkungan dan sumber daya hutan yang berkelanjutan, berkontribusi pada kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian bangsa.

- Optimalisasi Pemanfaatan:**

KLHK berupaya agar sumber daya hutan dan lingkungan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan, dengan indikator seperti kontribusi sektor LHK terhadap PDB, nilai ekspor, dan peningkatan PNPB.

- **Tata Kelola dan Inovasi:**

KLHK juga fokus pada tata kelola yang baik dan inovasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk melalui indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan, penanganan kasus LHK, dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- **Pengarusutamaan Transformasi Digital:**

KLHK berupaya membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta mengoptimalkan pengelolaan big data, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis KLHK.

- **Pengurangan Kerentanan Bencana:**

KLHK juga memiliki sasaran dalam mengurangi kerentanan bencana, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem peringatan dini, dan pengembangan sistem logistik kebencanaan.

Berkaitan dengan sasaran strategis KLHK terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang bersinggungan dengan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan :

- 1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;

- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2026
1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh serta resilien terhadap bencana	Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	67.00
			Indeks Kualitas Udara	93.50
			Indeks Tutupan Lahan	89.00
		Meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	60

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 5 program dan 16 Kegiatan serta 19 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 (T-C-32) berikut:

Tabel 3.4 (T-C-32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		
1	2	3	4	5	6
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup				
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Bolssel	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab.Bolssel	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3	
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab.Bolssel	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1	
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab.Bolssel	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Bolssel	Menurunnya Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Bolssel	Indeks Kualitas Air	64.05	
			Indeks Kualitas Udara	93.15	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab.Bolssel	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab.Bolssel	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1	
	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kab.Bolssel	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	9	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab.Bolssel	Meningkatnya Ketahanan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	80	

			lingkungan hidup yang diterbitkan		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bolsel	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10	
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab.Bolsel	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab.Bolsel	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab.Bolsel	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Bolsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	25	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab.Bolsel	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab.Bolsel	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bolsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bolsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	

			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD	19	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolssel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	18	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	1	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Bolssel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD	54	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	12	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bolssel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolssel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan	150	

	Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bolssel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bolssel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolssel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berisikan program dan kegiatan, Indikator kinerja program, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 T-C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup									
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Kab. Bolssel	100%	Rp. 617.166.500,00	DAU		100%	Rp. 617.166.500,00	
	<i>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>	<i>Kab.Bolssel</i>	3	<i>Rp. 353.900.500,00</i>	DAU		3	<i>Rp. 353.900.500,00</i>	
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kab. Bolssel	2	Rp. 353.900.500,00	DAU	Usulan Hasil Musrenbang	2	Rp. 353.900.500,00	
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun</i>	<i>Kab.Bolssel</i>	1	<i>Rp. 263.266.000,00</i>	DAU		1	<i>Rp. 263.266.000,00</i>	
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab.Bolssel	1	Rp. 263.266.000,00	DAU		1	Rp. 263.266.000,00	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Bolssel	100%	Rp. 611.285.400,00	DAU		100%	Rp. 611.285.400,00	
	<i>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Indeks Kualitas Air</i>	<i>Kab.Bolssel</i>	<i>64.05</i>	<i>Rp. 611.285.400,00</i>	DAU		<i>64.05</i>	<i>Rp. 611.285.400,00</i>	
		Indeks Kualitas Udara		93.15		DAU		93.15		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup									
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab.Bolsel	2	Rp. 311.092.400,00	DAU		2	Rp. 311.092.400,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Bolsel	1	Rp. 36.990.500,00	DAU		1	Rp. 36.990.500,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Kab.Bolsel	1	Rp. 98.314.500,00	DAU		1	Rp. 98.314.500,00	
	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Kab.Bolsel	9	Rp. 164.888.000,00	DAU		9	Rp. 164.888.000,00	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Ketahuan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	Kab.Bolsel	80	Rp. 50.000.000,00	DAU		80	Rp. 50.000.000,00	
	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	<i>Kab.Bolsel</i>	<i>10</i>	<i>Rp. 50.000.000,00</i>	DAU		<i>10</i>	<i>Rp. 50.000.000,00</i>	
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab.Bolsel	10	Rp. 50.000.000,00	DAU		10	Rp. 50.000.000,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup									
	Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Kab.Bolsel		Rp. 2.062.359.536,00	DAU			Rp. 2.062.359.536,00	
	<i>Kegiatan Pengelolaan Sampah</i>	<i>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</i>	<i>Kab.Bolsel</i>		Rp. 2.062.359.536,00	DAU			Rp. 2.062.359.536,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kab.Bolsel	4	Rp. 26.236.000.00	DAU		4	Rp. 26.236.000.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab.Bolsel	25	Rp. 1.774.983.536.00	DAU		25	Rp. 1.774.983.536.00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kab.Bolsel	1	Rp. 261.140.000,00	DAU		1	Rp. 261.140.000,00	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Bolsel	3.45	Rp. 2.366.790.661,00	DAU		3.45	Rp. 2.366.790.661,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup									
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bolsel	4	Rp. 5.913.500,00	DAU		4	Rp. 5.913.500,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bolsel	1	Rp. 986.000,00	DAU		1	Rp. 986.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bolsel	1	Rp. 960.000,00	DAU		1	Rp. 960.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bolsel	1	Rp. 990.000,00	DAU		1	Rp. 990.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bolsel	1	Rp. 997.500,00	DAU		1	Rp. 997.500,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bolsel	1	Rp. 990.000,00	DAU		1	Rp. 990.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bolsel	1	Rp. 990.000,00	DAU		1	Rp. 990.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD	Kab. Bolsel	19	Rp. 1.876.197.941,00	DAU		19	Rp. 1.876.197.941,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolsel	18	Rp. 1.863.412.941.001,00	DAU		18	Rp. 1.863.412.941.001,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolsel	165	Rp. 8.185.000,00	DAU		165	Rp. 8.185.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bolsel	1	Rp. 2.100.000,00	DAU		1	Rp. 2.100.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Kab. Bolsel	18	Rp. 2.500.000,00	DAU		18	Rp. 2.500.000,00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolsel	4	Rp. 12.830.000,00	DAU		4	Rp. 12.830.000,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup									
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolssel	4	Rp. 12.830.000,00	DAU		4	Rp. 12.830.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	Kab. Bolssel	1	Rp. 20.346.000,00	DAU		1	Rp. 20.346.000,00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bolssel	6	Rp. 20.346.000,00	DAU		6	Rp. 20.346.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD	Kab. Bolssel	54	Rp. 302.526.500,00	DAU		54	Rp. 302.526.500,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bolssel	1	Rp. 2.941.500,00	DAU		1	Rp. 2.941.500,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bolssel	2	Rp. 11.100.000,00	DAU		2	Rp. 11.100.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bolssel	1	Rp. 9.490.000,00	DAU		1	Rp. 9.490.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolssel	60	Rp. 278.995.000,00	DAU		60	Rp. 278.995.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bolssel	12	Rp. 90.884.720,00	DAU		12	Rp. 90.884.720,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bolssel	6	Rp. 35.244.720,00	DAU		6	Rp. 35.244.720,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolssel	6	Rp. 55.640.000,00	DAU		6	Rp. 55.640.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolssel	158	Rp. 7.620.000,00	DAU		158	Rp. 7.620.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bolssel	150	Rp. 1.480.000,00	DAU		150	Rp. 1.480.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bolssel	4	Rp. 6.140.000,00	DAU		4	Rp. 6.140.000,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup									
	Listrik									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolsel	4	Rp. 126.677.538,00	DAU		4	Rp. 126.677.538,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolsel	9	Rp. 50.472.000,00	DAU		9	Rp. 50.472.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bolsel	1	Rp. 43.880.000,00	DAU		1	Rp. 43.880.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bolsel	2	Rp. 3.682.000,00	DAU		2	Rp. 3.682.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bolsel	6	Rp. 2.910.000,00	DAU		6	Rp. 2.910.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang

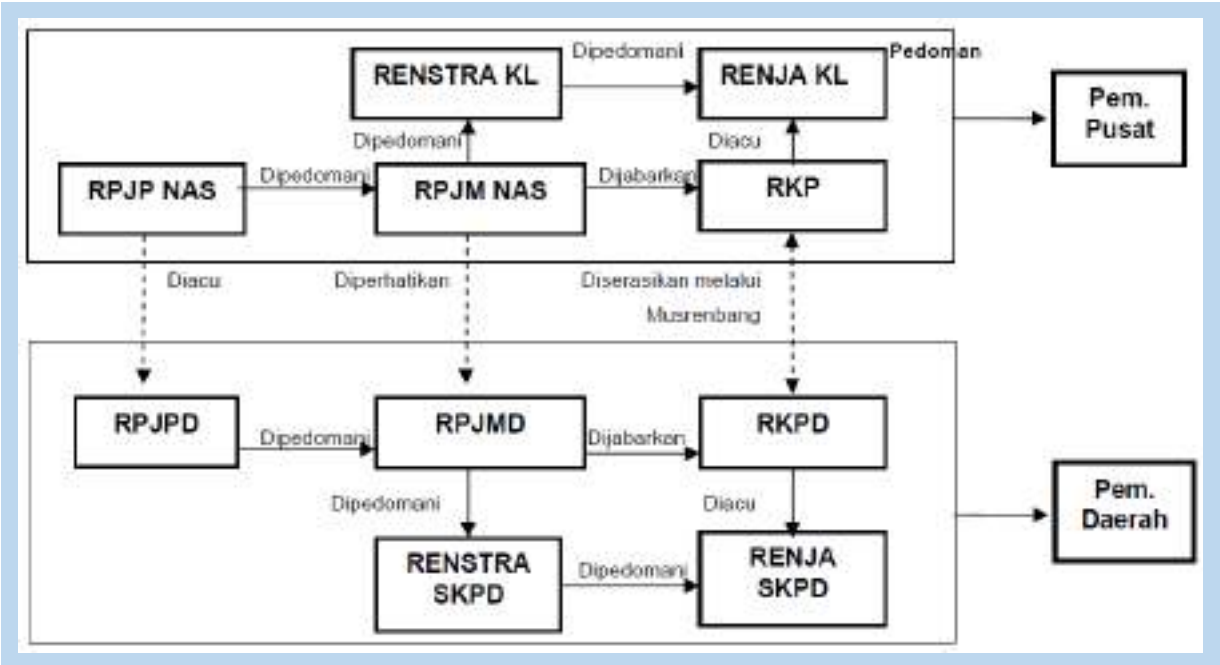
Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berkesinambungan

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara sistematis dan terorganisir;
- 3). Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 3) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan yang di terbitkan
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang di kumpulkan dan diolah untuk menyediakan data yang akurat.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel2.2 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86%	85%	85%	99.99%	86%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis	85%	85%			85%		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	71			71		
			Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya	100%	100%			100%		
			Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	100%	100%			100%		

						Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	100%		100%			100%		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Rencana Kerja	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok		1 Dok			1 Dok		

					3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
					4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
					5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	4 Kali		4 Kali			4 Kali		
					-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%		0%	100%	100%	0%		
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	100%		100%			100%		
					2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	100%		100%	100%	100%	100%		
					3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	1 Laporan		1 Laporan			1 Laporan		
					4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18 Dok		18 Dok			18 Dok		

					5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	4 Dok		4 Dok			4 Dok		
							Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	4 Dok		4 Dok			4 Dok		
					-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%		100%	100%	100%	100%		
					1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok		1 Dok		100%	1 Dok		
							Jumlah Laporan Barang Habis Pakai	1 Dok		1 Dok		100%	1 Dok		
					-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	4%		5%		97.49%	5%		
					1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	100%		100%			100%		
					2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	11 Pasang		11 Pasang			0		
					3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	12,5%		12,5%			12,5%		
					4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	50%		50%			50%		
					-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%			100%		
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%		90%			90%		
							Jumlah Inovasi	3		2			3		

						Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	100%		100%			100%		
						Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	100%		100%			100%		
						Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50%		50%			50%		
						Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	100%		100%			100%		
						Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%		100%			100%		
					1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%		100%		100%		
					3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%		100%		100%		
							Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi	2		12		12		
							Jumlah Halaman/Fotocopy/Pengadaan	5500 Lembar		5000lembar		5000lembar		
					4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	32 Exemplar		24 Exemplar		24 Exemplar		
					5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	25 Orang		95 Orang		25 Orang		

						Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	100%		100%	98%	98%	100%		
						Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dok		-			1 Dok		
					6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP	1 Dok		1 Dok		1 Dok		
						Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Maklumat Pelayanan	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
						Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik	1 Layanan		1 Layanan			1 Layanan		
					7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	10%		0		10%		
						Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR	10%		0			10%		
					-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2		100%		2		
					1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0		-		0		

				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	2		-			2		
				3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	8 Unit		6 Unit			8 Unit		
				4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/Gedung	1 Unit		-			1 Unit		
				5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0 Unit		0			-		
				-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	`	100%		100%			100%		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89		87			88		
						Jumlah Inovasi	85		1			1		
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Internet yang tersedia	1		1			1		
						Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	1		1			1		
						Jumlah jaringan Air Yang Tersedia	1		1			1		
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100%		100%		100%	100%		
				-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%		100%		99%	100%		
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	8 Unit		8 Unit			8 Unit		

				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara	1 Unit		1 Unit		99%	1 Unit		
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit		1 Unit			1 Unit		
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	0		0			0		
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil	100%		0		83.87%	100%		
					- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan									
				1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil			0%			11 Peserta		
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependuduakn	100%		100%		78.94%	100%		
						Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA	95%		75%			85%		
						Persentase kepemilikan akta kelahiran	100%		100%			100%		
					- Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%		100%			100%		
				1	Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk	Presentase Jumlah ATK	100%		100%			100%		
						Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	100%		100 Rim			100%		

						Presentase Jumlah Bahan Cetak	100%		100%			100%		
						Jumlah THL	13 Otang		11 Orang			11 Orang		
						Presentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%		100%			100%		
						Presentase Penerbitan Akta Kematian	100%		100%			100%		
						Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan	100%		100%			100%		
						Presentase Jumlah Perekaman KTP-el	100%		100%			100%		
						Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	100%		75%			100%		
						Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%					100%		
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama	7 Opd		2Opd			5 OPd		
				1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan									
					1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	7 PD		2 PD			5 PD		
					2 Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan	5 Unit		0			5 Unit		
				2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
					1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan	90 Orang		90 Orang			90 Orang		

					2	Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.	Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan	10 Tahun		10 Tahun			10 Tahun		
					1	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	81 orang		0			81 orang		
					PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Jumlah Buku Profil Kependudukan			0			50 Buku		
					1	Penyusunan Profil Kependudukan		50 Buku		0			50 Buku		
					1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Kependudukan	30 Buku		0			25 Buku		
							Jumlah Buku Agregat	30 Buku		0			25 Buku		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target 100%, tercapa 96.96%.
2. Pada Indikator Presentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dengan target 100%,tercapai 99,5%

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.3 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan			85%	85%	85%	85%	80%	81.00%	80%	82,%	85%	87%	
2	Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan			90%	92%	94%	95%	99%	95%	96%	96.50%	97%	99,5%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Sarana dan prasarana yang ada tidak memenuhi standar pelayanan publik	Masih kurangnya anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersedia seperti Gedung kantor yang belum sesuai Standar Pelayanan Pelayanan Publik
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat kepemilikan dokumen kependudukan	• Keterbatasan akses • Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan
Kurangnya SDM tentang edukasi pelayanan adminsitrasi kependudukan	Kurangnya kesempatan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pelayanan administrasi kependudukan
Pengamanan database yang belum maksimal dan kurangnya integrasi beberapa layanan berbasis kependudukan	• Akses internet yang terbatas • Perangkat yang tidak memadai • Kurangnya te naga ahli di bidang teknologi informasi

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Peluang	Tantangan
• Perkembangan Teknologi Informasi yang memungkinkan inovasi pelayanan • Meningkatnya kepentingan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan • Dukungan kebijakan pemerintah daerah berupa PERDA tentang administrasi kependudukan	• Perubahan regulasi yang berdampak pada pelayanan • Penyalahgunaan data kependudukan • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan • Bencana Alam yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik

• Potensi Kerjasama dengan pihak ketiga	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembanagan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
 - a. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah.
 - b. Perkembangan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat.
 - c. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan Adminduk.
2. Satu data kependudukan secara nasional. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai pendudukm Indonesia.
 - a. Implementasi integrasi big data kependudukan dalam semua proses berpemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi big data ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi-instansi pelayanan publik.
 - b. *Big data* mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik.
 - c. Semua penduduk memiliki identitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada table berikut:

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.6 (T-C31)** berikut ini:

Tabel2.6 (T-C 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

No	Rancangan awal RKPD					Rancangan awal RKPD					Catatan Penting
	Proram Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Proram Kegiatan	Lokasi	Indik ator Kiner ja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bol-Sel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86%	3.515.464.397	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86%	86%	3.515.464.397	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bol-Sel	Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis	85%	4.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis	85%	85%	4.500.000	
		Bol-Sel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	71		
		Bol-Sel	Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja di atasnya	100%			Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja di atasnya	100%	100%		
		Bol-Sel	Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	100%			Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	100%	100%		
		Bol-Sel	Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	100%			Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja	100%	100%		

								seluruh pegawai				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bol-Sel	Jumlah Rencana Strategis	1 Dok	1.200.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis	1 Dok	1 Dok	1.200.000	
		Bol-Sel	Jumlah Rencana Kerja	1 Dok				Jumlah Rencana Kerja	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja	1 Dok				Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama	1 Dok				Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu	1 Dok				Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Dok				Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja	1 Dok				Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja	1 Dok	1 Dok		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bol-Sel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	650.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	650.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bol-Sel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	400.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	400.000	

	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bol-Sel	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok	500.000	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	500.000	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bol-Sel	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	500.000	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	500.000	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bol-Sel	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dok	350.000	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dok	1 Dok	350.000	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bol-Sel	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	4 Kali	350.000	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	350.000	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bol-Sel	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	1.724.875.585		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	0%	1.724.875.585	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bol-Sel	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	100%	1.672.522.585	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	100%	100%	1.672.522.585	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bol-Sel	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	100%	50.853.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	100%	100%	50.853.000	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bol-Sel	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	1 Laporan	500.000	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	1 Laporan	1 Laporan	500.000	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bol-Sel	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18 Dok	500.000	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18 Dok	18 Dok	500.000	
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Bol-Sel	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	4 Dok	500.000	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	4 Dok	4 Dok	500.000	

	Realisasi Anggaran	Bol-Sel	Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	4 Dok				Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	4 Dok	4 Dok		
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bol-Sel	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	54.243.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	100%	54.243.000	
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bol-Sel	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok	54.243.000	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	54.243.000	
		Bol-Sel	Jumlah Laporan Barang Habis Pakai	1 Dok				Jumlah Laporan Barang Habis Pakai	1 Dok	1 Dok		
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bol-Sel	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	4%	102.386.546		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	4%	4%	102.386.546	
	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bol-Sel	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	100%	5.000.000	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	100%	100%	5.000.000	
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bol-Sel	Jumlah Pakaian Dinas	11 Pasan g	8.800.000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	11 Pasan g	11 Pasan g	8.800.000	
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bol-Sel	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	12,5%	61.304.512	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	12,5%	12,5%	61.304.512	
	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bol-Sel	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	50%	27.282.034	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	50%	50%	27.282.034	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bol-Sel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	223.200.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	223.200.000	
		Bol-Sel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%		
		Bol-Sel	Jumlah Inovasi	3				Jumlah Inovasi	3	3		
		Bol-Sel	Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	100%				Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	100%	100%		

		Bol-Sel	Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	100%				Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	100%	100%			
		Bol-Sel	Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50%				Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50%	50%			
		Bol-Sel	Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	100%				Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	100%	100%			
		Bol-Sel	Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%				Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%	100%			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bol-Sel	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	48.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	48.000.000	
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bol-Sel	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	7.800.000	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	7.800.000	
	Bol-Sel		Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi	2	Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi				2	2			
	Bol-Sel		Jumlah Halaman/Fotocopy/Pengadaan	5500 Lembar	Jumlah Halaman/Fotocopy /Pengadaan				5500 Lembar	5500 Lembar			
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bol-Sel	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	32 Exemplar	2.500.000	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	32 Exemplar	32 Exemplar	2.500.000	
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bol-Sel	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	25 Orang	1.250.000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	25 Orang	25 Orang	1.250.000	

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bol-Sel	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	265.248.000	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	100%	265.248.000	
		Bol-Sel	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dok				Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD	1 Dok				Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dok				Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP	1 Dok				Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP	1 Dok				Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan	1 Dok				Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan	1 Dok	1 Dok		
		Bol-Sel	Jumlah Maklumat Pelayanan	1 Dok				Jumlah Maklumat Pelayanan	1 Dok	1 Dok		
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bol-Sel	Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik	1 Layanan	22.000.000	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik	1 Layanan	1 Layanan	22.000.000	
		Bol-Sel	Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	10%				Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	10%	10%		
		Bol-Sel	Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR	10%				Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR	10%	10%		
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bol-Sel	Jumlah BMD yang diadakan	2	4.077.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2	2	4.077.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Bol-Sel	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0	-	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0	0	-	

	atau Kendaraan Dinas Jabatan											
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bol-Sel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	2	52.000.000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	2	2	52.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bol-Sel	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	8 Unit	280.000.000	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	8 Unit	8 Unit	280.000.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bol-Sel	Jumlah bangunan/Gedung	1 Unit	3.745.000.000	4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/Gedung	1 Unit	1 Unit	3.745.000.000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bol-Sel	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0 Unit	0	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0 Unit	0 Unit	0	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bol-Sel	`	100%	256.715.965		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	`	100%	100%	256.715.965	
		Bol-Sel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89	89		
		Bol-Sel	Jumlah Inovasi	85				Jumlah Inovasi	85	85		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bol-Sel	Jumlah Jaringan Internet yang tersedia	1	32.000.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Internet yang tersedia	1	1	32.000.000	
		Bol-Sel	Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	1				Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	1	1		
		Bol-Sel	Jumlah jaringan Air Yang Tersedia	1				Jumlah jaringan Air Yang Tersedia	1	1		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bol-Sel	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100%	224.715.965	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100%	100%	224.715.965	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bol-Sel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	110.038.500		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	110.038.500	

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bol-Sel	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	8 Unit	110.038.500	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	110.038.500	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bol-Sel	Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara	1 Unit		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bol-Sel	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bol-Sel	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	0		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	0	0		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Bol-Sel	Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil	100%	58.721.646		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil	100%	100%	58.721.646	
	- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan		Bol-Sel					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan					
	1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Bol-Sel	Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil		58.721.646	1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil			58.721.646	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Bol-Sel	Presentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kepemduduakn	100%	622.691.860		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kepemduduakn	100%	100%	622.691.860	
			Bol-Sel	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA	95%				Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA	95%	95%		

		Bol-Sel	Persentase kepemilikan akta kelahiran	100%				Persentase kepemilikan akta kelahiran	100%	100%		
	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bol-Sel		100%	368.000.000		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%	100%	368.000.000	
	1 Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk	Bol-Sel	Presentase Jumlah ATK	100%	26.500.000	1	Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk	Presentase Jumlah ATK	100%	100%	26.500.000	
		Bol-Sel	Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	100%	7.500.000			Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	100%	100%	7.500.000	
		Bol-Sel	Presentase Jumlah Bahan Cetak	100%	32.000.000			Presentase Jumlah Bahan Cetak	100%	100%	32.000.000	
		Bol-Sel	Jumlah THL	13 Otang	302.000.000			Jumlah THL	13 Otang	13 Otang	302.000.000	
		Bol-Sel	Presentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%	254.691.860			Presentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%	254.691.860	
		Bol-Sel	Presentase Penerbitan Akta Kematin	100%				Presentase Penerbitan Akta Kematin	100%	100%		
		Bol-Sel	Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan	100%				Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan	100%	100%		
		Bol-Sel	Presentase Jumlah Perekaman KTP-el	100%				Presentase Jumlah Perekaman KTP-el	100%	100%		

		Bol-Sel	Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	100%				Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	100%	100%		
		Bol-Sel	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%				Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%	100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Bol-Sel	Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama	7 Opd	45.500.000		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama	7 Opd	7 Opd	45.500.000	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Bol-Sel				1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan					
1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Bol-Sel	Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	7 PD	18.000.000	1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	7 PD	7 PD	18.000.000	
2	Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Bol-Sel	Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan	5 Unit	27.500.000	2	Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan	5 Unit	5 Unit	27.500.000	
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bol-Sel			196.000.000	1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				196.000.000	
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Bol-Sel	Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan	90 Orang	125.000.000	1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan	90 Orang	90 Orang	125.000.000	
2	Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.	Bol-Sel	Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan	10 Tahun	27.500.000	2	Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.	Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan	10 Tahun	10 Tahun	27.500.000	

	1	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan	Bol-Sel	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	81 orang	43.500.000	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	81 orang	81 orang	43.500.000	
		PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Bol-Sel	Jumlah Buku Profil Kependudukan		26.500.000		PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Buku Profil Kependudukan			26.500.000	
	1	Penyusunan Profil Kependudukan	Bol-Sel		50 Buku			Penyusunan Profil Kependudukan		50 Buku	50 Buku		
	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Bol-Sel	Jumlah Buku Profil Kependudukan	30 Buku	26.500.000	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Kependudukan	30 Buku	30 Buku	26.500.000	
			Bol-Sel	Jumlah Buku Agregat	30 Buku			Jumlah Buku Agregat	30 Buku	30 Buku			
TOTAL						7.502.373.102						7.502.373.102	

2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025. Keempat pilar RPJMN ke-IV tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda keenam yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “*Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pembangunan*”, dengan sasaran dan focus antara lain :

Tabel 3.1

Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2025
1	Peningkatan kualitas data kependudukan	Reformasi birokrasi dengan cara penerapan SIAK terpusat dan IKD untuk pelayanan yang lebih modern
2	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Pemanfaatan data untuk stunting
3	Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan kualitas SDM

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2025
4	Peningkatan kesadaran masyarakat	Penyediaan Infrastruktur

Sasaran strategis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Misi untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 sasaran strategis yaitu:

- 1) Penyediaan data kependudukan yang akurat dan valid;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Peningkatan tertib administrasi kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatanka pasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET SASARAN TAHUN 2026
-1	-2	-3	-4
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	85
		Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	97,5
	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi	Perekamanam KTP-el	100
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65
		Kepemilikan Akta Kelahiran	99.8
		Kepemilikan Akta Kematian	20,5
		Kepemilikan Akta Perkawinan	53
		Kepemilikan Akta Perceraian	55
		Persentase Peserta yang memahami teknis pencatatan sipil	100
		Jumlah PD yang Memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	17

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Tabel 3.3 (T-C-32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N I H I L				

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berisikan program dan kegiatan, Indikator kinerja program, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1T-C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatuf
1	2	3	6	7		8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Bol-Sel	86%	6.262.189.120	DAU	86%	86%	3.515.464.397
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis	Bol-Sel	85%	4.000.000	DAU	85%	85%	4.500.000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bol-Sel	71		DAU	71	71	
		Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja di atasnya	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
		Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
		Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	

				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Bol-Sel	1 Dok	500.000	DAU	1 Dok	1 Dok	500.000
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Bol-Sel	1 Dok	500.000	DAU	1 Dok	1 Dok	350.000
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	Bol-Sel	4 Kali	500.000	DAU	4 Kali	4 Kali	350.000
				-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	Bol-Sel	0%	1.388.773.729	DAU	0%	0%	1.724.875.585
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	Bol-Sel	100%	1.343.073.729	DAU	100%	100%	1.672.522.585
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	Bol-Sel	100%	44.200.000	DAU	100%	100%	50.853.000
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Bol-Sel	1 Laporan	500.000	DAU	1 Laporan	1 Laporan	500.000
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Bol-Sel	18 Dok	500.000	DAU	18 Dok	18 Dok	500.000
				5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	Bol-Sel	4 Dok	500.000	DAU	4 Dok	4 Dok	500.000
						Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	Bol-Sel	4 Dok		DAU	4 Dok	4 Dok	
				-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	Bol-Sel	100%	51.660.000	DAU	100%	100%	54.243.000
				1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Bol-Sel	1 Dok	51.660.000	DAU	1 Dok	1 Dok	54.243.000

					Jumlah Laporan Barang Habis Pakai	Bol-Sel	1 Dok		DAU	1 Dok	1 Dok		
				-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	Bol-Sel	5%	94.868.140	DAU	5%	4%	102.386.546
				1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	Bol-Sel	100%	5.000.000	DAU	100%	100%	5.000.000
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Bol-Sel	0	5.500.000	DAU	0	11 Pasang	8.800.000
				3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	Bol-Sel	12,5%	58.385.250	DAU	12,5%	12,5%	61.304.512
				4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	Bol-Sel	50%	25.982.890	DAU	50%	50%	27.282.034
				-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Bol-Sel	100%	210.000.000	DAU	100%	100%	223.200.000
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bol-Sel	90%		DAU	90%	90%	
						Jumlah Inovasi	Bol-Sel	3		DAU	3	3	
						Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
						Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
						Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	Bol-Sel	50%		DAU	50%	50%	

						Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	Bol-Sel	100%			DAU	100%	100%	
						Persentase SOP dan SP yang diterapkan	Bol-Sel	100%			DAU	100%	100%	
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bol-Sel	100%	45.000.000		DAU	100%	100%	48.000.000
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Bol-Sel	100%	7.500.000		DAU	100%	100%	7.800.000
						Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi	Bol-Sel	12			DAU	12	2	
						Jumlah Halaman/Fotocopy/Pengadaan	Bol-Sel	5000lembar			DAU	5000lembar	5500 Lembar	
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Bol-Sel	24 Exemplar	2.500.000		DAU	24 Exemplar	32 Exemplar	2.500.000
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	Bol-Sel	25 Orang	1.000.000		DAU	25 Orang	25 Orang	1.250.000
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	Bol-Sel	100%	256.001.985		DAU	100%	100%	265.248.000
						Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Bol-Sel	1 Dok			DAU	1 Dok	1 Dok	
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD	Bol-Sel	1 Dok			DAU	1 Dok	1 Dok	
						Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	Bol-Sel	1 Dok			DAU	1 Dok	1 Dok	
						Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP	Bol-Sel	1 Dok			DAU	1 Dok	1 Dok	

					Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP	Bol-Sel	1 Dok		DAU	1 Dok	1 Dok	
					Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan	Bol-Sel	1 Dok		DAU	1 Dok	1 Dok	
					Jumlah Maklumat Pelayanan	Bol-Sel	1 Dok		DAU	1 Dok	1 Dok	
				7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik	Bol-Sel	1 Layanan	20.000.000	DAU	1 Layanan	1 Layanan	22.000.000
					Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	Bol-Sel	10%		DAU	10%	10%	
					Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR	Bol-Sel	10%		DAU	10%	10%	
				- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Bol-Sel	2	4.045.000.000	DAU	2	2	4.077.000.000
				1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Bol-Sel	0		DAU	0	0	-
				2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	Bol-Sel	2	50.000.000	DAU	2	2	52.000.000
				3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	Bol-Sel	8 Unit	250.000.000	DAU	8 Unit	8 Unit	280.000.000
				4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/Gedung	Bol-Sel	1 Unit	3.745.000.000	DAU	1 Unit	1 Unit	3.745.000.000
				5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Bol-Sel	-	0	DAU	-	0 Unit	0

					-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bol-Sel	100%	198.836.270	DAU	100%	100%	256.715.965
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Bol-Sel	88		DAU	88	89	
						Jumlah Inovasi		Bol-Sel	1		DAU	1	85	
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Internet yang tersedia	Bol-Sel	1	75.000.000	DAU	1	1	32.000.000
							Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	Bol-Sel	1		DAU	1	1	
							Jumlah jaringan Air Yang Tersedia	Bol-Sel	1		DAU	1	1	
					2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	Bol-Sel	100%	123.836.270	DAU	100%	100%	224.715.965
					-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Bol-Sel	100%	101.038.500	DAU	100%	100%	110.038.500
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	Bol-Sel	8 Unit	101.038.500	DAU	8 Unit	8 Unit	110.038.500
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara	Bol-Sel	1 Unit		DAU	1 Unit	1 Unit	
					3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Bol-Sel	1 Unit		DAU	1 Unit	1 Unit	

				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	Bol-Sel	0		DAU	0	0	
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil	Bol-Sel	100%	55.721.846	DAU	100%	100%	58.721.646
					- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan		Bol-Sel						
				1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Bol-Sel	11 Peserta	55.721.846	DAU	11 Peserta		58.721.646
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependuduakn	Bol-Sel	100%	519.191.860	DAU	100%	100%	622.691.860
						Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA	Bol-Sel	85%			85%	95%	
						Persentase kepemilikan akta kelahiran	Bol-Sel	100%			100%	100%	
					- Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Bol-Sel	100%			100%	100%	368.000.000
				1	Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk	Presentase Jumlah ATK	Bol-Sel	100%	25.000.000	DAU	100%	100%	26.500.000
						Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Bol-Sel	100%	7.500.000	DAU	100%	100%	7.500.000
						Presentase Jumlah Bahan Cetak	Bol-Sel	100%	30.000.000	DAU	100%	100%	32.000.000
						Jumlah THL	Bol-Sel	11 Orang	302.000.000	DAU	11 Org	13 Org	302.000.000
						Presentase Penerbitan Akta Perkawinan	Bol-Sel	100%	154.691.860	DAU	100%	100%	254.691.860
						Presentase Penerbitan Akta Kematian	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	

						Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
						Presentase Jumlah Perekaman KTP-el	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
						Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
						Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Bol-Sel	100%		DAU	100%	100%	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama	Bol-Sel	5 OPd	40.000.000	DAU	5 OPd	7 Opd	45.500.000
				1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan		Bol-Sel		40.000.000				
				1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	Bol-Sel	5 PD	15.000.000	DAU	5 PD	7 PD	18.000.000
				2	Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan	Bol-Sel	5 Unit	25.000.000	DAU	5 Unit	5 Unit	27.500.000
				2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Bol-Sel		182.000.000				196.000.000
				1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan	Bol-Sel	90 Orang	115.000.000	DAU	90 Orang	90 Orang	125.000.000
				2	Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.	Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan	Bol-Sel	10 Tahun	25.000.000	DAU	10 Tahun	10 Tahun	27.500.000
				1	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Bol-Sel	81 orang	42.000.000	DAU	81 orang	81 orang	43.500.000
					PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Bol-Sel	50 Buku	25.000.000	DAU	50 Buku		26.500.000

				1	Penyusunan Profil Kependudukan		Bol-Sel	50 Buku	25.000.000	DAU	50 Buku	50 Buku	
				1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Bol-Sel	25 Buku	25.000.000	DAU	25 Buku	30 Buku	26.500.000
						Jumlah Buku Agregat	Bol-Sel	25 Buku		DAU	25 Buku	30 Buku	
TOTAL									6.916.090.345				7.502.373.102

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacupada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

1. Landasan hukum penyusunan Renja DINAS PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINAS PMD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SistematikaPenulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN

- 1.1. Latarbelakang;
- 1.2. Maksud dan tujuan;
- 1.3. Landasan hukum;
- 1.4. Sistematika penulisan;

BABII. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BABIII. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPerangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2025, Renstra Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

TableT-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA PerangkatDaerahs/d2025

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja a SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi								
2.13.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	3 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	75%	5 Unit	3 Unit	80%

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa								
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	65 %	0	60%	60%	60%	65%	65%	65%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60%	40%	60%	45%	45%	60%	60%	60%
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	60%	40%	60%	45%	45%	60%	60%	60%

[illegible]

	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Masyarakat Hukum Adat								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

**Tabel T-C30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Prov. Sulawesi Utara**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			85	85	85	85	85	85	85	85	
4	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Fasilitasi Penataan Desa			0	60%	65%	65%	0	60%	65%	65%	
6	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya			60%	60%	60%	65%	40%	45%	65%	65%	
7	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa			60%	60%	60%	65%	40%	45%	65%	65%	
8	Persentase Kemasyarakatan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat											

Berdasarkan informasi pada table diatas, realisasi kinerja sasaran strategis Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal Tahun 2024.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Bidang yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Desa.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain;

- a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda.
- b. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan disiplin keilmuannya, sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak bisa diselesaikan dengan baik;
- c. Terbatasnya data-data yang akurat dan terbaru.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Bidang, Perangkat Daerah/instansi dan lintas sektor didalam penyusunan program/kegiatan dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Daerah (IKD);
- b. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
- c. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya

secara berkala;

- d. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan dan Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung untuk mencapai target kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Hampir seperempat penduduk Sulawesi Utara merupakan pemuda, jumlah ini menunjukkan memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar. Akan sangat berarti jika diiringi dengan kualitas yang mumpuni, karena pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai aktor intelektual penggerak pembangunan. Peran dan fungsi pemuda menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan diberbagai bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang

Mongondow Selatan, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, guna memberikan kontribusi terhadap Pengelolaan Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara Menyeuruh dan akuntable.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024, maka rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kementrian Desa PDTT 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2021–2026, yaitu *Meningkatnya Indeks Kemandirian Desa..*

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Doku men	11.130.00 0,00	Kab. Bolaan g Mongondow Selatan, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa		10.000.00 0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA
	2	1	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
	2	1	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Lapo ran	11.400.00 0,00	Kab. Bolaan g Mongondow Selatan, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi	Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa		11.400.00 0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA

															Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
	2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	2	1	0	2.	00	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Lapo ran	433.846.5 00,00	Kab. Bolaan g Mongow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan	Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa		300.000.0 00,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	5.000.550 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASIM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	-			65 Persen	94.907.750,00						-	100.000.000,00	
						[Meningkatkan Kualitas Penataan Desa]														
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	94.907.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Desa	-	100.000.000,00	
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														

							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				81 Desa	46.016.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	201	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				81 Unit	48.891.750,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
3	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															

						[Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemeirntahan Desa]	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80	45	50	60	404.214.500,00							360.000.000,00	
	2	1	0	2.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
	2	1	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
	2	1	0	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
	2	1	0	2.	00	Penyelenggara n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa				81 Lapo ran	207.765.500,00	Kab. Bolaan g Mongondow Selatan, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Pemerintahan Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	1	0	2.	00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan															
4	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	-			100 Perse n	94.254.50 0,00					-	90.000.00 0,00			
						[Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]															
	2	1	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	-	-			-	94.254.50 0,00			Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Lembaga Kemasyar akatan	-	90.000.00 0,00		
	J U M L A H											4.516.796 .566,00								4.521.400 .000,00	

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	40.405.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Lembaga Kemasyarakatan		55.000.000,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	53.849.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan	Lembaga Kemasyarakatan		35.000.000,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																Pelaksanaan SPBE				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja(Renja) Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

K. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

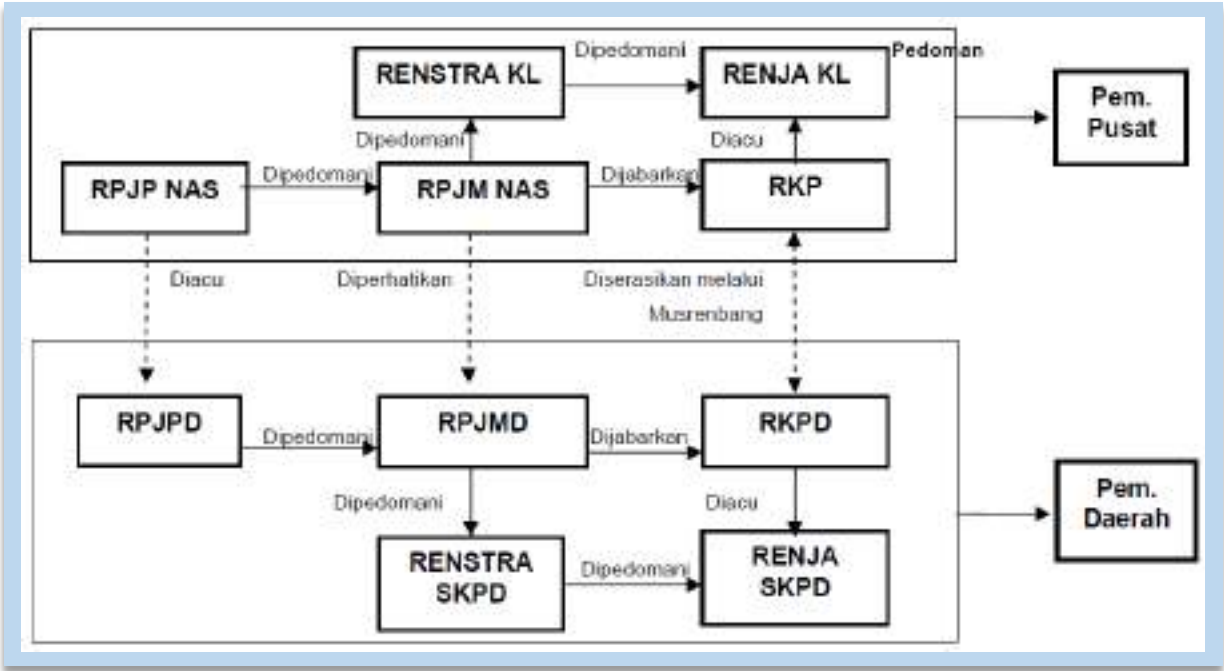
Sehubungan dengan hal tersebut, DINAS PPKBPPPA menyusun Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DINAS PPKBPPPA.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
 30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 32. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadukan serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DINAS PPKBPPPA Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 5) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Capaian Rencana Strategis DINAS PPKBPPPA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PPKBPPPA
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS PPKBPPPA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DINAS PPKBPPPA

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PPKBPPPA

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PPKBPPPA

TAHUN 2024

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Stategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 - 2026 merupakan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah . Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan keuangan
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sesuai perhitungan penguluaran dengan target gaji ASN
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penggunaanya peralatan sudah sesuai dengan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
		peruntukannya
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan kepengurusan barang
5	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan
6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah printer dan laptop diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum dan kebijakan, penyediaan layanan pendukung, dan pemberdayaan perempuan dan anak
8	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum dan kebijakan, penyediaan layanan pendukung, dan pemberdayaan perempuan dan anak
9	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program bangsa Kencana	ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
10	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait
11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait
12	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait
13	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait
14	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Penyediaan sarana dan prasarana sheiter dan oprasional - Penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan	Data kekerasan terhadap perempuan,kurangnya pemahaman masyarakat tentang rumah aman
2	Sosialisasi pembukaan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan	Belum terbentuknya forum puspa baik di tingkat kabupaten,kecamatan maupun desa
3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Belum adanya Perbup PUG dan buku profil gender
4	Pembinaan pengerustamaan gender	Kurangnya tenaga terlatih PPRG

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Rata-rata capaian target reformasi birokrasi	75%		85%	80,00%	94	71%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis			85%	83,00%	98			
		Nilai Pelaporan pada Komponen SAKIP	11,25		71	71,00%	1	10,65		
		Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja di atasnya			100%	100,00%	100			
		Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	75%		100%	100,00%	100	71%		
		Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	100%		100%	100,00%	100	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
		Jumlah Rencana Kerja	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok		1	100,00%	100	1 Dok		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	4 Kali		4	400,00%	100	4 Kali		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	100%		100%		-	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	100%		100%	100,00%	100	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	100%		100%	0,00%	-	100%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	100%		100%		-	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	1 Laporan		1	100,00%	100	1 Laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	18 Dok		18		-	18 Dok		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%		100%		-	100%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok		1	1,00%	1	1 Dok		
		Jumlah Laporan Barang Habis Pakai	1 Dok		1	1,00%	1	1 Dok		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai	4%		5%		-	5%		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	100%		0%	0,00%	#DIV/0!	0%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	20%		0%	0,00%	#DIV/0!	10%		

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%		100%	100,00%	100	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 unit		0	0,00%	#DIV/0!	3 Unit		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%		100%	100,00%	100	100%		
		Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birokrasi	2 Lembar		0	0,00%	#DIV/0!	2 Lembar		
		Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Standar Pelayanan dan SOP	5 Lembar		12	10,00%	1	5 Lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	32 Exemplar		32	30	94	32 Exemplar		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	20 Orang		20	20	100	20 Orang		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	100%		100%	99%	99	100%		
		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dok		1		-	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD	1 Dok		1		-	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dok		1		-	1 Dok		
		Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP	1 Dok		1		-	1 Dok		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP	1 Dok		1		-	1 Dok		
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan	1 Dok		1		-	1 Dok		
		Jumlah Maklumat Pelayanan	1 Dok		1		-	1 Dok		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik	1 Layanan		1		-	1 Layanan		
		Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	10%		0	0	#DIV/0!	10%		
		Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR	10%		0	0	#DIV/0!	10%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	6 Unit		0	0	#DIV/0!	2 unit		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit		0	0	#DIV/0!	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	2 unit		0	0	#DIV/0!	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	2 Unit		0	0	#DIV/0!	2 Unit		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/Gedung	1 Unit		0	0	#DIV/0!	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Unit		0	0	#DIV/0!	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%		-	100%		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95		87		-	88		
		Jumlah Inovasi	1		1		-	1		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim melalui Kantor Pos	10		0	0	#DIV/0!	10		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Internet yang tersedia	1		0	0	#DIV/0!	1		
		Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia	1		0	0	#DIV/0!	1		
		Jumlah jaringan Air Yang Tersedia	1		0	0	#DIV/0!	1		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100%		100%	100%	100	100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%		100%		-	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	22 Unit		22	22	100	22 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit		2	2	100	2 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit		0		#DIV/0!	0		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,5		92,91%		-	95,5		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,5		68	50	74	71,5		
		Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafficking	100%		100%		-	100%		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase PD Yang Melaksanakan PPRG	80%		0		#DIV/0!	75%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Penyusunan buku Profil untuk Analisis Gender	1 Dok		0		#DIV/0!	1 Dok		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan		0		#DIV/0!	1 Kegiatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	7 Kali		0		#DIV/0!	7 kali		
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif presentase perempuan sebagai lembaga manager ,profesional administrasi dan tehni	80%		0		#DIV/0!	50%		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentase partisipasi perempuan yang mendapatkan pendampingan	60%		0		#DIV/0!	45%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Kelembagaan PUG Yang Aktif	40%		0		#DIV/0!	30%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	13 Lembaga		0		#DIV/0!	10 Lembaga		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Yang Mendapat Penguatan Kapsaitas Layanan Pemberdayaan Perempuan	26 Orang		0		#DIV/0!	20 orang		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang		0		#DIV/0!	200 Orang		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (perjumlah penduduk perempuan)	3%		3%	0	-	3%		
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%		100%	100%	100	100%		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan Yang mendapatkan Perlindungan	100%		100%	100%	100	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang		100	100	100	100 Orang		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang		15000%	150	100	150 Orang		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan Korban kekerasan Yang dilayani	100%		0		#DIV/0!	100%		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan perempuan Korban kekerasan	1 Lembaga		0		#DIV/0!	1 Lembaga		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%		0		#DIV/0!	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga layanan Perlindungan Perempuan (pusat Pelayanan terpadu) Yang aktif	100%		0		#DIV/0!	100%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Jenis Sarana Prasarana (Shelter/Rumah Penampungan)		0		#DIV/0!	0		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan	30 Orang		0		#DIV/0!	30 Orang		
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Kebutuhan Spesifik Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	25%		0		#DIV/0!	20%		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	100%		100%		-	100%		
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	1.80%		0.16	0.16	#VALUE!	1.75%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Kualitas Kesertaan Gender dan Hak Anak	100%		100%		-	100%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	3 Kegiatan		3	3	100	3 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan TP PKK	9 Kegiatan		9	9	100	9 Kegiatan		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	75%		0		#DIV/0!	75%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	13 Lembaga		0		#DIV/0!	10 Lembaga		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan	30 Orang		0		#DIV/0!	30 Orang		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak	100%		0		#DIV/0!	100%		
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan layanan Bagi Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	1 Kegiatan		0		#DIV/0!	1 Kegiatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase data dan Informasi Gender dan Anak di Daerah	25%		0		#DIV/0!	25%		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perangkat Daerah Yang memiliki Sistem data Gender dan anak	25%		0		#DIV/0!	25%		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan Informasi	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan data Gender dan Anak	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Madya		Inisiasi		#VALUE!	Inisiasi		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Forum Anak Yang terbentuk (Kab/kota,kecamatan dan pedesaan)	100%		100%	100%	100	100%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama ,Tingkat Madya, Tingkat Nindya,	1 Penghargaan Nindya		0		#DIV/0!	1 Penghargaan Pratama		
		jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Menuju Kota layak anak	3 Orang		100%		-	3 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Provinsi/Kota Yang Terbentuk dan Terlibat Proses Pembagunan	20 Forum Anak		0		#DIV/0!	20 Forum Anak		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup anak	50%		80%		-	50%		
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Pemenuhan Hak Anak	0				#DIV/0!	2 Lembaga Layanan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Delegasi forum anak daerah ketingkat provinsi dan nasional	3 Orang		1	1	100	3 Orang		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Kota Yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) /Jumlah kabupaten Menuju Layak Anak	60 Orang		0		#DIV/0!	60 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Forum Anak	50 Orang		0		#DIV/0!	50 Orang		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pemerintah	100%		100%	100%	100	100%		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani	100%		100%	100%	100	100%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Kasus Kekerasanyang terlayani	100%		0%		#DIV/0!	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi	200 Orang		0		#DIV/0!	200 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Anak Yang berhadapan dengan Hukum	100%		0%		#DIV/0!	100%		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase anak Korban Kekerasan Yang Terlaporkan Mendapat Layanan Sesuai Standar	100%				#DIV/0!	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	10 Kali	0			#DIV/0!	4 Kali		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 Anak	0			#DIV/0!	30 Anak		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perindungan anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus	1 Lembaga	0			#DIV/0!	1 Lembaga		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Penyedia layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang sesuai dengan standar	80%	0	80%		-	80%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan KPPA Terhadap Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak	1 Jenis Sarana Prasarana (Shelter/Rumah Penampungan)		0		#DIV/0!	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang		30	30	100	50 Orang		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak / Pelayanan Terpadu Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang di Fasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	1 Lembaga		0		#DIV/0!	1 Lembaga		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (angka Kelahiran Total)	80%		2.3	2.3	#VALUE!	80%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	80%		80%		-	80%		
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Pngendalian Penduduk	1 Kegiatan		0		#DIV/0!	1 Kegiatan		
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK	1 Dokumen		0		#DIV/0!	0		
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Pendataan Indeks Pembagunan	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah peserta Sosialisasi	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non formal	Jumlah peserta Sosialalisasi	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan	30 orang		0		#DIV/0!	30 orang		
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan	25 orang		0		#DIV/0!	25 orang		
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta Sosialalisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Kependudukan formal dan non Formal	50 orang		0		#DIV/0!	50 orang		
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Kelompok binaan yang mendapatkan pendidikan kependudukan	50 orang		0		#DIV/0!	50 orang		
	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak kependudukan	1 Kegiatan		0		#DIV/0!	1 Kegiatan		
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan evaluasi	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat /forum Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	250 Orang		250 Orang		#VALUE!	250 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk	100%		50%	40%	80	50%		
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen Parameter dan Kependudukan	1 Dokumen		0		#DIV/0!	1 Dokumen		
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data dan informasi Kependudukan	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan KB dan Pembagunan Keluarga	1 Dokumen		0		#DIV/0!	1 Dokumen		
	Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat Daerah	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah peserta pertemuan	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah Dokumen Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen		0		#DIV/0!	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah data kependudukan dikampung KB	21 Kampung KB		0		#DIV/0!	21 Kampung KB		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Peserta sosialisasi	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pemukthakiran Data Keluarga	1 Kegiatan		0		#DIV/0!	1 Kegiatan		
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data Keluarga	1 Laporan		1	1	100	1 Laporan		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Laporan		0		#DIV/0!	1 Laporan		
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Petugas pencatatan dan pelaporan program KKBPK	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence RatmCPR)	87%		70.24%	50	#VALUE!	87%		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet ned)	13%		17,47%		-	13%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS mendapatkan KIE	80%		75%	75%	100	75%		
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK kepada Mirta Kerja dan Stakeholders	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
		Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK kepada Mitra Kerja	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Media KIE yang dipublikasi	0		50%	50%	100	0		
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah distribusi sarana KIE di balai penyuluh KB dan di Institusi Masyarakat Padesaan (IMP)	4 Media				#DIV/0!	4 Media		
		Jumlah distribusi sarana KIE di Institusi Masyarakat Padesaan (IMP)	100%				#DIV/0!	100%		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah MOU dengan Media Informasi, Leaflet dan Brosur	0		0		#DIV/0!	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Informasi Penggunaan Media dalam Pencitraan KKBPK	0		0		#DIV/0!			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Peserta	200 orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Operasional Balai Penyuluh KB	7 balai		7	7	100	7 balai		
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta	1 keg		0		#DIV/0!	1 keg		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase Petugas Penyuluh/Petugas Lapangan	100%		100%	100%	100	100%		
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah peserta IMP	1 keg		0		#DIV/0!	1 keg		
		Jumlah Peserta Lini lapangan	1 keg		0		#DIV/0!	1 keg		
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Kerja PKB/PLKB	341 orang		0		#DIV/0!	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pelatihan			0		#DIV/0!	1 keg		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader	341 Orang		341	341	100	341 Orang		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan keluarga Berencana	75%		75%		-	75%		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi	10 Fakes		18	18	100	10 Fakes		
		Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	18 Kali		0		#DIV/0!	18 Kali		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	10 Fakes		18	18	100	10 Fakes		
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah petugas pengelola logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang berkompeten	30 Orang		0		#DIV/0!	30 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Kesertaan Pengguna MKJP	87%		0%		#DIV/0!	87%		
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	0		0%		#DIV/0!	0%		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen Rencana Distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	1 Dok		0		#DIV/0!	1 Dok		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia	0		0		#DIV/0!	0%		
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Pembinaan Peserta KB yang sudah terlayani	50%		0		#DIV/0!	45%		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang akan dilakukan pembinaan KB dan Kespro	10 Faskes		0		#DIV/0!	10 Faskes		
		Jumlah Jaringan dan jejaring Faskes yang akan dilakukan pembinaan KB dan Kespro	81 Pustu		0		#DIV/0!	81 Pustu		
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase faskes yang melayani promosi dan konseling kespro	0		0		#DIV/0!	0%		
		Persentase kelompok kegiatan yang melayani promosi dan konseling kespro	0		0		#DIV/0!	0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang bersertifikat kompetensi	1 Kali		0		#DIV/0!	1 Kali		
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB oleh mobil operasional	0		0		#DIV/0!	0		
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah konseling KB Pasca Persalinan	200 orang		0		#DIV/0!	200 orang		
		Jmlah konseling KB Pasca Keguguran	100 Orang		0		#DIV/0!	100 Orang		
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Kesertaan KB pria	10 Orang		0		#DIV/0!	10 Orang		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase Peningkatan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	100%		100%	75%	75	100%		
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Petugas PLKB Gaya Baru, PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader Pendata	356 Orang		365	365	100	356 Orang		
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	jumlah peserta pertemuan Integrasi Pembangunan di kampung KB	150 Orang		0		#DIV/0!	150 Orang		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Presentase Program KKBPK di Kampung KB	100%		100%		-	100%		
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Peserta Pertemuan Pembinaan Terpadu Kampung KB	100%		0		#DIV/0!	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	100%		100%		-	100%		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga	150 Orang		100%		-	150 Orang		
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dibentuk	100%				#DIV/0!	100%		
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana poktan	100%		0		#DIV/0!	100%		
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Peserta orientasi dan pelatihan Poktan	20 Poktan		0		#DIV/0!	20 Poktan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Peserta pelatihan Kader	20 Paket		0		#DIV/0!	20 Paket		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Operasional kader pengelola dan pelaksana	25%		0		#DIV/0!	25%		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Presentase Balai penyuluh KB dalam kondisi baik dan kecukupan sarana petugas lapangan	150 Orang		100%		-	150 Orang		
		Presentase Kecukupan sarana petugas lapangan	150 Orang		100%		-	150 Orang		
		presentase peserta KB yang dilayani	20 Poktan		100%		-	20 Poktan		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%		0		#DIV/0!	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%		0		#DIV/0!	100%		
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah SK/perbub/perda dalam mendukung IPK	100 orang		0		#DIV/0!	100 orang		
	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Penyediaan Materi IPK	100 orang		0		#DIV/0!	100 orang		
	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Peserta	0		0		#DIV/0!	0		
	Sosialisasi IPK	Jumlah Peserta sosialisasi	7 paket		0		#DIV/0!	0		
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Presentase Pencapaian Evaluasi IPK	150 Orang		0		#DIV/0!	0		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Peningkatan Ormas di wilayah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Keluarga	100 orang		50%		-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah SK/perbub/perda	20%		0		#DIV/0!	20%		
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kapasitas Lembaga	50%		1 Lembaga		#VALUE!	50%		
		Jumlah Kelompok	1 Dok		40 Kelompok		#VALUE!	0		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta pelatihan	50 orang		0		#DIV/0!	50 orang		
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta	100 orang		0		#DIV/0!	100 orang		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PPKBPPPA

Analisis kinerja pelayanan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bolaang mongondow selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat terus berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan. Dengan mengacu pada prinsip Good Governance, Clean Governance dan mengarah ke Open Governance, Kinerja pelayanan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dapat di ukur dengan indikator kinerja kunci sebagaimana tertera pada indikator kinerja kunci yang telah di tetapkan Perangkat Daerah.

Analisis lingkungan internal bertujuan mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) dengan pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis (faktor dominan). Analisis lingkungan internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek yang ada pada Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Aspek-aspek internal tersebut dari aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya. Adapun faktor strategis internal adalah sebagai berikut :

I. Kekuatan :

- a. Terbitnya regulasi daerah yang mendukung terbentuknya Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Perbup No. 6 Tahun 2011).
- b. Tingkat pendidikan sumberdaya aparatur Dinas PP, KB, PP dan PA (pejabat struktural) cukup memadai Tingkat pendidikan sumberdaya aparatur Dinas PP, KB, PP dan PA (pejabat struktural) cukup memadai
- c. Terbentuknya lembaga SKPD- Dinas PP, KB, PP dan PA serta UPTDnya ditiap kecamatan'
- d. Adanya dukungan sumber dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- e. Sumber daya alam dan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup tinggi untuk mendukung upaya Pelayanan KB,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesetaraan Gender.

II. Kelemahan :

- a. Jumlah sumber daya aparatur (PNS) masih sangat kurang dari jumlah kebutuhan pegawai.
- b. Sumber daya aparatur yang ada belum terampil dalam Pelayanan di lapangan.
- c. Sebagai lembaga yang baru terbentuk, sarana dan prasarana perkantoran dan pelaksanaan pelayanan sangat kurang memadai.
- d. Sistem kelembagaan dalam pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA belum mantap.
- e. Masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya sistem Pelayanan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesetaraan Gender dan Aturan Hukum UU yang berlaku.

1. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan mengetahui berbagai kemungkinan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan eksternal dengan memberikan pembobotan dan *rating* pada setiap faktor strategis (faktor dominan). Analisis lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari berbagai aspek yang ada dari lingkungan luar yang berpengaruh terhadap upaya Pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan mencapai kinerja yang optimal. Adapun faktor strategis eksternal adalah sebagai berikut :

I. Peluang

- a. Diberlakukannya regulasi dari pusat tentang urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (UU No.23/2014, Pedoman dari Kepala BKKBN, SE Mendagri No.120/253/SJ tgl 16 Januari 2015, dll)
- b. Adanya dukungan dari Pemerintah Sulut (Perwakilan BKKBN Prov. Sulut).
- c. Adanya dukungan pendanaan dan manajemen dari pemerintah pusat khususnya .
- d. Adanya peluang pelibatan/kerjasama Kemitraan, lintas Sektor dan Masyarakat.(Ormas dan Tokoh Masyarakat).

- e. Adanya perkembangan iptek dan informasi dalam sistem pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA serta kesetaraan gender..

II. Ancaman

- a. Promosi dan Edukasi tentang KIE KB,PP dan PA serta kesetaraan Gender sangat kurang,.
- b. KIE Hukum UU PP dan Anak serta kesetaraan Gender belum disosialisasikan dengan baik.
- c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.
- d. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam upaya pelayanan KB,PP dan Anak masih sangat tinggi.
- e. Kemiskinan dan Pernikahan Dini.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Dalam rangka menjamin keberhasilan Dinas PP, KB, PP dan PA di wilayahnya, maka perlu ditetapkan rumusan strategi sebagai dasar faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

- (1) Membangun kapasitas kelembagaan dan perangkatnya.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KB,PP dan PA
- (3) Optimalisasi sumber-sumber pendanaan.
- (4) Memberdayakan masyarakat melalui UPPKS
- (5) Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek pengurangan resiko Pertambahan Penduduk.
- (6) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pelayanan KB,PP dan Anak serta kesetaraan Gender.
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan operasional.
- (8) Peningkatan keterlibatan Kemitraan, Lintas Sektor dan lembaga masyarakat.
- (9) Pengintegrasian muatan ilmu pengetahuan KB,PP Dan PA dalam muatan pendidikan.
- (10) Pemantapan koordinasi, komando Pelayanan KB,PP dan PA.
- (11) Pengentasan Kemiskinan melalui UPPKS.

Uraian mengenai kinerja pelayanan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PPKBPPPA

Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100	100	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			0.000645	0.000647	0.00055	0.443038				
Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)			1.6	1.7	1.7	1.6		1.7	1.7	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			54.3	54.05	54.07	74.01582				
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)			20.06	19.07	18.09	11.84695				
Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)				62.9	62.10					
Indeks Perlindungan Anak				56	57					

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PPKBPPPA

Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan sesuai tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku maka ada dua mandat yang menjadi tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yakni : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahtraan sosial dan layanan dasar dibidang keluarga berencana, dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Belum optimalnya koordinasi perencanaan, Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak, Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan mayarakat, Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi.

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan pendanaan dan manajemen dari pemerintah pusat khususnya	Ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam upaya pelayanan KB,PP dan Anak masih sangat tinggi.
Adanya peluang pelibatan/kerjasama Kemitraan,lintas Sektor dan Masyarakat.(Ormas dan Tokoh Masyarakat).	Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.

Peluang	Tantangan
Adanya perkembangan iptek dan informasi dalam sistem pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA serta kesetaraan gender	Promosi dan Edukasi tentang KIE KB,PP dan PA serta kesetaraan Gender sangat kurang.
Diberlakukannya regulasi dari pusat tentang urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (UU No.23/2014, Pedoman dari Kepala BKKBN, SE Mendagri No.120/253/SJ tgl 16 Januari 2015, dll)	Promosi dan Edukasi tentang KIE KB,PP dan PA serta kesetaraan Gender sangat kurang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain sebagai berikut :
 - a. Rencana kebutuhan Rumah Aman
 - b. Pembuatan MOU dengan Pihak terkait dalam kasus kekerasan terhadap anak
 - c. Sinkronisasi tentang Kualitas hidup anak tingkat daerah
 - d. Pembentukan UPTD PPPA

3. Melaksanakan Program Pemerintah Pusat dalam hal ini tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.7 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Layak Anak Indek Pemberdayaan Gender	Bolsel	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafficking	100 Persen	342,019,755	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Layak Anak Indek Pemberdayaan Gender	Bolsel	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafficking	100 Persen	359,120,743	
2	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot	Bolsel	Presentase PD Yang Melaksanakan PPRG	80 Persen	146,326,005	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot	Bolsel	Presentase PD Yang Melaksanakan PPRG	80 Persen	153,642,305	
3	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif ,presentase perempuan sebagai lembbaga manager ,profesional administrasi dan tehni	75 Persen	82,687,500	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif ,presentase perempuan sebagai lembbaga manager ,profesional administrasi dan tehni	80 Persen	86,821,875	
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Kelembagaan PUG Yang Aktif	35 Persen	113,006,250	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Kelembagaan PUG Yang Aktif	35 Persen	118,656,563	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Bolsel	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Rasio kekerasan terhadap jumlah	100 Persen 3 Kasus	1,613,489,026 0	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Bolsel	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Rasio kekerasan terhadap jumlah	100 Persen	1,644,163,478	
6	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Bolsel	Presentase Perempuan perempuan yang mendapat perlindungan	100 Persen	73,736,526	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Bolsel	Presentase Perempuan perempuan yang mendapat perlindungan	100 Persen	77,423,353	
7	Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagan kabupaten/kota	Bolsel	Presentase Perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 Persen	77,175,000	Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagan kabupaten/kota	Bolsel	Presentase Perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 Persen	81,033,750	
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Lembaga layanan Perlindungan Perempuan (pusat Pelayanan terpadu) Yang aktif	80 Persen	1,462,577,500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Lembaga layanan Perlindungan Perempuan (pusat Pelayanan terpadu) Yang aktif	80 Persen	1,485,706,375	
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Bolsel	Persentase ARG padabelanja langsung APBD(%) Rasio KDR	1.75 Persen 100 Persen	643,807,500	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Bolsel	Persentase ARG padabelanja langsung APBD(%) Rasio KDR	1.80 Persen	675,997,875	
10	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Peningkatan Kualitas Kesertaan Gender dan Hak Anak	100 Persen	485,598,750	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Peningkatan Kualitas Kesertaan Gender dan Hak Anak	100 Persen	509,878,688	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Persentase PenyediaanLayanan dalamMewujudkan KG danHak Anak	75 Persen	123,480,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Persentase PenyediaanLayanan dalamMewujudkan KG danHak Anak	75 Persen	129,654,000	
12	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak	100 Persen	36,465,188	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak	100 Persen	36,465,188	
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Bolsel	Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak	100 Persen	54,408,375	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Bolsel	Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak	100 Persen	54,408,375	
14	engumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Perangkat Daerah Yang memiliki Sistem data Gender dan anak	25 Persen	54,408,375	engumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Perangkat Daerah Yang memiliki Sistem data Gender dan anak	25 Persen	54,408,375	
15	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Bolsel	Cakupan pemenuhan hak anak	100 Persen	340,518,004	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Bolsel	Cakupan pemenuhan hak anak	100 Persen	303,826,079	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
16	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Forum Anak Yang terbentuk (Kab/kota,kecamatan dan pedesaan)	100 Persen	86,161,504	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Forum Anak Yang terbentuk (Kab/kota,kecamatan dan pedesaan)	100 Persen	90,469,579	
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase lembaga layanan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup anak	50 Persen	254,356,500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase lembaga layanan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup anak	50 Persen	213,356,500	
18	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Bolsel	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pemerintah	100 Persen	1,917,206,958	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Bolsel	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pemerintah	100 Persen	1,989,329,087	
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani	100 Persen	474,824,373	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani	100 Persen	474,827,373	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
20	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Anak Yang berhadapan dengan Hukum	100 Persen	284,075,085	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Anak Yang berhadapan dengan Hukum	100 Persen	298,278,839	
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase lembaga Penyedia layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang sesuai dengan standar	80 Persen	1,158,307,500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase lembaga Penyedia layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang sesuai dengan standar	80 Persen	1,217,222,875	
22	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Bolsel	Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	80 Persen	687,562,943	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Bolsel	Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	80 Persen	720,041,090	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
23	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk	50 Persen	1,080,450,034	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk	50 Persen	1,134,472,535	
24	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Bolsel	Jumlah PUS mendapatkan KIE	80 Persen	1,387,008,245	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Bolsel	Jumlah PUS mendapatkan KIE	80 Persen	1,456,358,657	
25	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Bolsel	Presentase Petugas Penyuluh/Petugas Lapangan	100 Persen	492,584,600	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Bolsel	Presentase Petugas Penyuluh/Petugas Lapangan	100 Persen	515,088,830	
26	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Pelayanan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan keluarga Berencana	75 Persen	563,569,188	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Bolsel	Presentase Pelayanan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan keluarga Berencana	75 Persen	591,747,647	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
27	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Bolsel	Presentase Peningkatan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	100 Persen	1,308,906,288	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Bolsel	Presentase Peningkatan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	100 Persen	1,371,101,602	
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Bolsel	Indeks pembangunan keluarga	100 Persen	711,788,259	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Bolsel	Indeks pembangunan keluarga	100 Persen	747,377,672	
29	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bolsel	Presentase pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga	100 Persen	583,032,009	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bolsel	Presentase pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga	100 Persen	612,183,609	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
30	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bolsel	Presentase Peningkatan Ormas di wilayah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Keluarga	50 Persen	128,756,250	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bolsel	Presentase Peningkatan Ormas di wilayah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Keluarga	50 Persen	135,194,063	
31	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	100 Persen	14,883,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	100 Persen	15,627,938	
32	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	100 Persen	2,322,213,297	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	100 Persen	2,438,323,962	
33	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100 Persen	56,955,150	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100 Persen	59,802,908	
34	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	4 Persen	153,503,399	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bolsel	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	4 Persen	161,178,569	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
35	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	323,468,823	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	332,142,265	
36	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel	Jumlah BMD yang diadakan	8 Unit	4,000,070,250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel	Jumlah BMD yang diadakan	8 Unit	4,007,962,313	
37	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen	359,767,890	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen	365,491,285	
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen	866,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen	866,100,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.8 berikut:

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow selatan		setiap ada kasus yang dilaporkan	Usulan Musrembang Kecamatan
2	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow selatan		7 Kecamatan	Usulan Musrembang Kecamatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah “*Meningkatkan Produktivitas Untuk Transpormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”.

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah

- 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- 7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

dengan sasaran dan fokus antara lain :

Tabel 3.1
Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2026
1	Percepatan penghapusan kemiskina ekstrem	a. Sistem Jaminan Sosial b. Modernisasi Pertanian c. Pemerataan Pembangunan
2	Peningkatan kualitas SDM; Kesehtan dan Pendidikan	a. Sistem Kesehatan b. Pendidikan (sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter
3	Penanggulangan Pengangguran disertai peningkatan desent job	a. Penyediaan Lapangan Usaha
4	Mendorong pemulihan dunia usaha	a. Revitalisasi Pariwisata b. Pengembangan UMKM
5	Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan	a. Industrialisasi b. Riset dan Inovasi

NO	Sasaran RKP	Fokus RKP 2026
6	Pembangunan rendah karbon dan respon terhadap perubahan iklim	a. Ekonomi Rendah Karbon b. Transisi Ekonomi
7	Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain: air bersih dan sanitasi	a. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi b. Infrastruktur Digita c. Infrastruktur Konektivitas
8	Pembangunan Ibukota Nusantara	a. Fasilitas Dasar IKN

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan pada sasaran 2 (dua) yaitu Peningkatan kualitas SDM Kesehtan dan Pendidikan anatra lain system Kesehatan dan Pendidikan (sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh PPKBPPPA adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko;
dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan perempuan
 - b. Keluarga berencana
 - c. Perlindungan anak
 - d. Pengendalian penduduk
2. Program Penanganan Darurat kekerasan anak dan perempuan kegiatan :
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- e. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- f. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas pengendalian penduduk, keluarga
berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2026
1	a) Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional b) Mengatur laju pertumbuhan penduduk c) Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja d) Meningkatkan PSM dalam Pelayanan KB e) Meningkatkan kemandirian dan peran serta Perempuan dalam pemberdayaan keluarga f) Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak g) Mewujudkan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien 2. Meningkatnya kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan public 3. Meningkatkan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wabita Usia Subur (MUS) 4. Remaja wanita usia subur (Wus) 5. Pasangan Usia Subur 6. Masyarakat memiliki kemandirian Dalam keluarga 7. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan 8. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Cakupan Pengendalian penduduk keluarga berencana	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak adalah sekumpulan rencana kerja Badan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu dalam pengendalian penduduk dalam ber KB dan pencegahan

kekerasan terhadap anak dan perempuan

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan 7 program dan 16 Kegiatan serta 22 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin

Tabel 3.4 (T-C-32)

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence RatmCPR)		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafficking		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Presentase data dan Informasi Gender dan Anak di Daerah		

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Presentase Forum Anak Yang terbentuk		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			

3.4 Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169.

Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga Prinsip Pelaksanaan SDG's:

1. Universality – SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang
2. Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
3. No One Left Behind / Tidak Meninggalkan Satu Orangpun
 - a). Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan Pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan
 - b). Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan
 - c). Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup. Secara rinci SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 target.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Tabel 4.1 T-C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

KODE										KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.016.463.370,00	DAK PPPA			1.076.414.879,00	
	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				17.271.639,00				17.271.639,00	
	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		40.50	17.271.639,00			41	17.271.639,00	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		13.25				13.50		
	2.08.02.2.01 - Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				7.676.284,00				7.676.284,00	
	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	jumlah Perangkat Daerahkab/kota		5	7.676.284,00			5	7.676.284,00	

KODE										KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	2027	PRAKIRAAN MAJU TAHUN	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	yang mendapatkan pendampingan								
		Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi		1				1		
		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		2				2		
		jumlah SDM Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek								
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)		5				5		
	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	
	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi		1	1.919.071,00			1	1.919.071,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	
	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerahkab/kota yang mendapatkan pendampingan		5	1.919.071,00			5	1.919.071,00	
	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	
	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		2	1.919.071,00			2	1.919.071,00	
	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)		5	1.919.071,00			5	1.919.071,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				-				-	
	terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek			-				-	
	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				9.595.355,00				9.595.355,00	
	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan		5	9.595.355,00			5	9.595.355,00	
		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		1				1		

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
		Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		4				4		
		Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi		1				1		
		jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek		20				25		
	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	
	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan		5	1.919.071,00			5	1.919.071,00	
	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		4	1.919.071,00			4	1.919.071,00	
	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				1.919.071,00				1.919.071,00	
	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		1	1.919.071,00			1	1.919.071,00	
	2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				1.919.071,00				1.919.071,00	
	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek		20	1.919.071,00			25	1.919.071,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08.02.2.03.0011 - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.				1.919.071,00				1.919.071,00	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi		1	1.919.071,00			1	1.919.071,00	
	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				69.786.824,00				73.974.031,00	
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		90	69.786.824,00			90	73.974.031,00	

KODE										KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	2027	PRAKIRAAN MAJU TAHUN	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				23.262.275,00				24.658.010,00	
	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		1	23.262.275,00			1	24.658.010,00	
		Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		2				2		
		Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi		1				1		
		Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		25				30		
		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi,		1				1		

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
		masyarakat, serta Kab/Kota								
	2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				4.652.455,00				4.931.602,00	
	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		1	4.652.455,00			1	4.931.602,00	
	2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				4.652.455,00				4.931.602,00	
	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		2	4.652.455,00			2	4.931.602,00	
	2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				4.652.455,00				4.931.602,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		25	4.652.455,00			30	4.931.602,00	
	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				4.652.455,00				4.931.602,00	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota		1	4.652.455,00			1	4.931.602,00	
	2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				4.652.455,00				4.931.602,00	
	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi		1	4.652.455,00			1	4.931.602,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				23.262.274,00				24.658.011,00	
	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota		20	23.262.274,00			20	24.658.011,00	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota		20				20		
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		20				20		
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota		20				20		

KODE										KET	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			LOKASI								
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		20				20			
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota		20				20			
		Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota&		20				20			
	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				3.323.182,00				3.522.573,00		
	&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota		20	3.323.182,00			20	3.522.573,00		

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3.323.182,00				3.522.573,00	
	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		20	3.323.182,00			20	3.522.573,00	
	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3.323.182,00				3.522.573,00	
	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota		20	3.323.182,00			20	3.522.573,00	
	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3.323.182,00				3.522.573,00	

KODE			RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)					CATATAN PENTING			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
			LOKASI							
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		20	3.323.182,00			20	3.522.573,00	
	2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				3.323.182,00				3.522.573,00	

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Dinas PP, KB, PP dan PA. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih yang dikenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Dinas PP, KB, PP dan PA selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas PP, KB, PP dan PA untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut.

dikemukakan indikator kinerja Dinas PP, KB, PP dan PA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Demikian Rencana kerja Tahun 2026 Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun, sebagai penjabaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kedinasan dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan. Kiranya ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman arah kebijakan .

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

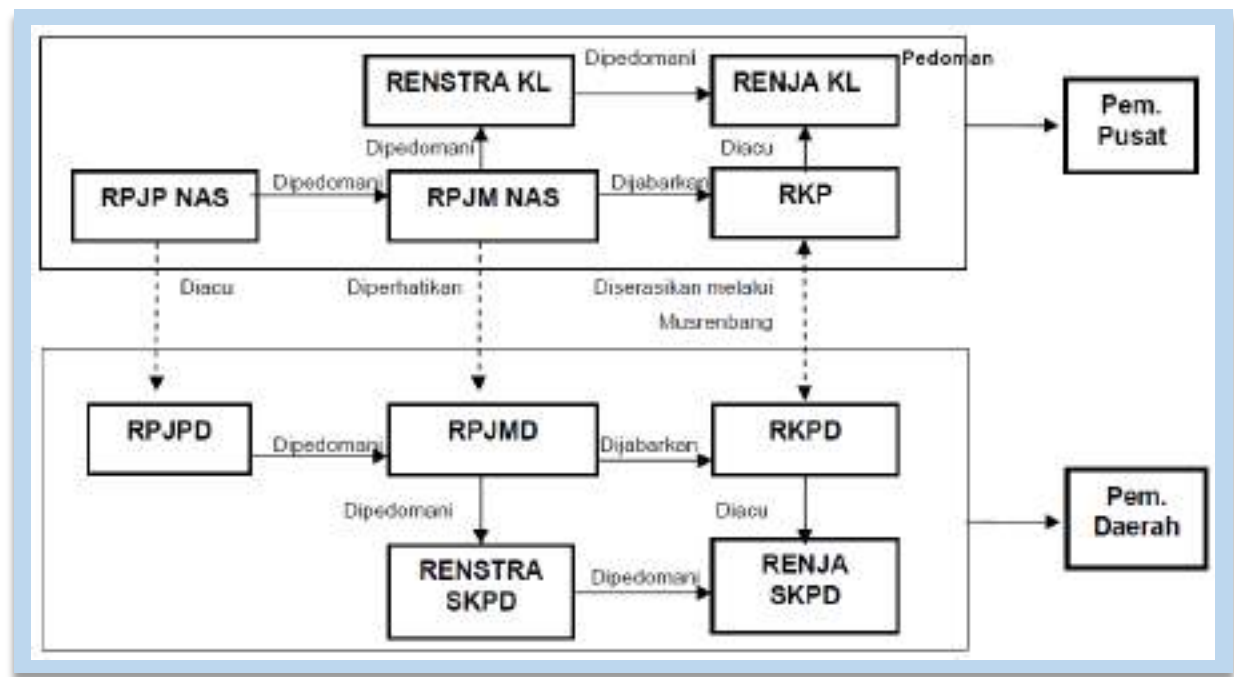
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan menyusun Dinas Perhubungan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Perhubungan Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2029.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
 22. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Bidang Perhubungan;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Dinas Perhubungan;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan telah sesuai
b	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi telah terlaksana
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
a	Kegi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor telah sesuai yang direncanakan
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan telah sesuai peruntukannya
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara sesuai dan telah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara dengan baik
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang di adakan sesuai perencanaan
-	Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	
a	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Tenaga Operator Kapal telah sesuai
-	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
a	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalulintas	Jumlah perlengkapan jalan yang di adakan sesuai perencanaan
-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
a	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pengendali dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 Daerah Kab/Kota telah sesuai

2. **Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:**

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya pergeseran anggaran

b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belum adanya jadwal Diklat dari kementerian Perhubungan RI sebagai pelaksana kegiatan
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya pergeseran anggaran

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024**

Sasaran SKPD Tahunan :

[illegible]

2.15.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	12	1.502.102.17 3	0	0	12	1.502.102.17 3	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	12	0	100	0
		Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang)	16		0		16		16		0		0		0		16		16		100	
2.15.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19 2	1.492.037.17 3	0	0	19 2	1.492.037.17 3	48	0	48	0	48	0	48	0	192	0	192	0	100	0
2.15.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10 0	10.065.000	0	0	10 0	10.065.000	24	0	24	0	24	0	28	0	100	0	100	0	100	0
2.15.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)	2	14.025.000	0	0	2	14.025.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0

		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	12		0		12		3		3		3		3		12		12		100					
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	14.025.000	0	0	2	14.025.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0				
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib (Dokumen)	3				3															0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen)	2				2															0	0	0	0	0
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	465.683.300	0	0	100	465.683.300	24	0	24	0	24	0	28	0	100	0	100	0	100	0				
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	4.665.200	0	0	100	4.665.200	24	0	24	0	24	0	28	0	100	0	100	0	100	0				
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	970.000	0	0	20	970.000	5	0	5	0	5	0	5	0	20	0	20	0	100	0				
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	460.048.100	0	0	100	460.048.100	24	0	24	0	24	0	28	0	100	0	100	0	100	0				
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Persen)	100	192.397.050	0	0	100	192.397.050	24	0	24	0	24	0	28	0	100	0	100	0	100	0				

	2.15.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12.060.000	0	0	3	12.060.000	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	100	0
	2.15.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.15.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	30	180.337.050	0	0	30	180.337.050	6	0	6	0	9	0	9	0	30	0	30	0	100	0
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen)	73	329.420.350	0	0	73	329.420.350	18	0	18	0	18	0	19	0	73	0	73	0	100	0
	2.15.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	40.407.400	0	0	1	40.407.400	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0
	2.15.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	271.980.000	0	0	11	271.980.000	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0	100	0
	2.15.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	17.032.950	0	0	1	17.032.950	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan (Persen)	65	824.413.500	0	0	65	824.413.500	0	0	65	0	0	0	0	0	65	0	65	0	100	0
			Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji KIR (Unit)	500		0	500	125		125	125	125	500	500	100								
			Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang dibangun dalam Kondisi Baik (Persen)	60		0	60	15		15	15	15	60	60	100								
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun (Unit)	10	30.913.500	0	0	10	30.913.500	2	0	2	0	3	0	3	0	10	0	10	0	100	0
			Jumlah Sarana Jalan yang diadakan (Unit)	10		0	10	2		2	3	3	10	10	100								

2.15.02.2.02.000 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	40	30.913.500	0	0	40	30.913.500	0	0	10	0	10	0	10	0	30	0	30	0	75	0
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang dibangun (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Terminal yang di kelola (Unit)	1		0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.15.02.2.03.000 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.2.03.000 9	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Prasarana Balai Pengujian (Unit)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.2.05.000 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.2.05.000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.2.05.000 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasi Lalu Lintas (Kali)	12	12.630.000	0	0	12	12.630.000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	12	0	100	0
		Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Laporan)	1		0	1	0		0	0	1	0	0	1	0	1		0	1	0	100	
2.15.02.2.06.001 4	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	12.630.000	0	0	3	12.630.000	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	100	0
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat (Persen)	0,2	780.870.000	0	0	0,2	780.870.000	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	100	0

		2.15.02.2.09.000 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	780.870.000	0	0	12	780.870.000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	12	0	100	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																								
3		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Layanan Angkutan Penyeberangan (Persen)	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.15.03.2.12.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																								
		JUMLAH				3.328.041.37 3		0		3.328.041.37 3		0		0		0		0		0				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																29,71	0			34,41	0	
		Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perhubungan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Persentase Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan Lalu Lintas dengan target 100%.
2. Pada Indikator Presentasi Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan dengan target 100% tidak terlaksana karena tidak dilakukannya pengujian kendaraan bermotor diakibatkan oleh belum adanya bangunan uji dan alat uji kendaraan bermotor di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perhubungan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

(TC-30)

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang dibangun dalam Kondisi Baik	-	-	-	0,07	1	1	1	1,5	0,007	0,011	0,010	0,011	0,013	10	1,1	1	1,1	0,87
2	Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan Perjumlah Penduduk	-	-	-	-	1.006	1.306	1.306	1.406	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Izin KIR angkutan Umum	-	-	-	601	707	740	794	810	88	106	91	63	16	14,64	15	12,29	8,41	2
4	Persentase sarana dan prasana dan fasilitas LLLAJ yang layak dan memenuhi standar	-	-	-	8,91	14,5	28,22	45,55	67,82	39,69	43,81	43,98	44,84	53,38	445,5	302,1	155,8	98,4	78,7
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	-	-	-	60	60	60	30	30	25	25	25	25	25	41,7	41,7	41,7	83,3	83,3
	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum:	-	-	-															
	JBB s/d 2.5 ton	-	-	-	250	270	290	310	330	371	453	591	606	42	148,4	167,8	203,8	195,5	12,7
	JBB 2.5 s/d 5 ton	-	-	-	60	80	100	120	140	52	55	58	60	2	86,7	68,8	58,0	50,0	1,4
	JBB 5.1 s/d 8 ton	-	-	-	5	7	9	12	14	-	1	1	1	1	0	14,3	11,1	8,3	7,1

	8 Sheet s/d 14 sheet	-	-	-	15	20	25	30	35	-	-	1	1	1	0	0	4,0	3,3	2,9
	Jumlah terminal bus	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	1	1	1	0	100	50	33,3	100
	Jumlah Halte/Shelter	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	0	0

Tabel 2.6

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Uraian dan rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dapat diinventarisir isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
- 2. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Perhubungan.
- 3. Pengorganisasian administrasi perijinan di bidang Perhubungan.
- 4. Perencanaan pembiayaan pada sektor Perhubungan.
- 5. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.
- 6. Pengelolaan sumber daya manusia Perhubungan.
- 7. Pelaksanaan manajemen Perhubungan.
- 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024,menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Permasalahan	Hambatan
Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang disiplin berlalulintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya di kawasan ibu kota	Ketersediaan anggaran dalam rangka kegiatan sosialisai dan penyuluhan

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Perhubngan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Koordinasi lintas sektoral yang masih kurang	Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khusunya Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat dan Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan
Koordinasi lintas sektoral yang masih kurang Tenaga kerja perhubungan dan sumberdaya manusia perhubungan	

Peluang	Tantangan
Cakupan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang luas wilayahnya 3.497,46 km ² terdiri dari wilayah daratan 1.615,86 km ² dan wilayah laut 1.881,60 km ² , dengan panjang garis pantai 294 km yang sebagian besar berada di pesisir pantai, bahkan semua wilayah kecamatan, mulai dari Kecamatan Posigadan sampai ke Pinolosian Timur, semuanya memiliki garis pantai	khususnya sarana dan prasarana di bidang transportasi sangat tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.7 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45 Indeks	5.871.073.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45 Indeks	5.871.073.500,00	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	25.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	15 Paket	59.993.750,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	15 Paket	59.993.750,00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	1.667.991.020,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	1.667.991.020,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bonsel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	610.010.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	610.010.000,00	
			Jumlah Inovasi	1				Jumlah Inovasi	1		
			Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	100%				Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	100%		
			Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	100%				Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	100%		

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50%				Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50%		
			Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	100%				Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	100%		
			Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%				Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	431.522.710,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	431.522.710,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolsel	Jumlah BMD yang diadakan	5 Unit	724.663.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	5 unit	724.663.500,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolsel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	234.992.360,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	234.992.360,00	
		Kab. Bolsel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89		
		Kab. Bolsel	Jumlah Inovasi	1				Jumlah Inovasi	1		

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.096.604.160,00	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.096.604.160,00	
			konektivitas Darat	0,04 %				konektivitas Darat	0,04 %		
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bolsel	Tingkat pemahaman peserta sosialisasi terkait ketertiban lalulintas dan angkutan	90%	125.966.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bolsel	Tingkat pemahaman peserta sosialisasi terkait ketertiban lalulintas dan angkutan	90%	125.966.000,00	
			Persentase penurunan pelanggaran lalulintas dijalan	50%				Persentase penurunan pelanggaran lalulintas dijalan	50%		

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bolssel	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100%	749.924.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bolssel	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100%	749.924.000,00	
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bolssel	Persentase fasilitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	33%	100.530.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bolssel	Persentase fasilitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	33%	100.530.000,00	
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	Persentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat	0.02	820.247.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	Persentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat	0.02	820.247.000,00	
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel			125.966.000,00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				125.966.000,00	
6		Kab. Bolssel			24.994.000,00		Kab. Bolssel			24.994.000,00	
7		Kab. Bolssel	Persentase Alat Pengendali dan Pengaman Jalan yang terpasang di Jalan Kabupaten	19.83%	249.943.160,00		Kab. Bolssel	Persentase Alat Pengendali dan Pengaman Jalan yang terpasang di Jalan Kabupaten	19.83%	249.943.160,00	

III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase fasilitas penyelenggaraan Pelabuhan yang sesuai standart	20%	Rp 250,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase fasilitas penyelenggaraan Pelabuhan yang sesuai standart	20%	Rp 250,000,000	
1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Bolssel	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang terbangun	0	20.296.000,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Bolssel	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	20%	20.296.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Dinas Perhubungan dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke PD terkait usulan tersebut.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab.Bolsel	Konektivitas Darat	10 Unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Porgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
PN7	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Program pengelolaan Pelayaran

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah **“Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing”**.Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Pemenuhan dan penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal;
- c. Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, regulasi, penerapan manajemen resiko, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan SPBE.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target sasaran Tahun 2026
1	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan penunjang perekonomian Daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya Kualitas Keselamatan Transportasi dan Pelayanan Angkutan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan	90

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perhubungan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perhubungan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
- 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
- 3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas

Perhubungan

4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Perhubungan melaksanakan 3 program dan 14 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Tidak adanya usulan pemangku kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Dinas Perhubungan maka T.C-32 tidak perlu kami uraikan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boilaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

- a) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- b) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- c) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan

Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Dengan rincian 2 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan adalah urusan pilihan perhubungan dan 1 program, 9 kegiatan, 18 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.653.017.020,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14.974.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	59.993.750,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peman gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	145.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	24.999.750,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peman gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	34.994.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	610.010.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	535.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.010.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	33.133.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	649.905.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	41.625.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	234.992.360,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	227.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	209.992.360,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	234.980.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	149.977.710,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	-			0.04 Persen	2.096.604.160,00						-	10.355.000.000,00	

		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	-	-	-	-	-	2.096.604.160,00	-	-	-	-	-	-	10.355.000.000,00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRaan MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Evaluasi (Reviu) <i>Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pambangun Infrastuktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	249.943.160,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pambangun Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	499.980.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peman gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	249.944.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peman gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peman gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peman gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	100.530.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Masyarakat	-	6.080.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Masyarakat		6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	51.510.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Dokumen	49.020.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	125.966.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)														
			Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi				12 Laporan	10.848.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				3 Unit	99.960.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	15.158.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				12 Laporan	24.994.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				1 Orang	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Badan Usaha Angkutan Laut	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pamban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Badan Usaha Angkutan Laut		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOME / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Dokumen	20.296.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							5.871.073.500,00							14.432.500.000,00	

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Perhubungan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perhubungan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perhubungan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, di mana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika menyusun Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

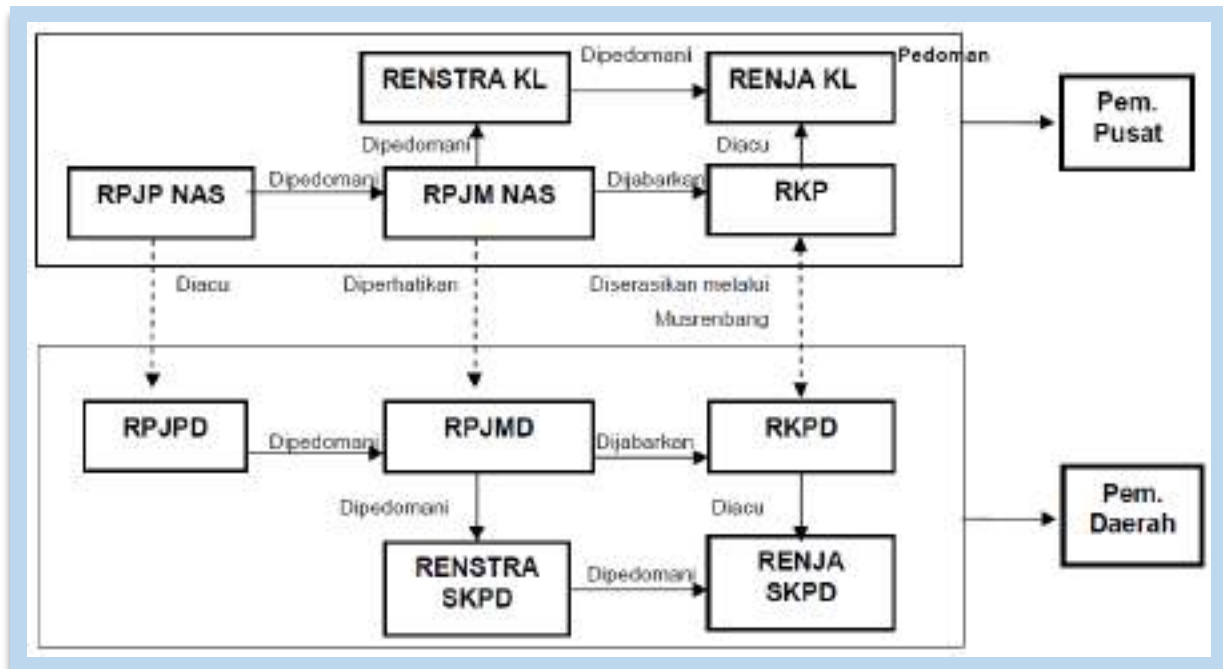
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah
- 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah
- 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan

Capaian Rencana Strategis

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab
2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaran pemerintahan SKPD
3	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaran pemerintahan SKPD
4	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan informasi dan Persandian
5	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersajinya data/informasi yang muktahir dan akurat
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

2. **Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:**

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat akan Informasi Publik	100%	100	100	100		100		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab	100%		100	100	1	100%		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 Konten		12	9	1	100 Konten		
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Media Cetak dan Online yang Kerjasama dengan Pemerintah			50	50	1			
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi	34 Org		2	2	1	33 Org		
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah radio Pemda	33 PPID		1	1	1	33 PPID		

				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok binaan	10 KIP		7	7	1	10 KIP		
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Evaluasi SPBE	100%		2		0	0.55		
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaran pemerintahan SKPD	37 Domain		95%	100%	1	37 Domain		
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah website	18		41	22	1	17		
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaran pemerintahan SKPD	56 SI		95%	100%	1	55 SI		
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Fasilitas Komunikasi dan Informatika	30 Web		1	1	1	27 Web		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah system	50 Org		3	1	0	50 Org		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Evaluasi SPBE	1		2	1,32		1		
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan informasi dan Persandian	1 Titik		95%	100%	1	1 Titik		
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis bidang Persandian	2 Orang		4 Org	0		2 Orang		

				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	80%		100%	100%	1	80%		
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersajinya data/informasi yang muktahir dan akurat	1 Dok		100%	100%	1	1 Dok		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Daerah Kabupaten	1 Kl		1 Dok	1 Dok		1 Kl		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	72		85			71		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%			100%		100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100%		100%	100%	1	100%		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelola keuangan	100%		3 Org	2 Org		100%		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya	100%		100%		0	100%		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola BMD	1 Dok		6 Org	5 Org		1 Dok		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%		95%		0	100%		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45%		10 Org	3 Org		45%		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal dan informal	45%		2 Org	0		45%		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%		100%	100%	1	100%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	5 Unit		5 Buah	4 Unit		5 Unit		

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%		40 Org	19 Org		100%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya	100%		100%	100%	1	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 Unit		1 Unit	1 Unit		3 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 Unit		2 Unit	0		4 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	1 UNIT					1 Unit		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya	3 Unit		100%	100%	1	3 Unit		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit		1 Unit	0		1 Unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	2 Unit					2 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%		100%	100%	1	100%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase alat tulis kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	1 Dok		100%	100%	1	1		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kominfo Dan Informatika Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks e-government / indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kepala Dinas	Kominfo	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi public dalam meningkatkan kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap informadi publik	Kepala Dinas	Kominfo	
3	Meningkatnya kualitas dan penggunaan data statistic sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kepala Dinas	Kominfo	

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			51,72 Poin	71,00 Poin	72,00 Poin	73,00 Poin	51,72 Poin	71,00 Poin	72,00 Poin	73,00 Poin	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			90,54%	100%	100%	100%	90,54%	100%	100%	100%	
	Persentase komunitas/mitrastrategis pemerintah daerahkab yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penurunan penyebaran informasi tidak benar / berita bohong (Hoaks)			0%	10%	10%	10%	0%	10%	10%	10%	
	Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan publik			0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik			0%	80%	80%	80%	0%	80%	80%	80%	
	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik			0%	80%	80%	80%	0%	80%	80%	80%	

[illegible]

	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase PD yang mempengaruhi datanya sesuai siklus jenis data			0%	25%	35%	50%	0%	25%	35%	50%	
	Persentase PD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah			0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
	Persentase PD yang Memiliki portal dan situs web sesuai standar			63%	65%	70%	75%	63%	65%	70%	75%	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi umum dan khusus yang ditetapkan sesuai peraturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kasus Hacking, Craking Sistem Pemda			0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	
	Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Sistem Elektronik Aset Yang Teleh diaudit			20%	25%	30%	45%	20%	25%	30%	45%	
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi			20%	25%	30%	45%	20%	25%	30%	45%	
	Persentase Titik Yang Diamankan			20%	25%	30%	45%	20%	25%	30%	45%	
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			36,57%	36,60%	36,70%	36,80%	36,57%	36,60%	36,70%	36,80%	

2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Implementasi TIK dalam layanan informasi pelayanan publik yang belum maksimal;
2. Koordinasi dan distribusi *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi yang semakin meningkat;
4. Pengelolaan dan pemanfaatan data statistik belum maksimal; dan

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.7 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan InformatikaTahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	2.345.085.725	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	2.345.085.725
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis	85%	2.580.714	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis	85%	2.580.714
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72%				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72%	
			Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya	90%				Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya	90%	
			Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	90%				Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)	90%	
			Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	80%				Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	80%	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25 dokumen	2.580.714	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25 dokumen	2.580.714
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	2.345.085.725	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	2.345.085.725
			Persentase DPA/RKA tepat waktu	100%				Persentase DPA/RKA tepat waktu	100%	
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	22 orang	2.345.085.725	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	22 orang	2.345.085.725
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	10.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	10.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	11.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	11.400.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	11.400.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	11.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	100%	350.953.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	100%	350.953.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	350.953.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	350.953.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	1 Unit	134.371.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	1 Unit	134.371.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	1 Unit	134.371.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	1 Unit	134.371.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	112.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	112.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	30.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	30.200.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah aporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	82.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah aporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	82.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1 unit	39.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1 unit	39.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	100	2.700.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	100	2.700.000.000
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM)	100%	2.700.000.000	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM)	100%	2.700.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /juknis	53 Media	2.700.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /juknis	53 Media	2.700.000.000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks SPBE	2,70	900.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks SPBE	2,70	900.000.000
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain	37 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain	37 Dokumen	50.000.000
	Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa		Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	37 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa		Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	37 Dokumen	50.000.000
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi yang online dan Terintegrasi	56 SI	850.000.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi yang online dan Terintegrasi	56 SI	850.000.000

	Penyelenggaraan jaring intra pemerintah daerah kab/kota		Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	15 perangkat	450.000.000	Penyelenggaraan jaring intra pemerintah daerah kab/kota		Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	15 perangkat	450.000.000
	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 aplikasi	100.000.000	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 aplikasi	100.000.000
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana,proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	20 dokumen	200.000.000	Koordinasi penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana,proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	20 dokumen	200.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan	1	175.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan	1	175.000.000
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Titik Yang Diamankan	1 Titik	150.000.000	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Titik Yang Diamankan	1 Titik	150.000.000
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	50.000.000	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	50.000.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dan persandian	1 pd	50.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dan persandian	1 pd	50.000.000
	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan data dan informasi elektronik	11 PD	10.000.000	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan data dan informasi elektronik	11 PD	10.000.000
	Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah		Jumlah operasional layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	1 kegiatan	25.000.000	Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah		Jumlah operasional layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	1 kegiatan	25.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	100%	49.644.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	100%	49.644.000

	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka	1 Dok	49.644.000	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka	1 Dok	49.644.000
	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Jumlah Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 laporan	49.644.000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Jumlah Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 laporan	49.644.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Dinas Kominfo Dan Informatika dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut.

Tabel 2.8 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada PD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah :

Tujuan :

- a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
- c. Meningkatnya Kualitas dan Penggunaan Data Statistik Sektoral

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera", dan sesuai dengan visi Dinas Komunikasi Dan Informatikayaitu " *Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan sebagai Destinasi Unggulan di Wilayah teluk Tomini berbasis Religi dan budaya* ",

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab, Bolaang Mongondow Selatan tersusun sebagaimana table berikut :
Tabel TC.33

Tabel 3.3 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		IndikatorKinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BOLSEL	72	2.345.085.725	DAU		72	2.345.085.725
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis		85%	2.580.714			85%	2.580.714
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72%				72%	
		Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya		90%				90%	
		Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome)		90%				90%	
		Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai		80%				80%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		25 dokumen	2.580.714			25 dokumen	2.580.714
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi		0%	2.345.085.725			0%	2.345.085.725
		Persentase DPA/RKA tepat waktu		100%				100%	
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%				100%	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan		22 orang	2.345.085.725			22 orang	2.345.085.725
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD		12 Dokumen	10.500.000			12 Dokumen	10.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat		100%	11.400.000			100%	11.400.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah		12 laporan	11.400.000			12 laporan	11.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</i>		100%	350.953.000			100%	350.953.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		50 Laporan	350.953.000			50 Laporan	350.953.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>		1 Unit	134.371.000			1 Unit	134.371.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan		1 Unit	134.371.000			1 Unit	134.371.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	112.200.000			100%	112.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan		1 laporan	30.200.000			1 laporan	30.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	82.000.000			1 laporan	82.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		1 unit	39.000.000			1 unit	39.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	39.000.000			1 Unit	39.000.000

	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	BOLSEL	100	2.700.000.000	DAU		100	2.700.000.000
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM)		100%	2.700.000.000			100%	2.700.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis		53 Media	2.700.000.000			53 Media	2.700.000.000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	BOLSEL	2,70	900.000.000	DAU		2,70	900.000.000
	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain		37 Dokumen	50.000.000			37 Dokumen	50.000.000
	Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa		37 Dokumen	50.000.000			37 Dokumen	50.000.000
	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sistem Informasi yang online dan Terintegrasi		56 SI	850.000.000			56 SI	850.000.000
	Penyelenggaraan jaring intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota		15 perangkat	450.000.000			15 perangkat	450.000.000
	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah		1 aplikasi	100.000.000			1 aplikasi	100.000.000
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur,peta rencana,proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah		20 dokumen	200.000.000			20 dokumen	200.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan	BOLSEL	1	175.000.000	DAU		1	175.000.000
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Titik Yang Diamankan		1 Titik	150.000.000			1 Titik	150.000.000
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik		1 laporan	50.000.000			1 laporan	50.000.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dan persandian		1 pd	50.000.000			1 pd	50.000.000
	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan data dan informasi elektronik		11 PD	10.000.000			11 PD	10.000.000

[illegible]

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang bersifat umum dan menunjang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 Program dan 12 Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 7.361.000.000,00,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 5 kegiatan yaitu :
 - a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 11.400.000,-
 - b. Administrasi Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 115.500.000,-
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.345.085.725,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 400.000.000,-
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 39.000.000,-
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.700.000.000,-
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 850.000.000
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 150.000.000,-

- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp. 25.000.000

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp. 49.644.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika .

Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) PD.

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Oleh karena itu dalam penyusunan Renja Diskopukmtransnaker Tahun 2026 harus selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan turunannya.

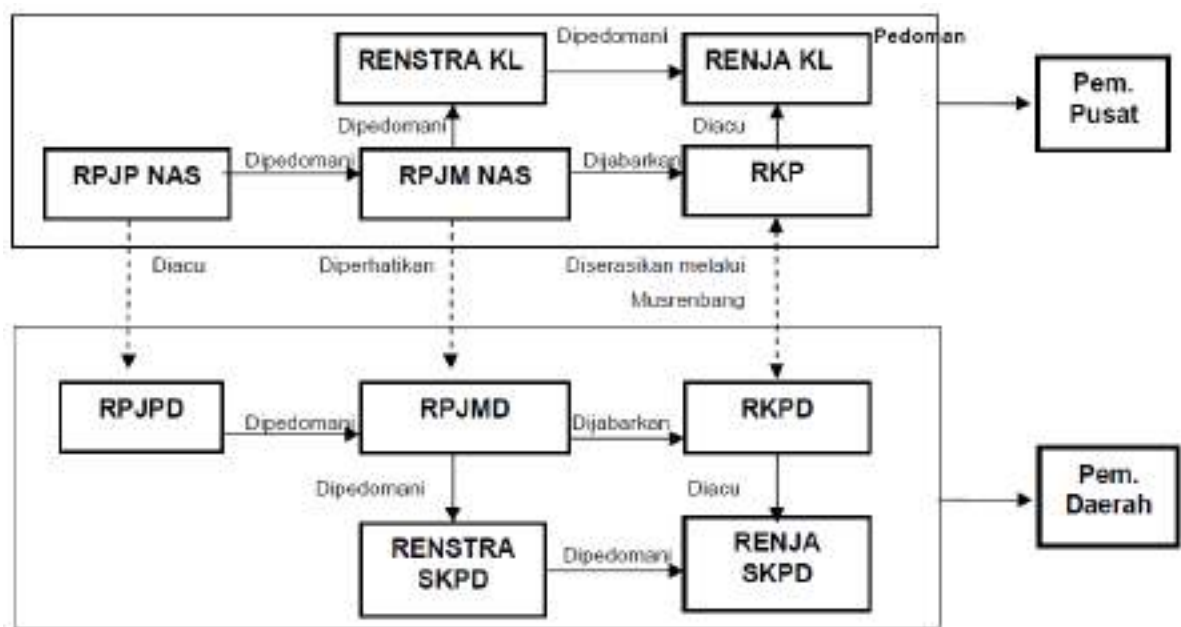
RENJA PD merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskopukmtransnaker secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, yaitu dalam pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti stimulan pemenuhan kebutuhan rumah menuju layak huni didukung dengan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun Renja Diskopukmtransnaker Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Renja Diskopukmtransnaker Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/ kegiatan.

Gambar 1
Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Koperasi Dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. .Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

1. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan KeKoperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja
3. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan KeKoperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pengembangan KeKoperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
6. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISKOUKMTRANSNAKER TAHUN 2024

Bab ini memuat reuiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Tahun 2025 dan perkiraan capaian Tahun 2026, mengacu pada APBD Tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi RENSTRA PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja, serta tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DISKOPUKMTRANSNAKER TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Diskopukmtransnaker Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan dengan melihat indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni RENSTRA Diskopukmtransnaker Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022–2026 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Diskopukmtransnaker juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:)

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm), Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan	Penganggaran dan Jumlah Penerima Bantuan Usaha Mikro

	Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan, Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	
2	Program, pendidikan pelatihan perkoperasian Kegiatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,Akses Pasar, Akses pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Penganggaran dan Jumla Koperasi yan Mendapat Pelatihan
3	Program, Hubungan industrial, Kegiatan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Peserta	Penganngaran dan Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun 2025 disajikan pada table berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha							
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	15 %							
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi									
3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskopukmtransnaker

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021, dapat diketahui bahwa;

1. Pada Indikator Presentase Koperasi berkualitas, dan Presentase Koperasi aktif Merupakan Indikator dari Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
2. Pada Indikator Presentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha, Presentase Pertumbuhan UMKM, Presentase Usaha Mikro, Presentase Usaha Kecil, Presentase Usaha Menengah Merupakan Idikator dari Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing UMKM
3. Pada Idikator Presentase Besaran Pencarri Kerja terdaftar yang ditempatkan dan Tingkat Produktivitas tenaga Kerja Merupakan Idikator dari Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Pada Idikator Jumlah Pencadangan Tanah Kawasan transmigrasi Merupakan Idikator dari sasaran Meningkatkan Pemenuhan Persyaratan Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja tercantum pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2

No	Indikator	SPM/Standar t Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Koperasi berkualitas			50%	10%	12,25%	12,5%	2,17%	25%	12,5%	15%	
2	Presentase Koperasi aktif			15%	16%	17%		2,91%	17,39%	18%	19%	
3.	Presentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha,			60%	60%	65%	54%		22,09%	65%	67%	
4.	Presentase Pertumbuhan UMKM			10	10	10		6,64%	4,64%	11	11	
5.	Presentase Usaha Mikro,			95,05%	96	94,88%			96,62%	97%	97,05%	
6.	Presentase Usaha Kecil,			4,52%	4,59%	4,66%		3,13%	3,02%	4,73%	4,80%	
7.	Presentase Usaha Menengah			0,52%	0,53%	0,53%			0,35%	0,54%	0,55%	
8.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			11%	12%	13%	46,1%			14%	15%	
9.	Tingkat Produktivitas tenaga Kerja			15	15	15	87,4		4,01	16	17	
10	Jumlah Pencadangan Tanah Kawasan transmigrasi			1	1	1	-	1	1	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja

Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki rintangan ataupun hambatan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagai instansi semi pelayanan publik, pasti memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi. Untuk itu diperlukan solusi sebagai pemecahan dari masalah tersebut. Berikut permasalahan dan solusi dari masing – masing bidang yang ada, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada	Menggunakan dan memanfaatkan secara optimal personil ASN membuat Anjab ABK agar penambahan personil bisa tercover
Mindset UMKM untuk maju yang rendah; merasa cukup puas walau hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari hari	Penanaman mental berusaha yang kuat di setiap awal pelatihan/pendampingan usaha Serta Pembuatan Peta Jalan/Rencana Bisnis
Pemasaran produk UMKM yang terbatas, Tingkat penguasaan penggunaan media online untuk pemasaran/promosi produk UMKM masih rendah dan Kualitas produk yang masih kurang	Perluasan pasar dengan penempatan etalase di Pertokoan dan penempatan booth di kampung wisata. Melakukan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kepada UKM melalui pengenalan dan penggunaan sistem promosi dan pemasaran produk melalui media online yang mencakup branding, design dan promotion selain bekerjasama dengan berbagai stake holder seperti platform e-commerce yang sudah ada di Indonesia juga dilakukan pemberdayaan fasilitator e-commerce yang berfungsi selain untuk melakukan pelatihan secara langsung juga melaksanakan pendampingan secara terus menerus kepada UKM
Akses permodalan yang sulit karena tidak adanya agunan dan terkena SLIK OJK	Mencari sumber permodalan yang tidak ada agunan dan BI Checking seperti kredit mekar dari permodalan nasional madani (PNM)
Pelaku UMKM yang tidak bisa mengikuti pembinaan dan sosialisasi karena keterbatasan kuota jumlah	Pelatihan peningkatan kualitas produk dan kemasan
Pada Pelaksanaan Pameran, baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Pelaksanaan pameran kurang optimal karena terdapat kelemahan pada produk-produk UMKM Kab Bolselsehingga produk UMKM kurang diminati	Solusi yang dapat diberikan oleh Diskopukmtransnaker selaku Pembina UMKM harus berusaha memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan daya saing produknya melalui fasilitasi kemasan, fasilitasi halal & merk, menjaga konsistensi kualitas produk, workshop dan sosialisasi peningkatankapasitas, dll

Pelasaksanaan Rapat Anggota Tahunan beberapa Koperasi tidak tepat waktu	Pembentukan Tim Coaching Clinic Koperasi dan Tim Pendampingan Laporan RAT
Koperasi belum menerapkan Digitalisasi Koperasi	Pelatihan Digitalisasi Koperasi
Pendataan dan Pengawasan Koperasi yang Belum Maksimal	Peningkatan Pengawasan Koperasi
Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja	Beberapa bentuk usaha guna mengatasi masalah ketenagakerjaan : Kebijakan pendidikan: Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan dan juga sikap yang baik. Kebijakan lapangan pekerjaan: Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. misalnya pemerintah membuka lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Selain itu pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Kebijakan pengupahan: Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan dan produktivitas dalam bekerja, Serta Melakukan pameran Lowongan Kerja (Job Fair Market).

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Koperasi Dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.3.2

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Bidang Koperasi dan UKM Adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Maupun Provinsi untuk Koperasi dan UKM	Koperasi dan UKM harus cepat beradaptasi dengan perubahan tren pasar, konsumen, dan teknologi Serta Minimnya modal usaha menjadi salah satu kendala utama Koperasi dan UMKM.
Bidang Tenaga Kerja Banyak perusahaan yang mencari tenaga Kerja , Khususnya Talenta Muda	Ttenaga Kerja masih belum siap untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat akibat perkembangan teknologi
Bidang Transmigrasi : Membuka dan mengembangkan daerah produksi baru,	Potensi konflik antara pendatang dan penduduk lokal

Peluang	Tantangan
Meningkatkan persebaran penduduk dan tenaga kerja	Potensi stigma negatif, seperti hanya memindahkan kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penambahan personil yang memadai dan menunjang Urusan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja.
2. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, Pemerintah Kabupaten Bolaamng Mongondow selatan, Perangkat Daerah lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2026 dengan usulan Dinas Koperasi dan Ukm Transnaker Tahun 2026 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.4. sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Melaksanakan program Pemerintah Pusat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan Hibah Barang untuk UKM;
3. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk percepatan peningkatan kualitas Koperasi UKM serta Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;dan
4. Meningkatkan pelayanan urusan Tenaga Kerja

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan tenaga Kerja
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Rancangan awal rkp					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / bidang urusan / program / outcome / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator program / kegiatan / sub kegiatan	Target 2026	Pagu indikatif (rp)	Urusan / bidang urusan / program / outcome / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator program / kegiatan / sub kegiatan	Target 2026	Pagu indikatif (rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja				8.274.091.925,00	Dinas koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja				8.274.091.925,00	
	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				8.226.918.425,00	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				8.226.918.425,00	
	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja				4.656.375.640,00	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja				4.656.375.640,00	
1,	Program perencanaan tenaga kerja				190.478.600,00	Program perencanaan tenaga kerja				190.478.600,00	
	Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk)		-	-	190.478.600,00	Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk)		-	-	190.478.600,00	
	Penyusunan rencana tenaga kerja makro	Bolse l	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	190.478.600,00	Penyusunan rencana tenaga kerja makro	Bolse l	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	190.478.600,00	
2,	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja				515.284.300,00	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja				515.284.300,00	
	[meningkatnya produktifitas tenaga kerja]	-	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tingkat produktivitas tenaga kerja	120 15 35	515.284.300,00	[meningkatnya produktifitas tenaga kerja]	-	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tingkat produktivitas tenaga kerja	120 15 35	515.284.300,00	
	Pelaksanaan pelatihan		-	-	515.284.300,00	Pelaksanaan pelatihan		-	-	515.284.300,00	

	berdasarkan unit kompetensi					berdasarkan unit kompetensi					
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Bolse l	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	7 orang	515.284.300,00	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Bolse l	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	7 orang	515.284.300,00	
3,	Program penempatan tenaga kerja				163.355.140,00	Program penempatan tenaga kerja				163.355.140,00	
	-	-	-	-	163.355.140,00	-	-	-	-	163.355.140,00	
	Pengelolaan informasi pasar kerja		-	-	163.355.140,00	Pengelolaan informasi pasar kerja		-	-	163.355.140,00	
	Job fair/bursa kerja	Bolse l	<i>Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja</i>	25 orang	163.355.140,00	Job fair/bursa kerja	Bolse l	<i>Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja</i>	25 orang	163.355.140,00	
4,	Program hubungan industrial				3.787.257.600,00	Program hubungan industrial				3.787.257.600,00	
	[meningkatnya pekerja yang terlindungi]	-	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	139008995	3.787.257.600,00	[meningkatnya pekerja yang terlindungi]	-	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	139008995	3.787.257.600,00	
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota		-	-	3.787.257.600,00	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota		-	-	3.787.257.600,00	
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Bolse l	<i>Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja</i>	15453 orang	3.787.257.600,00	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Bolse l	<i>Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja</i>	15453 orang	3.787.257.600,00	

	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah				3.570.542.785,00	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah				3.570.542.785,00	
1,	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				2.543.782.940,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				2.543.782.940,00	
	[meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	-	Indeks kepuasan masyarakat	3.45 3.60	2.543.782.940,00	[meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	-	Indeks kepuasan masyarakat	3.45 3.60	2.543.782.940,00	
	Administrasi keuangan perangkat daerah		-	-	1.946.042.288,00	Administrasi keuangan perangkat daerah		-	-	1.946.042.288,00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Bolse l	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn</i>	16 orang/bulan	1.935.842.288,00	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Bolse l	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn</i>	16 orang/bulan	1.935.842.288,00	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Bolse l	<i>Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd</i>	12 dokumen	10.200.000,00	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Bolse l	<i>Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd</i>	12 dokumen	10.200.000,00	
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		-	-	12.000.000,00	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		-	-	12.000.000,00	
	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Bolse l	<i>Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd</i>	12 laporan	12.000.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Bolse l	<i>Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd</i>	12 laporan	12.000.000,00	
	Administrasi umum perangkat daerah		-	-	368.376.775,00	Administrasi umum perangkat daerah		-	-	368.376.775,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bolse l	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	1 paket	2.000.775,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bolse l	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	1 paket	2.000.775,00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Bolse l	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	24 laporan	366.376.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Bolse l	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	24 laporan	366.376.000,00	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	-	50.832.450,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	-	50.832.450,00	

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bolse 1	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	4 unit	50.832.450,00	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bolse 1	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	4 unit	50.832.450,00	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		-	-	121.735.927,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		-	-	121.735.927,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bolse 1	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	12 laporan	3.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bolse 1	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	12 laporan	3.000.000,00	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bolse 1	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	12 laporan	118.735.927,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bolse 1	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	12 laporan	118.735.927,00	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		-	-	44.795.500,00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		-	-	44.795.500,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bolse 1	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	2 unit	44.795.500,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bolse 1	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	2 unit	44.795.500,00	
2,	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi				461.553.000,00	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi				461.553.000,00	
	-	-	-	-	461.553.000,00	-	-	-	-	461.553.000,00	
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota		-	-	461.553.000,00	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota		-	-	461.553.000,00	
	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Bolse 1	<i>Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan</i>	81 unit usaha	461.553.000,00	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Bolse 1	<i>Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan</i>	81 unit usaha	461.553.000,00	

			<i>koperasi</i>					<i>koperasi</i>			
3,	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi				100.003.530,00	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi				100.003.530,00	
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		-	-	100.003.530,00	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		-	-	100.003.530,00	
	Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan	Bolse l	<i>Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan</i>	16 unit usaha	100.003.530,00	Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan	Bolse l	<i>Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan</i>	16 unit usaha	100.003.530,00	
4,	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				161.908.320,00	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				161.908.320,00	
	[meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri]	-	Proporsi jumlah umkm	2 2.75	161.908.320,00	[meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri]	-	Proporsi jumlah umkm	2 2.75	161.908.320,00	
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		-	-	161.908.320,00	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		-	-	161.908.320,00	
	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Bolse l	<i>Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro</i>	30 unit usaha	161.908.320,00	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Bolse l	<i>Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro</i>	30 unit usaha	161.908.320,00	
5,	Program pengembangan umkm				303.294.995,00	Program pengembangan umkm				303.294.995,00	
	-	-	-	-	303.294.995,00	-	-	-	-	303.294.995,00	

	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		-	-	303.294.995,00	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		-	-	303.294.995,00	
	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Bolse l	<i>Jumlah unit usaha umkm yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi</i>	10 unit usaha	303.294.995,00	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Bolse l	<i>Jumlah unit usaha umkm yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi</i>	10 unit usaha	303.294.995,00	
	Urusan pemerintahan pilihan				47.173.500,00	Urusan pemerintahan pilihan				47.173.500,00	
	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi				47.173.500,00	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi				47.173.500,00	
1,	Program perencanaan kawasan transmigrasi				47.173.500,00	Program perencanaan kawasan transmigrasi				47.173.500,00	
	[meningkatya pelaksanaana kawasan transmigrasi]	-	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	15 20	47.173.500,00	[meningkatya pelaksanaana kawasan transmigrasi]	-	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	15 20	47.173.500,00	
	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi		-	-	47.173.500,00	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi		-	-	47.173.500,00	
	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Bolse l	<i>Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi</i>	1 dokumen	47.173.500,00	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Bolse l	<i>Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi</i>	1 dokumen	47.173.500,00	
					8.274.091.925,00					8.274.091.925,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawsan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	4 Usulan	Usulan Musrembang : 1. Peningkatan Kapasitas Kursus Menjahit 1 kelompok 2. Bantuan Mesin Obras 10 kelompok 3. Bantuan alat-alat kerajinan mesin jahit 2 bauh 4. Bantuan Mesin Jahit 10 kelompok
2	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Bolaang Mongondow Selatan	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	3 Usulan	1. Penyediaan bantuan Alat Catring, 3 Kelompok, Pengadaan Alat Pangkas Rambut 1 Kelompok 2. Penyediaan Peralatan Perbengkelan 1 kelompok 3. Penyediaan Bantuan Peralatan dan Perlengkapan UMKM
3.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Bolaang Mongondow Selatan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Usulan	1. bantuan Kartu Ketenagakerjaan 1000 orang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021-2026, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“Naik Kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.” dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan usaha.
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 20 % per tahun.
2. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
3. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi dengan baik.
4. Tumbuh dan kembangnya Wirausaha Baru.
5. Program OVOP berhasil.
6. Tumbu dan kembangnya Koperasi berskala besar.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi serta Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, RENJA Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berpedoman pada RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, RPJMD Provinsi

Bengkulu 2021-2026, dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2026
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dalam menopang Perkonomian Masyarakat	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitasn	Persentase Koperasi Berkualitas	
			Persentase koperasi aktif	
2	Mewujudkan UMKM sebagai Pilar Penopang Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	
			Persentase Pertumbuhan UMKM	11
			Persentase Usaha	97,05%

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2026
			Mikro	
			Persentase usaha Kecil	4,80%
			Persentase Usaha Menengah	0,55%
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran dalam menurunkan kemiskinanmerata dan berkualitas	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	17

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja yang mendukung terwujudnya infrastruktur penunjang ekonomi daerah dan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sehingga penunjang bisa tercapai sesuai dengan sasaran.

Tabel 3.3 Kegiatan Utama Dan Kegiatan Rutin

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Boilaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 9 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Dengan rincian 4 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan adalah urusan pilihan Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja dan 1 program, 8 kegiatan, 19 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dapat dilihat berdasarkan table 4.1

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Koperasi dan UKM,Transmigrasi dan tenaga Kerja
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		Ket
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dinas koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja			8.274.091.925,00				7.338.246.950,00	
	2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			8.226.918.425,00				7.088.246.950,00	
	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja			4.656.375.640,00				4.100.000.000,00	
1,	2,07,02	Program perencanaan tenaga kerja			190.478.600,00			-	0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk)	-	-	190.478.600,00			-	0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan rencana tenaga kerja makro	<i>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro</i>	1 dokumen	190.478.600,00	Bolsel	DAU		0,00	
2,	2,07,03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja			515.284.300,00			-	100.000.000,00	
		[meningkatnya produktifitas tenaga kerja]	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	120	515.284.300,00	-	-	-	100.000.000,00	
			persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	15						
			tingkat produktivitas tenaga kerja	35						

	2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	-	-	515.284.300,00			-	100.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun</i>	7 orang	515.284.300,00	Bolsel	DAU		100.000.000,00	
3,	2,07,04	Program penempatan tenaga kerja			163.355.140,00			-	0,00	
		-	-	-	163.355.140,00	-	-	-	0,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	-	-	163.355.140,00			-	0,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job fair/bursa kerja	<i>Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja</i>	25 orang	163.355.140,00	Bolsel	DAU		0,00	
4,	2,07,05	Program hubungan industrial			3.787.257.600,00			-	4.000.000.000,00	
		[meningkatnya pekerja yang terlindungi]	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	13900 89 95	3.787.257.600,00	-	-	-	4.000.000.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	-	-	3.787.257.600,00			-	4.000.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	<i>Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja</i>	15453 orang	3.787.257.600,00	Bolsel	DAU		4.000.000.000,00	

	2.17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah			3.570.542.785,00				2.988.246.950,00	
1,	2.17.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			2.543.782.940,00			-	2.395.246.950,00	
		[meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks kepuasan masyarakat	3.45 3.60	2.543.782.940,00	-	-	-	2.395.246.950,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	1.946.042.288,00			-	1.811.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	16 orang/bulan	1.935.842.288,00	Bolsel	DAU		1.800.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	12 dokumen	10.200.000,00	Bolsel	DAU		11. 000.000,00	
	2.17.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	12.000.000,00			-	18. 600.000,00	
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	12 laporan	12.000.000,00	Bolsel	DAU		18.600.000,00	
	2.17.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	-	-	368.376.775,00			-	302.500.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.000.775,00	Bolsel	DAU		2.500.000,00	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	24 laporan	366.376.000,00	Bolsel	DAU		300.000.000,00	
	2.17.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	50.832.450,00			-	60. 000.000,00	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	4 unit	50.832.450,00	Bolsel	DAU		60. 000.000,00	

			<i>disediakan</i>							
	2.17.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	121.735.927,00			-	163.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	12 laporan	3.000.000,00	Bolsel	DAU		3.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	12 laporan	118.735.927,00	Bolsel	DAU		160.000.000,00	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	44.795.500,00			-	40.146.950,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	2 unit	44.795.500,00	Bolsel	DAU		40.146.950,00	
2,	2,17,03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi			461.553.000,00			-	3.000.000,00	
		-	-	-	461.553.000,00	-	-	-	3.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	-	-	461.553.000,00			-	3.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	<i>Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi</i>	81 unit usaha	461.553.000,00	Bolsel	DAU		3.000.000,00	
3,	2,17,04	Program penilaian kesehatan ksp/usp			100.003.530,00			-	150.000.000,00	

		koperasi								
	2.17.04.2.01	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-	-	100.003.530,00			-	150.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan	<i>Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan</i>	16 unit usaha	100.003.530,00	Bolsel	DAU		150.000.000,00	
4,	2,17,07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)			161.908.320,00			-	140.000.000,00	
		[meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri]	Proporsi jumlah ukm	2 2.75	161.908.320,00	-	-	-	140.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	-	161.908.320,00			-	140.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	<i>Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro</i>	30 unit usaha	161.908.320,00	Bolsel	DAU		140.000.000,00	
5,	2,17,08	Program pengembangan umkm			303.294.995,00			-	300.000.000,00	
		-	-	-	303.294.995,00	-	-	-	300.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	-	-	303.294.995,00			-	300.000.000,00	

	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	<i>Jumlah unit usaha umkm yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi</i>	10 unit usaha	303.294.995,00	Bolsel	DAU		300.000.000,00	
	3	Urusan pemerintahan pilihan			47.173.500,00				250.000.000,00	
	3.32	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi			47.173.500,00				250.000.000,00	
1,	3.32.02	Program perencanaan kawasan transmigrasi			47.173.500,00			-	250.000.000,00	
		[meningkatya pelaksanaana kawasan transmigrasi]	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	15	47.173.500,00	-	-	-	250.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	-	-	47.173.500,00			-	250.000.000,00	
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	<i>Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi</i>	1 dokumen	47.173.500,00	Bolsel	DAU		250.000.000,00	
	J U M L A H				8.274.091.925,00				7.338.246.950,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

P. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (*outcome*), indikator kinerja kegiatan (*output*), indikator kinerja sub kegiatan (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja Perangkat Daerah inimemuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

1.1 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;

16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD);

1.2 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.2.1. Maksud

Maksud disusun nya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu:

- a. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;
- b. Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- c. Tersedianya seluruh informasi dalam Rencana Kerja dan diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2026 ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga

penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.3 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Tahun 2026, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan

PTSP 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Rencana Kerja berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2026 beserta Rencana Penganggarannya.

Bab V. Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun n-2) dan proyeksi capaian Tahun 2025 (tahun n-1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang pada saat penyusunan Renja seharusnya telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan,
2. Mengidentifikasi tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra,
3. Menjadi dasar dalam perumusan prioritas dan strategi perencanaan tahun 2026.

Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan estimasi capaian Tahun 2025 dikaitkan secara langsung dengan target-target dalam Renstra 2025–2029, berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam:

1. Laporan Kinerja Tahunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2. dan/atau realisasi APBD untuk urusan pendidikan dan kebudayaan.

Hasil evaluasi dan capaian kinerja program/kegiatan tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.1 (Format TC.29) yang memuat informasi mengenai indikator kinerja, target, realisasi, serta analisis pencapaian kinerja:

Tabel 2.1 (TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
(01)	(02)	(04)	(03)	(06)	(08)	(10)	(06)	(08)	(10)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100

2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	4	4	100	1	1	100
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	0	0	0	0	0
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	15	12	12	100	12	12	100
2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50		20			35	23	65,7
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	0	0	0	1	0	0
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	5	5	100	7	7	100
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	10	7	70	10	10	100

2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0	0	0
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	200	1	1	1	100	196	0	0
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15	15	85	100	117	14	14	100
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	10	10	10	100	10	10	100

Berdasarkan hasil review pada tabel 2.1 (TC-29) diatas Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Kegiatan yang memenuhi Target dan Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program dan kegiatan perangkat daerah terencana dengan baik
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA disusun tepat waktu
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA disusun tepat waktu
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA disusun tepat waktu
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA disusun tepat waktu
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi disusun tepat waktu
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi dilaksanakan rutin
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran honor pelaksana fungsi akuntansi tepat waktu
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan disusun tepat waktu
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan dibuat secara rutin
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran honor pengurus barang dan pembantu pengurus barang dilaksanakan tepat waktu
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keperluan komponen listrik kantor sesuai dengan kebutuhan
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan dilakukan rutin
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu perangkat daerah dijamu sesuai SOP
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan SOP
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perangkat daerah melaksanakan SPBE sesuai SOP
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa listrik dilaksanakan tepat waktu
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor jasa pelayanan kantor dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pemeliharaan dan pembayaran pajak

	Kendaraan Dinas Jabatan	dilaksanakan rutin dan tepat waktu
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak dilaksanakan rutin dan tepat waktu
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor dilaksanakan rutin
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan sesuai kebutuhan
23	Pengawasan Penanaman Modal	Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) membuat pelaksanaan pengawasan pelaku usaha lebih efektif
24	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Data terkait Perizinan Berusaha diolah secara tepat dan profesional

Tabel 2.3
Program Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target dan Faktor Penghambatnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target dan anggaran ditentukan bersamaan dengan proyeksi pertambahan pegawai di tahun berjalan sehingga target yang ditetapkan lebih banyak dari keadaan rill
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tidak adanya penambahan unit peningkatan sarana disiplin pegawai
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dapat diikuti
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tidak adanya kegiatan bimbingan teknis yang dapat diikuti
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan peraturan perundang-undangan dibagikan secara online
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangkat Daerah tidak lagi menggunakan jasa surat menyurat
7	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) adalah dokumen yang dibuat dan berlaku selama 5 tahun sehingga tidak ada ada realisasi pada tahun diantara tahun pelaksanaan
8	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :

1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan drastis, Nilai investasi tahun 2023 adalah senilai Rp.226.166.830.517,- sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.146.139.510.782,- jika dibandingkan maka pada tahun 2024 mengalami penurunan Nilai Investasi sebesar -35.38% dengan persentase realisasi capaian sebesar 0% dengan kategori Sangat Rendah. Hal ini terjadi karena Pada tahun 2023 terdapat banyak Pelaku Usaha/Investor cukup besar yang berada pada tahap konstruksi bangunan sebagai tempat pelaksanaan usaha dan pelaporan realisasi investasi mengikutsertakan nilai modal pembangunan bangunan tersebut sehingga mendongkrak realisasi investasi secara keseluruhan menjadi sangat tinggi, dibandingkan dengan tahun 2024 tahap konstruksi bagi Pelaku Usaha/Investor besar tersebut telah selesai sehingga pelaporan realisasi investasi sudah tidak lagi menghitung nilai konstruksi bangunan tersebut. Selain itu, untuk tahun 2024 tidak lagi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bidang Penanaman Modal sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang realisasi investasi menjadi kurang efektif dikarenakan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan bertahap sejak tahun 2020 pada indeks 84.05 hingga pada

tahun 2024 mencapai indeks 93.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan tahun 2024 dengan capaian 93,6 dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 91.55, maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 102% dengan kategori Sangat Tinggi yang mengindikasikan bahwa dalam proses melayani masyarakat petugas telah mengaplikasikan pelayanan sesuai dengan standar unsur pelayanan.

Uraian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi		√	7%	8%	8.5%	9%	-35.38	8%	8.5%	9%	Capaian pada tahun 2024 sangat rendah sehingga memerlukan perhatian khusus untuk kembali mendorong pertumbuhan nilai investasi, namun pada tahun 2025 hingga tahun 2027 diproyeksikan akan memenuhi target karena telah adanya tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2025
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			91.55	91.55	92	93.50	93.6	93.6	93.6	93.6	Tren capaian indeks kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan yang stabil sejak tahun 2020 sehingga diproyeksikan dapat memenuhi target pada tahun 2025-2027

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan baik internal maupun external dan hambatan yang dihadapi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraanya pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan

	Permasalahan	Hambatan
Internal	Kurangnya SDM Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia	- Belum tersedianya formasi jabatan fungsional terkait - Kurangnya jumlah ASN sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan
External	Pelaporan Realisasi Pelaku Usaha Tidak Maksimal Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melaporkan realisasi kegiatan usaha	- Kurangnya kesadaran pelaku usaha - Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha terkait tata cara pengoperasian sistem OSS untuk pelaporan kegiatan usaha
	Kurangnya Minat Investasi Kurangnya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha	- Proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum selesai - Ruang bagi pelaku usaha belum diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga dihadapkan dengan tantangan dan peluang sebagai berikut:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan

Peluang	Tantangan
Telah adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemberian Fasilitas/Insentif bagi Pelaku Usaha/Penanam Modal	Kurangnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pemanfaatan Aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS)

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.
2. Pemenuhan SDM aspek kuantitas, kualitas DPMPTSP untuk mendukung fungsi (pengembangan, promosi, perizinan teknologi informasi, pengendalian dan data).
3. Peningkatan realisasi investasi berbasis pada potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah.
5. Peningkatan investor baru baik PMA/ PMDN yang masuk ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Pemahaman pelaku usaha mengenai LKPM masih kurang.
7. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C 31) berikut

Tabel 2.7 (TC 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RANCANGAN RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(030)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.676.768.978,00				3.676.768.978,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.760.856.678,00				2.760.856.678,00	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	2.494.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	2.494.000,00	
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.200.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.200.000,00	
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	1.200.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	1.200.000,00	
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.134.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.134.000,00	
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	2.494.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	2.494.000,00	

2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	14	1.903.097.891,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	14	1.903.097.891,00	
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	7.800.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	7.800.000,00	
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.200.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.200.000,00	
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	12.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	12.000.000,00	
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	31.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	31.000.000,00	
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	31.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	31.000.000,00	
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	3.999.760,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	3.999.760,00	

2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	16.650.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	16.650.000,00	
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.304.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.304.000,00	
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.510.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.510.000,00	
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	204.582.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	204.582.000,00	
2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.132.960,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.132.960,00	
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	50	264.157.800,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	50	264.157.800,00	
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	5.999.715,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		5.999.715,00	
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	54.670.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		54.670.000,00	
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	91.224.552,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		91.224.552,00	
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	45.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	45.000.000,00	
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	15.120.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	15.120.000,00	

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	84.923.500,00	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahany	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	84.923.500,00	
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	139.702.000,00	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	139.702.000,00	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	148.306.150,00	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	148.306.150,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional adalah urutan kepentingan dari berbagai program atau kegiatan pembangunan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Prioritas ini membantu pemerintah dalam menentukan fokus dan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Prioritas Nasional terdiri dari 8 unsur yang ditetapkan sebagai Prioritas Nasional, berdasarkan telaahan terhadap RKP 2026 Prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Prioritas Nasional 7 yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Salah satu sasaran dari tema ini yang berkorelasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani” dengan arah kebijakan yaitu Transformasi Tata kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan yang juga telah dicurahkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, adalah :

- Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif
- Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 1. Meningkatnya Nilai Investasi
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dengan detail sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	8%	8.5%	9%	9.5%	10%	10.5%	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (91,55)	A (92)	A (93.50)	A (94)	A (95)	A (96)	

1.1 Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditunjang dengan 6 (enam) program , yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Sub

kegiatan sebagai berikut :

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.3.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.3.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- 1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.3.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- 2.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
Sub kegiatan sebagai berikut :

- 2.1.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;

3. Program Promosi Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan sebagai berikut :

3.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota;

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota;

Sub kegiatan sebagai berikut :

4.1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik;

4.1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan;

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan sebagai berikut :

5.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

5.1.2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

KODE	KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	Target Kinerja Capaian Program	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIFI	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.676.768.978,00	DAU				
	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.760.856.678,00	DAU				
	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	2.494.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.200.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	1.200.000,00	DAU		2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.134.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	2.494.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	

	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	14	1.903.097.891,00	DAU		16	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	7.800.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.200.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	12.000.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	1.000.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	31.000.000,00	DAU		6	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	31.000.000,00	DAU		6	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	

	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					DAU				
	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	3.999.760,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	16.650.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.304.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.510.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	204.582.000,00	DAU		15	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	4.132.960,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	50	264.157.800,00	DAU		50	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	5.999.715,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	54.670.000,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	91.224.552,00	DAU		1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	

	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					DAU				
	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	86.221.320,00	DAU		10		
	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2	19.544.500,00	DAU		2		
	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					DAU				
	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					DAU				
	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	84.923.500,00	DAU		3		
	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15	139.702.000,00	DAU		15	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					DAU				
	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					DAU				
	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10	148.306.150,00	DAU		10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dan Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023. Dengan mengacu hal-hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah merumuskan 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melaalui pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebutm Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Meningkatnya nilai investasi daerah. Rencana Program, Kegiatan, dan kerangka pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.676.768.978,00							1.489.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.676.768.978,00							1.489.100.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.676.768.978,00							1.489.100.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.760.856.678,00						-	869.100.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.50 91.55	3.29 91.55	3.35 91.55	3.45 91.55	2.760.856.678,00	-	-	-	-	-	-	869.100.000,00	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.028.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.494.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.200.000,0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.500.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.134.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.913.097.891,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	17.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.903.097.891,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		12.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.200.000,0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.500.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1.000.000,0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	17.500.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		17.500.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	63.000.000,00			-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	131.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	31.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	31.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	238.178.720,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	214.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.999.760,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.650.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaannya SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.304.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaannya SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	4.510.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15 Laporan	204.582.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	4.132.960,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		12.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	-	-	-	-	-	2.760.856.678,00	-	-	-	-	-	-	869.100.000,00	-
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	264.157.800,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	264.157.800,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.894.267,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	153.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.999.715,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.50 91.55	3.29 91.55	3.35 91.55	3.45 91.55	2.760.856.678,00	-	-	-	-	-	-	869.100.000,00	-
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	54.670.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	91.224.552,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		92.500.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.500.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	75.500.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		45.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	15.120.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		10.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.040.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		12.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	39.340.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						355.602.000,00						-	20.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	355.602.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	355.602.000,00			-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	20.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	355.602.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		20.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						81.612.830,00						-	90.000.000,0 0	
		[Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal]	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	9	3	4	5	81.612.830,00	-	-	-	-	-	-	90.000.000,0 0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	81.612.830,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	81.612.830,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						105.765.820,00						-	110.000.000,00	

		[Meningkatkan perizinan berusaha berbasis resiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 95	100 80	100 80	100 85	105.765.820,00	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	105.765.820,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	-	-	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	86.221.320,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

												Dan Pelaksana a n SPBE				
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2 Pelaku Usaha	19.544.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						224.625.500,00						-	170.000.000,00	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	95	80	80	85	224.625.500,00	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	224.625.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				3 Kegiatan Usaha.	84.923.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	139.702.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						148.306.150,00						-	230.000.000,00	
		[Meningkatkan Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	0	100	148.306.150,00	-	-	-	-	-	-	230.000.000,00	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026-2029. Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2026 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kesesuaian dengan renja KL, (Renja merupakan mengacu pada renstra perubahan 2)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja DISPORA Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunn 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Maksud dan tujuan;
- 1.3. Landasan hukum;
- 1.4. Sistematika penulisan;

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2025, Renstra Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Table T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d 2025

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219-2.19.01	Program Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga	276,54 %	95,77 %	85 %	95,77 %	112,67%	85 %	276,54 %	100 %
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga	218.75%	72 %	73 %	72,75%.	99,65%	74 %	218.75%	100 %
		Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	292.85 %	81,63 %	73%	89,13%	100%	122,09 %	292.85 %	100 %
219-2.19.0101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencana	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen	100 %
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	8 Dokumen	24 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	100 %
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	100 %
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	100 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100 %	12 Laporan	14 Laporan	100 %
219-2.19.0102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	43 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	86,6 %	15 Orang / Bulan	43 Orang / Bulan	100 %
		Jumlah Laporan Keuangan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	86,6 %	15 Orang / Bulan	43 Orang / Bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	36 Dokumen	100 %
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	5 Dokumen	15 Dokumen	100 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	12 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	12 Laporan	3 Laporan	100 %
219-2.19.0103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana BMD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	100 %
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	100 %
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100 %	12 Laporan	28 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219- 2.19.0105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang	15 Orang	100 %
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	9 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	100 %
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	1 Dokumen	11 Dokumen	100 %
219- 2.19.0106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umun PD	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	100 %

02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	1 Paket	5 Paket	100 %
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	100 %
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	43 Laporan	8 Laporan	60 Laporan	30 Laporan	50 %	5 Laporan	43 Laporan	100 %
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	12 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100 %	12 Laporan	74 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219- 2.19.0107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Yang diadakan	15 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	15 Unit	100 %
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	1 Unit	9 Unit	100 %
07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219-2.19.0108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124 Laporan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 %	12 Laporan	124 Laporan	100 %
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	12 Laporan	26 Laporan	100 %
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	124 Laporan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 %	12 Laporan	124 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219- 2.19.0109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	300 %	194 %	73 %	48 %	65,75 %	74 %	194 %	100 %
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	4 Unit	4Unit	2 Unit	50 %	2 Unit	10 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	1 Unit	11 Unit	100 %
219-2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan	260 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	260 %	100 %
		Persentase Pemuda terampil	260 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	260 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219-2.19.0201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	391 Orang	100 Orang	100 Orang	191 Orang	191 %	100 Orang	391 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausahaan Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	391 Orang	100 Orang	100 Orang	191 Orang	191 %	100 Orang	391 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
219- 2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolsel	3 Event	1 Event	1 Event	1 Event	100 %	1 Event	3 Event	100 %
		Persentase Sarana Prasarana yang tersedia	240 Persen	80 %	80 %	75 %	100 %	80 Orang	240 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
21903102	Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Even Olahraga yang dilaksanakan	3 Event	1 Event	1 Event	1 Event	100 %	1 Event	3 Event	100 %
04	Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah Kejuaraan Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Event	1 Event	1 Event	1 Event	100 %	1 Event	3 Event	100 %

[illegible]

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 2025, evaluasi hasil pelaksanaan renja Dispora Bolaang Mongondow Selatan disimpulkan sebagai berikut :

Dari 4 program yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat 7 indikator program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. 1 (satu) indikator program melebihi target kinerja yaitu :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 112,67 %

b. 6 (enam) indikator program telah memenuhi target kinerja yaitu :

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 99,67 %
- 2) Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 %
- 3) Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 %
- 4) Persentase Pemuda terampil, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 %
- 5) Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolssel, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 %
- 6) Persentase Sarana Prasarana yang tersedia, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 93,75 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

**Tabel T-C30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Prov. Sulawesi Utara**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	85	85	85	85	95,77	95,77	85	85	
	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga			72	73	74	74	72	72.75	74	74	
	Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan			83	83	100	-	80%	80%	-	-	
	Persentase Pemuda terampil			-	80%	100%	-	80%	80%	100%	-	
	Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolssel			1 Event	1 Event	1 Event	-	1 Event	1 Event	1 Event	-	
	Persentase Sarana Prasarana yang tersedia			-	80%	80%	-	75%	80%	80%	-	
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan		✓	57.50%	40.32%	42%	44%	56.5%	57,5%	42%	44%	
3	Rasio Wirausaha Pemuda					50%	52%			50%	52%	
4	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti					63%	63%			63%	63%	

	kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir											
5	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan					30%	32%			30%	32%	
6	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir					5%	5%			5%	5%	
7	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas					55%	60%			55%	60%	
8	Indeks Partisipasi Olahraga		✓	-	-	42 %	44 %			42 %	44 %	
9	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhirRegional dan Nasional di Bolsel	-				30%	30%			30%	30%	
10	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	-	✓	-	-	30 %	30 %			30 %	30 %	

11	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional					60%	60%			60%	60%	
12	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional					50%	50%			50%	50%	
13	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan					60%	60%			60%	60%	

Berdasarkan informasi pada table diatas, realisasi kinerja sasaran strategis Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023, yaitu pada Sasaran Strategis Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan. Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada Tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal Tahun 2024.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Bidang yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti program kepeloporan dan kewirausahaan Pemuda serta program peningkatan prestasi olahraga.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain;

- a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda.
- b. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan disiplin keilmuannya, sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak bisa diselesaikan dengan baik;
- c. Terbatasnya data-data pembangunan Kepemudaan dan Olahraga yang akurat dan terbaru.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Bidang, Perangkat Daerah/instansi dan lintas sektor didalam penyusunan program/ kegiatan dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Daerah (IKD);
- b. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
- c. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;

- d. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan dan Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung untuk mencapai target kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Hampir seperempat penduduk Sulawesi Utara merupakan pemuda, jumlah ini menunjukkan memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar. Akan sangat berarti jika diiringi dengan kualitas yang mumpuni, karena pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai aktor intelektual penggerak pembangunan. Peran dan fungsi pemuda menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di berbagai bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi

terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan Bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan daya saing pemuda.

Secara umum, sebagian besar pemuda di Kab. Bolaang Mongondow Selatan bekerja di sektor informal. Minimnya keahlian professional pemuda, dan tingkat kewirausahaan pemuda masih rendah, menjadi penyebab kecilnya persentase pemuda yang berusaha sendiri. Hal ini memperlihatkan masih minimnya inovasi, kreasi, serta keberanian pemuda untuk mengambil resiko.

2. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan

Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

Rendahnya Angka Partisipasi Masyarakat berolahraga ditunjukkan dengan data Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 bahwa angka partisipasi berolahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan 0,287 berada di bawah rata-rata nasional 0,328.

4. Masih lemahnya manajemen Keolahragaan

Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu. Dana Pembinaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat relatif terbatas, sumberdaya manusia (guru, pelatih, instruktur, manajer) juga masih lemah. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan olahraga adalah sarana dan prasarana yang belum memadai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026, yaitu;

1. Penguatan sistem pelayanan kepemudaan melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.
2. Transformasi kepramukaan
3. Pengembangan olahraga masyarakat
4. Pembinaan olahragawan muda melalui:
 - a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;

- d. peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan
 - f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- 5. Pengembangan wisata olahraga dan
 - 6. Penguatan kemitraan global.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tersebut dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu merumus dan melaksanakan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan, maka dukungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dispora Tahun 2021–2026, yaitu *Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga..*

Target tujuan dan sasaran Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Program	Target Program
1	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	1. Indeks Pembangunan Pemuda	55	1..Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	35% 44%	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	1. Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan 2. Rasio Wirausaha Pemuda 3. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir 4. Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan 5. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	44 % 52% 63% 32% 5%
		2. Indeks Partisipasi Olahraga	44	2.Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	42 %	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas 2. Indeks Partisipasi Olahraga 3. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir 4. Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir 5. Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	60 % 44% 30% 30% 60%

								6. Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	50%

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Kab. Bolaang Monvondow Selatan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											(Rp)				(Rp)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bolsel		2.479.000.000	DAU			2.689.000.000
2	19	01	1	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Bolsel		9.000.000	DAU			9.000.000
2	19	01	1	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	2	2.500.000	DAU		2	2.500.000
2	19	01	1	01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bolsel	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	19	01	1	01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bolsel	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	19	01	1	01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bolsel	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	19	01	1	01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bolsel	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	19	01	1	01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bolsel	12	2.500.000			2	2.500.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
									Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											(Rp)				(Rp)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kinerja SKPD							
2	19	01	1	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.715.000.000	DAU			1.815.000.000
2	19	01	1	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	18	1.700.000.000	DAU		18	1.800.000.000
2	19	01	1	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bolsel	12	5.000.000	DAU		12	5.000.000
2	19	01	1	02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	12	8.000.000	DAU		12	8.000.000
2	19	01	1	02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bolsel	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	19	01	1	02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bolsel	12	1.000.000	DAU		12	1.000.000
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Bolsel		15.000.000	DAU			15.000.000
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	Bolsel	4	15.000.000			4	15.000.000
2	19	01	1	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Bolsel		5.000.000	DAU			5.000.000
2	19	01	1	05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bolsel	4	5.000.000	DAU		4	5.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										(Rp)				(Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bolsel		450.000.000	DAU			550.000.000
2	19	01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bolsel	2	15.000.000	DAU		2	15.000.000
2	19	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bolsel	2	15.000.000	DAU		2	15.000.000
2	19	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bolsel	2	10.000.000	DAU		2	10.000.000
2	19	01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bolsel	4	10.000.000	DAU		4	10.000.000
2	19	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	12	400.000.000	DAU		12	500.000.000
2	19	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Bolsel		55.000.000	DAU			55.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										(Rp)				(Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Daerah								
2	19	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Bolsel	4	30.000.000	DAU		4	30.000.000
2	19	01	1	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bolsel	4	25.000.000			4	25.000.000
2	19	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Bolsel		170.000.000				180.000.000
2	19	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bolsel	12	5.000.000			12	5.000.000
2	19	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bolsel	12	15.000.000			12	15.000.000
2	19	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bolsel	12	150.000.000			12	160.000.000
2	19	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Bolsel		60.000.000				60.000.000
2	19	01	1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bolsel	2	50.000.000			2	50.000.000
2	19	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bolsel	1	10.000.000			1	10.000.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
									Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											(Rp)				(Rp)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dipelihara/direhabilitasi							
2	19	02					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Bolsel		320.000.000	DAU			330.000.000
2	19	02	2	01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Bolsel		250.000.000	DAU			260.000.000
2	19	02	1	01	0010		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Bolsel	1	50.000.000	DAU		1	50.000.000
2	19	02	1	01	0011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausahaan Muda Tingkat Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Bolsel	100	100.000.000	DAU		100	100.000.000
2	19	02	2	02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
2	19	02	2	02	0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Bolsel	100	70.000.000	DAU		100	70.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										(Rp)				(Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	03				Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		Bolsel		470.000.000	DAU			520.000.000
2	19	03	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Bolsel		50.000.000	DAU			50.000.000
					05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabuapten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan Termanfaatkan	Bolsel	5	50.000.000	DAU		5	50.000.000
2	19	03	1	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bolsel		200.000.000	DAU			220.000.000
2	19	03	1	02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bolsel	1	100.000.000	DAU			110.000.000
2	19	03	2	03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Atlit Berprestasi yang dibina	Bolsel		50.000.000	DAU			50.000.000
2	19	03	2	03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Bolsel	25	25.000.000	DAU		25	25.000.000
2	19	03	2	03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Bolsel	5	25.000.000	DAU		5	25.000.000
2	19	03	2	04		Pembinaan dan Pegembangan Organisasi Olahraga		Bolsel		100.000.000	DAU			120.000.000
2	19	03	2	04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Bolsel	1	50.000.000	DAU		1	60.000.000
2	19	03	2	04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Bolsel	1	50.000.000	DAU		1	60.000.000

2	19	03	2	05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Bolsel		70.000.000	DAU			70.000.000
2	19	03	2	05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Bolsel	1	20.000.000	DAU		1	20.000.000
2	19	03	2	05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Bolsel	1	20.000.000	DAU		1	20.000.000
2	19	03	2	05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bolsel	1	30.00.000	DAU		1	40.000.000
2	19	04				Program Pengembangan Daya Saing Kepramukaan		Bolsel		320.000.000	DAU			330.000.000
2	19	04	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Bolsel		320.000.000	DAU			330.000.000
2	19	04	2	01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Bolsel	8	1000.000.000	DAU		8	1000.000.000
2	19	04	2	01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Bolsel	1	220.000.000	DAU		1	230.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan menyusun Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun

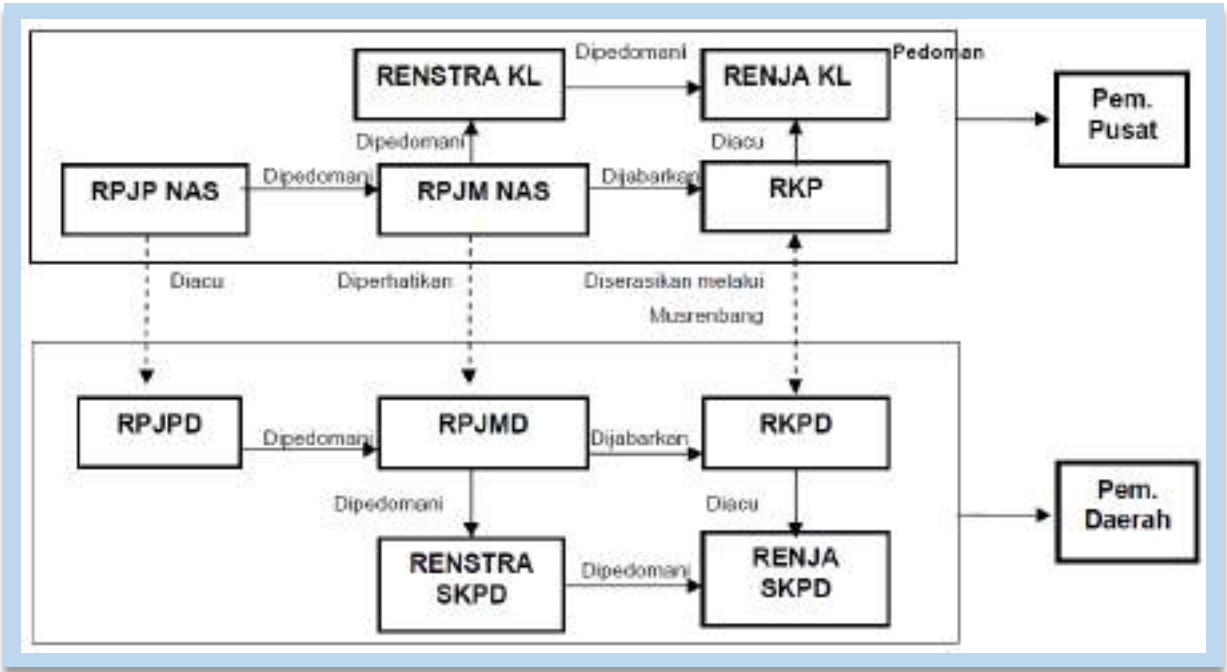
2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 **LandasanHukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor);
 25. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan

koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;

6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Program Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Aktif melakukan pelayanan perpustakaan keliling dengan sasaran anak sekolah. - Program transformasi perpustakaan bebrbasis inklusi sosial dengann beberapa desa penerima manfaat telah menggerakkan pengelola perpustakaan desa untuk mengaktifkan kegiatan

		perpustakaan desa

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel2.2 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Tingk at Realis asi (%)	Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025	RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n	Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	Bidang Perpustakaan									
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	70	57,34	65	62,21	95,70	65	-	-
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dikelola Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	-	-
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	20	30	30	100	10	-	-
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80	-	-	-	-	-	-	-
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukungKegiatannya	3	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Tingk at Realis asi (%)	Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025	RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n	Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bidang Kearsipan									
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	80	-	-	-	-	-		
	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
	<i>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</i>	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	15000	-	15000	13668	91,12	15000		
	<i>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1	1	1	1	100	1		
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip	70	-	-	-	-	-		
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
	<i>Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</i>	<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>	1000	-	-	-	-	-		

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Tingk at Realis asi (%)	Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025	RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n	Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000	-	-	-	-	-		
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IndeksKepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan	74		72			73		
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan	71	24,76	71			71		
		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	71	68,00	71	63,50		71		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahDokumenPerencanaan	5	1	5	2		5		
		JumlahDokumenPelaporan Kinerja	5	5	5	5	100	5	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis	1	1	1	1	100	1	-	
	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD.	1	1	1	1	100	1	-	
		JumlahPerubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	-	

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Tingk at Realis asi (%)	Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025	RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n	Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	14	14	14	100	13	-	
	PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/ VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	65	84	80	68		65	-	
	AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1	1	1	1	100%	1	-	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	1	1	1	1	100%	1	-	
	PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	2	2	100%	2	-	
	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	5	0	0	-	-	5	-	
		Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab	1	1	1	1	100%	1	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5	-	-	-	-	-	-	
	AdministrasiUmumPerangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1		

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Tingk at Realis asi (%)	Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025	RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n	Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	<i>PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1	-	-	-	-	-		
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50	67	35	35	100	30		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan		-	1 Unit	1 Unit	100%	5 Unit		
	<i>PengadaanPeralatan dan MesinLainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	5	24	24	100	2 Unit		
	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor								
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Keg	1	1	1	100	1 Keg		
	<i>Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1	1	1	1	100	1		
	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik								
		Jumlah Barang yang dipelihara								
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit		4 Unit	4 Unit	100	1 Unit		
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit	5	5	5	100	5		
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit		

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perpustakaan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :

1. Pada Indikator Nilai Kegemaran Membaca dengan target 65, hasil capaian 62,21 atau 95,70%
2. Pada Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target 15,72, dengan capaian 30,97 atau 191,01%.
3. Pada Indikator Indeks Pengawasan Kearsipan dengan target 50 dengan capaian 49,47 atau 98,94.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.3 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target RenstraPerangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		CatatanAnalisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13
1	Nilai Kegemaran Membaca			55	55	60	65	50,57	50,16	57,34	62,21	68	70	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			15,50	15,68	15,70	15,72	16,21	20	18,43	30,97	35	37	
3	Indeks Pengawasan Kearsipan			35	40	45	50	-	10,27	46,28	49,47	50	55	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan

Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Permasalahan	Hambatan
peningkatan minat baca masyarakat	Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut layanan berbasis digital
Sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang tersedia seperti fasilitas internet, lemari arsip, bahan pustaka.
Pengelolaan kearsipan yang memenuhi kaidah mudah ditemukan, mudah disimpan dan dipahami	Belum optimalnya penerapan system kearsipan
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya bidang perpustakaan dan kearsipan	keterbatasan anggaran dalam rangka Diklat Teknis Bidang Perpustakaan dan kearsipan

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Peluang	Tantangan
Meningkatnya kepercayaan dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kepala Daerah	Perubahan kebijakan pemerintah berdampak pada operasional dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan

Peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan dan perangkat daerah lain untuk pengembangan literasi	Gedung perpustakaan daerah belum memenuhi standar pelayanan
Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan arsip dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan akses, dan keamanan informasi	Perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi dan hiburan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Promosi Gemar Membaca
2. Peningkatan sarana penunjang Perpustakaan dan kearsipan
3. Pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
4. Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada table berikut:

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.6 (T-C31)** berikut ini:

Tabel 2.6 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Program Pembinaan Perpustakaan		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		314.595.800	Program Pembinaan Perpustakaan		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		314.595.800	
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perpustakaan yang dikelola		166.496.000	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perpustakaan yang dikelola		166.496.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	76.353.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	76.353.000	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	90.143.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	90.143.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				148.099.800	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				148.099.800	
	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	3 Orang	75.022.000	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	3 Orang	75.022.000	

	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	73.077.800	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	73.077.800	
	Program Pengelolaan Arsip		Tingkat Ketersediaan Arsip	75	70.589.000	Program Pengelolaan Arsip		Tingkat Ketersediaan Arsip	75	70.589.000	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				70.589.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				70.589.000	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	15000 berkas	35.828.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	15000 berkas	35.828.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	34.761.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	34.761.000	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip	70 %	96.682.500	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip	70 %	96.682.500	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				96.682.500	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				96.682.500	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Arsip	29.826.500	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Arsip	29.826.500	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Berkas	66.856.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	1000 Berkas	66.856.000	

								Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50	2.268.223.161	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50	2.268.223.161	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.354.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.354.950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1.575.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1.575.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.907.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.907.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD.	1 Dok	1.114.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD.	1 Dok	1.114.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.008.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.008.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	13	1.641.431.895	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	13	1.641.431.895	
			Jumlah Laporan Keuangan	1				Jumlah Laporan Keuangan	1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13	1.635.751.895	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13	1.635.751.895	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan SKPD	65 Dokumen	5.680.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan SKPD	65 Dokumen	5.680.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		12.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		12.000.000	
			Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD					Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD	1	12.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD	1	12.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD		205.355.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD		205.355.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1.264.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1.264.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	6.091.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	6.091.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	198.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	198.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan		102.410.820	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan		102.410.820	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	102.410.820	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	102.410.820	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor		185.964.056	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor		185.964.056	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	173.964.056	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	173.964.056	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		94.479.840	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		94.479.840	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	43.743.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	43.743.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	45.428.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	45.428.000	
	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPeralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1	5.308.840	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPeralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1	5.308.840	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada RPJMN 2025-2029, yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program** pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan **RPJP Nasional 2025-2045**. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2026, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah *"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*. Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan RKP dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta selaras dengan Prioritas Nasional yang mengacu pada visi-misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan PDMN Nomor 10 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026 ada arah kebijakan Pembangunan Nasional yang menyentuh literasi dan peran perpustakaan dalam memperkuat budaya membaca dan sains. Salah satunya yaitu memperkuat kegemaran membaca dan kemampuan literasi Masyarakat sebagai bagian dari Pembangunan Masyarakat yang Makmur dan harmonis.

Sasaran RKP perpustakaan Nasional Tahun 2026 diarahkan untuk menguatkan budaya literasi terutama di segmen yang lebih luas seperti generasi muda dan Masyarakat desa.

Fokus Utama RKP 2026:

- Penguatan koleksi dan fasilitas:
Meningkatkan jumlah dan kualitas koleksi, serta memperbaiki

sarana/prasarana fisik maupun digital.

- Budaya baca dan literasi masyarakat:
Gerakan literasi nasional yang lebih inklusif dan merata, khususnya di desa, pelajar, dan komunitas lokal.
- Profesionalisme SDM:
Program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk pustakawan dan pengelola layanan literasi.
- Efisiensi dan layanan modern:
Digitalisasi layanan perpustakaan, efisiensi sistem manajemen, dan integrasi teknologi informasi.
- Perluasan jaringan layanan:
Pengembangan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 “Perpustakaan Hadir demi Martabat Bangsa”. Perpustakaan sebagai instrumen penting dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengetahuan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Arsip Nasional RI Tahun 2026 menyesuaikan arah Pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Prioritasnya adalah :

- Penguatan akses dan kualitas pelayanan kearsipan sebagai bagian dari revolusi mental dan transformasi pelayanan public.
- Implementasi SPBE dan akuntabilitas kelembagaan yang efektif sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Sasaran RKP ANRI 2026

- Budaya tertib arsip :
Peningkatan indeks budaya tertib arsip dari institusi publik dan Masyarakat umum
- Memori kolektif bangsa:
Penguatan indeks memori kolektif bangsa dengan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya.
- Tata Kelola kearsipan:
Penguatan SRIKANDI, percepatan digitalisasi arsip, integrasi system informasi (SPBE).
- Ketersediaan dan pelayanan arsip:
Peningkatan arsip tersedia di ANRI dan Lembaga mitra; layanan via JIKN lebih optimal.

Visi ANRI 2025-2029 “ Terwujudnya ekosistem kearsipan yang terintegrasi untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa serta tata Kelola

pemerintahan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah **“peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”**. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaansumberdayaalam dan kualitaslingkungan, sertamitigasibencana
- e. Peningkatankapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelolapemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Target sasaranTahun 2026
	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Tata Kelola Arsip	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah	Indeks Pengawasan Kearsipan	55
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Perpustakaan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perpustakaan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk meningkatnya kegemaran membaca Masyarakat dan meningkatkan kinerja pengelola kearsipan daerah.
- o Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun

2026 Dinas Perpustakaan melaksanakan 4 program dan 12 Kegiatan serta 26 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2 (T-C-32) berikut:

Tabel 3.3 (T-C-32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KODE		
1	2	3	4	5	6
	Urusan Bidang Perpustakaan				
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		70	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dikelola Kabupaten/Kota		100	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		10	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya		1	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80	
	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	umlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya		3	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan		1	
	Bidang Kearsipan				
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip		80	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		15000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota		1	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip		70	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				
				1000	

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		1000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan		74	
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan		71	
		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan		71	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		5	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja		5	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis		1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD.		1	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		13	
		Jumlah Laporan Keuangan		1	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13	
	Pelaksanaan Pentasahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		65	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		1	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD		1	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya		5	
		Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab		1	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai		5	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD		100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan		6	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Dipelihara		7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berisikan program dan kegiatan, Indikator kinerja program, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1T-C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Perpustakaan				2.749.990.461				2.122.210.165	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				2.582.718.961				2.034.353.824	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Bolsel	70	314.595.800	DAU		72	37.000.000	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dikelola Kabupaten/Kota	Bolsel	100	166.496.000	DAU		100	20.000.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Bolsel	10	76.353.000	DAU		10	20.000.000	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	Bolsel	1	90.143.000	DAU		-	-	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bolsel	80	148.099.800	DAU		-	17.000.000	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	Bolsel	3	75.022.000	DAU		8	17.000.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah	Bolsel	1	73.077.800	DAU		-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Kabupaten/ Kota yang dikembangkan</i>								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan	Bolsel	75	2.268.223.161	DAU		75	1.997.353.824	
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan		71				71		
		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan		71				71		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bolsel	5	8.354.950	DAU		5	7.384.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Bolsel	5				5		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	1 Dok	1.575.000	DAU		1 Dok	1.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Bolsel	1 Dok	1.907.250	DAU		1 Dok	1.530.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bolsel	1 Dok	1.750.000	DAU		1 Dok	1.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Bolsel	1 Dok	1.114.000	DAU		1 Dok	1.530.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bolsel	1 Dok	2.008.700	DAU		1 Dok	1.424.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Bolsel	13	1.641.431.895	DAU		13	1.450.528.444	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Keuangan	Bolsel	1		DAU		1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	13	1.635.751.895	DAU		13	1.444.848.444	
	Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	65	5.680.000	DAU		60	5.680.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	Bolsel	2	12.000.000	DAU		2	11.400.000	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	Bolsel	4				4		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	2	12.000.000	DAU		2	11.400.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Bolsel	5	18.126.000	DAU		5	16.500.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolsel	5	18.126.000	DAU		5	16.500.000	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD	Bolsel	100	205.355.600	DAU			170.550.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bolsel	1	1.264.600	DAU		1	1.550.000	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bolsel	1	6.091.000	DAU		1	6.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	50	198.000.000	DAU		50	163.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Bolsel	6	102.410.820	DAU		5	59.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bolsel	6 Unit	102.410.820	DAU		5 Unit	59.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Bolsel	100%	185.964.056	Bolsel		100%	194.078.380	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bolsel	1	12.000.000	Bolsel		1	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bolsel	1	173.964.056	Bolsel		1	182.078.380	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Dipelihara	Bolsel		94.479.840	Bolsel			87.413.000	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bolsel	1	43.743.000	Bolsel		1	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bolsel	5	45.428.000	Bolsel		5	42.063.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bolsel	1	5.308.840	Bolsel		1	5.350.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				167.271.500	DAU			87.856.341	
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Bolsel	75	70.589.000	DAU		75	38.600.000	
	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Bolsel		70.589.000	DAU			38.600.000	
	<i>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</i>	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	Bolsel	15000 berkas	35.828.000	DAU		15000 berkas	26.500.000	
	<i>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Bolsel	1 Laporan	34.761.000	DAU		1 Laporan	12.100.000	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Bolsel	70 %	96.682.500	DAU		70%	49.256.341	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Bolsel		96.682.500	DAU				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								49.256.341	
	<i>Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</i>	<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>	Bolsel	1000 Arsip	29.826.500	DAU		1000 Arsip	29.256.341	
	<i>Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	Bolsel	1000 Arsip	66.856.000	DAU		1000 Arsip	20.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

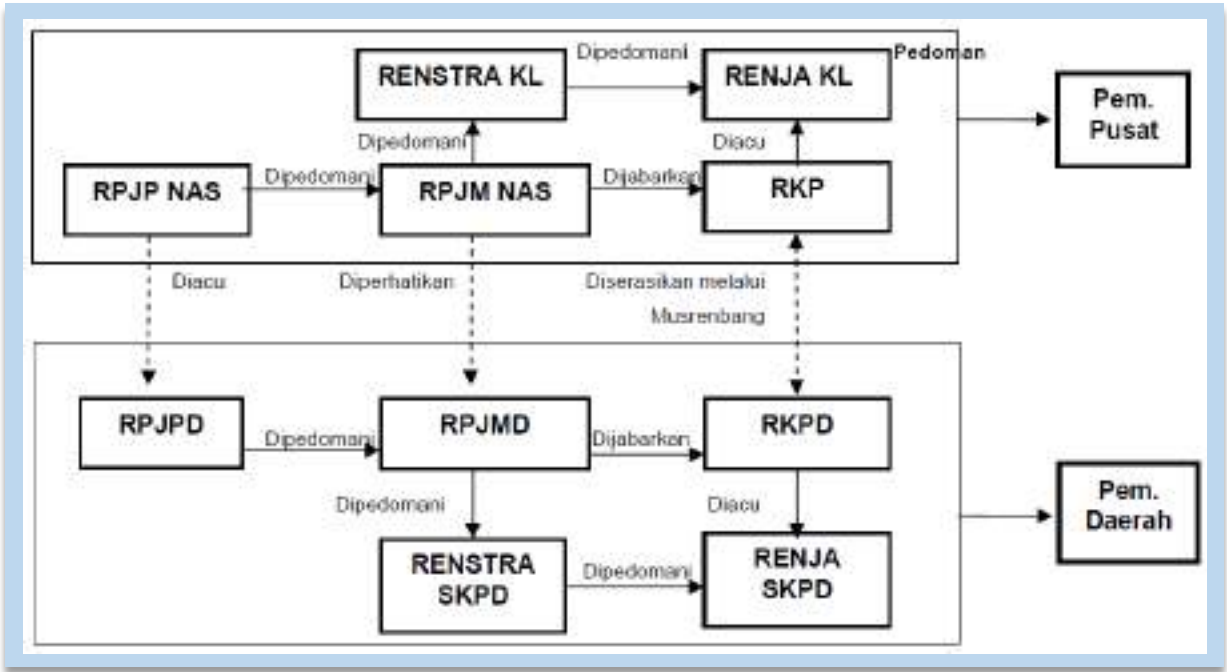
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perikanan menyusun Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan Renja.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan **Gambar 1.1**, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) secara terpadu, partisipatif, dan demokratis, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen Renja ini berfungsi sebagai: 1. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, 2. Rujukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten, serta 3. Acuan dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN. 2 Dengan

demikian, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen kunci yang menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan pengembangan perikanan kelautan;
- 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 5) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis PERIKANAN
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PERIKANAN
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PERIKANAN
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PERIKANAN
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERIKANAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun-2) dan proyeksi capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan				Faktor Pendukung
1	A.PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		a. Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sumber daya ASN Dinas Perikanan yang berkualitas
			Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		b. Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
			Sub Kegiatan	Penata Usahaan Barang Barang Milik Daerah Pada SKPD	
		c. Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

			Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
		d. Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2. Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		f. Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	B.PROGRAM	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Perencanaan program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan
		a. Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			2. Sub Kegiatan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
3	PROGRAM	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Perencanaan program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat /kelompok pengolah hasil dan pemasaran
		Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupeatn /Kota		

			Sub Kegiatan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan				Faktor Penghambat
1	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
		b. Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/service AC Kantor tidak dilaksanakan disebabkan kondisi AC Kantor yang telah rusak berat
2	PROGRAM	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIAYA			Tidak tersedia anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ko de	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					tahun 2024 (n-2)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) /Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2		3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/4)
1	A. PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85%	85%	85%	85%	100%	85	85	75%

		a. Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75	75%
			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75	75%
			2. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100	65	65%
		b. Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100	65	65%
			1. Sub Kegiatan	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Dokumen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65	45%
		c. Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100	45	45%

			1. Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUn dangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
		d. Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100	65	65%
			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	9 Unit	4 Unit	4	4	100%	4	25	16%
			2. Sub Kegiatan	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100	70	70%
		e. Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti	100%	100%	100%	80%	80%	100	85	70%

			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100	85	70%
		f. Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100	65	65%
			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	19 Unit	12 Unit	14	14	100%	19	4	45%
			2. Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	4 Unit	3 Unit	2	2	100%	4	0	0%
	B.PROG RAM	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	22.000 (ton)	1690 0	16000	16900	106%	18,000	12.45 0	70%

		a. Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sarana prasarana yang diserahkan ke masyarakat/kelompok nelayan	90 Unit	28	24	24	100%	10	0	0%
			1. Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (unit)	Jumlah prasarana yang dibangun (Unit)	74 Unit		4	4	100%	10	0	0%
	C. PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	44.5 Ton	44.3	44.35	44.35	100%	47,5	31.5	65%
		a. Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	7 Rekomendasi	0	0	0	0%	0	0	0%

			1. Sub Kegiatan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah pelaku usaha perikanan yang telah diterbitkan Izin usaha perikanan dengan penetapan prosedur (dokumen)	7 Persyaratan		1	1	100%	1	0	0%
		b. Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100%	100	100	100%	100	0	0	0%

			1. Sub Kegiatan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang dibantu	22000 Calon Industrikan	0	0	0	0%	0	0	0%
	PROGRAM	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Jumlah Produk Olahan serba ikan	3	1	1	1	100%	1	0	0%
		Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Binaan	5 Kelompok	5	5	5	100%	0	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PERIKANAN

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa

1. Pada Indikator Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan target 16000 (Ton), target yang tercapai tercapai 16.900 (Ton)
2. Pada Indikator Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan target 44.3 (Ton), target yang tercapai tercapai 44.35 (Ton)

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perikanan tercantum pada Tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan PERIKANAN

NO	Indikator	Satuan	SPM/Standard Nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun			Realsiasi Capain		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Produksi Budidaya Perikanan	Ton		Meningkatnya Produksi Perikanan	46.5	46.5	47.5	44.35	31.5	47.5	48.5	
2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun			24.5 Kg/Kapita/Tahun	24.5 Kg/Kapita/Tahun	25.5 kg/Kapita/Tahun	22,7		25.5 kg/Kapita/Tahun	26.5 Kg/kapita/Tahun	
3	Produksi perikanan tangkap	Ton			17000	17000	18000	16.900	12,450	18000	19000	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PERIKANAN

Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan, hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Perikanan Budidaya	
Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil / tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar;	Keterbatasan modal dan informasi pasar
Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;	Lahan budidaya sebagian besar masi tradisyonal
Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul;	Calon induk yang berkualitas masi terbatas
Tingginya harga pakan;	Pakan/pelet ikan masi didatangkan dari luar kota
Ketidakstabilan harga jual dan keterbatasan pasar;	harga jual di masing-masing pembudiday

		a yang berbeda
	Hama dan penyakit ikan	Ketidaksiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit;
	Peningkatan peluang pasar hasil perikanan budidaya;	Masi terbatasnya stok permintaan pasar
	Pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.	sebagin lokasi budidaya sumber airnya masi melalui irigasi - irigasi pertanian
Perikanan Tangkap		
	Informasi produksi hasil tangkapan non Pelabuhan	keterbatasan petugas pengumpul data dilapangan dan keterbatasan teknologi oleh nelayan
	Peningkatan produksi melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.	masi menerpkan tekn

Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (overfishing) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, bahan peledak serta Potassium.		Pengawasan sumberdaya perikanan yang belum optimal
Sarana dan prasarana perikanan tangkap, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana tangkap maupun alat tangkap, dan SDM yang belummemadai		Terbatasnya permodalan dan pelatihan - pelatihan oleh intasnsi terkait
Rendahnya SDM dan kelembagaan nelayan terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai;		Keterbatasan pengetahuan teknologi tepat guna oleh nelayan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
Belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu dan hilir;		
Belum optimalnya penumbuhan sentra-sentra pengolahan hasil perikanan baik usaha skala rumah tangga maupun skala besar yang ditunjang dengan dukungan permodalan, pemasaran dan peningkatan sumberdaya manusia;		Masi terbatasnya dukukungn a permodalan dari perbankan untuk sentra - sentra usaha skala kecil
Belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan		keterbatsan sarana pengolahan yang sesuai

		SOP pengolahan ikan yang baik

Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kebijakan dan implementasinya pada sub sektor kelautan dan perikanan sehinga dimasukan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan lima tahunan 2021 sampai 2026	Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP-RI-715;
Teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang;	Peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas tinggi dalam industri perikanan dan kelautan yang memanfaatkan teknologi tinggiini diperhadpkan dengan kondisi penerapan teknologi
Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi;	Keterbatasan bahan baku untuk bahan baku industri kelautan dan perikanan
Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.	Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan karena semakin ketatnya persaingan pasar perikanan dan kelautan

Peyediaan sarana pendukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)	Ketersedian lahan budidaya air payau minimal 13 Ha yang disediakan Pemerintah Kab. Bolssel dalam bentuk Perda Kawsan Budidaya Air Payau

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi sampai dengan Tahun 2026
 - Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 22.000 (Ton)
 - Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 44.5 (Ton)
 - Peningkatan Konsumsi Ikan 24 KG/Kapita/Tahun
2. overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat;
3. pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan;
4. Penguatan kelembagaan masyarakat/Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan;
5. Konflik antar nelayan (penempatan rumpon);
6. Perlunya Penguatan kapasitas kelompok usaha bidang perikanan dan kelautan;
7. Minimnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan;
8. Restrukturisasi armada tangkap;
9. Belum optimalnya fungsi dan peran TPI;
10. Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya;
11. Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan pemasaran;
12. Masih rendahnya minat pelaku usaha budidaya/Pokdakan untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan food safety dan jaminan mutu;

13. Ketersediaan hasil produksi perikanan tidak stabil;
14. Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut:

Tabel 2.7 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALSISI KEBUTUHAN					Catatan Penting	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output					
			Lokasi	Target Kinerja Capaian Program	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Target Kinerja Capaian Program	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.45 Skor	3.110.208.478 ,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.45 Skor	3.110.208.478 ,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat		0 3.45	3.110.208.478 ,00	[Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat		0 3.45	3.110.208.478 ,00	
3	25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
3	25	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi					

		kasi Keuangan SKPD					kasi Keuangan SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	10.300.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	10.300.000,00	
3	25	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
3	25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	
		-										
3	25	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	43.442.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	43.442.000,00	
3	25	Bimbingan Teknis					Bimbingan Teknis					

[illegible]

			Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	467.857.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	467.857.000,00	
		-										
3	25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		3.45 Skor	372.665.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		3.45 Skor	372.665.000,00	
3	25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	325.165.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	325.165.000,00	
3	25	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		[Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		0 3.45	3.110.208.478,00	[Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		0 3.45	3.110.208.478,00	

		perangkat daerah]					perangkat daerah]					
3	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	47.500.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	47.500.000,00	
3	25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		3.45 Skor	219.710.988,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		3.45 Skor	219.710.988,00	
3	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	
3	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	12 Laporan	207.710.988,0 0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	12 Laporan	207.710.988,0 0	
3	2 5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		3.45 Skor	49.315.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		3.45 Skor	49.315.000,00	
3	2 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
3	2 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas					

		Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
3	2 5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		18000 Ton pertahu n	4.784.280.150 ,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		18000 Ton pertahu n	4.784.280.150 ,00	
		[Meningkatkan Produksi perikanan tangkap]										
3	2 5	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap		18000 Ton	4.770.295.150 ,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap		18000 Ton	4.770.295.150 ,00	
3	2 5	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					
3	2 5	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					

3	2 5	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	841.283.000,00		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	841.283.000,00	
3	2 5	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap		18000 Ton pertahun	13.985.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap		18000 Ton pertahun	13.985.000,00	
3	2 5	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	4.020.000,00		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	4.020.000,00	
3	2 5	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil										
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua	5 Kelompok	9.965.000,00		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua	5 Kelompok	9.965.000,00	

			Pengembangan Kelembagaannya	Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pengembangan Kelembagaannya	Kecamatan, Semua Kel/Desa			
3	25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		47.5	1.859.422.394,00	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		47.5	1.859.422.394,00	
3	25	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										
3	25	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.880.000,00		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.880.000,00	
3	25	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

3	25	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	14.025.000,00		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	14.025.000,00	
3	25	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	245.900.000,00		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	245.900.000,00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						552,260,000.00					530,000,000.00	
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	Angka Konsumsi Ikan		25.5	552.260.000,00	[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	Angka Konsumsi Ikan		25.5	552.260.000,00	

3	2 5	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		25.5 Kg/KAP/TH	12.010.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		25.5 Kg/KAP/TH	12.010.000,00	
3	2 5	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko					
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	12.010.000,00		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	12.010.000,00	
3	2 5	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)		25.5 Kg/Kap/Th	540.250.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)		25.5 Kg/Kap/Th	540.250.000,00	

		Kabupaten/ Kota					Kabupaten/ Kota					
3	2 5	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Pelaku Usaha	540.250.000,00		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Pelaku Usaha	540.250.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrembang
Tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	VOLUME	SATUAN	Catatan
1		2	4	5	6	7
Pengelolaan Perikanan Tangkap						
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meyambanga Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Kelompok Nelayan (Perahu Fiber, Rakit)	1	Kelompok	Lengkapi dengan proposal pendukung 2 kelompok
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Momalia I, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Untuk Kelompok Nelayan	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Momalia Tiga, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pengadaan Bantuan Kelompok Nelayan 1 Set	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Luwoo, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Kelompok Nelayan	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Sinombayuga, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Kelompok Nelayan 3 Kelompok	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Molosipat, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Nelayan (Katintin) 10 Unit	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Molosipat, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Nelayan (Rakit) 5 Buah	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Manggada, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Kelompok Nelayan	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tonala, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan perahu nelayan 1 set, 2 kelompok	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tonala, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Bibit Kelapa, Pala, Cingkeh, Jagung, 2 Kelompok	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meyambanga, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan perahu Nelayan 2 set. 2 kelompok	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Dumagin B, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pengadaan Bibit ikan air tawar 10000 ekor	1	Kelompok	Usulan dilengkapi dengan data calon penerima/proposal

Daerah Kabupaten/ Kota					
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dumagin B, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pengadaan Alat-alat Perikanan/Nelayan 10 unit	1	Kelompok	Usulan dilengkapi dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dumagin A, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pengadaan Kelengkapan Nelayan Perahu Mesin 3 kelompok	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dayow, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Peralatan Perahu dan alat tangkapan 1 kelompok	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Sakti, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pembangunan tambahan perahu 1 unit	1	Unit	Usulan dilengkapi dengan proposal untuk diteruskan ke Provinsi
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Milangoda a, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 1 kegiatan	1	Kegiatan	Lengkapi usulan dengan proposal kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Milangoda a, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Kartu KUSUKA 100 orang	100	Orang	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Milangoda a Barat, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Perahu Viber Bagi Nelayan 50 unit	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Milangoda a Barat, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Mesin Katinting 50 unit	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Sarana Usaha	Milangoda a Barat, Kab. Bolaang	Bantuan Bagan/Rumpun 2 unit	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon

Perikanan Tangkap	Mongondow Selatan				penerima/proposal
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Milangoda Barat, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Rakit Bagi Nelayan 5 unit	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pakuku Jaya, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bibit Ikan Tawar	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pintadia, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Perahu Kantinting Fiber 10 unit	1	Kelompok	Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/proposal
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pintadia, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Pengadaan Rumpon 2 unit	1	kelompok	Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Popodu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pengadaan Perahu & Mesin 1 paket	1	Kelompok	Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/proposal
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Popodu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pengadaan Rakit 1 unit	1	Kelompok	Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/proposal
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Soguo, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan Perahu Fiber 10 unit	1	Kelompok	Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/proposal
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Deaga, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penyediaan Bantuan Untuk Kelompok Nelayan (Rakit Tuna 1 Unit)	1	Kelompok	Siapkan Dokumen Pendukung
Penyediaan Prasarana Usaha	Sakti, Kab. Bolaang Mongondow	Bantuan kelompok budidaya 2 kelompok	1	Kelompok	Lengkapi dengan proposal pendukung

	Perikanan Tangkap	ow Selatan				
Pengelolaan Perikanan Buidaya						
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Botuliodu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan bibit ikan air tawar 50000 ekor	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Botuliodu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Bantuan pakan ikan air tawar 40 sak	1	Kelompok	Lengkapi usulan dengan data calon penerima/proposal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, disampaikan telaahan kebijakan nasional yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sebagai berikut. RKP Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan kerangka pendanaan, serta menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing. Dokumen ini berfungsi untuk mengoperasionalkan sasaran RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 pada tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan isu strategis nasional. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, khususnya Dinas Perikanan, kebijakan nasional ini menjadi rujukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sinkronisasi Renja Dinas dengan RKP 2026 dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional, serta forum koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait. Proses ini memastikan keterpaduan perencanaan, keterukuran indikator kinerja, dan konsistensi pendanaan antara APBD dan APBN.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

dengan kegiatan :

- a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- c. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Program Pengelolaan Perikanan

Budidaya dengan kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Dengan kegiatan :
- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - b. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah **“peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”**. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4						
	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah luas lokasi budidaya x produktifitas	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah produksi/tahun	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
			Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi kartu nelayan sejahterah dan kartu asuransi nelayan	Jumlah nelayan yang terdaftar Asuransi Nelayan/Tahun	2000	2000	2000	2000	2000
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai ssop (Standard sanitasi operasioanal Procedure) dan gmp (Good Manufacturin g Practice)	Jumlah Produk olahan yang dihasilkan/jumlah produk yang dipasarkan	5	6	6	7	7
			Jumlah konsumsi ikan/kapita/tahun (kg)	Kg/Kapita/Tahun	23 Kg	24 Kg	25 Kg	26 Kg	27 Kg

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perikanan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perikanan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai

dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perikanan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
2. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Perikanan melaksanakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) Kegiatan serta 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Kegiatan. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Sub Kegiatan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Kegiatan. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- f. Kegiatan. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- h. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Kegiatan. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - Sub Kegiatan. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
 - Sub Kegiatan. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
 - Sub Kegiatan. Perencanaan, dan Pengembangan

Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

- Sub Kegiatan. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Sub Kegiatan. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- Sub Kegiatan. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

c. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala

Mikro dan Kecil

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- b. Kegiatan. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersusun sebagaimana Tabel 4.1 TC-33

Tabel 4.1 T-C-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2027		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PERIKANAN			10.306.171.022,00					9.098.500.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN			10.306.171.022,00					9.098.500.000,00	
		PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN			10.306.171.022,00					9.098.500.000,00	
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG			3.110.208.478,00				-	2.953.500.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN									
		DAERAH									
		KABUPATEN/KOTA									
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 3.45	3.110.208.478,00	-	-	-	-	2.953.500.000,00	-
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.935.840.990,00			Dinas Perikanan	-	2.112.500.000,00	DINAS PERIKANAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN								
		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen	100	10.300.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		12.500.000,00	DINAS PERIKANAN
		Penatausahaan dan	Dokumen	Mongondow							
		Pengujian/Verifikasi		Selatan, Semua							
		Keuangan SKPD		Kecamatan,							
				Semua Kel/Desa							
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik	-	-	12.000.000,00			Dinas Perikanan	-	22.500.000,00	DINAS PERIKANAN
		Daerah pada Perangkat									
		Daerah									
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		22.500.000,00	DINAS PERIKANAN
		Penatausahaan Barang Milik	Mongondow								
		Daerah pada SKPD	Selatan, Semua								
			Kecamatan,								
			Semua Kel/Desa								
		-	-	-	3.110.208.478,00	-	-	-	-	2.953.500.000,00	-
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	43.442.000,00			Dinas Perikanan	-	45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang	5 Orang	43.442.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI	Dinas Perikanan		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN

			Mengikuti Bimbingan Teknis			Mongondow	UMUM (DAU)				
			Implementasi Peraturan			Selatan, Semua					
			Perundang-Undangan			Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					
		[Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 3.45	3.110.208.478,00	-	-	-	-	2.953.500.000,00	-
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	477.234.500,00			Dinas Perikanan	-	473.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	1.894.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		16.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Perlengkapan Kantor yang			Mongondow					
			Disediakan			Selatan, Semua					
						Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.483.500,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
					Mongondow						
					Selatan, Semua						
					Kecamatan,						
					Semua Kel/Desa						
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan	20 Laporan	467.857.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Penyelenggaraan Rapat			Mongondow					
			Koordinasi dan Konsultasi			Selatan, Semua					
			SKPD			Kecamatan,					

						Semua Kel/Desa					
		-	-	-	3.110.208.478,00	-	-	-	-	2.953.500.000,00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN								
		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	372.665.000,00			Dinas Perikanan	-	62.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan			Kab. Bolaang					
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	325.165.000,00	Mongondow	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN

[illegible]

	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN								
		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		12.500.000,00	DINAS PERIKANAN
			Jasa Komunikasi, Sumber			Mongondow					
			Daya Air dan Listrik yang			Selatan, Semua					
			Disediakan			Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	207.710.988,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		175.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Jasa Pelayanan Umum			Mongondow					
			Kantor yang Disediakan			Selatan, Semua					

						Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	-	-	49.315.000,00			Dinas Perikanan	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		Daerah Penunjang Urusan									
		Pemerintahan Daerah									
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan	1 Unit	42.240.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		42.500.000,00	DINAS PERIKANAN
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Mongondow					
						Selatan, Semua					
						Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 Unit	7.075.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
			Perizinannya			Mongondow					
						Selatan, Semua					
						Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					

2	3.25.03	PROGRAM			4.784.280.150,00				-	3.585.000.000,00	
		PENGELOLAAN									
		PERIKANAN TANGKAP									
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN								
		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
		[Meningkatnya Produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18000	4.784.280.150,00	-	-	-	-	3.585.000.000,00	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	4.770.295.150,00			Dinas Perikanan	-	3.555.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah Data dan Informasi	1 Dokumen	9.810.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Sumber Daya Ikan di			Mongondow					

			Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Prasarana Usaha	35 Unit	3.919.202.150,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		2.700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Perikanan Tangkap yang Tersedia								
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Sarana Usaha	25 Unit	841.283.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Perikanan		850.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia								
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	RENCANA	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN								

1	2	OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan	-	-	13.985.000,00			Nelayan Kecil	-	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		Kecil dalam Daerah									
		Kabupaten/Kota									
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	4.020.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Nelayan Kecil		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Mongondow					
						Selatan, Semua					
						Kecamatan,					
						Semua Kel/Desa					

	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
			Jumlah Kelompok Nelayan	5 Kelompok	9.965.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Nelayan Kecil		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Kecil yang Difasilitasi			Mongondow					
			Pembentukan dan			Selatan, Semua					
			Pengembangan			Kecamatan,					
			Kelembagaannya			Semua Kel/Desa					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN								
		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	3.25.04	PROGRAM			1.859.422.394,00				-	2.030.000.000,00	
		PENGELOLAAN									
		PERIKANAN BUDIDAYA									
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi	47.5	1.859.422.394,00	-	-	-	-	2.030.000.000,00	-

			Perikanan Budidaya								
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	1.859.422.394,00			Nelayan Budidaya	-	2.030.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> 	12 Dokumen	8.880.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Nelayan Budidaya		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	RENCANA	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
		URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN							

1	2	OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET RENJA							
				Perangkat Daerah TAHUN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				2025				DAERAH			
1	2	3	4	7	8	9	10	13	14	15	16
			Jumlah Prasarana		22 Unit	1.590.617.394,00	Kab. Bolaang	2. Peman- gunan Infra struktur dan	Nelayan Budidaya		1.500.000.000,00
			Pembudidayaan Ikan dalam				Mongondow	Penguatan			
			1 (Satu) Daerah				Selatan, Semua	Sektor			
			Kabupaten/Kota				Kecamatan,	Pertanian, Perikanan dan UMKM			
							Semua Kel/Desa	Peningkata n Produksi Dan Produk			
								tivitas			
								Komoditas			
								Unggulan			
								Daerah			
								Serta			
								Inovasi			
								Produk			
								Lokal			
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Hasil Ikan dan		5 Dokumen	14.025.000,00	Kab. Bolaang	2. Peman- gunan Infra struktur dan	Nelayan Budidaya		20.000.000,00
			Lingkungan Budidaya dalam				Mongondow	Penguatan			
			1 (Satu) Daerah				Selatan, Semua	Sektor			
			Kabupaten/Kota yang Teruji				Kecamatan,	Pertanian, Perikanan dan UMKM			

		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN										
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17	
4	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN			552.260.000,00				-	530.000.000,00		
		DAN PEMASARAN HASIL										
		PERIKANAN										
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	Angka Konsumsi Ikan	25.5	552.260.000,00	-	-	-	-	530.000.000,00	-	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar	-	-	12.010.000,00			Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
		Usaha Pengolahan Hasil										
		Perikanan bagi Usaha Skala										
		Mikro dan Kecil										
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko										
			Jumlah Data dan Informasi	10 Dokumen	12.010.000,00	Kab. Bolaang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Usaha Skala Mikro dan Kecil		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
			Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan			Mongondow						
			berdasarkan skala usaha dan risiko			Selatan, Semua						

			Perikanan Skala Mikro dan	Usaha		Mongondow	UMUM (DAU)	Industri Pengolahan Ikan			
			Kecil dalam 1 (Satu) Daerah			Selatan, Semua					
			Kabupaten/Kota yang			Kecamatan,					
			Terfasilitasi			Semua Kel/Desa					
	J U M L A H			10.306.171.022,00					9.098.500.000,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

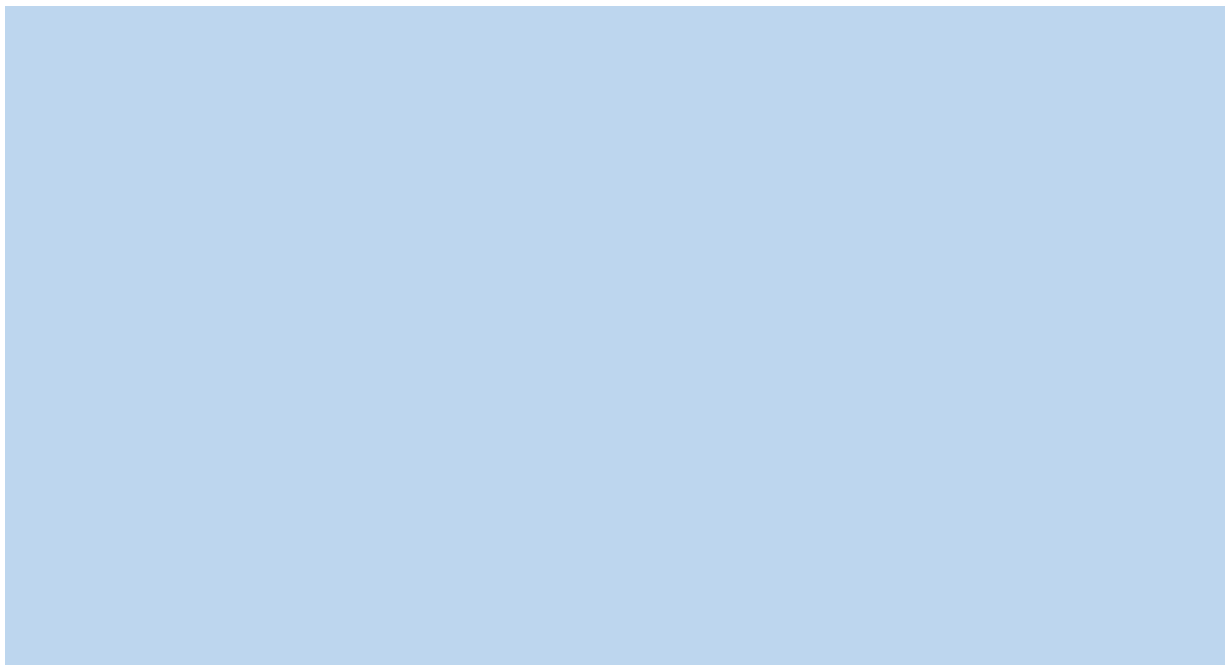
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,

- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Kepariwisataaan
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Kepariwisataaan
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pengembangan Kepariwisataaan
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Program Pemasaran Pariwisata, Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan	Jumlah Promosi, event yang dilaksanakan (Pelaksanaan Nyong Noni Sulut 2024 dan Deep Extreme Indonesia,) dan Penganggaran

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel2.2 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingka t Realisa si (%)	Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTahun 2025	RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan	Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	Bidang Urusan Pariwisata									
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pertumbuhan Wisatawan	6,75	0,022	1,51	2,23		-	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	10							
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DestinasiPariwisata yang Dikelola								
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingka t Realisa si (%)	Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTahun 2025	RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan	Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	JumlahLaporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang MengikutiFasilitasiPengembanganKompetensiSumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	15	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10	-	-	-	-	-	-	-
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan DokumenPerencanaanPerangkat Daerah Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	IndeksKepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata								
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata								
		Nilai SAKIP Dinas Pariwisata								
		Jumlah Dokumen Perencanaan	1	2	1	3	3	1	6	10
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	5	5	5	5	1	5	15	3
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	1	3	3	1	6	10
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPerangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025	RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4	1	4	400	1	9	9
	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	17	19	18	18	100	17	54	3,17
		Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	100	1	3	3
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	19	18	18		17	54	3,17
	PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	100	105	83	79	50	233	4,66
	AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	1	1	1	1	100 %	1	-	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	1	1	1	1	100 %	1	-	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	4	4	100%	1	-	
	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	5	12	5	-	-	5	-	
		Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab	1	1	1	1	100 %	1	-	
	Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	4	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1)		
					Target RenjaPerangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025	RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan									
	AdministrasiUmumPerangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD								
	Fasilitasi KunjunganTamud	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamud	1	1	-	-	-	1	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	50	60	60	100	65	175	2,5
	PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit	100	1	22	11
	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	3	3
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	3	3
	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	3	3
	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik								
		Jumlah Barang yang dipelihara								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	1 Unit	9	2,25
	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	11	2,2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :

1. Pada Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan target 28.000 Orang, tercapai 24.612 Orang atau 88 %
2. Pada Indikator Presentase PAD Sektor Pariwisata dengan target 0,05%, dengan capaian 23% atau 1,15%.
3. Pada Indikator Lama Kunjungan Wisatawan dengan target 1,51% dengan capaian 1,47% atau 97%.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Pariwisata tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.3 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target RenstraPerangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		CatatanAnalisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan			26.000	26.500	27.000	28.000	19.512	21.706	23.117	24.611	28.500	29.000	
2	Lama Kunjungan Wisatawan			1,36	1,39	1,44	1,51	1,36	1,37	2,23	1,47	1,6	1,6	
3	Presentase PAD Sektor Pariwisata			-	1,45	0,04	0,05	-	25,2	26,4	1,15	0,06	0,07	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Masih kurangnya sarana dan prasarana public dan pengunjung di ObjekWisata	Keterbatasan penganggaran
Pengembangan Kepariwisataan belum maksimal	Keterbatasan SDM Pariwisata dan penganggaran
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan objek wisata sehingga tidak begitu memanfaatkan keberadaan objek wisata dalam cakupan ekonomi kreatif	Masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat daerah objek wisata dalam pengembangan kepariwisataan
Masih kurangnyapromosipariwisata di luardaerah	Keterbatasan penganggaran
Perlumanajemenpengelolaanobjekwis atagunamencapai target pendapatanaslidaerah (PAD)	Kurangnya personil dalam pelaksanaan tugas
PerluadanyaPengembanganIndustri Ekonomi kreatif	Keterbatasan Sumber daya SDM dan penganggaran

Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Peluang	Tantangan
Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki sangat beragam	Persaingan kepariwisataan daerah lain yang sejenis
Perkembangan trend pasar wisatawan dan tanggapan positif masyarakat	Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata, ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam usaha pariwisata
Keseriusan dan minat pemerintah daerah dalam mengembangkan sector pariwisata sebagai sector penyumbang devisa daerah.	Jarak tempuh ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 Jam dari Ibukota Provinsi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Potensi Pariwisata
2. Peningkatan sarana penunjang Pariwisata
3. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
4. Pengembangan Pasar, Minat Khusus, Event dan Konvensi
5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada table berikut:

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.6 (T-C31)** berikut ini:

Tabel 2.6 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikator	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Presentase Pertumbuhan Wisatawan		231.000.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Presentase Pertumbuhan Wisatawan		231.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola		61.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola		61.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	1.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	1.000.000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	10	10.000.000	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	10	10.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola		170.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola		170.000.000	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	50.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	50.000.000	
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	50.000.000	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	50.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) Dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	target capaian kinerja	kebutuhan dana/Pagu indikator	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	10.000.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	10.000.000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1	50.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	1	10.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	1	10.000.000	
	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	25%	40.000.000	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase pertumbuhan wisatawan	25 %	40.000.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran			
			Jumlah Media Pemasaran					Jumlah Media Pemasaran			
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	5.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	5.000.000	
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	25.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	25.000.000	
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	10.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	10.000.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	10%	60.000.000	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	10%	60.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) Dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	target capaian kinerja	kebutuhan dana/Pagu indikator	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				60.000.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				60.000.000	
	<i>Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah terlaksananya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif</i>	1	50.000.000	<i>Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah terlaksananya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif</i>	1	50.000.000	
	<i>Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah</i>		<i>Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>	1	10.000.000	<i>Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah</i>		<i>Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>	1	10.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah Pelaku Usaha Ekraf	1,30	106.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah Pelaku Usaha Ekraf	1,30	106.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya			
	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	1	20.000.000	<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>		<i>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang memiliki Kompetensi</i>	1	20.000.000	
	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	1	1.000.000	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>		<i>Jumlah Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	1	1.000.000	
	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	15 Orang	50.000.000	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi</i>	15 Orang	50.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				35.000.000					35.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) Dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	target capaian kinerja	kebutuhan dana/Pagu indikator	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10	20.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10	20.000.000	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10	15.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10	15.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	2.605.598.584	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	2.123.643.584	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.750.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.750.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Strategis	1 Dok	1.050.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Strategis	1 Dok	1.050.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	550.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	550.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD.	1 Dok	550.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD.	1 Dok	550.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	550.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dok	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dok	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	17	2.123.643.584	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	17	2.123.643.584	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) Dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	target capaian kinerja	kebutuhan dana/Pagu indikator	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
			Jumlah Laporan Keuangan	1				Jumlah Laporan Keuangan	1		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	2.112.601.584	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	2.112.601.584	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan SKPD	1	11.042.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Keuangan ke uangan bulanan/triwulan/semesteran	1	11.042.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		11.405.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		11.405.000	
			Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD					Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD			
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD	1	11.405.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD	1	11.405.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD		151.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		151.000.000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang diadakan		60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang diadakan		60.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	35.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	25.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan pemerintahan Daerah dan program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (Outcome) Dan kegiatan (Output)	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	target capaian kinerja	kebutuhan dana/Pagu indikator	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor		206.550.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan jasa penunjang kantor		206.550.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.050.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.050.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	200.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		49.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		49.250.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	44.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	44.580.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5	4.670.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	5	4.670.000	

2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 (TC-32)
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Daya Tarik DestinasiPariwisata		Lama Kunjungan Wisatawan		
	PengelolaanDaya Tarik WisataKabupaten/Kota		Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola		
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Desa Transpatoa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Unit	
		Desa Salango Timur	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Unit	
		Desa Tolondadu II	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Unit	
		Botuliodu	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada RPJMN 2025-2029, yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program** pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan **RPJP Nasional 2025-2045**. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2026, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah *"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*. Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan RKP dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta selaras dengan Prioritas Nasional yang mengacu pada visi-misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029.

Sasaran RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Pariwisata tahun 2026, sesuai dengan dokumen KEM-PPKF 2026, adalah untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan sosial. Selain itu, Kemenparekraf juga fokus pada pengembangan destinasi pariwisata berkualitas, pemasaran pariwisata berbasis kemitraan, pengembangan industri pariwisata terintegrasi, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata.

Fokus Utama RKP 2026:

- **Pengembangan Destinasi Pariwisata:**
Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, termasuk pengembangan produk pariwisata yang beragam dan berkelanjutan.
- **Pemasaran Pariwisata:**
Memperkuat branding destinasi pariwisata dan melakukan pemasaran berbasis kemitraan strategis.
- **Pengembangan Industri Pariwisata:**

Membangun industri pariwisata yang terintegrasi dan berdaya saing.

- Pengembangan SDM:
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pariwisata melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Pengelolaan Keuangan:
Mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk mendukung program-program pariwisata.
- Harmonisasi dan Sinergi:
Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pariwisata.

Visi Kementerian Pariwisata adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Kementerian Pariwisata memiliki misi untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, memperluas pemasaran yang berorientasi pada wisatawan, serta meningkatkan kapasitas industri pariwisata. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga berupaya memperkuat ekonomi kreatif sebagai tulang punggung negara. Secara keseluruhan, visi Kementerian Pariwisata adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pariwisata agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah ***"Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing"***.

Inovasi produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Pemenuhan dan penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal;
- c. Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, regulasi, penerapan manajemen resiko, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan SPBE.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Target sasaranTahun 2026
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kunjungan dan Pendapatan Sektor Pariwisata	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	28.500
			Jumlah Tamu Wisatawan Manacanegara	69
			Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	7,38
			Presentase Tingkat Hunian Hotel	100
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,31

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Pariwisata adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Pariwisata, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Pariwisata menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Meningkatnya Kunjungan dan Pendapatan Sektor Pariwisata;

Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Pariwisata melaksanakan 4 program dan 14 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 T-C 33.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Dengan rincian 4 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan adalah urusan pilihan pariwisata dan 1 program, 8 kegiatan, 19 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dapat dilihat berdasarkan table 4.1

Tabel 4.1 T-C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENJELASAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Bidang Pariwisata									
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Wisatawan	Kab. Bolssel	6,75		DAU		7		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	Kab. Bolssel			DAU				
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	<u>1</u>	<u>50.000.000</u>	<u>DAU</u>		<u>1</u>	<u>50.000.000</u>	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Kab. Bolssel	10	10.000.000	DAU		10	10.000.000	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Kab. Bolssel		120.000.000					
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Bolssel	1	50.000.000	DAU		1	50.000.000	
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Bolssel	1	50.000.000	DAU		1	50.000.000	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bolssel	1	10.000.000			1	10.000.000	

KODE	URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATANPE NTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGETCAPA IANKINERJA	KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF	SUMBER DANA		TARGETCA PAIANKIN ERJA	KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranadalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Bolssel	1	50.000.000			1	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota	JumlahLaporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota	Kab. Bolssel	1	10.000.000			1	15.000.000	
	Program PemasaranPariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Kab. Bolssel	25		DAU		30		
	PemasaranPariwisataDalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisataKabupaten/Kota		Kab. Bolssel			DAU				
	PenguatanPromosimelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bolssel	1	5.000.000	UAD		1	5.000.000	
	FasilitasiKegiatanPemasaranPariwisataBaikDalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bolssel	1	25.000.000	DAU		1	25.000.000	
	PeningkatanKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bolssel	1	10.000.000	DAU		1	10.000.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Kab. Bolssel	10		DAU		15		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					DAU				
	Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif		1	50.000.000	DAU		1	60.000.000	

KODE	URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATANPE NTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGETCAPA IANKINERJA	KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF	SUMBER DANA		TARGETCA PAIANKIN ERJA	KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah		1	10.000.000	DAU		1	10.000.000	
	Program PengembanganSumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		1.30	-	DAU		1,50		
	Kegiatan PelaksanaanPeningkatanKapasitasSumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar									
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	JumlahLaporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1	20.000.000	DAU		1	20.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1	1.000.000	DAU		1	1.200.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang MengikutiFasilitasiPengembanganKompetensiSumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		15	50.000.000	DAU		15	50.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			-						
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif		10	20.000.000			10	20.000.000	

KODE	URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATANPE NTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGETCAPA IANKINERJA	KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF	SUMBER DANA		TARGETCA PAIANKIN ERJA	KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>		10	15.000.000	DAU		10	15.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata		3,45				3,46		
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata								
		Nilai SAKIP Dinas Pariwisata								
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan</i>								
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja</i>								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	1.000.000	DAU		1 Dok	1.050.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	500.000	DAU		1 Dok	550,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	500.000	DAU		1 Dok	550,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	500.000	DAU		1 Dok	550,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	500.000	DAU		1 Dok	550.000	

KODE	URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATANPE NTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGETCAPA IANKINERJA	KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF	SUMBER DANA		TARGETCA PAIANKIN ERJA	KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dok	500.000	DAU		1 Dok	550.000	
	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		17				17		
		Jumlah Laporan Keuangan		1				1		
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	2.112.601.584	DAU		17	2.112.601.584	
	PelaksanaanPentausahaan dan Pengujian /VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		50	11.042.000	DAU		60	11.042.000	
	AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD								
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD								
	PenatausahaanBarang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	11.405.000	DAU		1	11.405.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya								
		Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab								
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai								

KODE	URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATANPE NTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGETCAPA IANKINERJA	KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF	SUMBER DANA		TARGETCA PAIANKIN ERJA	KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BimbinganeknisImplementasiPeraturanPerundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		5	10.000.000	DAU		5	10.000.000	
	AdmiistrasiUmumPerangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	1.000.000	DAU		1	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70	150.000.000	DAU		75	150.000.000	
	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik								
		Jumlah Barang yang dipelihara								
	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	JumlahPeralatan dan Mesin yang dipelihara		5	4.670.000	DAU		5	4.670.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraan Dinas Jabatan	JumlahKendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara		4	44.580.000	DAU		4	44.580.000	
	PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan								
	PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	35.000.000	DAU		1 Unit	35.000.000	
	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	25.000.000	DAU		2 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	500.000	DAU		1	550.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	6.050.000	DAU		1	6.050.000	

KODE	URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATANPE NTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGETCAPA IANKINERJA	KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF	SUMBER DANA		TARGETCA PAIANKIN ERJA	KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	200.000.000	DAU		1	205.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang mongondow Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Sealatan dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan dilebur bersama beberapa PD diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penyelenggara Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP4K, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan. Dan selanjutnya menjadi Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan. Sejak bulan Januari 2018 berdasarkan Perda No 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah maka Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan berubah nama menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya pada Januari 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berubah namanya menjadi Dinas Pertanian

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai

dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Perangkat Daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada hasil review Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan dalam peningkatan produksi pertanian dan upaya memenuhi kebutuhan pangan.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 diupayakan agar :

1. Mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian yang lebih optimal dalam upaya pencapaian target.
2. Pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2026 harus menjadi prioritas penanganan Pangan.
3. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja PD Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
- f. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang PertanggungJawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow No 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah maka Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan berubah nama menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

- q. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
- r. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RENJA PD Tahun 2026 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan evaluasi kinerja PD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA PD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun Anggaran 2026.
3. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pedoman penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2026 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra

PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2027, mengacu pada APBD tahun 2026 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing PD, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan

yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan actor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
1.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
1.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Anggaran yang tersedia
1.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Anggaran yang tersedia
1.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Anggaran yang tersedia - Tersedianya data kelompok tani hortikultura dan tanaman pangan
1.2.2	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Anggaran yang tersedia - Tersedianya data kelompok tani perkebunan

1.3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.3.1	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	- Anggaran yang tersedia - Tersedianya data Kelompok tani peternakan
1.4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
1.4.1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Anggaran yang tersedia - Tersedianya data Kelompok tani peternakan
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-
2.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-
2.1.1	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	- Anggaran tersedia - Tersedianya data populasi ternak ditiap kecamatan
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Anggaran yang tersedia - Tersedianya data kelembagaan penyuluh di tingkat Kecamatan
4.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Anggaran yang tersedia

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada Table 2.2

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Dinas Pertanian

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

[illegible]

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	300%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	40	40	40	66	165%	40	146	365%
					Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	100%	1	3	300%

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	40	66	165%	66	172	430%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	195	150	193	129%	150	538	538%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	2	2	2	1	50%	2	5	250%
					Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	12	12	12	12	100%	12	36	300%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	300%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100	0	0	0	0%	0	0	0%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	0	0	0	0%	0	0	0%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	300%

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100	100	100	100	100%	100	300	300%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam Kondisi Baik	75	99,58	73	61,05	84%	74	234,63	313%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	24	32	29	91%	32	85	283%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2	1	1	1	100%	1	3	150%
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Petani yang	100,00	22,5	100	103,05	103%	70	195,55	196%

				PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	menggunakan Bibit Unggul								
					Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan	90,00	0	80	68	85%	80	148	164%
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian	1	2	1	1	100%	1	4	400%
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	4	0	0	#DIV/0!	0	4	100%
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	0	4	2	50%	4	6	150%
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	100	100	0	0%	100	200	200%
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2	8	3	0	0%	3	11	550%

				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	0	3	0	0%	3	3	150%
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Unggul yang beredar	1	0	1	0	0%	1	1	100%
					Jumlah Pakan Unggul yang beredar	1	0	1	0	0%	1	7	700%
				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	2	0	1	0	0%	1	1	50%
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bantuan Bibit Ternak	150	0	0	0	0%	0	0	0%
					Jumlah Bantuan Pakan Ternak	0	0	0	0	0%	0	0	0%
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	150	0	0	55	0%	0	55	37%
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kejadian Penyakit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan	2	2	1	0	0%	0	2	100%

				Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	2	0	0	0%	0	2	100%
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi	100	0	100	70	70%	100	170	170%
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	persentase Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi	100	0	100	70	70%	100	170	170%
				Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	0	4	1	25%	4	5	250%
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	100	95,03	100	38,31	38%	100	233,34	233%
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan Penyuluhan	4	4	7	2	29%	4	10	250%
					Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya	20	186	20	0	0%	20	206	1030%
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	7	4	0	0%	4	11	550%

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	186	7	0	0%	20	206	1030%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan Pembangunan Pertanian dan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu :

Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Permasalahan Umum :

Pelaksanaan tugas kurang efektif karena kekurangan staf, kurangnya peralatan kantor sehingga menjadi kendala dalam pencapaian kinerja dinas.

Solusinya : Sebagian melakukan tugas rangkap, mengusulkan penambahan staf dan penambahan fasilitas penunjang aktivitas perkantoran untuk Dinas Pertanian.

Permasalahan terkait Urusan Pilihan (Pertanian) :

1. Pengusulan pembangunan Kantor BP3K di Kec. Tomini dan Helumo melalui DAK mengalami kendala terkait Hibah Tanah.

Solusi : Menghimbau pemerintah dan masyarakat kecamatan Tomini dan Helumo agar menyiapkan lahan untuk pembangunan BP3K, atau mengusulkan pengadaan lahan baik difasilitasi Pemda ataupun Hibah dari pihak lain yang tidak mengikat.

2. Kurangnya tenaga teknis di bidang peternakan terutama tenaga teknis kesehatan hewan.

Solusi : Mengoptimalkan tenaga teknis yang sudah ada, dan mengusulkan penambahan tenaga teknis Kesehatan hewan

3. Antusias masyarakat masih rendah dalam menerima program teknologi peternakan.

Solusi : Terus melakukan sosialisasi secara langsung, melalui PPL ataupun melalui pemerintah desa

4. Permohonan bantuan Kelompok Tani/Ternak belum sepenuhnya terakomodir dalam pendanaan.

Solusi : Pengusulan permohonan alokasi anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan Kelompok Tani, melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN

5. Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian (KUR) masih kurang karena pihak bank meminta angunan walau sebenarnya tidak dipersyaratkan.

Solusi : Terus melakukan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat mengenai manfaat KUR.

- 6 Minimnya pengetahuan budidaya hortikultura bagi Kelompok Wanita Tani penerima bantuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan.

Solusi : Terus dilakukan pembinaan oleh Bidang Pangan dan Penyuluh Pertanian serta diusulkan untuk adanya kegiatan Pelatihan Budidaya aneka hortikultura bagi petani.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian tahun 2026 antara lain :

1. Ketergantungan petani terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi masih sangat tinggi.
2. Perlu adanya pengadaan alat dan mesin pertanian secara bertahap dan berimbang berdasarkan potensi baik melalui APBD serta pengusulan ke Propinsi dan Kementerian dalam bentuk E-Proposal dan Manual Proposal.
3. Usaha pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit melalui bantuan pestisida dan penyuluhan cara bercocok tanam yang efektif, efisien berbasis keseimbangan dan kesetimbangan lingkungan dalam bentuk pengendalian utama berdasarkan kearifan lokal, perlu di tingkatkan
4. Pada beberapa tempat perlu disediakan sarana pompanisai (irigasi dan tenaga surya)
5. Bantuan pupuk melalui dana APBD dan APBN serta penggalakan pemanfaatan potensi lokal pupuk alternatif (organik) dan Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik masih sangat dibutuhkan.
6. Gerakan untuk memasyarakatkan kembali wilayah Kabupaten sebagai Kabupaten Agraris dimana pertanian merupakan usaha pokok dan unggulan.
7. Kegiatan Penyuluhan, Anjagsana, Demplot dan Denfarm perlu dilakukan. Serta adanya reward terhadap para pelaku usaha tani dan bisnis pertanian juga mengikutsertakan pada Kegiatan-Kegiatan Daerah, Propinsi, Pusat (Pameran, PEDAS, PENAS).
8. Penguatan Kelembagaan di tingkat petani dalam bentuk Revitalisasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta kenaikan Status Kelompok Tani.

Berdasarkan isu-isu strategis perlu ditempuh Program yang mendukung yaitu :

1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3. Program Penyuluhan Pertanian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta

menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 4 program yang tercantum dalam RENJA Dinas Pertanian (lihat tabel 2.4)

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Pertanian
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BOLSEL	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	85	7.306.918.975	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BOLSEL	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	85	7.306.918.975	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	7.494.165	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	7.494.165	
		BOLSEL	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	1			BOLSEL	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	1		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.494.165	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.494.165	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	40	5.380.197.914	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	40	5.380.197.914	

		BOLSEL	Jumlah Laporan Keuangan	1			BOLSEL	Jumlah Laporan Keuangan	1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BOLSEL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	5.345.812.234	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BOLSEL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	5.345.812.234	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BOLSEL	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	34.385.680	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BOLSEL	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	34.385.680	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	2	18.543.450	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	2	18.543.450	
		BOLSEL	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	12			BOLSEL	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	12		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BOLSEL	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	18.543.450	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BOLSEL	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	18.543.450	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	84.560.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	84.560.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	84.560.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	84.560.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	615.083.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	615.083.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BOLSEL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BOLSEL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BOLSEL	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	12	710.298.030	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BOLSEL	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	12	710.298.030	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLSEL	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	602.225.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLSEL	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	602.225.000	
	Pengadaan Mebel	BOLSEL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	30.323.030	Pengadaan Mebel	BOLSEL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	30.323.030	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BOLSEL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	77.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BOLSEL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	77.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100	263.182.416	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100	263.182.416	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BOLSEL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	263.182.416	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BOLSEL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	263.182.416	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	227.560.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	227.560.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLSEL	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	87.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLSEL	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	87.510.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	BOLSEL	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2	140.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	BOLSEL	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2	140.050.000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	BOLSEL	Persentase Petani yang menggunakan Bibit Unggul	100%	851.780.840	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	BOLSEL	Persentase Petani yang menggunakan Bibit Unggul	100%	851.780.840	
		BOLSEL	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan	90%			BOLSEL	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan	90%		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	BOLSEL	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian	1	851.780.840	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	BOLSEL	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian	1	851.780.840	

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	BOLSEL	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	851.780.840	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	BOLSEL	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	851.780.840	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	BOLSEL	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	2.561.318.635	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	BOLSEL	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	2.561.318.635	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	BOLSEL	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2	1.159.021.735	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	BOLSEL	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2	1.159.021.735	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	BOLSEL	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	1.402.296.900	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	BOLSEL	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	1.402.296.900	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	BOLSEL	Jumlah Bibit Unggul yang beredar	1	277.899.700	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	BOLSEL	Jumlah Bibit Unggul yang beredar	1	277.899.700	
		BOLSEL	Jumlah Pakan Unggul yang beredar	1			BOLSEL	Jumlah Pakan Unggul yang beredar	1		

	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	BOLSEL	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	2	277.899.700	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	BOLSEL	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	2	277.899.700	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	BOLSEL	Jumlah Bantuan Bibit Ternak	150	4.129.221.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	BOLSEL	Jumlah Bantuan Bibit Ternak	150	4.129.221.000	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	BOLSEL	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	150	4.129.221.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	BOLSEL	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	150	4.129.221.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	BOLSEL	Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi	100%	52.440.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	BOLSEL	Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi	100%	52.440.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	BOLSEL	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100	52.440.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	BOLSEL	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100	52.440.000	
	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	BOLSEL	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	52.440.000	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	BOLSEL	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	52.440.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	BOLSEL	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	423.003.510	Program Penyuluhan Pertanian	BOLSEL	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	423.003.510	

	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	BOLSEL	Jumlah kegiatan Penyuluhan	4	423.003.510	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	BOLSEL	Jumlah kegiatan Penyuluhan	4	423.003.510	
		BOLSEL	Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya	20			BOLSEL	Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya	20		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	BOLSEL	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	345.189.510	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	BOLSEL	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	345.189.510	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	BOLSEL	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	77.814.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	BOLSEL	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	77.814.000	

15.602.582.660

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian maka pada tahun 2026 program dan kegiatan yang direncanakan ini mengacu pada program prioritas RPJMD yaitu pemberian bantuan benih/bibit dan sarana pertanian.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2026, secara keseluruhan masyarakat pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengusulkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian baik pokok maupun penunjang dalam pembangunan pertanian yang meliputi :

- 1) Pengadaan/penyediaan Alsintan;
- 2) Pembangunan jalan usaha tani;
- 3) Bantuan bibit lemon cui,
- 4) Bantuan benih cabe,
- 5) Bantuan bibit pisang,
- 6) Bantuan benih padi;
- 7) Bantuan benih jagung;
- 8) Bantuan ternak sapi
- 9) Bantuan bibit buah-buahan
- 10) Bantuan bibit, cacao, cengkeh dan pala
- 11) Bantuan Pupuk dan Obat-obatan
- 12) Pembangunan Irigasi
- 15) Bantuan alat perkebunan

Selengkapnya dapat di lihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Jumlah Produksi padi (ton)		Produksi padi (ton)	14.000	14.125	14.250	14.500	6.462,08	0	13.925	13.650	
2	Jumlah produksi jagung (ton)		produksi jagung (ton)	14.000	14.125	14.250	14.500	5.699	0	13.387	14.115	
3	Jumlah produksi Cabe (Kg)		produksi Cabe (Kg)	14.000	14.125	14.250	14.500	420.300	0	15.875	15.575	
4	Jumlah produksi Pisang (Kg)		produksi Pisang (Kg)	104.000	104.500	105.000	105.500	763.943	0	115.300	110.250	
5	Jumlah produksi Lemon Cui (Kg)		produksi Lemon Cui (Kg)	31.850	32.000	32.050	32.100	180.442	0	35.150	35.500	

Kepala Dinas

ANAS KANGIDEN, SP, M.Si
NIP. 19730728 201001 1 006

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Penyusunan perencanaan PD di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian fokus pada sektor produksi dimana anggaran fokus pada peningkatan kesejahteraan petani, seperti ketersediaan air, pengadaan bibit unggul, pupuk tepat waktu, alat mesin pertanian, processing/packaging pertanian yang menarik, dan tentunya perbaikan regulasi.

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran dan fokus pada modernisasi pertanian. Dimana proses pelaksanaannya dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi pertanian yang maju, mandiri dan modern. Perbaikan lahan pertanian, irigasi, penggunaan bibit unggul, penggunaan alat dan mesin pertanian modern.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Bidang Peternakan dan memiliki tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya sektor ekonomi unggulan Daerah.

b. Sasaran

1. Meningkatkan produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
4. Meningkatkan kinerja penyuluhan

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan potensi, kendala, permasalahan serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Program dan kegiatan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam masa periode 2021-2026. Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten maka Dinas Pertanian masuk dalam misi ke tiga dalam RPJMD kabupaten yaitu Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah melalui terwujudnya pembangunan bidang pertanian, peternakan dan kehutanan, sumber daya kelautan, pertambangan, transportasi, perdagangan, pengembangan usaha mikro. Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merencanakan suatu Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dengan 5 program, 13 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan jumlah dana belanja langsung Rp. 15.602.582.660,- (lima belas miliar enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Matrik Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
 Dinas Pertanian
 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Urusan Pilihan								
					Bidang Urusan Pertanian								
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	BOLSEL	85	7.306.918.975	APBD		86	4,035,513,737
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		1	7.494.165			1	7.494.165
						Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja		1					1
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	7.494.165			1 Dok	7.494.165
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		40	5.380.197.914			40	5.380.197.914
						Jumlah Laporan Keuangan		1					1
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40	5.345.812.234	APBD		40	5.345.812.234
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	34.385.680	APBD		100	34.385.680
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		2	18.543.450			2	18.543.450

					Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD		12				12	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	18.543.450	APBD		12	18.543.450
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai		100%	84.560.000			100%	84.560.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20	84.560.000	APBD		20	84.560.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	615.083.000			100%	615.083.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	615.083.000	APBD		12	615.083.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>		1	710.298.030			1	710.298.030
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	602.225.000			1	602.225.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	30.323.030	APBD		1	30.323.030
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	77.750.000			5	77.750.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	263.182.416			100%	263.182.416
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	263.182.416	APBD		12	263.182.416
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		75%	227.560.000			75%	227.560.000

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30	87.510.000	APBD		30	87.510.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		2	140.050.000	APBD		2	140.050.000
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Petani yang menggunakan Bibit Unggul		100%	7.820.220.175			100%	7.820.220.175
					Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan		90%				90%	
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian		1	851.780.840			1	851.780.840
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		4	851.780.840	APBD		4	851.780.840
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	2.561.318.635			100%	2.561.318.635
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		2	1.159.021.735	APBD		2	1.159.021.735
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		2	1.402.296.900	APBD		2	1.402.296.900
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Unggul yang beredar		1	277.899.700			1	277.899.700
					Jumlah Pakan Unggul yang beredar		1				1	

				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		2	277.899.700				2	277.899.700
				Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bantuan Bibit Ternak		150	4.129.221.000				150	4.129.221.000
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		150	4.129.221.000	APBD			150	4.129.221.000
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi		100%	52.440.000				100%	52.440.000
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana OPT		100%	52.440.000				100%	52.440.000
				Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		2	52.440.000	APBD			2	52.440.000
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani		100%	423.003.510				100%	423.003.510
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan Penyuluhan		4	423.003.510				4	423.003.510
					Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya		20					20	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2 Unit	345.189.510				2 Unit	345.189.510

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		20 Kelompok	77.814.000	APBD		20 Kelompok	77.814.000
					J U M L A H			15.602.582.660				15.602.582.660

Bolaang Uki, Agustus 2025

Kepala Dinas

ANAS KANGIDEN, SP, M.Si
NIP.19730728 201001 1 006

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian tahun 2026 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan pertanian. Mengingat masalah pertanian dan pangan bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selain itu, ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur perlu sekali ditingkatkan baik mutu dan jumlahnya. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur (keahlian dan keterampilan) sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan. Namun demikian apabila terjadi ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja, maka program/kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan harus ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Membangun terus kemitraan dengan semua stakeholder merupakan kunci keberhasilan pembangunan Pertanian. Pembangunan pertanian tidak dapat dilaksanakan oleh satu SKPD saja melainkan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan/berkelanjutan. Pertanian merupakan pembangunan bidang hilir dari proses produksi yang dilaksanakan oleh pertanian, perkebunan dan peternakan. Pertanian merupakan bidang pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan hasil produksi siap dikonsumsi.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian tahun 2026 merupakan ringkasan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan pertanian kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Mengingat masalah pertanian bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

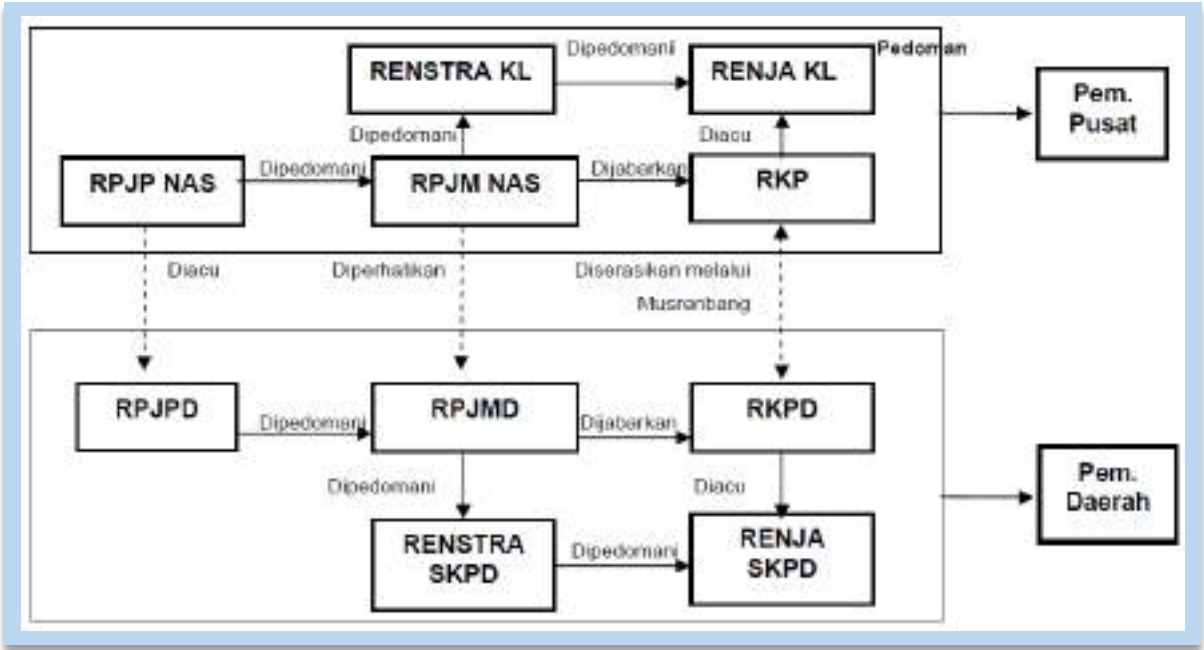
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbanda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
-

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
-

23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).
24. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026;

- a. Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
 - b. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
 - c. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
-

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra PD Tahun Lalu.

- a. Realisasi Program/Kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
 - b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - 3) Program Pengembangan Umkm
 - 4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - 6) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada Tahun 2021
 - d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

 - kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran,
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak ada, karena Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra semuanya terlaksana.
 - f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
-

Tindakan yang akan diambil oleh Dinas Perindustrian, dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan antara lain membuat Perencanaan yang lebih matang sehingga anggaran yang digunakan Lebih Efisien dan efektif.

Secara Rinci Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2027 disajikan pada tabel TC-29 berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023(n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	Baik	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	14 Dok	-	12 Dok	16 Dok	133%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	94,44%	17 Orang	17 Orang	94,44
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	14 Paket	14 Paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	N/A	80%	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	-						
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	-						
		Jumlah Inovasi	N/A							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	2 Lap	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	2 Lap	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	N/A	-						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	40%	60%	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi	3Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	65%	72%	70%	75%	107,14	70%	75%	107,14
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	20%							
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr	0%							
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	10%							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Dok	-	-	-	-	-	-	-

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	25%							
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>10%</i>							

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat diketahui bahwa Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

N O	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (Thn n-2)	Tahun (Thn n-1)	Tahun (Thn n)	Tahun (Thn n+1)	Tahun (Thn n-2)	Tahun (Thn n-1)	Tahun (Thn n)	Tahun (Thn n+1)	
1	Jumlah sarana distribusi		√	1 Unit	1 Unit	0	3 Unit	1 Unit	1 Unit	0	3 Unit	
2	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		√	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
3	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		√	1	-	-	6 Unit	-	-	-	6 Unit	
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		√	1 Dok	1 Dok	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam hal pelayanan, khususnya pada Dinas Perindustrian, sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Baik itu pada Bidang maupun Sekretariat. Sampai dengan saat ini pula, Hubungan kinerja antara Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Dinas Perindag Provinsi masih cukup baik, sebagai tolak ukurnya dinas Perindag Provinsi sangat merespon usulan yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bantuan/fasilitasi alat pengolahan dibidang industri Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Permasalahan dan hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian antara lain Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Tenaga Penyuluh Lapangan untuk mengecek keberadaan Industri Kecil dan Menengah, Maupun Jumlah Pasar Aktif. Sehingga terkadang untuk penyaluran bantuan fasilitasi untuk industri kecil dan menengah masih sering terjadi kesalahan. Karena petugas/tenaga lapangan untuk memferifikasi keberadaan kelompok masih kurang.

Permasalahan yang di hadapi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian antara lain :

- 1) Belum tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
- 2) Kurangnya Sumber daya yang terlatih dalam Pengawasan Metrologi

Capaian yang muncul pada Dinas Perindustrian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Antara Lain Pengentasan kemiskinan melalui Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan di Dinas Perindustrian yaitu masih kurangnya SDM yang berkompeten, sedangkan Peluang Untuk meningkatkan pelayanan pada Dinas Perindustrian yaitu Banyaknya Potensi Sumber Daya Alam sehingga membuat masyarakat lebih kreatif dalam membuat suatu produk usaha yang bisa di jadikan IKM Binaan Dinas Perindustrian.

Formulasi Isu-isu Penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Prioritas tahun yang di rencanakan yaitu Perlu adanya penambahan SDM yang berkompeten.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD Khususnya pada Dinas Perindustrian dapat dilihat pada **Tabel T-C.31**

TC-31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bolse l	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85%	2.561.782.810	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bolssel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85%	2.561.782.810	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Bolssel			1.868.159.632	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Bolssel			1.868.159.632	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolssel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Org	16.847.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolssel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Org	16.847.300	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dok	1.851.312.332	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dok	1.851.312.332	
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				12.900.000	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				12.900.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah LaporanPenatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	12.900.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah LaporanPenatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	12.900.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	334.795.780	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	334.795.780	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.879.780	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.879.780	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	14.986.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	14.986.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	312.930.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	312.930.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	74.399.250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	74.399.250	
	Pengadaan Mebel	Bolsel	Jumlah Unit Mebel Disediakan	3 Unit	21.950.750	Pengadaan Mebel	Bolsel	Jumlah Unit Mebel Disediakan	3 Unit	21.950.750	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolsel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	52.448.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolsel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	52.448.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	209.531.748	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	209.531.748	
		Bolsel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85			Bolsel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	25.045.020	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	25.045.020	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	184.486.728	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	184.486.728	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80%	61.996.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80%	61.996.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	61.996.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	61.996.400	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Bolsel	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	40%	1.288.598.284	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Bolsel	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	40%	1.288.598.284	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel		1 Unit	1.087.803.500	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel		1 Unit	1.087.803.500	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel	Jumlah sarana distribusi	3Unit	1.087.803.500	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel	Jumlah sarana distribusi	3Unit	1.087.803.500	

	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Bolsel		1 Unit	200.794.784	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Bolsel		1 Unit	200.794.784	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	200.794.784	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	200.794.784	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Bolsel	Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok	100%	14.880.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Bolsel	Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok	100%	14.880.000	
		Bolsel	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	65%			Bolsel	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	65%		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Bolsel			14.880.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Bolsel			14.880.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Lap	14.880.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Lap	14.880.000	

	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Bolsel	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	20%	44.994.700	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Bolsel	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	20%	44.994.700	
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Bolsel			44.994.700	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Bolsel			44.994.700	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Bolsel	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6 Unit	44.994.700	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Bolsel	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6 Unit	44.994.700	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bolsel	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr	0%	1.047.960.075	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bolsel	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr	0%	1.047.960.075	
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Bolsel	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	10%	1.047.960.075	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Bolsel	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	10%	1.047.960.075	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Dok	49.987.840	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Dok	49.987.840	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 Dok	897.741.930	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 Dok	897.741.930	

			Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	55.240.885	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	55.240.885	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dok	10.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dok	10.000.000	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	34.989.420	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	34.989.420	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Bolsel	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	25%	59.185.585	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Bolsel	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	25%	59.185.585	

	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Bolsel	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	10%	59.185.585	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Bolsel	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	10%	59.185.585	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Bolsel	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 Dok	59.185.585	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Bolsel	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 Dok	59.185.585	

			kewenangan pemerintah pusat					kewenangan pemerintah pusat			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Pemantauan	20 Kali	15.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Bolsel	Jumlah Pemantauan	20 Kali	15.000.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Bolsel	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	20%	67.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Bolsel	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	20%	67.000.000	
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Bolsel	<i>Jumlah Metrologi legal,Berapa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan</i>	<i>5 Kali</i>	<i>67.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Bolsel	<i>Jumlah Metrologi legal,Berapa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan</i>	<i>5 Kali</i>	<i>67.000.000</i>	

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Bolsel	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal,Tera dan Tera Ulang	5 Kali	35.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Bolsel	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal,Tera dan Tera Ulang	5 Kali	35.000.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Bolsel	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan	12 Kali	32.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Bolsel	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan	12 Kali	32.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bolsel	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	20%	315.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bolsel	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	20%	315.000.000	
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Bolsel	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>10%</i>	<i>315.000.000</i>	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Bolsel	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>10%</i>	<i>315.000.000</i>	
	Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota	Bolsel	Persentase RIPID	10%	50.000.000	Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota	Bolsel	Persentase RIPID	10%	50.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Bolsel	Jumlah Wilayah Industri	2 Sentra IKM	80.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Bolsel	Jumlah Wilayah Industri	2 Sentra IKM	80.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bolsel	Jumlah IKM yang di fasiitasi	3 IKM	85.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bolsel	Jumlah IKM yang di fasiitasi	3 IKM	85.000.000	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bolsel	Presentase Monev IKM	100%	25.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bolsel	Presentase Monev IKM	100%	25.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Bolsel	Presentase data IKM	100%	75.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Bolsel	Presentase data IKM	100%	75.000.000	

2.6 Usulan Program dan Kegiatan yang di tuangkan dalam Rencana Kegiatan bersumber dari hasil Musrembang Desa maupun Kecamatan, dari hasil Musrembang Kecamatan terdapat 3 Usulan yang di usul oleh Masyarakat seperti yang terlihat pada tabel TC-32 di bawah ini;

TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Bolsel	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	40%	
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Bolsel			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel	Jumlah sarana distribusi	3 Unit	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bolsel	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr	0%	
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Bolsel			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada RPJMN 2025-2029, yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program** pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan **RPJP Nasional 2025-2045**. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2026, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah *"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*. Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan RKP dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta selaras dengan Prioritas Nasional yang mengacu pada visi-misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029.

Sasaran RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Perindustrian tahun 2026,, adalah untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor parindustrian dan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan sosial,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja program dan kegiatan pada SKPD Dinas Perindustrian antara lain ;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2026
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Ekspor Barang dan Jasa (%)	13,50%
			Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP/ Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%
		Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertambahann Industri Kecil Menengah (%)	5%
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan instansi terkait	100%

1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Perindustrian adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perindustrian, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perindustrian dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Meningkatnya Kunjungan dan Pendapatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
- b.** Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja untuk Dinas Perindustrian bersumber dari hasil Musrembang Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan sumber pendanaannya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimuat dalam RKA.

RUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATA N PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAH DANA/PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Bolsel	85%	2.561.782.810	DAU		85%	2.817.961.091
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.868.159.632	DAU			1.812.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	18 Org	16.847.300	DAU		100%	12.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	2 Dok	1.851.312.332	DAU		100%	1.800.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.900.000				17.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LaporanPenatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	1 Dok	12.900.000	DAU		1 Dok	17.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Bolsel	100%	334.795.780	DAU		100%	290.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bolsel	1 Paket	6.879.780	DAU		2 Unit	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bolsel	15 Paket	14.986.000	DAU		100%	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	4 Lap	312.930.000	DAU		100%	250.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Bolsel	100%	74.399.250	DAU		100%	40.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Disediakan	Bolsel	3 Unit	21.950.750	DAU		1 Unit	15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bolsel	4 Unit	52.448.500	DAU		1 Unit	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Bolsel	100%	209.531.748	DAU		100%	195.000.000
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bolsel	85				85	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan	Bolsel	2 Lap	25.045.020	DAU		1	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bolsel	2 Lap	184.486.728	DAU		100%	180.000.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	<i>Bolsel</i>	80%	61.996.400	DAU		85%	58.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bolsel	8 Unit	61.996.400	DAU		1 Unit	58.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bolsel	40%	1.288.598.284	DAU		50%	115.475.580
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		<i>Bolsel</i>	1 Unit	1.087.803.500	DAU		1 Unit	75.000.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi	Bolsel	3Unit	1.087.803.500	DAU		1 Unit	75.000.000
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>		<i>Bolsel</i>	1 Unit	200.794.784	DAU		1 Unit	40.475.580
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	Bolsel	1 Dok	200.794.784	DAU		1 Unit	40.475.580

		Distribusi Perdagangan							
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok	Bolsel	100%	14.880.000	DAU		100%	22.000.000
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Bolsel	65%				70%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				14.880.000				22.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bolsel	4 Lap	14.880.000	DAU		4 Lap	22.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	Bolsel	20%	44.994.700	DAU			40.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				44.994.700				40.000.000

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Bolsel	6 Unit	44.994.700	DAU		6 Unit	40.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr	Bolsel	0%	1.047.960.075	DAU		20%	105.000.000
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>Bolsel</i>	<i>10%</i>	<i>1.047.960.075</i>	<i>DAU</i>			<i>105.000.000</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Bolsel	4 Dok	49.987.840	DAU			40.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bolsel	1 Dok	897.741.930	DAU			25.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bolsel	1 Dok	55.240.885	DAU			20.000.000

	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bolsel	2 Dok	10.000.000	DAU			10.000.000
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bolsel	1 Dok	34.989.420	DAU			10.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Bolsel	25%	59.185.585	DAU		20%	65.104.144
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>Bolsel</i>	<i>10%</i>	<i>59.185.585</i>	DAU			65.104.144

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Bolsel	1 Dok	59.185.585	DAU			35.000.000
TOTAL					5.017.401.454				3.165.540.815

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pembangunan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak terlepas dari upaya Dinas Perindustrian yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Keberhasilan dimaksud tergantung dari Rencana Kerja (RENJA) dan Sumber Daya Manusia pendukungnya termasuk Manajemen Akuntabel serta dukungan Pemerintah Daerah.

Wujud nyata dan keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian pervormence Indikator yang telah ditetapkan seluruhnya.

Pencapaian indikator tertuang sepenuhnya pada komitmen dan kemauan serta keikhlasan semua pelaku Industri dan Perdagangan diberbagai tingkat dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud industri kecil dan menengah yang berbudaya, efisien dan efektif bertumpu pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, serta menjadikan Pasar Kabupaten dan Pasar Kecamatan yang bersih, sehat dan nyaman.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja atau Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang nantinya akan dirumuskan untuk kemudian menjadi sebuah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Renja, Sekertariat Daerah menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat di Sekertariat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, secara khusus Sekertariat Daerah Setiap Bagian melaksanakan sebagian tugas dari Asisten Sekda Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perekonomian dan pembangunan, Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan program dan petunjuk teknis Perekonomian dan pembangunan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

- Mongondow Selatan Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Renja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan

1.3.2 Tujuan

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Sekertariat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Seertariat Daerah adalah:

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan di lingkungan Sekertariat Daerah;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Sekertariat Daerah;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(stakeholders) tentang rencana Pada Bagian-Bagian di Sekertariat Daerah;

- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

4.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 2.2. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi antar Stakeholder yang menangani teknis Perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-tersedianya anggaran
4		-Tersedianya SDM Aparatur
		-Tim Work yang solid
		-Adanya Komitmen pimpinan
5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual	Tersediannya SDM Aparatur yang Memiliki Kompeten
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat	Tim Work yang Solid

		Adanya Komitmen Pimpinan
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	
7	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya anggaran
8	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang teknis
9	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	adanya komitmen pimpinan
	Penataan Organisasi	
10	Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas	Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang teknis
11	Terpenuhinya Peraturan Bupati tentang Anjab ABK	Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang teknis
12	Tim pengelola SIPP dan SP4N Lapor	adanya komitmen pimpinan

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat kurang padahal bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi koordinasi ke bawah yang nantinya akan memberikan masukan kebijakan pembangunan daerah kepada pimpinan
	Administrasi tata Pemerintahan	
2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sampai saat ini masih dalam proses penyusunan LPPD, sehingga hasilnya belum bisa diketahui.

3	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tidak ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan segmen batas
4		Belum ada tenaga teknis tersedia
5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual	Ada beberapa kendala di pelaksana Minguan kegiatan PISB dan kegiatan Keagamaan Isramiraj
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat	Ada beberapa Kelengkapan Administrasi belum Memenuhi Syarat dalam Pemberian Bantuan Beasiswa
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
7	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan
8	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan
9	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan
	Penataan Organisasi	
10	Tersedianya Data Evaluasi Kelembagaan	Narasumber yang kompeten
	Peraturan Bupati Tentang SOP	Data yang diberikan oleh Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permenan RB No 35/2012
	Peta Proses Bisnis	Ketersediaan Narasumber

2.2 Isu - isu penting dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD

Dalam upaya Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional.

Adapun isu - isu strategis yang menjadi sasaran Sekertariat daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi aspek-aspek , yaitu ;

- Peningkatan pemahaman terkait persyaratan pemberian bantuan beasiswa prestasi dan kurang mampu melalui pemberian sosialisasi.
- Optimalisasi Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu dengan memanfaatkan perbup tentang petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa pendidikan kedokteran
- Optimalisasi pelaksanaan pemberian beasiswa dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Perbaikan kualitas produk hukum daerah melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas legislatif
- Pengembangan kemitraan dengan lembaga bantuan hukum untuk memperluas cakupan layanan
- Pembangunan sistem pemeliharaan data dan dokumentasi hukum yang terstandarisasi
- Belum optimalnya kinerja terpadu dan kapasitas teknis Perangkat Daerah dalam mendukung peningkatan nilai LPPD Kabupaten.
- Optimalisasi kinerja terpadu dan kapasitas teknis Perangkat Daerah perlu ditingkatkan guna mendukung penyusunan laporan LKPJ Kabupaten yang lebih berkualitas
- Optimalisasi komitmen Perangkat Daerah pengampu terhadap penerapan SPM belum sepenuhnya tercapai
- Peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM kerja sama, integrasi yang kuat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta dukungan yang memadai menjadi kunci dalam mengoptimalkan kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga secara berkelanjutan.
- peningkatan kapasitas dan koordinasi dalam penelaahan serta pembakuan nama rupabumi untuk mendorong terciptanya basis data geospasial yang valid dalam mendukung perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
- Mengembangkan Protokol yang Efektif dan Efisien
- Mengembangkan Komunikasi yang Efektif antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Tabel 2.1.2
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Permasalahan	Hambatan
Program Perekonomian dan Pembangunan	
Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan	Sinergitas antar stakeholder lebih ditingkatkan, stakeholder yang

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat kurang padahal bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi koordinasi ke bawah yang nantinya akan memberikan masukan kebijakan pembangunan daerah kepada pimpinan	menangani teknis perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan seharusnya melibatkan bagian administrasi pembangunan dalam tiap kegiatan, dan melaporkan di bagian administrasi pembangunan untuk diteruskan kepada pimpinan untuk di lanjutkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah
Administrasi Tata Pemerintahan	
Permasalahan pada Administrasi Pemerintahan	Sampai saat ini masih dalam proses penyusunan LPPD, sehingga hasilnya belum bisa diketahui.
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tidak ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan segmen batas
	Belum ada Tenaga teknis tersedia
Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Kelengkapan Administrasi belum Memenuhi Syarat dalam Pemberian Bantuan Beasiswa
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan
Tersedianya Indikator Indeks Kelembagaan	Belum Tersedianya Narasumber yang berkompeten
Belum melakukan perubahan/update Peraturan Bupati tentang SOP	SOP yang dimasukkan oleh Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permenpan RB No. 35/2012
belum ada Peta Proses Bisnis kabupaten	Ketersediaan Narasumber karena terhalang Pandemi Covid-19

Tabel Tabel 2.1.3

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Administrasi Pembangunan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan menempatkan Kebijakan pembangunan lima tahunan 2021 sampai 2026	Sinergitas antar stakeholder lebih ditingkatkan, stakeholder yang menangani teknis perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan seharusnya melibatkan bagian administrasi pembangunan dalam tiap kegiatan, dan melaporkan di bagian administrasi pembangunan untuk diteruskan kepada pimpinan untuk di lanjutkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah
Administrasi Tata Pemerintahan - Tim work yang solid ;	Tidak ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan
Belum Terlaksananya Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pemkab dengan Perguruan Tinggi	Tersediannya SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidang Teknis
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pengawasan dan koordinasi dengan pihak ke tiga untuk pengadaan kebutuhan rumah tangga
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pengawasan dan koordinasi dengan pihak ke tiga untuk pengadaan kebutuhan rumah tangga
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pengawasan dan koordinasi dengan pihak ke tiga untuk pengadaan kebutuhan rumah tangga
Penataan Organisasi	
Penataan Anggaran untuk Bimtek Penyusunan Evaluasi Kelembagaan sudah sesuai	Memperoleh Narasumber yang kompeten dalam penyusunan Evaluasi Kelembagaan
Regulasi Penyusunan SOP sudah jelas yaitu menggunakan Permenpan RB No. 35/2012	Kurangnya Pemahaman tentang Permenpan RB No 35/2012
Penataan Anggaran untuk Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis sudah sesuai	Ketersediaan waktu Narasumber terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis

2.3 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai tupoksi SKPD. Ditingkat Provinsi, kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD Provinsi tentunya lebih bersifat perbantuan terhadap kabupaten / kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas, termasuk didalamnya kepentingan Pemerintahan Kab/kota. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari SKPD Kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kab/Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kab/kota.

BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Kajian terhadap kebijakan di tingkat Nasional menguraikan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, disamping itu penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan bagaimana keterkaitan prioritas dan sarana pembangunan nasional untuk tahun rencana dengan pembangunan daerah, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, dan kreativitas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah **“peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”**. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Program makan bergizi gratis
- b. Pembangunan tiga Juta rumah per tahun
- c. Pembentukan Koprasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan
- d. Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda
- e. Rehabilitasi Sekolah
- f. Layanan Cek Kesehatan Gratis
- g. Pembangunan Lumbung pangan
- h. Pembangunan rumah sakit berkualitas
- i. Penuntasan Tuberkolosis (TBC)

- j. Pembangunan bendungan dan Irigasi
- k. Penangan Sampah.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Sekertariat Daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersusun sebagaimana terdapat pada table terlampir.

Program-program yang di laksanakan oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan; dengan Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c. Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Daerah
 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekertariat Daerah
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah
 - c. Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekertariat daerah
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Fasilitas Bantuan Hukum
- c. Pendokumentasian Produk Hukum Pengelolaan Informasi Hukum
- 4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 - b. Fasilitas Keprotokolan
 - c. Fasilitas Komunikasi Pimpinan
- 5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Administrasi tata pemerintahan
 - b. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - c. Fasilitas Kerja Sama Daerah
- 6. Program Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 7. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil
 - b. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD
 - c. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BUMD
- 8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat
- 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota
Administrasi Umum
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) TAHUN 2026 disusun sebagai bentuk penjabaran Program dan Kegiatan Sekertariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan visi, misi, Program serta Kegiatan.

Berkaitan dengan penyusunan Renja SKPD diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Dengan tersusunnya Renja SKPD ini maka dapat dijadikan alat ukur dan evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun, sejauh mana dapat dilaksanakan, program apa yang belum terlaksana dan masih sangat dibutuhkan guna dilaksanakan serta dilanjutkan tahun berikutnya.

Demi kesempurnaan Renja SKPD ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga sesuai dengan yang kita harapkan.

BOLAANG UKI, 2026
SEKRETARIS DAERAH,

MARZANZIUS ARVAN OHY,
S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770318 199511 1 001

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2026
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKERTARIAT DAERAH
TC 2.9

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan RANJA Tahun 2025 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Berjalan (n-1)	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Terpenuhinya pelayanan BLUD yang memadai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	12	12	12	100%	12	12	3
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
				meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	12	12	12	100%	12	12	3
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	12	12	12	100%	12	12	3
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
				Terlaksannya Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45	45	45	45	100%	45	135	33,75
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45	45	45	45	100%	45	135	33,75
				Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60	60	60	60	100%	50	170	42,5
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300	300	370	370	100%	370	1040	260

				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	75	75	75	100%	75	225	56,25
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300	300	380	380	100%	380	1060	260
3	1	1	15	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase opd yang menyampaikan laporan EPRA secara tepat waktu dan akuntabel								
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan Realisasi anggaran/triwulan	5	5	5	5	100%	5	15	3,75
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program	1	0	0	0	0	0	0	0
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1							

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1							
				Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1							
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	1	1	1	50%	1	3	0,75
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1							
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1							

					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan								
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1							
				Terlaksananya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	12	12	100%	12	12	3
				Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	12	12	100%	12	12	3

				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	12	12	100%	12	12	3

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	Rancangan Awal RKPD isi dri SIPD					Hasil Analisis Kebutuhan isi dari Rensra					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha n Dana (Rp.000)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			
	Terpenuhinya pelayanan BLUD yang memadai	SETDA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	100.000.000	Terpenuhinya pelayanan BLUD yang memadai	SETD A	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	2	250.000.000,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETD A	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	2	11.382.198.714,00	

			Kepala Daerah					Kepala Daerah			
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	250.000.000,00	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2		
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	250.000.000,00	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	18.100.000,00	
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	250.000.000,00	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2.500.000.000,00	
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	500.000.000,00	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1.000.000.000,00	

	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	250.000.000,00	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	SETDA	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	800.000.000,00	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	SETDA	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	250.000.000,00	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	SETDA	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	700.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	500.000.000,00	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SETDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	10.000.000,00	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SETDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2		
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SETDA	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	150.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SETDA	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	68.199.267,00	

	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	150.000.000,00	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	73.372.906,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SETDA	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	150.000.000,00	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SETDA	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	105.000.000,00	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	150.000.000,00	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	6.355.361,00	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA									
	meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	2.900.000.000,00	meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	2.542.871.050,00	

	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	2.900.000.000,00	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	1.352.773.550,00	
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	100.000.000,00	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	50.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	100.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	50.000.200,00	
	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	50.000.000,00	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	10.373.050,00	
	Terlaksananya Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45	50.000.000,00	Terlaksananya Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45	22.528.000,00	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45	50.000.000,00	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45		

	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	SETDA	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60	200.000.000,00	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	SETDA	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60		
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	SETDA	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300	200.000.000,00	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	SETDA	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300	250.000.000,0	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	SETDA	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	249.041.309,00	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	SETDA	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	350.000.000,00	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	SETDA	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60	200.000.000,00	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	SETDA	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60	200.000.000,00	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA	Presentase opd yang menyampaikan laporan EPRA secara tepat waktu dan akuntabel								

	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	SETDA	jumlah laporan Realisasi anggaran/triwulan	1	120.000.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	SETDA	jumlah laporan Realisasi anggaran/triwulan	1	99.999.920,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	SETDA	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program	2	30.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	SETDA	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program	2		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	SETDA	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1	108.707.829,00	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	SETDA	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1	210.000.000	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	28.707.829,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1		
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	20.000.000,00	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SETDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	210.000.000	

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	10.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	10.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1		
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pembangunan	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	5.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pembangunan	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1		

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	5.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1		
Pengolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SETDA	umlah Dokumen HasilLayanan Pengadaan SecaraElektroni	150	50.000.000,00	Pengolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SETDA	umlah Dokumen HasilLayanan Pengadaan SecaraElektroni	150	349.313.000,00	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	50.000.000,00	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 dokumen	249.924.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	50.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 orang	199.971.150,00	

[illegible]

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA Perangkat Daerah) SEKRETARIAT
DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2026

[illegible]

1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.382.198.714,00						-	13.011.614.749,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 3.50	0 3.29	0 3.35	0 3.45	11.382.198.714,00	-	-	-	-	-	-	13.011.614.749,00	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.382.198.714,00			-	-	Sekretariat Daerah	-	13.011.614.749,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	11.382.198.714,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat Daerah		13.011.614.749,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM						14.819.556.523,00							19.832.149.832,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						14.819.556.523,00							19.832.149.832,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						14.819.556.523,00							19.832.149.832,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.819.556.523,00						-	19.832.149.832,00	
		-	-	-	-	-	-	14.819.556.523,00	-	-	-	-	-	-	19.832.149.832,00	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.940.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	31.940.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	30.940.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Umum Sekretariat Daerah		31.940.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	49.141.600,00			-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	50.400.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	49.141.600,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		50.400.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	43.853.800,00			-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	50.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	43.853.800,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.550.000.000,00			-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	6.230.514.521,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		120.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		150.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	400.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		550.000.000,00	BAGIAN UMUM
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				20 Laporan	500.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		890.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	450.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		4.520.514.521,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.202.743.187,00			-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	1.406.669.620,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	647.894.807,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		807.669.620,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	104.848.380,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		120.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	450.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		479.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.706.200.000,00			-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	6.936.200.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	422.200.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		452.200.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.284.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		6.484.000.000,00	BAGIAN UMUM
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.301.059.000,00			-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	2.710.391.395,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				80 Unit	1.287.586.400,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		1.394.432.486,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	403.472.600,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		460.544.979,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	610.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum Sekretariat Daerah		855.413.930,00	BAGIAN UMUM

	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	435.618.936,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	435.618.936,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	196.038.936,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Umum Sekretariat Daerah		196.038.936,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

[illegible]

1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						148.194.200,00						-	163.012.000,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah 2024	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	85.436.900,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	93.979.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.436.900,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		93.979.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	22.290.000,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	24.519.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	22.290.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		24.519.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.467.300,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	44.514.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40.467.300,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		44.514.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						160.374.080,00						-	200.373.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	110.373.250,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	140.373.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		60.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	50.000.200,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		60.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	10.373.050,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		20.373.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	50.000.830,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	60.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				50 Dokumen	50.000.830,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		60.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						258.729.840,00							258.729.920,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						258.729.840,00							258.729.920,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						258.729.840,00							258.729.920,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						158.729.920,00						-	158.729.920,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	99.999.920,00			-	-	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	-	99.999.920,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99.999.920,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah		99.999.920,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	-	21.100.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	21.100.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah		21.100.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.630.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	-	37.630.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.630.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah		37.630.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

											pe nyeludupa n .					
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						99.999.920,00						-	100.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	99.999.920,00			-	-	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	-	100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	99.999.920,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah		100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.833.396.948,00							2.833.396.948,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.833.396.948,00							2.833.396.948,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.833.396.948,00							2.833.396.948,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						290.525.898,00						-	290.525.898,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.720.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba,	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	-	3.720.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

											judi, dan pe nyeludupa n .					
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		3.720.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	16.449.000,00			-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	-	16.449.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>				1 Orang	16.449.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		16.449.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	124.897.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	-	124.897.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	124.897.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		124.897.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	-	50.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.572.300,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		38.572.300,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.542.871.050,00						-	2.542.871.050,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	2.542.871.050,00			-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	-	2.542.871.050,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1.352.773.550,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		1.352.773.550,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1.190.097.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		1.190.097.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1.040.000.000,00							1.000.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.040.000.000,00							1.000.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.040.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						240.000.000,00						-	240.000.000,00	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-	175.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	175.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		175.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-	25.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		25.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-	40.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	40.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		40.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						800.000.000,00						-	760.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	800.000.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-	760.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		210.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		350.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		200.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ORGANISASI						318.149.434,00							351.149.434,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						318.149.434,00							351.149.434,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						318.149.434,00							351.149.434,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						318.149.434,00						-	351.149.434,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.910.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	-	3.910.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifika si Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	2.910.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		3.910.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.999.600,00			-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	-	3.999.600,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	2.999.600,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		3.999.600,00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.650.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	-	22.650.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	21.650.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		22.650.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.662.300,00			-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	-	37.662.300,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.662.300,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		37.662.300,00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah PD yang Menyusun LKjIP Jumlah PD yang Menyusun Laporan RB Persentase PD yang / unit kerja yang memasang leaflet / banner / x banner / spanduk dll terkait reformasi birokrasi Jumlah PD yang Memiliki Dokumen SP dan SOP Jumlah PD yang memiliki Dokumen Anjab, ABK dan Evajab Persentase Perangkat Daerah yang membuat/ memasang maklumat standar pelayanan Persentase perangkat daerah yang memiliki cascading kinerja (pohon kinerja) Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan kinerja individu secara berkala bulanan / triwulan Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP berdasarkan peta proses bisnis undefined Jumlah PD yang melakukan Survey IKM Jumlah Perda tentang Perangkat Daerah	-			36.00 Perangkat Daerah 36.00 Perangkat Daerah 100 Persen 36.00 Perangkat Daerah 36.00 Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 0 Persen 100 Persen undefined undefined 36.00 Perangkat Daerah n.a Dokumen	252.927.534,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	-	282.927.534,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	68.199.267,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		78.199.267,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	73.372.906,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		83.372.906,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		115.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	6.355.361,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		6.355.361,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							420.032.150,00						422.370.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						420.032.150,00							422.370.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						420.032.150,00							422.370.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						210.032.150,00						-	212.370.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	-	150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah		150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	22.370.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	-	22.370.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	22.370.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah		22.370.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.662.150,00			-	-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	-	40.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	37.662.150,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah		40.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

									Kel/Desa							
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						210.000.000,00						-	210.000.000,00	

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendali an dan Distribusi Perekonom ian</i>				4 Laporan	210.000.000,00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	4. Peningka tan Pelayana n Publik dan Reformas i Birokrasi Perwujud an Tata Kelola Pemerint ah an Dan Ketertiba n Dan Keamana n	Bagian Perekonom ian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah		210.000.000,00	BAGIAN PEREKONOM IAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	J U M L A H							31.380.631.88 9,00							38.072.795.88 3,00	

X. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-Perangkat Daerah) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Renstra-Perangkat Daerah disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-Perangkat Daerah tersebut, maka Perangkat Daerah harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang

secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, meliputi:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika. Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2026

BAB II Evaluasi Pelaksanaan

RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,, review terhadap Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB IV Penutup,

Menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja TahunLalu dan Capian Renstra SKPD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka **Tujuan** yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2022-2026 adalah **“Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”** Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, **Sasaran** yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD
 2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah;
 3. Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.
- ❖ Faktor – factor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :
 - o Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
 - o Lemahnya pemahaman terhadap Tupoksi Aparatur;
 - o Pelaksanaan yang sangat hati – hati dan taat peraturan yang ada;
 - o Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.
 - ❖ Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:
 - o Tersedianya anggaran operasional yang cukup
 - o Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut dangat mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
 - o Terjalannya hubungan yang harmonis antara DPRD dan

Sekretariat DPRD.

- o Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup.
- o Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ❖ Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :
 - o Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
 - o Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
 - o Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
 - o Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai Lembaga perwakilan;

1. Kinerja Program kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi Rendah/Tidak ada
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Barang Cetak dan Penggandaan, Alat Listrik dan Peralatan Perlengkapan Gedung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
		Kantor
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Barang Milik Daerah
8	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
9	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Paripurna yang dilaksanakan Tepat Waktu
10	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD
11	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD
12	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat yang menjadi Pokok – Pokok Pikiran DPRD, membuat Pokok – Pokok Pikiran DPRD tepat waktu
13	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
14	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD tepat waktu

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
2	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada Table berikut :

Tabel 2.3 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/ 6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan/Nilai Reformasi Birokrasi Prangkat Daerah	3,45		3,29			3,35		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perengakat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	100%		100%	100%	96,68%	-		
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkata Daerah	8 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96,91%	-		
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99,56%	-		
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	81,72%			
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97,07%	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Dokumen	2 Dokumen	99,31%	-		
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	98,81%	-		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%			
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	20 Org/bulan		20 Orang	20 Orang	100%			
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%			
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	-	-		
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	-		
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	98,39%			
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket		18 Paket	18 Paket	100%	-		
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jummlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		150	150	100%			
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		21 Orang	21 Orang	100%	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	-		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-		
4.02.01.2.08.0002	Pemyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-		
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	-		
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	-		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 Unit		6 Unit	6 Unit	99,50%	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	-		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	-		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan		20 Orang	20 Orang	92,89%	-		
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket		20 Pasang	20 Pasang	99,83%	-		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Chek Up DPRD	20 Orang		20 Orang	10 Orang	49,89%			
4.02.01.2.16	Layanan Adminstras DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	-		
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan		20 Pasang	20 Pasang	99,98%	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD dan Fungsi	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	100	100	100			100		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100%		100%	100%	98,28%	-		
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	96,42%	-		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	99,17%	-		
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	7 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	94,95%			
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%		100%	100%	100%	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	99,77%	-		
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	99,70%	-		
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99,77%	-		
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99,39%	-		
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	97,49%	-		
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	98,81%	-		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%		-	-	-	-		
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		-	-	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		-	-	-	-		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%		100%	100%	99,75%			
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	10 Dokumen		20 Orang	20 Orang	99,87%			
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang		8 Orang	8 Orang	99,98%			
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	100%			
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		3	3	100%			
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	86%	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentas Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		30	30	100%	-		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100%		-	-	-	-		
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Jumlah DokumenPokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen		-	-	-	-		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		-	-	-	-		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100%		-	-	-	-		
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Berbicara DPRD	1 Dokumen		-	-	-	-		
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen		-	-	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.02.2.08	Fasilitasi tugas DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100%		100%	100%	100%	-		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	1 Dokumen		20 Orang	20 Orang	99,90%			
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	93,46%			
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184,84%			
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56,82%			
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100%		-	-	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 Orang		-	-	-	-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 99 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dari target/sasaran sebesar 100% rata- rata selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Sekrtariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Masih seringnya terjadi campur tangan pihakpihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Masih seringnya terjadi campur tangan pihakpihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD
Masih rendahnya kualitas laporan kinerja SKPD	Belum optimalnya kinerja pengelola keuangan Set. DPRD
Belum optimalnya DPRD melaksanakan tupoksi	Pengaruh eksternal terhadap pelaksanaan tupoksi
Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum	Lemahnya penegakan produk hukum daerah oleh aparatur.

Selain itu, selama Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabuoaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Tantangan	Peluang
Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.	Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan DPRD
Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan	Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang

Tantangan	Peluang
Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan”	kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kegiatan DPRD.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

- a. Kompetensi sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi Pemerintah.
- e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun Lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun2026

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2026 , memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.6 (T-C.31) berikut :

Tabel 2.6 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
SEKETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat		17.264.231.640	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat		17.264.231.640	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		52.404.200	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		52.404.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	42.206.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	42.206.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.462.500	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.462.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.746.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.746.250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.137.860	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.137.860	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.137.860	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.137.860	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.137.860	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.137.860	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	370.606.670	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	370.606.670	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	21.291.470	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	21.291.470	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	71.617.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	71.617.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	277.698.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	277.698.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	2.060.491.322	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	2.060.491.322	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.608.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.608.600	
	Pemyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	190.000.000	Pemyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	190.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	80.701.950	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	80.701.950	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1.808.180.772	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1.808.180.772	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	1.593.355.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	1.593.355.200	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JABatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	234.845.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JABatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	234.845.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24	26.399.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24	26.399.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	1.332.111.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	21.291.470	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	8.528.142.967	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	8.528.142.967	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20	8.355.427.967	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20	8.355.427.967	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2	82.710.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	2.060.491.322	
	Pelaksanaan Medical Chek Up		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Chek Up DPRD	20	90.005.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.608.600	
	Layanan Administrasi DPRD		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	2.665.097.000	Layanan Administrasi DPRD		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	2.665.097.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	2.665.097.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	2.665.097.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	100	5.108.792.880	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	100	5.108.792.880	

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	871.713.820	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	871.713.820	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7	222.371.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7	222.371.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	23.310.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	23.310.000	
NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	7	18.827.820	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	7	18.827.820	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7	607.205.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7	607.205.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	158.059.640	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	158.059.640	
	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	18.731.150	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	18.731.150	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	18.731.150	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	18.731.150	
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	30.037.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.608.600	
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	30.037.250	Layanan Administrasi DPRD		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	2.665.097.000	
	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	30.037.250	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	2.665.097.000	

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	30.037.250	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	100	5.108.792.880	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	9.204.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	9.204.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1.670.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1.670.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	7.534.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	7.534.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	2.898.868.070	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	2.898.868.070	
	Pendalaman Tugas		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	10	1.843.936.000	Pendalaman Tugas		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	10	1.843.936.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15	720.070.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15	720.070.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3	117.003.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3	117.003.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	170.160.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	170.160.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	16.885.320	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	16.885.320	
	Publikasi dan Dokumentasi		Jumlah Dokumentas Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	30.813.750	Publikasi dan Dokumentasi		Jumlah Dokumentas Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	30.813.750	

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	237.927.300	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	237.927.300	
	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD		Jumlah DokumenPokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1	7.080.000	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD		Jumlah DokumenPokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1	7.080.000	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	230.847.300	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	230.847.300	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	8.741.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	8.741.000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Berbicara DPRD	1	2.937.000	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Berbicara DPRD	1	2.937.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	5.804.000	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	5.804.000	
	Fasililitasi Tugas DPRD		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	924.279.050	Fasililitasi Tugas DPRD		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan	100	924.279.050	
NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	1	906.058.000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	2.898.868.070	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1	5.000.550	Pendalaman Tugas		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	10	1.843.936.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	10.529.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15	720.070.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	2.041.500	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3	117.003.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	650.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	170.160.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	15.012.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100	15.012.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2	15.012.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2	15.012.000	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappelitbang. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam

mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026.

Tabel 2.7 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catat
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOLSEL	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan/Nilai Reformasi Birokrasi Prangkat Daerah	20.482.134.287	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Rencana Kerja Jumlah Cascading Kinerja/Pohon Kinerja. Jumlah Keputusan Lepala PD tentang Indikator Kinerja Utama Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu Jumlah Dokumen Rencana Aksi Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit Kerja	7.000.000 1.700.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BOLSEL	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	450.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	BOLSEL	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	500.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BOLSEL	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BOLSEL	Jumlah Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1.000.000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	1.000.000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BOLSEL	Jumlah ASN dan Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan	8.997.984.287	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BOLSEL	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas	7.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catat
1	2	3	4	5	6
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BOLSEL	Jumlah Dokumen yang di verifikasi	5.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BOLSEL	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BOLSEL	Jumlah Laporan yang tersusun	5.000.000	
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BOLSEL	Jumlah ASN Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD	42.000.000	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BOLSEL	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan	100.000.000	
14	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BOLSEL	Jumlah Alat Listrik yang tersedia	22.500.000	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BOLSEL	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	150.000.000	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BOLSEL	Jumlah Spanduk yang dicetak Jumlah Baliho yang di cetak Jumlah Karangan Bunga Jumlah Undangan yang di cetak Jumlah Penggandaan	5.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000 4.000.000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	BOLSEL	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	150.000.000	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BOLSEL	Jumlah tamu yang berkunjung	40.000.000	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BOLSEL	Jumlah ASN yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi	500.000.000	
20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLSEL	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	350.000.000	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BOLSEL	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	100.000.000	
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BOLSEL	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor Jumlah ruangan yang di Rehabilitasi	5.000.000.000 100.000.000	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BOLSEL	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	250.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catat
1	2	3	4	5	6
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BOLSEL	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	200.000.000	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BOLSEL	Jumlah Materai	5.000.000	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	BOLSEL	Jumlah Jasa Internet Jumlah Jasa Listrik	120.000.000 12.000.000	
27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BOLSEL	Jumlah Jasa Peralatan	10.000.000	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BOLSEL	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000.000	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BOLSEL	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas yang memerlukan Jasa Perawatan	4.000.000 400.000.000	
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BOLSEL	Jumlah Peralatan dan Mesin Jumlah Jasa Perawatan Peralatan dan Mesin Jumlah BBM Genset	10.000.000 5.000.000 12.000.000	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BOLSEL	Jumlah ruangan yang di Rehabilitasi	300.000.000	
32	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani	200.000.000	
33	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD	BOLSEL	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD Jumlah Pakaian Adat Anggota DPRD	70.000.000 50.000.000	
34	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Chek Up	90.000.000	
35	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	BOLSEL	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	150.000.000	
36	Fasilitasi Fraksi DPRD	BOLSEL	Jumlah Fasilitasi Fraksi DPRD	200.000.000	
37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	BOLSEL	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.500.000.000	
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani	250.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

1	2	3	4	5	6
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BOLSEL	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	9.190.819.920	
39	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	BOLSEL	Jumlah Program Pembentukan PERDA Jumlah Rancangan Perda yang diparipurnakan	35.000.000 100.000.000	
40	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	BOLSEL	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	35.000.000	
41	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	BOLSEL	Jumlah Perundang - Undangan yang di bahas	10.000.000	
42	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	BOLSEL	Jumlah Legal Drafting yang difasilitasi Jumlah Naskah Akademik yang difasilitasi	50.000.000 210.000.000	
43	Penyusunan Tata Tertib DPRD	BOLSEL	Jumlah Tata Tertib yang disusun	-	
44	Pembahasan KUA dan PPAS	BOLSEL	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	30.000.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BOLSEL	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.000.000	
45	Pembahasan APBD	BOLSEL	Jumlah Pembahasan APBD	25.000.000	
46	Pembahasan APBD Perubahan	BOLSEL	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	25.000.000	
	Pembahasan Laporan Semester	BOLSEL	Jumlah Pembahasan Laporan Semester	10.000.000	
47	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	BOLSEL	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25.000.000	
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan	60.000.000 25.000.000	
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan	60.000.000 25.000.000	
50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan	60.000.000 25.000.000	
51	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan	60.000.000 25.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
52	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan	80.000.000 30.000.000	
53	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10.000.000	
54	Pengawasan Penggunaan Anggaran	BOLSEL	Jumlah Hearing yang dilaksanakan	60.000.000	
55	Pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Pembahasan Jumlah Perangkat Daerah yang hadir dalam Laporan Keterangan Paripurna Pertanggungjawaban	25.000.000 35.000.000	
56	Orientasi DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Orientasi Jumlah Orientasi yang dilaksanakan	- -	
57	Bimbingan Teknis DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Dtudi Banding Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan dan Studi Banding	550.000.000 300.000.000	
58	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	BOLSEL	Jumlah Media yang mempublikasi kegiatan DPRD	1.500.819.920	
59	Pemyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	BOLSEL	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	324.000.000	
60	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	BOLSEL	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	216.000.000	
61	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	BOLSEL	Jumlah Hari - hari besar keagamaan yang dilaksanakan Pimpinan DPRD	200.000.000	
62	Penyusunan Program Kerja DPRD	BOLSEL	Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun	20.000.000	
63	Kunjungan Kerja dalam Daerah	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah	200.000.000	
64	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	BOLSEL	Jumlah Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	20.000.000	
65	Pelaksanaan Reses	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Reses Jumlah Reses yang dilaksanakan	100.000.000 400.000.000	

66	Penyusunan Kode Etik DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yang menyusun Kode Etik	20.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
67	Pengawasan Kode Etik DPRD	BOLSEL	Jumlah Anggota DPRD yangmengawasi Kode Etik	10.000.000	
68	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	BOLSEL	Jumlah DPRD yang melaksanakan Konsultasi	25.000.000	
69	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	BOLSEL	Jumlah DPRD yang menyusun Laporan Kinerja	20.000.000	
70	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	BOLSEL	Jumlah DPRD yang melaksanakan Konsultasi	4.000.000.000	
71	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	BOLSEL	Jumlah DPRD yang menyusun Laporan Kinerja	20.000.000	
72	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	BOLSEL	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang difasilitasi	60.000.000	
73	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	BOLSEL	Jumlah Pimpinan yang difasilitasi	15.000.000	
74	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	BOLSEL	Jumlah Anggota Pansus	30.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP
Tahun 2026

PN	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Mengacu pada pernyataan serta visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, yaitu : Meningkatnya Dukungan Sekretariat Terhadap Peran DPRD sesuai Tugas dan Fungsinya, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan dukungan sekretariat terhadap peran dprd sesuai dengan fungsinya	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	25 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Sekretariat DPRD menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah Bersama Bupati.
2. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam Menyusun dan menetapkan APBD Bersama Pemerintah Daerah.
3. Fungsi Pengawasanyang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – UNDANG, Peraturan Daerah,

Peraturan/Keputusan Bupati dan Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2023 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 2 program dan Kegiatan serta 75 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

Tabel 3.3 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KODE	UURUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.2.0.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan/Nilai Reformasi Birokrasi Prangkat Daerah	Bolsel	35%	20.482.134.287	DAU		40%	16.832.134.287
4.0.2.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Bolsel	35%	20.650.000	DAU		38%	20.650.000
4.0.2.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel	35%	9.019.984.287	DAU		35%	9.019.984.287
4.0.2.0.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat	Bolsel	45%	42.000.000	DAU		45%	42.000.000
4.0.2.0.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	Bolsel	50%	100.000.000	DAU		45%	100.000.000
4.0.2.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan, Alat Listrik dan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Bolsel	35%	911.500.000	DAU		40%	911.500.000
4.0.2.0.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Bolsel	40%	6.000.000.000	DAU	Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Yang Baru	35%	2.350.000.000
4.0.2.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel	50%	1.147.000.000	DAU		40%	1.147.000.000
4.0.2.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perawatan Barang Milik Daerah	Bolsel	45%	731.000.000	DAU		55%	731.000.000
4.0.2.0.1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bolsel	35%	410.000.000	DAU		35%	410.000.000

4.0.2.0.1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Bolsel		2.100.000.000	DAU			2.100.000.000

KODE	UURUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.2.0.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	Bolsel	25%	9.190.819.920				9.585.819.920
4.0.2.0.2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Bolsel	50%	440.000.000	DAU		40%	440.000.000
4.0.2.0.2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Paripurna yang dilaksanakan Tepat Waktu	Bolsel	45%	140.000.000	DAU		35%	140.000.000
4.0.2.0.2.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD	Bolsel	30%	580.000.000	DAU		30%	580.000.000
4.0.2.0.2.2.01	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD	Bolsel	80%	3.110.819.920	DAU		80%	3.535.819.920
4.0.2.0.2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang menjadi Pokok - Pokok Pikiran DPRD, membuat Pokok - Pokok Pikiran DPRD tepat waktu	Bolsel	40%	720.000.000	DAU		35%	720.000.000
4.0.2.0.2.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik	Bolsel	2%	30.000.000	DAU		2%	30.000.000
4.0.2.0.2.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang disetujui DPRD	Bolsel	6%	45.000.000	DAU		10%	45.000.000
4.0.2.0.2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	Bolsel	40%	4.125.000.000	DAU		45%	4.095.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang bersifat umum dan menunjang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD terdiri dari 2 Program dan 18 Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 29.672.954.207,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 10 kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 20.650.000,-
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 9.019.984.287,-
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 42.000.000,-
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 100.000.000,-
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 911.500.000,-
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. .6000.000.000,-
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 1.147.000.000,-
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 731.000.000,-
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 410.000.000,-
- j. Layanan Administrasi DPRD, , yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 2.100.000.000,-

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD dengan 8 kegiatan yaitu :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 440.000.000,-
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran, yang terdiri dari 6 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 140.000.000,-
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 580.000.000,-
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri dari 7 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 3.110.819.920,-
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 720.000.000,-
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 30.000.000,-
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 45.000.000,-
- h. Fasilitasi Tugas DPRD, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 4.125.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Y. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BERLAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Resntra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 merupakan tahun I (Pertama) Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Renja bappelitbangda Tahun 2026 di laksanakan pada 1 minggu setelah dokumen RKPD di tetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu kedua bulan Juni. Selanjutnya, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2026 dengan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029, maka penyusunan renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempedomani Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Selanjutnya penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2026 juga memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Nomor Daerah, sehingga Renja Bappelitbangda Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman dengan regulasi dimaksud.

1.2 **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbanda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Bappelitbangda yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terukur, dan terintegrasi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan Renstra Bappelitbangda ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional, lengkap dengan indikator kinerja dan target yang jelas.;
2. Menyelaraskan rencana kerja Bappelitbangda dengan RKPD, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan nasional/provinsi yang relevan;

3. Menjadi acuan penyusunan anggaran (RKA) Bappelitbangda agar program dan kegiatan dapat dibiayai secara tepat dan efisien.
4. Mengintegrasikan masukan hasil Musrenbang, forum perangkat daerah, dan aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja Bappelitbangda;
5. Memastikan keterukuran kinerja Bappelitbangda melalui indikator output dan outcome yang relevan dan dapat dievaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD dan Review Terhadap Renstra PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, Berisi tentang : Program dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan, Keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, Alokasi anggaran per program/kegiatan, sumber pendanaan, dan lokasi pelaksanaan, dan penjabaran indikator kinerja kegiatan, target, serta kelompok sasaran.

BAB V PENUTUP, Berisi tentang: Kesimpulan Umum Serta harapan dan Komitmen Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Renja Bappelitbangda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama tahun 2024. Evaluasi Renja bappelitbangda Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 (Tiga) Pelaksanaan Rencana Strategis Bappelitbangda berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Tahun 2022-2026.

Pada tahun 2024 Anggaran Belanja Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan mencapai Rp. **8.891.322.244,-** (*Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), untuk pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 4 (*Empat*) Program, 15 (*Lima Belas*) Kegiatan dan 38 (*Tiga Puluh Delapan*) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai **Rp. 8.456.737.240,-** (*Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan capaian kinerja fisik sebesar 96% dan capaian kinerja keuangan sebesar **95,11%**.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan Tahun 2022 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian IKU Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024 (n-2)			Target Akhir Renstra	(%)Capaian s/d 2023 terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8 = $\frac{5}{7} \times 100\%$
1	Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP	16,44	17,70	N/A*	N/A	18,1	N/A
2	Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP	23,86	22,45	N/A*	N/A	22,5	N/A
3	Penilaian PPD	0	1	0	0%	1	0%
4	Indeks Inovasi daerah	49,43	40,00	47,91	100%	50	95,82%

Sumber : Dokumen LKJIP Bappelitbangda Tahun 2023

Secara umum capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sampai dengan tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2022 – 2026. Beberapa indikkator kinerja belum terdapat realisasi dimana dari 4 (Empat) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 2 (Dua) indikator yang belum dilakukan Penilaian Yaitu *Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP*, dan *Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen Sakip*, hal ini di sebabkan karena penilaian indikator diatas belum dilaksnakan Evaluasi Oleh PAN-RB. Sedangkan untuk Indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) sudah dilakukan penilaian dengan capaian Indikator Kinerja **Sangat Tinggi**.

Pada Tahun 2023 semua indikator kinerja telah melampaui target yang di tetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja atas indikator Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian Indikator kinerja Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP dan Indeks Inovasi Daerah juga telah On the Track sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Penilaian PPD tidak sesuai dengan target renstra yang ditetapkan, namun Bappelitbangda

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima Penghargaan PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan kategori kabupaten dengan Perencanaan dan pencapaian Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten dengan peringkat harapan I (Satu).

Sementara capaian atas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda satu tahun. Secara detail capaian evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun lalu dan capaian Renstra Bappelitbangda dapat dilihat dalam tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.2 (T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangk t Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Reallis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01	PERENCANAAN				86%					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Skor)	170	85,56	42,5	85,56	100%	85	256,12	100%
		Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Skor)	145	0	72	0	0%	73	73	50%
		Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Skor)	145	67,9	72	0	0%	73	140,9	100%
5.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	60	12	12	12	100%	12	36	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Reallis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Laporan)	40	8	8	8	100%	8	24	60%
5.01.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35	0	10	10	100%	10	20	57%
5.01.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	100%
5.01.01. 2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	100%
5.01.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	0	1	1	100%	1	2	33%
5.01.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	0	1	1	100%	1	2	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Reallis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	4	4	100%	4	8	100%
5.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	34	34	34	34	100%	34	102	100%
			60	12	12	12	100%	12	36	60%
5.01.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	34	34	100%	35	103	100%
5.01.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	48	45	12	12	100%	12	69	100%
5.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)	10	2	2	2	100%	2	6	60%
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
5.01.01. 2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	12	12	12	100%	12	36	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	34	10	34	100%	10	78	100%
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib (Dokumen)	15	3	3	3	100%	3	9	60%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Laporan)	20	12	12	12	100%	12	36	180%
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	34	0	0	0%	0	34	100%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	104	101	1	1	100%	1	103	99%
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	45	10	10	10	100%	10	30	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	34	34	34	34	100%	34	102	100%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan (Unit)	23	2	2	2	100%	5	9	39%
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	1	1	100%	0	1	100%
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	2	1	13	1300%	2	17	283%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100	100	100	100	100%	100	300	100%
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	19	2	2	2	100%	24	28	147%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen)	75	100	72	100	100%	100	100	100%
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60	1	1	1	100%	1	3	5%
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60	15	17	15	88%	15	45	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Operasional atau Lapangan									
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	2	2	2	0%	2	6	26%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan (Persen)	100	100	75	100	100%	100	100	100%
		Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam perencanaan pembangunan (Persen)	90	90	90	100	100%	90	100	100%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah (Dokumen)	16	3	2	2	100%	4	9	56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	8	2	2	2	100%	2	6	75%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	7	2	1	1	100%	1	4	57%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	12	3	5	2	40%	2	7	58%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Data)	20	4	4	4	100%	4	12	60%
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	143	50	33	36	109%	33	119	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	4	1	1	1	0%	1	3	75%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	35	4	9	4	44%	4	12	34%
		Jumlah PD yang dievaluasi (SKPD)	36	36	36	36	100%	36	108	100%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	36	12	8	4	50%	4	20	56%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persen)	85	41,36	85	50	59%	85	176,36	207%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Reallis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	85	41,36	85	50	59%	85	176,36	207%
		Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Persen)	85	41,36	85	50	59%	85	176,36	207%
5.01.03. 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (SKPD)	27	27	27	27	100%	27	81	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	10	2	2	2	100%	2	6	60%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Laporan)	20	0	4	4	100%	4	8	40%
5.01.03. 2.01.000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	18	9	3	3	0%	3	15	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	2	2	2	100%	2	6	75%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (SKPD)	8	8	8	8	100%	8	24	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	10	2	2	2	100%	2	6	60%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	5	5	5	5	100%	5	15	100%
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	7	1	2	2	100%	2	5	71%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	1	2	2	100%	2	5	83%
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	1	1	100%	1	4	100%

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Reallis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.03. 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (SKPD)	5	5	5	5	100%	20	30	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	22	2	2	2	100%	2	6	27%
		Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Laporan)	5	5	5	5	100%	5	15	100%
5.01.03. 2.03.000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	0	1	100%	0	3	100%
5.01.03. 2.03.000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan (Persen)	80	0	80	100	125%	80	100	100%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kompetisi Inovasi yang dilaksanakan (Kompetisi)	11	1	3	1	33%	1	3	27%
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	4	1	1	1	100%	1	3	75%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kompetisi Inovasi yang dilaksanakan (Kompetisi)	2	1	1	1	100%	1	3	150%
		Jumlah Hasil Penilaian Inovasi (Inovasi)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	2	1	0	1	100%	0	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	3	0	1	1	100%	1	2	67%

Sumber :Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa uraian mengenai kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tercantum pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	2025 (thn n)	2026 (thn n+1)	2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	2025 (Thn n)	2026 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP	-		17,50	17,70	18,00	18,10	16,44	N/A	17,825	17,56	
2	Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen Sakip	-		22,4	22,5	22,5	22,5	23,86	N/A	22,455	22,82	
3	Penilaian PPD	-		1	1	1	1	0	0	1	1	
4	Indeks Inovasi	-		35,00	40,00	45,00	50,00	49,43	47,91	42,5	46,108	

Sumber: Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 Bappelitbangda (TC-30 *permendagri nomor 86 tahun 2017 hal - 402 -)

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masih Terdapat Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
- Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan, terutama terkait dengan Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi.	- Kurangnya Komitmen Pimpinan PD dalam pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.
- Belum terkoneksi dengan baik system perencanaan pembangunan daerah dari tingkatan desa sampai tingkat pemerintah pusat.	- Rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur
- Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	- Belum adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur
- Masih rendahnya kualitas data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistic sektoral pada perangkat daerah

Permasalahan	Hambatan
- Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan.	- Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan terkait perencanaan pembangunan
- Masih rendahnya kualitas SDM perencana di tiap perangkat daerah dan pemerintah desa. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.	- Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya
- Masih perlunya penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.	- Belum terbangunnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- Belum Optimalnya Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.	- Tidak Ada penerapan “reward dan punishment” secara proporsional
- Belum Adanya ASN Peneliti dalam menunjang kegiatan keitbangan.	- Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidang Kelitbangan

Selain itu, selama Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Tantangan	Peluang
- Dinamika regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat terkait	- tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan

Tantangan	Peluang
perencanaan pembangunan daerah yang menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup dan adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi	pembangunan juga sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah
- Sebagai daerah yang sedang berkembang, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat serta komitmen yang kuat dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	- perkembangan informasi dan teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya
- Tingkat pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan pembangunan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Memberi ruang pada penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang bisa diakomodir sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara tepat	- tersedianya potensi sumber daya manusia yang harus dikelola dengan tepat terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya lewat Pendidikan formal dan non formal agar dapat berperan optimal dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah - keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan Bappelitbangda adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan;
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
3. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
5. Meningkatkan Penelitian Dan Inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, di susun Berdasarkan Rancangan Renstra Periode Pertama yaitu renstra tahun 2025 – 2029. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.6 (T-C 31) berikut ini:

Tabel 2.6
Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Nama Perangkat Daerah : Bappelitbangda

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.521.866.823,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.521.866.823,00	
5	1				PERENCANAAN				8.871.867.463,00	PERENCANAAN				8.871.867.463,00	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,45	6.156.113.493,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,45	6.156.113.493,00	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.491.932,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.491.932,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan			
								jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	4.912.680,00		jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	4.912.680,00
5	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.491.932,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.491.932,00	
5	1	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.996.110,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.996.110,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.795.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.795.800,00	
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1.789.875,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1.789.875,00	
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	2.758.350,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	2.758.350,00	
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja	Kab. Bolaang	jumlah Laporan Evaluasi	10 Laporan	4.912.680,00	Evaluasi Kinerja	Kab. Bolaang	jumlah Laporan Evaluasi	10 Laporan	4.912.680,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perangkat Daerah	Mongondow Selatan	Kinerja Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	Mongondow Selatan	Kinerja Perangkat Daerah			
5	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	4.202.585.783,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	4.202.585.783,00	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.225.000,00			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.225.000,00	
5	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	4.202.585.783,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	4.202.585.783,00	
5	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.225.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.225.000,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.386.180,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.386.180,00	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	765.287.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	765.287.000,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		14.386.180,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.386.180,00	
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		4.800.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		765.287.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	765.287.000,00	
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolang Mongondow	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		478.784.070,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolang Mongondow	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	478.784.070,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Selatan					Selatan				
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	478.784.070,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	478.784.070,00		
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	82.800.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	82.800.000,00		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167.920.913,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	2 Laporan	82.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	82.800.000,00		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Listrik yang Disediakan					yang Disediakan			
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167.920.913,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167.920.913,00	
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.436.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.436.400,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	2.050.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	2.050.000,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.355.400,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.355.400,00	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	303.738.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	303.738.000,00	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	48.436.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	48.436.400,00	
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Selatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Selatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	9 Unit	2.050.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	9 Unit	2.050.000,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
5	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.355.400,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.355.400,00	
5	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	303.738.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	303.738.000,00	
5	1	2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persen	1.346.171.800,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persen	1.346.171.800,00	
								Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 Persen				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 Persen		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	2	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	24.031.500 ,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	24.031.500,00	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Linta s Perangkat Daerah	2 Berita Acara	11.377.500 ,00			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Li ntas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	11.377.500,00	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/K ota	2 Berita Acara	27.195.000 ,00			Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten /Kota	2 Berita Acara	27.195.000,00	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD)	2 Dokume n	733.973.40 0,00			Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKP D)	2 Dokume n	733.973.400,0 0	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	2	2.0 1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	24.031.500, 00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	24.031.500,00	
5	1	2	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Linta s Perangkat Daerah	2 Berita Acara	11.377.500, 00	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Li ntas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	11.377.500,00	
5	1	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/K ota	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/K ota	2 Berita Acara	27.195.000, 00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten /Kota	2 Berita Acara	27.195.000,00	
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/K ota	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD)	2 Dokume n	733.973.40 0,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKP D)	2 Dokume n	733.973.400,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	2	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	376.880.900,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	376.880.900,00	
5	1	2	2.0 2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	328.436.500,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	328.436.500,00	
5	1	2	2.0 2	2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	48.444.400,00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	48.444.400,00	
5	1	2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	67.540.000,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	67.540.000,00	
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Kab. Bolaa ng Mong ondo w	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	67.540.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Kab. Bolaa ng Mong ondo w	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	4 Laporan	67.540.000,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Daerah	Selatan				Pembangunan Daerah	Selatan	nan Daerah			
5	1	2	2.04		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	105.173.500,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	105.173.500,00	
5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	105.173.500,00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	105.173.500,00	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	404.600.450,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100 Persen	404.600.450,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												nan Manusia			
							Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	264.981.720,00			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	264.981.720,00	
							Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	700.000.000,00			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	700.000.000,00	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.797.160,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen	200.797.160,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bidang Pemerintahan						nan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	101.154.970,00			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	101.154.970,00		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	102.648.320,00			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1 Laporan	102.648.320,00		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Pembangunan Manusia			
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	200.797.160,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	200.797.160,00	
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	101.154.970,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	1 Laporan	101.154.970,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Daerah Bidang Pembangu nan Manusia			
5	1	3	2.0 1	8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembanguna n Manusia	1 Lapora n	102.648.32 0,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangu nan Manusia	1 Lapora n	102.648.320,00	
5	1	3	2.0 2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Lapora n	99.990.665 ,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Lapora n	99.990.665,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	39.995.550,00			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	39.995.550,00	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	124.995.505,00			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	124.995.505,00	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	99.990.665,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	99.990.665,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Selatan	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Selatan	Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	39.995.550,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	39.995.550,00	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	124.995.505,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada	1 Laporan	124.995.505,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Bidang Perekonomian			
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang KewilayahanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	700.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang KewilayahanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	700.000.000,00	
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang KewilayahanJumlah	1 Laporan	700.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1 Laporan	700.000.000,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan					KewilayahanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan			
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				649.999.360,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				649.999.360,00	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 Persen	649.999.360,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 Persen	649.999.360,00	
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Kab. Bolaang Mongondo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	199.999.940,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Bolaang Mongondo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1 Dokumen	199.999.940,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kependudukan	w Selatana	n Bidang Aspek-Aspek Sosial				w Selatana	Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Bolang Mongondow Selatana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	199.999.940,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Bolang Mongondow Selatana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	199.999.940,00	
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Bolang Mongondow Selatana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	249.999.600,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Bolang Mongondow Selatana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	249.999.600,00	
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Bolang Mongondow Selatana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	249.999.600,00	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Bolang Mongondow Selatana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	249.999.600,00	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Bolang Mongondow	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan	1 Dokumen	199.999.820,00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Bolang Mongondow	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan	1 Dokumen	199.999.820,00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							w Selatan	n, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				w Selatan	gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi			
5	5	2	2.04	1		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	199.999.820,00	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	199.999.820,00	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 di Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

Tabel 2.7 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : BAPPELITBANGDA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	-	-	-	-	NIHIL
2	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	

(Tabel Tc-32 Permendagri 86 tahun 2017)

Berdasarkan table diatas, maka tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan

menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut Sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendukung kebijakan nasional 2025 – 2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke 7 (Tujuh).

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat pada tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja:

Tabel 3.1 (T-C 33) Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TAHUN 2025-2029

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	TARGET					TARGET AKHIR
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Tujuan :									
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	indeks	86	82.00	83.00	84.00	85.00	85.00	85.00
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)	Persentase	0	100	100	100	100	100	100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARN	SAT UAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	TARGET					TARGE T AKHIR
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Pembangunan Daerah									
Sasaran :									
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, tepat waktu, dan berbasis data	Nilai Perencanaan pada Komponen SAKIP (Angka)	Angka	23,86	23.87	23.88	23.89	24	24.10	24.30
	Nilai Pengukuran Kinerja pada Komponen SAKIP (Angka)	Angka	16,44	17	17.23	17.50	18	18.15	18.25
Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Indeks	47.91	40.5	41	41.5	42	42.5	43
	Indeks Daya Saing Digital (Indeks)	Indeks	0.009	1.27	2.31	2.50	2.52	2.54	2.56

Sumber Data: Dokumen Renstra 2025-2029 Bappelitbangda

Program dan kegiatan

Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan salah satu fungsi Bappelitbangda adalah “perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan”. Maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, secara umum Bappelitbangda memiliki

kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappelitbangda mendukung pencapaian Misi Kesatu, yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Melalui Penguatan Sistem Yang Baik, Bersih Dan Adaptif”.

Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Adaptif dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut hanya terdapat 2 sasaran pembangunan (Sasaran 1 RPJMD) yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Pada sasaran ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu (a) Nilai SAKIP, (b) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), (c) Indeks SPBE. (sasaran 2 RPJMD) yaitu “Meningkatnya Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, sasaran ke 2 ini terdapat 2 Indikator sasaran yaitu (a) Indeks Pelayanan Publik dan (b) Indeks Inovasi Daerah. dimana Bappelitbangda mendukung pencapaian indikator sasaran “NILAI SAKIP” dan “INDEKS INOVASI DAERAH”.

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, pada tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 4 (empat) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 41 (empat puluh Satu) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Total pagu yang dibutuhkan sebanyak Rp. 9.521.866.823,- (Sembilan Milyar Lima ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada

Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu dapat dilihat pada tabel 3.2:

Tabel 3.2 program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1.21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.22	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
1.31	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.1	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>
2.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
2.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.2	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
2.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.3	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
2.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.1	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.2	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
3.3	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>
3.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.1	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
4.3	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>
4.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Penjelasan Jika Rumusan Program Dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan RKPD

Rumusan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus disusun berdasarkan RKPD sebagai pedoman perencanaan tahunan daerah. Apabila rumusan program dan kegiatan **tidak sesuai** dengan RKPD hal ini dapat menimbulkan ketidaksinkronan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perubahan yang tidak sejalan, baik berupa penambahan, penghapusan, maupun modifikasi substansi program/kegiatan, berpotensi mengganggu keterpaduan dokumen perencanaan, menghambat proses sinkronisasi dengan RPJMD dan dokumen penganggaran, serta memerlukan pembahasan dan justifikasi ulang melalui forum perangkat daerah atau mekanisme revisi perencanaan. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan penetapan dokumen dan berisiko mengurangi peluang program/kegiatan tersebut untuk diakomodasi dalam RKPD final dan KUA-PPAS.

Tetapi Rumusan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2026 sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, hal ini akan menciptakan kesinambungan dan konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Bappelitbangda. Kesesuaian ini memudahkan proses sinkronisasi dan pembahasan lebih lanjut, mempercepat tahapan penetapan dokumen, serta meningkatkan peluang program/kegiatan untuk memperoleh alokasi anggaran sebagaimana direncanakan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, seperti yang tercantum dalam tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 (T-C 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.521.866.823,00				8.674.853.381,00
5	1			PERENCANAAN				8.871.867.463,00				8.324.853.381,00
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,45 Indeks	6.156.113.493,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3,45 Indeks	5.296.212.829,00
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Dokumen	24.491.932,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	5.000.000,00
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	4.996.110,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	1.795.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	1.789.875,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	2.758.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00	
					jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10 Laporan	4.912.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 Laporan	10.000.000,00	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Dokumen	24.491.932,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	5.000.000,00
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	4.996.110,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
51112.013	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	1.795.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00
51112.014	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	1.789.875,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00
51112.015	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	2.758.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	2.500.000,00
51112.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10 Laporan	4.912.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 Laporan	10.000.000,00
51112.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	37 ASN	4.202.585.783,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	37 ASN	4.241.204.971,00
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12 Dokumen	10.225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Dokumen	20.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	37 ASN	4.202.585.783,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	37 ASN 4.241.204.971,00
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12 Dokumen	10.225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Dokumen 20.000.000,00
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan 1.000.000,00
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan 1.000.000,00
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 paket	14.386.180,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 paket 1.398.650,00
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan 2.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	765.287.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	400.000.000,00
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 paket	14.386.180,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 paket	1.398.650,00
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	2.500.000,00
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	765.287.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	400.000.000,00
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	478.784.070,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	100.000.000,00
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	478.784.070,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Laporan	82.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Laporan	85.308.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	167.920.913,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	360.538.408,00	
5111	2.08	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Laporan	82.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Laporan	85.308.000,00
5111	2.08	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12 Laporan	167.920.913,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	360.538.408,00
5111	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	48.436.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	44.262.800,00
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9 Unit	2.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9 Unit	2.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	22.355.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	2.500.000,00
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	303.738.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	10.000.000,00
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	48.436.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	44.262.800,00
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9 Unit	2.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9 Unit	2.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	22.355.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	2.500.000,00
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Unit	303.738.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	10.000.000,00
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 Persen	1.346.171.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Persen	2.004.312.100,00
						Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 Persen		Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Persen	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Berita Acara	24.031.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Berita Acara	100.000.000,00
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Berita Acara	11.377.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Berita Acara	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Berita Acara	27.195.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Berita Acara	100.000.000,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Dokumen	733.973.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	848.791.790,00
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Berita Acara	24.031.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Berita Acara	100.000.000,00
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Berita Acara	11.377.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Berita Acara	100.000.000,00
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Berita Acara	27.195.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Berita Acara	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
5122.017	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2 Dokumen	733.973.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	848.791.790,00
5122.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	36 Orang	328.436.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	36 Orang	332.738.973,00
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		48.444.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		100.000.000,00
5122.022	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	36 Orang	328.436.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	36 Orang	332.738.973,00
5122.023	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Buku	48.444.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Buku	100.000.000,00
5122.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	4 Laporan	67.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Laporan	322.781.337,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
5122.033	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	4 Laporan	67.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Laporan	322.781.337,00
5122.04	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	105.173.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	100.000.000,00
5122.042	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	105.173.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	100.000.000,00
513	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 Persen	404.600.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Persen	300.000.000,00
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 Persen	264.981.720,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Persen	674.328.452,00
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 Persen	700.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Persen	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Infrastruktur dan Kewilayahan							
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	200.797.160,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	100.000.000,00
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	101.154.970,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	100.000.000,00
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	102.648.320,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	200.797.160,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	100.000.000,00
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	101.154.970,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	100.000.000,00
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	102.648.320,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	150.000.000,00
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	99.990.665,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	574.328.452,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	39.995.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000,00
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian		1 Laporan	124.995.505,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000,00
513	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	99.990.665,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	574.328.452,00
513	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	39.995.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
5132.024	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	124.995.505,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000,00
5132.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	700.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000,00
5132.038	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Laporan	700.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000,00
55	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						649.999.360,00				350.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	100 Persen	649.999.360,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Persen	350.000.000,00
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	199.999.940,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	250.000.000,00
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	199.999.940,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	250.000.000,00
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	249.999.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	50.000.000,00
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	249.999.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	50.000.000,00
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	199.999.820,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi Target Capaian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5522.041	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Dokumen	199.999.820,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	50.000.000,00

Sumber : Renstra Bapplitbangda Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026, Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2026 disusun berdasarkan:

1. Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029;
2. Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana kerja dan pendanaan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai Pada Lampiran tabel 4.1:

**Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Prakti kaan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.521.866 .823,00							8.674.85 3.381,00	
5 1	PERENCANAAN						8.871.867 .463,00							8.324.85 3.381,00	
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		85	86	3,45 Indeks	6.156.113 .493,00	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Dana Alo kas i Um um (DAU)			-	3,45 Indeks	5.296.21 2.829,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 0 1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	24.491.932,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN Bappelitbangda	2 Dokumen	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.996.110 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional.	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narko ba, judi, dan pe nyelud upan .	Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen	1 Dok umen	1 Dok umen	1 Dok umen	1 Dok umen	1.795.800 ,00	Kab. Bolaang Mong ondow Selatan	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta	4. Penin gkatan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr	ASN Bappelitbang da	1 Dok umen	2.500.00 0,00	Badan Perenca naan Pemban gungan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perubahan RKA-SKPD								mempertahankan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	aspek Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.789.875 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.758.350 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional,	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narkoba, judi, dan penyeludupan.	Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	4.912.680,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokr	ASN Bappelitbangda	10 Laporan	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan .	asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	24.491.932,00	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penigitan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN Bappelitbangda	2 Dokumen	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.996.110,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										mempertahankan dan pembangunan erantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	aspek Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 3 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.800 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelesaian .	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 4 0 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.789.875 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi,	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional,	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narkoba, judi, dan penyeludupan.	Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 5 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.758.350,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokr	ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	2.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										mempertuapencapaian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	asipenataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsinya, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 7 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	4.912.680 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertu penguat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penint gkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan	ASN Bappelitbang da	10 Laporan	10.000.0 00,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praki raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	34 ASN	34 ASN	37 ASN	4.202.585.783,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional,	ASN BAPPELITB ANGDA	37 ASN	4.241.204.971,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
		Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12 Doku men	12 lapor an	12 lapor an	12 Doku men	10.225.00 0,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr	ASN BAPPELITB ANGDA	12 Doku men	20.000.0 00,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										mempertuapencapaian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	asipenataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	34 ASN	34 ASN	37 ASN	4.202.585 .783,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi,	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi	ASN BAPPELITB ANGDA	37 ASN	4.241.20 4.971,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti a n dan Pengam bangan Daerah
5 1 1 2. 3 0 2	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12 Doku men	12 lapor an	12 lapor an	12 Doku men	10.225.00 0,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	4. Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan		12 Doku men	20.000.0 00,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti a n dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	12.000.00 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Laporan	1.000.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dana	PRIORITAS			Targe t Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio nal	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 6 0 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Laporan	1.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	N/A	N/A	1 paket	14.386.180,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penintakan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 paket	1.398.650,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	4.800.000 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencapaian K	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Laporan	2.500.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										egahan dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	765.287.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Laporan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 1 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	N/A	N/A	1 paket	14.386.18 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 paket	1.398.65 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 8 0 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	4.800.000 ,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penindakan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Laporan	2.500.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 9 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	765.287.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penindakan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Laporan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	478.784.070,00	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 6 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	478.784.070,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penanganan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	N/A	N/A	2 Laporan	82.800.00 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	2 Laporan	85.308.0 00,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	12 Laporan	167.920.913,00		Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	12 Laporan	360.538.408,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 2. 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	N/A	N/A	2 Laporan	82.800.00 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan	ASN BAPPELITB ANGDA	2 Laporan	85.308.0 00,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capa ian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 4 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	N/A	N/A	12 Laporan	167.920.913,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alokasi Umum	Mempertkuat reformasi politik, hukum	4. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN BAPPELITB ANGDA	12 Laporan	360.538.408,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kantor yang Disediakan							(DA U)	dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak				Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											sanaa n SPBE				
5 1 1 2. 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	48.436.40 0,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	44.262.8 00,00	Badan Perencana aan Pemban gunan Penelitian dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja a PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	emen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	N/A	N/A	9 Unit	2.050.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan	ASN BAPPELITB ANGDA	9 Unit	2.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	22.355.40 0,00		Dan a Alo kasi Um um	Memp erkua t reform asi politik,	4. Penin gka tan Pelay anan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	2.500.00 0,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									(DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan				n dan Pengamban Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	303.738.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penipuan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capaian Targ et Renja PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	48.436.40 0,00	Kab. Bolaa ng Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertu pencapaian dan pemb	4. Penin gkatan Pelayan an Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	44.262.8 00,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
5 1 1 2. 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaa an, Biaya Pemeliharaa an, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	9 Unit	N/A	N/A	9 Unit	2.050.000 ,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um	Memp erkua t reform asi politik, hukum	4. Penin gka tan Pelay anan Publik	ASN BAPPELITB ANGDA	9 Unit	2.500.00 0,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti a n dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelak				Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											sanaa n SPBE				
5 1 1 2. 6 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	22.355.400,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manaj	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	2.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	emen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 1 2. 1 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	N/A	N/A	1 Unit	303.738.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan	ASN BAPPELITB ANGDA	1 Unit	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 2	PROGRAM PERENCAN AAN, PENGENDA LIAN DAN EVALUASI PEMBANGU NAN DAERAH	Persentase Keselarasa n RPJMD dengan RKPD	100 P ersen	N/A	N/A	100 P ersen	1.346.171 .800,00	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Dan a Alo kas i Um um (DA U)	Memp erkua t refor masi po litik , huku m dan birokr asi, se rta mem perkuat penc egaha n dan pemb erant asan k orup si, nark oba, judi, dan pe nyelu dupan .	4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga a n Yang Tepat Fung si, Regul asi, Pener apan Mana jeme n Resik o, Perce	Perangkat daerah	100 P ersen	2.004.31 2.100,00	Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana an SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capa ian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 P ersen	N/A	N/A	100 P ersen		Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alo kas i Um um (DAU)	Memp erkua t refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korup si, narko ba, judi, dan pe nyelu dupan .	4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga a n Yang Tepat Fung si, Regul asi, Pener apan Mana jeme n Resik o, Perce	Perangkat daerah	100 P ersen		Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana an SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 2 2. 0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	24.031.50 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penington Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Berita Acara	100.000. 000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktiraan Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	11.377.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional,	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Berita Acara	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praktik Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Regul asi, Pener apan Manaj emen Resiko, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai an Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	27.195.00 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alokasi Umum (DAU)	Mempertu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertu penguatan dan pemerantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Berita Acara	100.000. 000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	733.973.400,00	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertahankan penguatan dan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Dokumen	848.791.790,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
5 1 2 2. 3 0 1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	24.031.50 0,00	Kab. Bola ang Mong ondow	Dan a Alo kasi Um um	Memp erkua t reform asi politik,	4. Penin gka tan Pelay anan	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Berita Acara	100.000. 000,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Penelit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Selatan	(DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan				n dan Pengamb angan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renja Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renja PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Pelaksanaan SPBE				
5 1 2 2. 4 0 1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	11.377.50 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manaj	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Berita Acara	100.000. 000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja a PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	emen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 2 2. 5 0 1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	27.195.00 0,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Berita Acara	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemerantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
512.017	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	733.973.400,00	Kab. Bolaang Mongondow	Dana Alokasi Umum	Mempertukarkan reformasi politik,	4. Peningkatan Pelayanan	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	2 Dokumen	848.791.790,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota	Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKPD)						Selata n	(DA U)	hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan				n dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praki raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Pelaksana an SPBE				
5 1 2 2. 0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Oran g	36 Oran g	36 Oran g	36 Oran g	328.436.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alokasi Umum (DAU)	Mempertu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan	Perangkat Daerah	36 Oran g	332.738.973,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										penyeludupan.	Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	48.444.400,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukar reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan hukum	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelemb	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	aga n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
5 1 2 2. 0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaata	36 Oran g	36 Oran g	36 Oran g	36 Oran g	328.436.5 00,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow	Dan a Alo kasi Um	Memp erkua t reform asi	4. Penin gka tan Pelay	Perangkat Daerah	36 Oran g	332.738. 973,00	Badan Perenca naan Pemban gunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perencanaan Pembangunan SKPD	n Data dan Informasi						Selatan	um (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalutan.	anan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik				Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 2 2. 3 0 2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	48.444.400,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manaj	Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa	1 Buku	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	emen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 2 2. 0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	67.540.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah	4 Laporan	322.781.337,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
5 1 2 2. 3 0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4 Lapor an	4 Lapor an	4 Lapor an	4 Lapor an	67.540.00 0,00	Kab. Bola ang Mong ondow	Dan a Alo kasi Um um	Memp erkua t reform asi politik,	4. Penin gka tan Pelay anan	Perangkat Daerah	4 Lapor an	322.781. 337,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembanguna n Daerah	Pembangun an Daerah						Selata n	(DA U)	hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan Kelemb agaan Yang Tepat Fungs i, Regula si, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan				n dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Pelaksanaan SPBE				
5 1 2 2.04	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.173.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manaj	Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencantra Peningkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peningkat Daerah Tahun 2024	Praktiraan Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	emen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 2 2. 2 0 0 4	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	105.173.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alo kasi Umum (DAU)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa	Perangkat Daerah	1 Doku men	100.000.000,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Praktik Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	N/A	NA	100 Persen	404.600.450,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Perce	Perangkat Daerah	100 Persen	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana a n SPBE				
		Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonom ian dan SDA	100 Perse n	N/A	NA	100 Perse n	264.981.7 20,00	Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n	Dan a Alo kas i Um um (DA U)			-	100 Perse n	674.328. 452,00	Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	100 Persen	N/A	NA	100 Persen	700.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	100 Persen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	NA	NA	1 Dokumen	200.797.160,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Perangka t Daerah Tahun 2024	Prakti raan Capa ian Targ et Renja a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										i, narkoba, judi, dan penyeludupan.	i, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	NA	NA	1 Laporan	101.154.970,00		Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi,	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia								serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakti raan Capa ian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangun an Manusia	1 Lap oran	NA	NA	1 Lap oran	102.648.3 20,00		Dan a Alo kasi Umum (DAU)	Memp erkua t reform asi poli tik, hu kum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	4. Penin gkatan Pelay anan Pu blik dan Refor masi Birokr asi Penat aan Kelemb agaan Yang Tepat Fungs i, Regulas i, Penera pan Manaj emen Resik o, Perce patan	Perangkat Daerah	1 Lap oran	100.000. 000,00	Badan Perenca naan Pemb angunan Peneliti an dan Peng amangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 3 2. 5 0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.797.160,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional,	Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE				
5 1 3 2. 7 0 1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	101.154.9 70,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr	Perangkat Daerah	1 Lap oran	100.000. 000,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembangunan Manusia	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								mempertuapencapaian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	asipenataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti kaan Capaian Targe t Renja a PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 3 2. 8 0 1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangun an Manusia	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	102.648.3 20,00	Kab. Bolaang Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan	Perangkat Daerah	1 Lap oran	150.000. 000,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 1 3 2. 0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	NA	NA	1 Laporan	99.990.665,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas	Perangkat Daerah	1 Laporan	574.328.452,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										narkoba, judi, dan penyeludupan.	didasarkan oleh Daerah serta Inovasi Produk Lokal				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	NA	NA	1 Laporan	39.995.550,00		Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkatan Produksi Dan Produktivitas	Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Perekonomi an	1 Lap oran	NA	NA	1 Lap oran	124.995.5 05,00		Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan	8. Penin gkat an Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Produ k	Perangkat Daerah	1 Lap oran	50.000.0 00,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	tivitas Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal				
5 1 3 2. 1 0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomi an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	99.990.66 5,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant	8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Produ	Perangkat Daerah	1 Lap oran	574.328. 452,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja a Pera ngka t Daer ah Ta hun 2024	Prakti raan Capaian Targe t Renja a PD Ta hun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 3 2. 3 0 2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	39.995.55 0,00	Kab. Bola ang Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egahan dan pemb	8. Penin gkatan Ekonomi dan Invest asi Daerah h Penin gkatan Produksi Dan	Perangkat Daerah	1 Lap oran	50.000.0 00,00	Badan Perencana aan Pemban gungan Penelitian n dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perekonomi an								erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	Produ k tivitas Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal				
5 1 3 2. 4 0 2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Perekonomia n	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	124.995.5 05,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egah an dan	8. Penin gkat an Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi	Perangkat Daerah	1 Lap oran	50.000.0 00,00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemerantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 3 2. 0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha nJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha n	1 Lapor an	NA	NA	1 Lapor an	700.000.0 00,00	Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan	Perangkat Daerah	1 Lapor an	50.000.0 00,00	Badan Perenca naan Pemban gungan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja a PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 3 2. 8 0 3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang KewilayahanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayahan	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	700.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alo kasi Umum (DAU)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korupsi, narko ba, judi, dan pe nyelud upan.	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan	Perangkat Daerah	1 Lapor an	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Prakti raan Capaian Targ et Renja PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capaian Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN						649.999.360,00							350.000.000,00	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 Perse n	N/A	NA	100 Perse n	649.999.360,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alo kas i Umum (DAU)	Memp erkua t refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkua t penc egaha n dan	4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga n	Perangkat Daerah	100 Perse n	350.000.000,00	Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 5 2 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	N/A	N/A	1 Dokumen	199.999.940,00	Kab. Bolaang Mongondow	Dana Alokasi Umum	Mempertahankan reformasi politik,	4. Peningkatan Pelayanan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rentra Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Renja Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kependudukan	gan Bidang Aspek-Aspek Sosial						Selatan	(DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelak				n dan Pengamban Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Real isasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024	Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											sanaa n SPBE				
5 5 2 2. 1 0 2	Penelitian dan Pengembang an Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dok umen	N/A	N/A	1 Dok umen	199.999.9 40,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egahan dan pemb erant asan korupsi, narko ba, judi, dan pe	4. Penin gkatan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan Kelemb agaan Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen	Perangkat Daerah	1 Dok umen	250.000. 000,00	Badan Perencana an Pemban gungan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 5 2 2. 0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	N/A	N/A	1 Dokumen	249.999.600,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peringkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 5 2 2. 7 0 3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	N/A	N/A	1 Dokumen	249.999.600,00	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Pera ngkat Daer ah Tahun 2024	Prakti raan Capa ian Targe t Renja PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mb er Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				
5 5 2 2. 0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa	1 Dokumen	N/A	N/A	1 Dokumen	199.999.820,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dana Alokasi Umum	Mempertahakan reformasi politik, hukum	4. Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkatan Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		an di Bidang Teknologi dan Inovasi							(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsional, Regulasi, Penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelak				Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah	Realisasi Capaian Renja Perangka t Daerah Tahun 2024	Praki raan Capaian Targ et Renja a PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Targe t 2026	Pagu Indikatif	Lokas i	Su mber Dan a	PRIORITAS			Targe t Capai n Kiner ja	Kabutih an Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasio anl	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											sanaa n SPBE				
5 5 2 2. 1 0 4	Penelitian, Pengembang an, dan Perekayasaa n di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dok umen	N/A	N/A	1 Dok umen	199.999.8 20,00	Kab. Bolaang Mong ondow Selata n	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe	4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen	Perangkat Daerah	1 Dok umen	50.000.0 00,00	Badan Perenca naan Pemb an gunan Peneliti an dan Pengam bangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir Periode Rencana Peningkat Daerah	Realisasi Capaian Rencana Peningkat Daerah Tahun 2024	Praktik Capaian Target Rencana PD Tahun 2025	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	PRIORITAS			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										nyeludupan.	Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE				

BAB V

PENUTUP

Renja Bappelitbangda Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Stretegis Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029, hasil evaluasi Renja Perangkat daereah Tahun lalu dan Evaluasi Renja Tahun Berjalan disusun berdasarkan Rencana Stretegis Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026 . Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renja Bappelitbangda tahun 2026 disusun mengacu juga kepada kemendari nomor. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor: 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Tahun 2026 memuat rencana Operasional pencapaian sasaran Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 melalui pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan 4 (Empat) Program dengan total pagu anggaran mencapai Rp. 9.521.866.823,- (Sembilan Milyar Lima ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Enam puluh enam ribu delapan ratu dua puluh tiga rupiah).

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 adalah Perubahan target output beberapa sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai hasil respon terhadap hasil pilkada serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024.

Penetapan Renja Bappelitbangda bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, terukur capaian kinerjanya, memiliki indikator yang jelas, serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Renja yang ditetapkan menjadi pedoman operasional tahunan bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan umum anggaran (KUA)

dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah.

Z. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan upaya untuk menangani apa yang harus diatur dan bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik, maka sesuai tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diuntut untuk melakukan perbaikan dalam rangka pelayanan publik yang cepat dan tepat. Dalam kerangka berfikir seperti inilah maka setiap unsur di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) harus melakukan reformasi pola pikir dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan misi yang diembannya. Untuk itu setiap unsur yang terkait didalam Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) harus bekerja secara simultan dalam menjalankan fungsinya guna turut menghadirkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, khususnya di dalam pengelolaan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan daerah telah merumuskan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pedoman di dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka perubahan paradigma penyelenggaraan memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam rangka menghadirkan proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dapat ditinjau dari bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan/pengadministrasian, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan. Kepatuhan dalam pelaksanaan proses tersebut akan sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan mempermudah proses pertanggungjawaban secara hukum. Disamping itu untuk mengimbangi dan melayani tuntutan swasta dan masyarakat juga sekaligus untuk mewujudkan proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien dan efektif maka penerapan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi suatu kebutuhan. Dapat kami sampaikan bahwa

sampai dengan saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah semuanya sudah dapat dijalankan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan keuangan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara :

- Membantu Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
- Menyelaraskan program dengan penganggaran
- Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah :

- Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan
- B. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi Pelaksanaan renja SKPD tahun lalu.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indicator kinerja yang ingin dicapai berikut analisis yang dilakukan:

[illegible]

				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kebijakan Bidang Anggaran	3 Kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100%	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100%
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	515 laporan	515 laporan	515 laporan	515 laporan	100%	515 laporan	515 laporan	100%
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	100%	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	100%
				Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi,Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rencana Penggunaan dan Realisasi Penggunaan Dana Transfer Pusat dan Provinsi	500 laporan	500 laporan	500 laporan	500 laporan	100%	500 laporan	500 laporan	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Potongan PFK	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	100%	Jumlah SP2D	Jumlah SP2D	100%
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	70 Orang	70 Orang	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDDan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
				Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Peaksanaan APBD Bulanan,Triwulan dan semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100%

				Koordinasi an Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa Yang Menerima ADD	81 Desa	81 Desa	81 Desa	81 Desa	100%	81 Desa	81 Desa	100%
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang menerima ADD	81 Desa	81 Desa	81 Desa	81 Desa	100%	81 Desa	81 Desa	100%
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rasio Belanja Darurat mendesak terhadap DAU	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	terlaksananya optimalisasi atas BMD yang digunakan, dimanfaatkan, Dipindahtangankan, dimusnahkan, dan di hapus	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusnya rencana kebutuhan Barang Milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

					Daerah								
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunya Kebijakan terkait pengelolaan BMD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan BMD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Pengamanan Barang Miik Daerah	Terlaksananya pengamanan BMD	50 SKPD	50 SKPD	50 SKPD	50 SKPD	100%	50 SKPD	50 SKPD	100%
				Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Penilaian BMD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
				Rekonsiasi daam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Terlaksananya rekonsiliasi terhadap BMD pada SKPD/Laporan Hasil Rekonsiliasi BMD	50 SKPD	50 SKPD	50 SKPD	50 SKPD	100%	50 SKPD	50 SKPD	100%
				Penyusunan laporan barang milik daerah	Tersusunya Laporan BMD setiap tahunnya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				pembinaan pengelolaan Barang miik daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan BMD SKPD	84 Orang	84 Orang	84 Orang	84 Orang	100%	84 Orang	84 Orang	100%
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terealisasi	28300 Nop	28300 Nop	28300 Nop	28300 Nop	100%	28300 Nop	28300 Nop	100%
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan rekon & Rapat evaluasi capaian Pajak & Retribusi Daerah	16 Pertemuan	16 Pertemuan	16 Pertemuan	16 Pertemuan	100%	16 Pertemuan	16 Pertemuan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 beberapa Program /Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Tersebut dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan dengan Total Anggaran Rp.,- 16.171.812.061,45 (70,22 %) Total realisasi. Sub Kegiatan yang realisasinya di bawah 50% yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16,16%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan dengan total Anggaran Rp.,- 109.455.592.696,00 (98,15%) total realisasi.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan dengan total anggaran Rp. 939.168.662,00,- Adapun realisasi keuangan (83,19%).

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program dimaksud dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan Dengan anggaran Rp. 1.018.989.000,00 dengan Realisasi Anggaran (91,14%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow selatan

Tabel TC-30

[illegible]

[illegible]

2.10	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2.11	Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2.12	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.13	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2.14	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3	Presentase Penambahan nilai Aset						1%		1%	1%	1%	
3.1	Jumlah standar harga yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.2	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.3	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3.4	Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3.5	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3.6	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.7	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3.8	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3.9	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota			35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	
4	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaaan pendapatan						4%		4%	4%	4%	

[illegible]

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu atau permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta factor-faktor yang mempengaruhinya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Keterbatasan Sumberdaya Manusia dalam tata kelolah keuangan.
- Regulasi tentang pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah dari pusat

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel TC-31
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	BPK PD									
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	BPK PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	12.994.465. 142	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	BPK PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	12.994.465. 142	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BPK PD	Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 Org	7,789,700,5 93.97	Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BPK PD	Jumlah Tenaga Administrasi	46 Org	7,789,700,5 93.97	
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPK PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1 Doku men	91,419,500. 00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPK PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1 Doku men	91,419,500. 00	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPK PD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD	1 Doku	46,100,000. 00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPK PD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miiik Daerah pada SKPD	1 Doku	46,100,000. 00	

				men					men		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPK PD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10,999,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPK PD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10,999,000.00	
3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPK PD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPK PD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	15,000,000.00	
3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPK PD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	738,499,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPK PD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	738,499,000.00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPK PD	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	45,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPK PD	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	45,000,000.00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPK PD	jumlah laporan penyediaan jasa surat-menysurat	1 laporan	5,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPK PD	jumlah laporan penyediaan jasa surat-menysurat	1 laporan	5,000,000.00	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPK PD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	151,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPK PD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	151,000,000.00	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPK PD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	3,999,999,548.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPK PD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	3,999,999,548.00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPK PD	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	55,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPK PD	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	55,000,000.00	

6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPK PD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	43,997,500.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPK PD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	43,997,500.00	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPK PD	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	2,750,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPK PD	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	2,750,000.00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPK PD	Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	30%		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPK PD	Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	30%		
7.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPK PD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 Dokumen	219,088,900.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPK PD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 Dokumen	219,088,900.00	
7.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPK PD	jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	219,141,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPK PD	jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	219,141,500.00	
7.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPK PD	jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	1,636,206,610.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPK PD	jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	1,636,206,610.00	
7.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPK PD	jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	1 Dokumen	683,385,165.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPK PD	jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	1 Dokumen	683,385,165.00	
7.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPK PD	Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran	1 Dokumen	481,040,480.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPK PD	Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran	1 Dokumen	481,040,480.00	
8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
8.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPK PD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	1 Dokumen	1,099,058,153.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPK PD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	1 Dokumen	1,099,058,153.00	

8.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPK PD	Jumlah dokumen hasil koordinasi,fasilitasi asistensi,sinkronisasi,su pervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya.	1 Dokumen	299,999,975.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPK PD	Jumlah dokumen hasil koordinasi,fasilitasi asistensi,sinkronisasi,su pervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya.	1 Dokumen	299,999,975.00	
8.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPK PD	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeuaran kas daerah	1 Dokumen	249,997,575.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPK PD	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeuaran kas daerah	1 Dokumen	249,997,575.00	
8.4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPK PD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota	35 Orang	149,995,750.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPK PD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota	35 Orang	149,995,750.00	
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
9.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PD	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	1 laporan	219,614,510.00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PD	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	1 laporan	219,614,510.00	
9.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK PD	Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	1 laporan	458,828,805.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK PD	Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	1 laporan	458,828,805.00	
9.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPK PD	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota	1 Dokumen	240,032,835.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPK PD	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota	1 Dokumen	240,032,835.00	
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
10.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPK PD	jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan	107,291,802,200.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPK PD	jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan	107,291,802,200.00	

10. 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPK PD	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 lapora n	9,000,000,0 00.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPK PD	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 lapora n	9,000,000,0 00.00	
11	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Presentase Penambahan nilai Aset	1%		Pengelolaan Barang Milik Daerah					
11. 1	Penyusunan Standar Harga	BPK PD	Presentase Penambahan nilai Aset	1%	306,129,48 5.00	Penyusunan Standar Harga	BPK PD	Presentase Penambahan nilai Aset	1%	306,129,48 5.00	
11. 2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah standar harga yang disusun	1 Doku men	49,999,510. 00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah standar harga yang disusun	1 Doku men	49,999,510. 00	
11. 3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1 Doku men	50,000,000. 00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1 Doku men	50,000,000. 00	
11. 4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 lapora n	24,999,170. 00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 lapora n	24,999,170. 00	
11. 5	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah	1 lapora n	49,999,960. 00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah	1 lapora n	49,999,960. 00	
11. 6	Penilaian Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	1 lapora n	49,999,825. 00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	1 lapora n	49,999,825. 00	
11. 7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah	1 Doku men	49,996,875. 00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah	1 Doku men	49,996,875. 00	
11. 8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	1 lapora n	50,000,000. 00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	1 lapora n	50,000,000. 00	
11. 9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1 lapora n	49,999,725. 00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPK PD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1 lapora n	49,999,725. 00	

11. 10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPK PD	Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota	35 Orang	50,000,000. 00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPK PD	Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota	35 Orang	50,000,000. 00	
12	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPK PD	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaan pendapatan	4%		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPK PD	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaan pendapatan	4%		
12. 1	Penagihan Pajak Daerah	BPK PD	Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah	1 Doku men	249,995,57 0.00	Penagihan Pajak Daerah	BPK PD	Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah	1 Doku men	249,995,57 0.00	
12. 2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 lapora n	299,993,06 0.00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPK PD	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Doku men	299,993,06 0.00	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Tujuan BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Misi yang terkait dengan tupoksi Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Misi satu (1) Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penguatan sistem yang baik, bersih dan adaptif. Yaitu Terwujudnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2. Sasaran

Badan Keuangan selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dalam rangka pencapaian visi dan misi yakni Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penguatan sistem yang baik, bersih dan adaptif. Yaitu Terwujudnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai kerja yang maksimal maka disusun rencana kerja kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Program pada BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel TC-33
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Uuruan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	9	10	7	8
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan						
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPKPD	87%	12.994.465.142	APBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BPKPD	46 Org	7,789,700,593.97	APBD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	BPKPD	1 Dokumen	91,419,500.00	APBD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD	BPKPD	1 Dokumen	46,100,000.00	APBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BPKPD	1 Paket	10,999,000.00	APBD	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	BPKPD	1 Paket	15,000,000.00	APBD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKPD	1 laporan	738,499,000.00	APBD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BPKPD	3 Unit	45,000,000.00	APBD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	BPKPD	1 laporan	5,000,000.00	APBD	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	BPKPD	1 laporan	151,000,000.00	APBD	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPKPD	1 laporan	3,999,999,548.00	APBD	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BPKPD	8 unit	55,000,000.00	APBD	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPKPD	15 unit	43,997,500.00	APBD	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKPD	1 Unit	2,750,000.00	APBD	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	BPKPD				
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKPD	1 Dokumen	219,088,900.00	APBD	

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKPD	1 Dokumen	219,141,500.00	APBD	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	BPKPD	1 Dokumen	1,636,206,610.00	APBD	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	BPKPD	1 Dokumen	683,385,165.00	APBD	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran	BPKPD	1 Dokumen	481,040,480.00	APBD	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BPKPD	1 Dokumen	1,099,058,153.00	APBD	
				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pertimbangan dan dana transfer lainnya.	BPKPD	1 Dokumen	299,999,975.00	APBD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeluaran kas daerah	BPKPD	1 Dokumen	249,997,575.00	APBD	
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota	BPKPD	35 Orang	149,995,750.00	APBD	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	BPKPD	1 laporan	219,614,510.00	APBD	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	BPKPD	1 laporan	458,828,805.00	APBD	

				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota	BPKPD	1 Dokumen	240,032,835.00	APBD	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					APBD	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	BPKPD	1 laporan	107,291,802,200.00	APBD	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	BPKPD	1 laporan	9,000,000,000.00	APBD	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Penambahan nilai Aset		1%		APBD	
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	BPKPD	1 Dokumen	306,129,485.00	APBD	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar harga yang disusun	BPKPD	1 Dokumen	49,999,510.00	APBD	
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah	BPKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	BPKPD	1 laporan	24,999,170.00	APBD	
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah	BPKPD	1 laporan	49,999,960.00	APBD	
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	BPKPD	1 laporan	49,999,825.00	APBD	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah	BPKPD	1 Dokumen	49,996,875.00	APBD	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	BPKPD	1 laporan	50,000,000.00	APBD	

				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	BPKPD	1 laporan	49,999,725.00	APBD	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota	BPKPD	35 Orang	50,000,000.00	APBD	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoan pendapatan	BPKPD	4%		APBD	
				Penagihan Pajak Daerah	Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah	BPKPD	1 Dokumen	249,995,570.00	APBD	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	BPKPD	1 laporan	299,993,060.00	APBD	
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terealisasi		28300 Nop		APBD	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan rekon & Rapat evaluasi capaian Pajak & Retribusi Daerah	BPKPD	16 Pertemuan	456.500.000	APBD	

BAB V. PENUTUP

Rencana kerja SKPD mempunyai Tugas dan fungsi Penting dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam rencana, Program dan penganggaran Tahunan .

Rencana kerja SKPD menjembantani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan ditingkat pemerintah daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

.

AA. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 04 tahun 2017 tentang Pembentukan Instansi Teknis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, melalui Sekretaris Daerah.

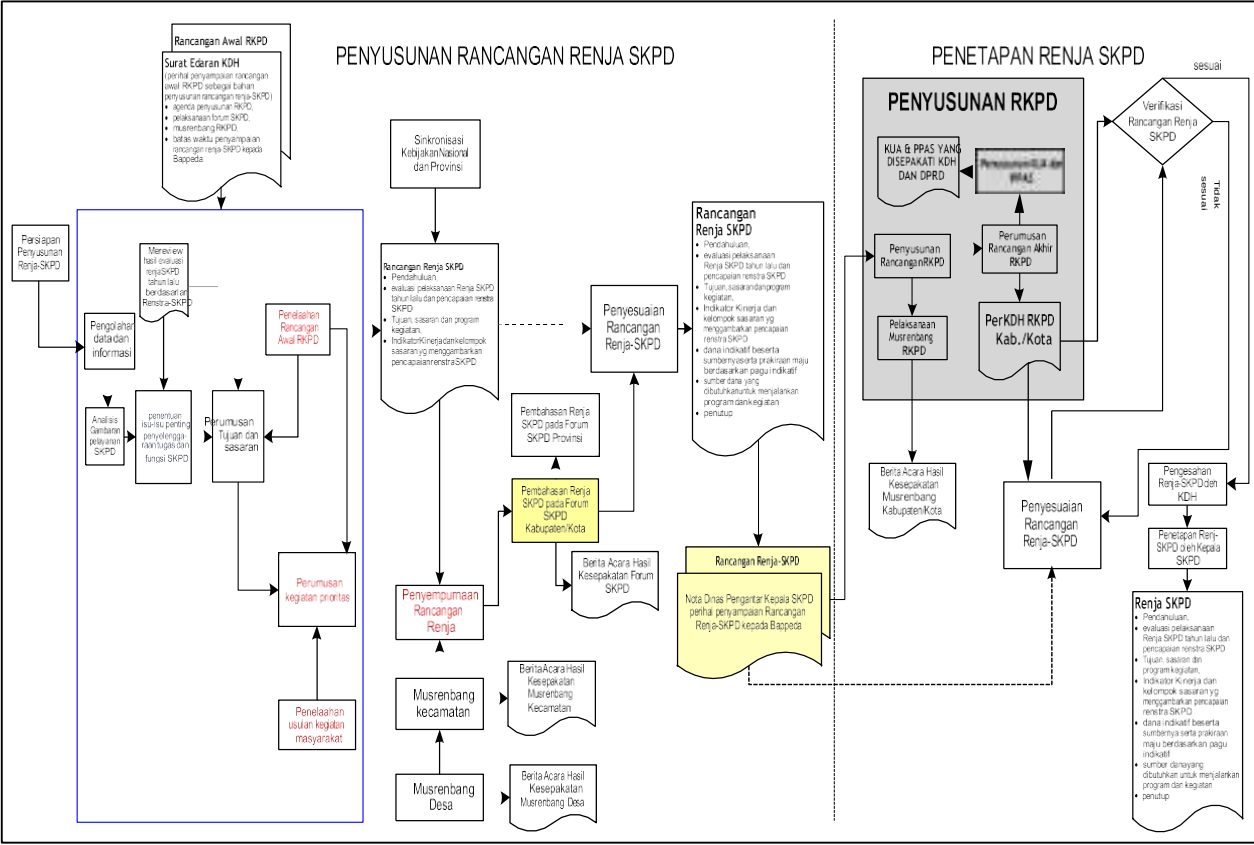
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan RENJA PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD
 berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 718);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Renstra BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan

penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran BKPSDM

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

BAB V Penutup

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD Tahun 2022-2026 untuk evaluasi Renja PD Tahun 2024 dan Renstra PD Tahun 2022-2026 untuk prakiraan capaian tahun 2025. Adapun program/kegiatan yang baru pada tahun 2025 dan tidak terlaksana pada tahun sebelumnya sehingga tidak memenuhi target capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pada tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 3 (tiga) program dengan 9 Kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.927.472.542,- Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.709.304.725,- atau 95,57%

Tabel 2.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Seleksi CPNS dan PPPK sehingga bertambahnya tenaga ASN yaitu CPNS Pemadam Kebakaran sebanyak 20 orang dan PPPK Tahap 1 sebanyak 105 orang dan Tahap 2 sebanyak 74 orang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang kompeten.
2	Pegelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu bisa mencapai target.
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN PPPK yang mengikuti Orientasi PPPK dan dinyatakan lulus sebanyak 218 orang. Jumlah JPT Pratama yang di Seleksi dan Mendapat Rekomendasi dari KASN berjumlah 4 orang dari 16 orang yang mengikuti Seleksi Terbuka.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	belum mendapatkan alokasi anggaran untuk pemberian beasiswa bagi ASN yang mendapat tugas belajar terutama bagi dokter yang mengambil spesialis.
2	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat belum maksimal karena adanya efisiensi anggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Instansi Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)? B	73	71	72	72	100	73	73	100
					Nilai Reformasi Birokrasi	73	71	72	72	100	73	73	100
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83	84	84	100	85	85	100
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	4 dok	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
					Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org	30 org	30 org	30 org	100	30 org	30 org	100

				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	60 orang	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	-	3	2	2	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	87	86	87	87	100	87	87	100
					Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	26	24	25	25,42	100	26		
					Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	10	9	9,6	9,6	100	10		
				Pengadaan, Pemberhentian dan Infomrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
					Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disajikan dalam tabel TC. 30 berikut ;

Tabel 2.5.
Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		CatatanAnalisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Profesionalitas ASN			59	63	65	65	74,19	74,19	75	76	IP ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024 dari kategori sangat rendah pada tahun 2023 naik ke kategori sedang pada tahun 2024.
2	Ratio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		√	35.05	36.5	37	37	79.36	79.36	80	81	Untuk ratio pegawai tinggi Pendidikan dan menengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena beberapa tahun terakhir sudah banyak ASN yang mengikuti tugas belajar maupun ijin belajar baik S1, S2 dan bahkan S3 sehingga hal ini berdampak pada peningkatan kualifikasi dan Kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3	Ratio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)		√	55	57	60	60	24.35	24.35	25	26	Untuk indicator kinerja kunci satu target kinerja dalam IKK yang tidak tercapai yaitu ratio pegawai fungsional. Hal ini dikarenakan belum semua pegawai yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bisa dilantik dalam jabatan fungsional karena belum memenuhi kualifikasi diantaranya latar Pendidikan, pangkat dan golongan dan factor lain yang belum memenuhi persyaratan

												untuk bisa dilantik dalam jabatan fungsional.
4	Ratio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)		√	8	8.12	8.55	8.55	15.38	15.38	16	17	Untuk ratio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi juga sudah mencapai target yang ditentukan namun belum bisa dikatakan berhasil karena untuk pemenuhan UU nomor 5 Tahun 2014 yaitu setiap ASN wajib mengikuti diklat 20 JPL/tahun belum bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran yang ada. Untuk peningkatan capaian kinerja ini terbanyak dari para auditor yang ada diinspektorat yang mereka harus mengikuti diklat untuk kepentingan dalam jabatan fungsional yang harus dipenuhi dan persyaratan dalam pemenuhan kenaikan pangkat pegawai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pilihan dan fungsi Penunjang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Kualitas dan Kompetensi ASN belum merata	Belum optimalnya sistem pengembangan karier dan diklat berbasis kebutuhan
proses mutasi dan promosi belum sepenuhnya berbasis kinerja dan kompetensi	sistem manajemen talenta belum terimplementasi dengan baik
belum optimalnya integrasi layanan kepegawaian daerah dan BKN	SDM operator/pengelola data belum sepenuhnya terlatih

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2026, sebagai berikut:

1. Penataan dan penyelesaian tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Penyempurnaan Manajemen Talenta dan integrasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi
3. Perbaikan tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional
4. Penambahan Storage, Restrukturisasi dan pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian serta pengembangan dokumen kepegawaian digital

- 5. Penekanan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, khususnya angka perceraian ASN
- 6. Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi.
- 7. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *road map* reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur, meliputi:
 - a) Pendistribusian pegawai di masing-masing perangkat daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan Perangkat Daerah
 - b) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
 - c) Penyempurnaan evaluasi jabatan
 - d) Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
 - e) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Berikut adalah Tantangan dan Peluang didasarkan dari isu-isu penting yang sedang berkembang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tantangan	Peluang
Terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan harus disempurnakan kembali baik skema maupun teknisnya;	Pemberian peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dengan tugas belajar, difokuskan pada beberapa jenis rumpun keilmuan sebagaimana kebutuhan dan prioritas daerah baik jenjang Sarjana, Magister maupun Doktoral, sehingga motivasi ASN untuk mengikuti program tugas belajar tinggi dan mendukung tercapainya kinerja daerah
Pengelolaan Jabatan fungsional ke depan akan menjadi sangat strategis, sehingga perlu disiapkan dan dimatangkan kembali terkait pengembangan dan pengelolaannya	Tingginya minat ASN untuk beralih ke jabatan Fungsional harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola pengelolaan jabatan fungsional, sehingga keberadaan jabatan fungsional akan menjadi pilihan karir yang strategis
Penyesuaian Kembali Manajemen talenta yang ada saat ini seiring dinamika kebijakan di tingkat pusat yang kemudian berdampak ke daerah	Penguatan Manajemen talenta dengan memanfaatkan data base yang sudah dibangun ada saat ini dengan berdasarkan pada pola karir instansi dan pola karir nasional

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel T-C. 31.

Tabel 2.7
Tabel T-C. 31
Review Rancangan Awal RKPD tahun 2026Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini tidak bersentuhan langsung dengan usulan yang ada di masyarakat.

Tabel 2.8 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun
2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

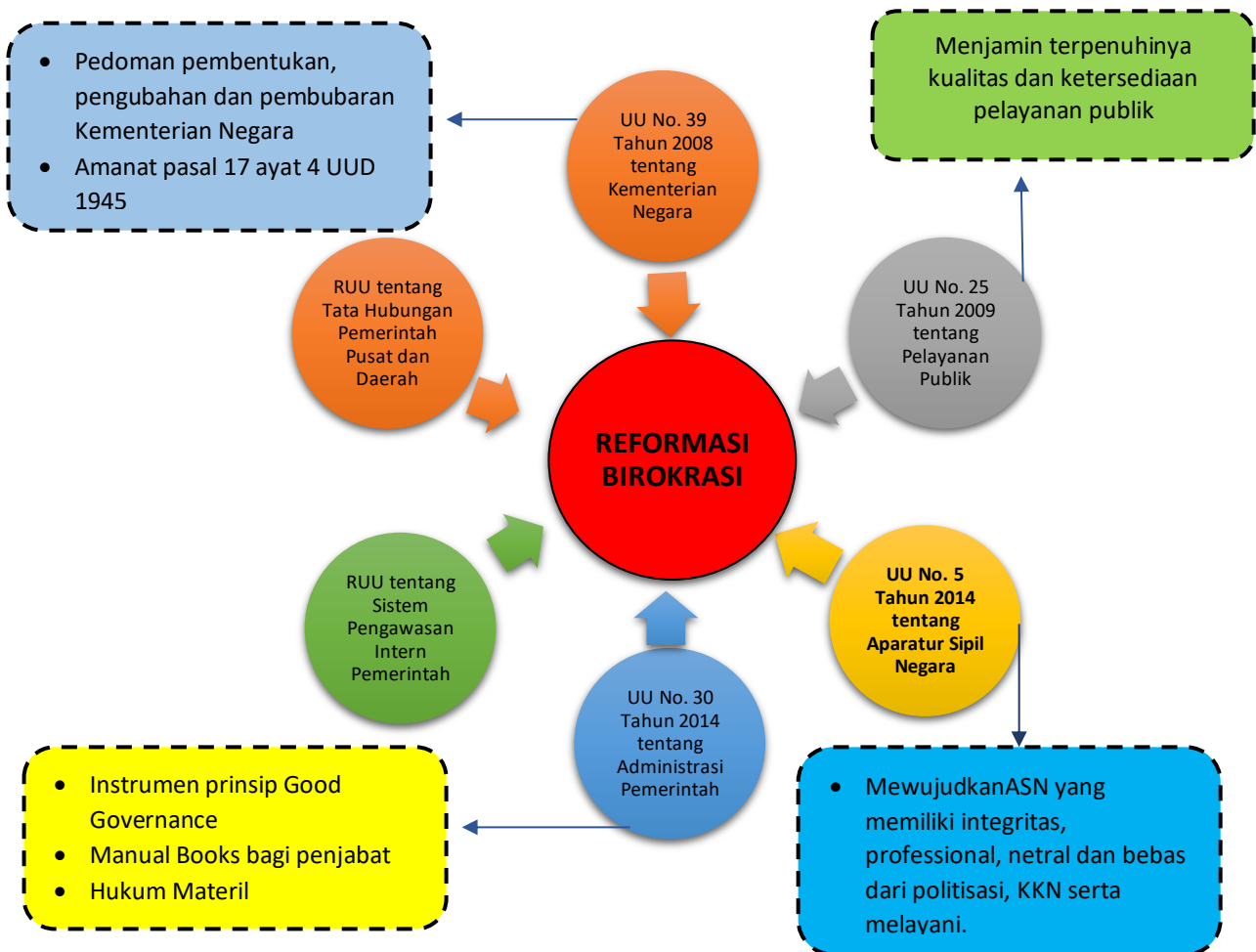
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Gambar 3.1
Kebijakan Strategi PANRB



Salah satu program wajib pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPSDM melalui kajian *bezetting* formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian

melibatkan pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026

Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan oleh bupati dan wakil bupati terpilih Periode 2025-2029 yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan”

Untuk Menunjang Visi dan Misi tersebut diatas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai pengelola Aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah misi ke 1 yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Melalui Penguatan Sistem Yang Baik, Bersih Dan Adaptif”.

Adapun tujuan Jangka Menengah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN” dengan Indikator tujuan yang ditetapkan yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut

Merumuskan Tujuan dan Sasaran RENSTRA BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
- Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN		Indeks Profesionalitas ASN	80.5	81	81.5	82	83	
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	27	28	29	30	31	
		Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Aparatur dalam Menjamin Profesionalitas Aparatur	Indeks NSPK	42	44	47	48	50	

Gambar 3.2
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD



3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sekumpulan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme aparatur
2. Meningkatnya Manajemen Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 program dan 14 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut

Tabel 2.11

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.815.544.438,00				7.710.505.342,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.815.544.438,00				7.710.505.342,00	
5	0				KEPEGAWAIAN				6.129.413.438,00				5.508.505.342,00	
5	0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bolsel	3.45 Indeks	4.195.250.938,00			-	4.209.608.094,00	

					[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bolsel	100	4.195.250.938,00				4.209.608.094,00	
						Indeks Reformasi Birokrasi		3.45						
						Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B		74						
								78						
								86						
								94						
						Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi								
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	1 Dokumen	5.421.520,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bolsel							

5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bolsel						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	1 Dokumen Dokumen	24.999.640,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	4 Laporan	15.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolsel	50 Orang	59.955.625,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

														SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	1 Laporan	399.997.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bolsel	10 Unit	91.913.550,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bolsel	1 Laporan	98.003.537,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bolsel	10 Unit	51.740.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Bolsel	100 Persen	1.934.162.500,00			-	1.298.897.248,00	
					[Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian]									
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	Bolsel	-	384.999.000,00			-	405.897.248,00	

5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK									
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Bolsel	1 Dokumen	225.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			94.897.248,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Bolsel	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN									
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Bolsel	1 Lembaga	45.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			47.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
					[Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN]	Persentase Pengembangan Karir ASN	Bolsel	11	1.934.162.500,00				1.298.897.248,00	

						sesuai dengan Kompetensinya								
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Bolsel	1 Dokumen	109.064.050,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Bolsel	1 Dokumen	119.999.950,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					[Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN]									
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-	1.162.100.000,00			-	601.000.000,00	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center									
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Bolsel	1 Dokumen	892.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

														SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Bolsel	1 Orang	100.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat									
5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN									
					[Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN]	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Bolsel	88	1.934.162.500,00				1.298.897.248,00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Bolsel							

									44.999.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Bolsel	1 Laporan	35.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		2 Dokumen	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				686.131.000,00				2.202.000.000,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									

					[Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis]	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Bolsel	27	686.131.000,00				2.202.000.000,00	
						Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		88						
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis									
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Bolsel							
J U M L A H									6.815.544.438,00				7.710.505.342,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					[Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional]	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Bolsel	27	686.131.000,00				2.202.000.000,00	

						dasar,manajerial dan fungsional								
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	Bolsel	-	596.131.000,00			-	1.640.000.000,00	
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Bolsel							
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Bolsel	10 Orang	150.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			840.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Bolsel		446.131.000,00				800.000.000,00	
									6.815.544.438.00				7.710.505.342.00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang bersifat umum dan menunjang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 Program dan 14 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 6.815.544.438,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 15 kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 5.421.520,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 3.353.233.566,-
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 59.955.625,-
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 399.997.000,-
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 91.913.550,-
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 217.989.677,-
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 51.740.000,-

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 384.999.000,-
- b. Mutasi dan Promosi ASN yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 229.064.000,-
- c. Pengembangan Kompetensi ASN yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1.162.100.000,-
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 157.999.500,-

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 90.000.000,-
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 596.131.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
6. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD). Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sebagai wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah, maka

setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang nantinya akan dirumuskan untuk kemudian menjadi sebuah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Renja, Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat di Inspektorat Daerah. Seluruh kegiatan pengawasan merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik. Dengan demikian Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat memainkan perannya sebagai Lembaga Pengawasan Internal dalam rangka menciptakan instansi pemerintah yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

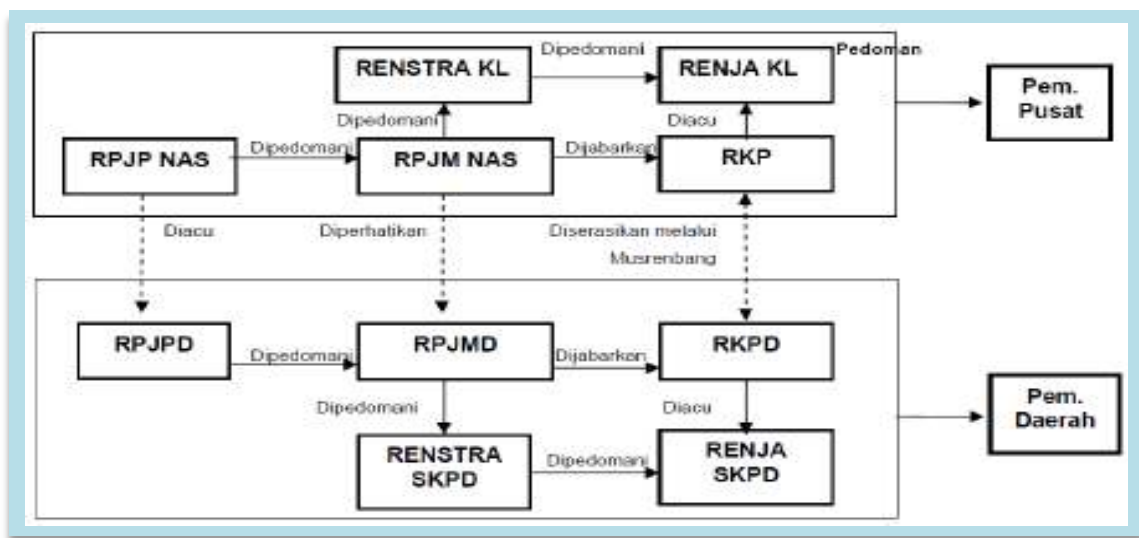
Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

- Mongondow Selatan Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
 28. Peraturan Bupati Nomor : 03.a Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 29. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah.
 30. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...);
 31. Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadukan serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun

2026.

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Inspektorat Daerah
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Pengawasan
- 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
- 5) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada tabel T.C. 29 berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program/ Kegiatan Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan 2024	Target . Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d 2025	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah	3,45	91,02	92,50	91,10	98,49%	92,57		
		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah			28,90	0,00%	0,00%	29,00		
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		72,00	73,00	76%	104,1	74,00		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		-	5	5	100%	5		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja		-	2	2	100%	2		
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok	1 dok	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok	1 dok	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok		
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok	1 dok	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok		

6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok		
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan			67 Orang	51 Orang	76,12%	75 Orang		
		Jumlah Laporan Keuangan			2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang	51 Orang	67 Orang	51 Orang	76,12	75 Orang	51 Orang	68,00
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	-						
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	-				1 Dok	1 Dok	

6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD			1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD			1 Lap			1 Lap		
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-				1 Dok		
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	-	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	1 Lap	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	1 Lap	
6.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-				1 Dok		
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya			85 Orang	104 Orang	122,35	92 Orang		
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab			1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai			1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok		1 Dok		
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	10 Orang	61 Orang	96 Orang	157,38	66 Orang		
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	-						
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	24 Orang	8 orang	33,33	26 Orang		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD			100%			100%		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-				1		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	-	3	3	100%	2		

6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-						
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	2	2	100%	4		
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		-	55 Lap	57 Lap	103,64	60 Lap		
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap	46 Lap	30 Lap	31 Lap	103,33	34 Lap	12 Lap	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan			29	16	55,17	38		
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-				1 Unit		
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-				1 Unit		
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	-	16	0	0	20		
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	-	12	16	133,33	16		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor			100%	100	100	100%		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158 Lap	132 Lap	153 Lap	155 Lap	101,31	155 Lap	45 Lap	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	7 Lap	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	6 Lap	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik			100%	100%	100	100%		
		Jumlah Barang Yang di pelihara			5 Unit			7 Unit		
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	-	3 Unit	5 Unit	166,67	5 Unit		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan Keuangan		-	7,5%			8,0%		
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI		86,09	88,50	85,09%	96,15	88,80		

		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,40%							
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		50	56 Keg	56 Keg	100	56 Keg		
		Jumlah Kegiatan Rivi Laporan		18 Keg	2 Keg	2 Keg	100	2 Keg		
		Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi		3 Keg	4 Keg	4	100	4 Keg		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap		
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31 Lap	42 Lap	37 Lap	37 Lap	100	37 Lap		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15 Lap	-	81 Desa	18 Desa	22,22	81 Desa	8 Desa	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	-	4 Kesepakatan	1 Kesepakatan	25	4 Kesepakatan		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	1 Dok	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan tujuan Tertentu	5 Lap	21 Lap	6 Keg			6 Keg		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Lap	-						
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Lap	21 Lap	5 Lap	5	100	5 Lap	2 Lap	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Temuan Berulang			0%	-	-	0%		
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai ditindaklanjuti		81%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Penyampaian LHKPN / LHKASN		100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK / WBBM		0	0	0	0	0%		
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi							

		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi							
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan yang disusun		2	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100	2 Kebijakan		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	1 Rekom	1 Rekom	100	1 Rekom		
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	1	1 Rekom	1 Rekom	100	1 Rekom		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang di dampingi dan di asistensi			36 PD	36 PD	100	36 PD%		
		Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			3 Keg	3 Keg	100	3 Keg%		
		Jumlah Kegiatan Penilaian (RB dll)			1 Keg	0	0	1 Keg		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 OPD	-	36 PD	36 PD	100	36 PD	36 PD	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 OPD	-	36 PD	0	0	36 PD		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 OPD	-	36 PD	36 PD	100	36 PD		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Inspektorat Daerah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Inspektorat Daerah Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator level maturitas SPIP target level 3+ namun terealisasi pada tahun 2024 adalah level 3 dengan angka 3,098 sesuai hasil laporan evaluasi dari BPKP Nomor PE.11.03/LHP-09/PW18/3/2025 tanggal 22 Januari 2025.
2. Pada Indikator level kapabilitas APIP dengan target level 3+ yang terealisasi adalah level 3 dengan angka 3,015 sesuai hasil QA dari BPKP nomor PE.09.03/LHP-276/PW18/6/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
3. Pada Indikator nilai evaluasi pada komponen SAKIP dengan target 7 terealisasi sesuai penilaian SAKIP dari Kemenpan RB tahun 2024 adalah 66.11 (predikat B).
4. Pada Indikator nilai APIP pada Komponen MCP dengan target 60% pada tahun 2024 terealisasi adalah 54% hal ini dipengaruhi menurunnya partisipasi OPD dalam percepatan pemberantasan korupsi.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dapat dilihat pada **tabel T-C.30**

Pencapaian Kinerja Pelayanan

[illegible]

	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD			1 Dok	1 Dok			1 Dok				
	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD			1 Lap	1 Lap							
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Lap	2 Lap	2 Dok	2 Dok	2 Lap	1 Lap	2 Dok	2 Dok	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Lap	2 Lap	2 Dok	2 Dok	2 Lap	1 Lap	2 Dok	2 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok	
4	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya			85 Orang	92 Orang			104 Orang				
	Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib			1 Dok	1 Dok			1 Dok				
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai			1 Dok	1 Dok			1 Dok				
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			61 Orang	66 Orang	35 Orang	35 Orang	96 Orang		35 Orang	35 Orang	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					4 Orang	4 Orang			4 Orang	4 Orang	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			24 Orang	26 Orang			8 orang				
5	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD			100%	100%							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		3	2	1 Paket	1 Paket	3		1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	4			2				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		55 Lap	60 Lap			57 Lap				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Lap	34 Lap	20 Lap	20 Lap	31 Lap	12 Lap	20 Lap	20 Lap	
6	Jumlah BMD yang diadakan		29	38			16				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		16	20	2 Paket	2 Paket	0		2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12	16	11 Unit	11 Unit	16		11 Unit	11 Unit	
7	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	100%			100				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		153 Lap	155 Lap	158 Lap	158 Lap	155 Lap	45 Lap	158 Lap	158 Lap	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	12 Lap	12 Bulan	12 Bulan	12 Lap	7 Lap	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	12 Lap	12 Bulan	12 Bulan	12 Lap	6 Lap	12 Bulan	12 Bulan	
8	Persentase Barang dalam kondisi baik		100%	100%			100%				
	Jumlah Barang Yang di pelihara		5 Unit	7 Unit							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	5 Unit	4	4	5 Unit		4	4	
9	Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan Keuangan		7,5%	8,0%							
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI		88,50	88,80			85,09%				
	Tindaklanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	√			85,40%	85,60%			85,40%	85,60%	
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		56 Keg	56 Keg			56 Keg				
	Jumlah Kegiatan Rivi Laporan		2 Keg	2 Keg			2 Keg				
	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi		4 Keg	4 Keg			4				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		37 Lap	37 Lap	31 Lap	31 Lap	37 Lap	10 Lap	31 Lap	31 Lap	

	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		81 Desa	81 Desa	15 Lap	15 Lap	18 Desa	8 Desa	15 Lap	15 Lap	
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	
10	Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan tujuan Tertentu		6 Keg	6 Keg	5 Lap	5 Lap			5 Lap	5 Lap	
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Lap	1 Lap			1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5	2 Lap	5 Lap	5 Lap	
11	Persentase Temuan Berulang		0%	0%			-				
	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai ditindaklanjuti		100%	100%			100%				
	Persentase Penyampaian LHKPN / LHKASN		100%	100%			100%				
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK / WBBM		0	0%			0				
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Terdefinisi	Terdefinisi			Terdefinisi	Terdefinisi	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	√			Terintegrasi	Terintegrasi			Terintegrasi	Terintegrasi	
12	Jumlah Kebijakan di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan yang disusun		2 Kebijakan	2 Kebijakan			2 Kebijakan				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1 Rekom	1 Rekom	1	1	1 Rekom		1	1	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekom	1 Rekom	1	1	1 Rekom		1	1	
13	Jumlah Perangkat Daerah yang di dampingi dan di asistensi		36 PD	36 PD%			36 PD				
	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		3 Keg	3 Keg%			3 Keg				
	Jumlah Kegiatan Penilaian (RB dll)		1 Keg	1 Keg			0				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		36 PD	36 PD	36 OPD	36 OPD	36 PD	36 PD	36 OPD	36 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		36 PD	36 PD	36 OPD	36 OPD	0		36 OPD	36 OPD	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		1 Keg	1 Keg	
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		36 PD	36 PD	36 OPD	36 OPD	36 PD		36 OPD	36 OPD	

2.3 Isu - isu penting dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan.

Dalam upaya membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional Inspektorat Daerah masih banyak mengalami permasalahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good Governance). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan selalu memenuhi kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2009 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi sasaran Inspektorat Daerah yaitu;

- Pelaksanaan Audit Ketaatan
 - Pelaksanaan Audit Kinerja
 - Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu
 - Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
- Hambatan Serta Solusi

Dalam pelaksanaan program kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ada beberapa permasalahan yang perlu kami sampaikan antara lain :

- a. Dari hasil evaluasi kami terhadap perkembangan tindaklanjut atas rekomendasi BPK RI, didapati ada beberapa rekomendasi terhadap SKPD yang tidak ada progress dalam penyelesaiannya, hal ini dapat menghambat tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK RI.

Atas permasalahan tersebut solusi yang perlu segera dilaksanakan yaitu Bupati Bolaang Mongondow Selatan agar segera memerintahkan masing-masing Kepala SKPD yang untuk segera bertanggungjawab dalam menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi tersebut, dan apabila rekomendasi dianggap tidak dapat ditindaklanjuti, maka dimintakan dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti untuk segera disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- b. Kurang kooperatifnya SKPD/Auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat.

Atas permasalahan tersebut solusi yang perlu segera dilaksanakan yaitu Bupati Bolaang Mongondow Selatan memerintahkan SKPD agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat agar nantinya pada saat pemeriksaan BPK RI, Pemerintah dapat meminimalisir temuan-temuan hasil pemeriksaan.

- c. SDM APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang belum memadai, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut solusi yang perlu segera dilaksanakan yaitu Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM auditor di Inspektorat antara lain, Kegiatan DIKLAT, BIMTEK maupun Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS).

Dalam melaksanakan Program Kerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai tantangan yaitu :

- a. Tuntutan Pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN
- b. Masih kurangnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah

- c. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substansif lainnya;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan;
- e. Tindak lanjut hasil pengawasan Internal dari Perangkat Daerah/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.
- f. Terbatasnya sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Daerah.

Adapun Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah yaitu :

- Adanya Komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih.
- Adanya dukungan dari Pihak Pengawas Eksternal maupun Pengawas Internal.
- Kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam meningkatkan kapasitas SDM dilingkungan Inspektorat Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.3 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.3 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bolsel	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah	3,45	8.258.855.412,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bolsel	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah	3,46	8.462.335.000,00	
		Bolsel	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah				Bolsel	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah			
		Bolsel	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				Bolsel	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolsel			1.247.085,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolsel			1.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	749.805,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	750.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	497.280,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	750.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel			6.402.046.219,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolsel			6.785.750.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/Bulan	6.384.800.719,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	6.750.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	17.245.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	35.750.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolsel			34.999.665,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolsel			55.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	34.999.665,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	55.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bolsel			1.099.580.370,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bolsel			786.500.000,00	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bolsel	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	790.875,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bolsel	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	750.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bolsel	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	499.500,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bolsel	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	750.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bolsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	966.388.595,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bolsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	635.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	131.901.400,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	150.000.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel			384.998.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolsel			429.250.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bolsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.499.720,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bolsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.250.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bolsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	124.999.510,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bolsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	75.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	257.499.170,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	350.000.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel			104.999.340,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolsel			164.835.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolsel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	104.999.340,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolsel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	164.835.000,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel			177.600.713,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel			187.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158 Lap	7.495.830,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160 Lap	8.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	3.748.695,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	3.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	166.356.188,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	176.000.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel			53.383.620,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel			52.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.884.900,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.750.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	3.498.720,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	7.500.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Bolsel	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,40	2.898.472.590,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Bolsel	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,60	3.883.230.075,00	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Bolsel			2.598.474.990,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Bolsel			3.302.930.075,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	912.999.510,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	1.148.750.000,00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31 Lap	949.982.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Lap	1.350.980.075,00	
	Reviu Laporan Kinerja	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Lap	49.998.500,00	Reviu Laporan Kinerja	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Lap	55.200.000,00	
	Reviu Laporan Keuangan	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	34.999.500,00	Reviu Laporan Keuangan	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	42.500.000,00	
	Pengawasan Desa	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15 Lap	445.496.780,00	Pengawasan Desa	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Lap	450.750.000,00	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Bolsel	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	29.999.500,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Bolsel	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	175.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dok	174.999.200,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bolsel	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dok	79.750.000,00	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Bolsel			299.997.600,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Bolsel			580.300.000,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Lap	49.999.500,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Bolsel	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Lap	290.300.000,00	

	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Lap	249.998.100,00	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Bolsel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Lap	290.000.000,00	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Bolsel	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi	385.745.555,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Bolsel	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi	485.250.000,00	
		Bolsel	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi			Bolsel	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Bolsel			87.496.920,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Bolsel			114.500.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Bolsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekom	29.996.920,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Bolsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekom	32.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Bolsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekom	57.500.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Bolsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekom	82.500.000,00	
2	Pendampingan dan Asistensi	Bolsel			298.248.635,00	Pendampingan dan Asistensi	Bolsel			370.750.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 PD	94.999.715,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 PD	100.000.000,00	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bolsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 PD	97.499.470,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bolsel	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 PD	135.750.000,00	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bolsel	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Keg	49.999.950,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bolsel	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Keg	75.000.000,00	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bolsel	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 PD	55.749.500,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bolsel	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 PD	60.000.000,00	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2026 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “***Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing***” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi (Level 3)
		Meningkatnya Kualitas	Kapabilitas Aparat	Terintegrasi (Level 3)

		Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,40

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Inspektorat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Inspektorat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Inspektorat Daerah menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan baik.
- b. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah
- c. Mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan

- d. Terselenggaranya pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab.
- e. Tidak terulang kembali temuan-temuan sebelumnya dari Aparat Pengawas Internal maupun Aparat Pengawas Eksternal.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program dan 12 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

Tabel 3.3 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Inspektorat Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah	Bolsel	3,45	8.258.855.412,00	DAU		3,46	8.462.335.000,00	
		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Bolsel							
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Bolsel							
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.247.085,00	DAU			1.500.000,00	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolsel	1 Dok	749.805,00	DAU		1 Dok	750.000,00	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bolsel	1 Dok	497.280,00	DAU		1 Dok	750.000,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.402.046.219,00	DAU			6.785.750.000,00	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bolsel	59 Orang/Bulan	6.384.800.719,00	DAU		65 Orang/Bulan	6.750.000.000,00	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolsel	1 Dok	17.245.500,00	DAU		1 Dok	35.750.000,00	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				34.999.665,00	DAU			55.000.000,00	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolsel	2 Lap	34.999.665,00	DAU		2 Lap	55.000.000,00	

6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.099.580.370,00	DAU			786.500.000,00	
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bolsel	1 Dok	790.875,00	DAU		1 Dok	750.000,00	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bolsel	1 Dok	499.500,00	DAU		1 Dok	750.000,00	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bolsel	35 Orang	966.388.595,00	DAU		35 Orang	635.000.000,00	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolsel	4 Orang	131.901.400,00	DAU		6 Orang	150.000.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				384.998.400,00	DAU			429.250.000,00	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bolsel	1 Paket	2.499.720,00	DAU		1 Paket	4.250.000,00	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Bolsel	1 Paket	124.999.510,00	DAU		1 Paket	75.000.000,00	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolsel	20 Laporan	257.499.170,00	DAU		25 Laporan	350.000.000,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104.999.340,00	DAU			164.835.000,00	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bolsel	11 Unit	104.999.340,00	DAU		11 Unit	164.835.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.600.713,00	DAU			187.250.000,00	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bolsel	158 Lap	7.495.830,00	DAU		160 Lap	8.250.000,00	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bolsel	12 Lap	3.748.695,00	DAU		12 Lap	3.000.000,00	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bolsel	12 Lap	166.356.188,00	DAU		12 Lap	176.000.000,00	

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.383.620,00	DAU			52.250.000,00	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bolsel	1 Unit	49.884.900,00	DAU		1 Unit	44.750.000,00	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bolsel	4	3.498.720,00	DAU		4	7.500.000,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Bolsel	85,40	2.898.472.590,00	DAU		85,60	3.883.230.075,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Bolsel		2.598.474.990,00	DAU			3.302.930.075,00	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Bolsel	1 Lap	912.999.510,00	DAU		1 Lap	1.148.750.000,00	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bolsel	31 Lap	949.982.000,00	DAU		32 Lap	1.350.980.075,00	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Bolsel	1 Lap	49.998.500,00	DAU		1 Lap	55.200.000,00	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Bolsel	1 Lap	34.999.500,00	DAU		1 Lap	42.500.000,00	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Bolsel	15 Lap	445.496.780,00	DAU		20 Lap	450.750.000,00	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Bolsel	1 Kesepakatan	29.999.500,00	DAU		1 Kesepakatan	175.000.000,00	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bolsel	4 Dok	174.999.200,00	DAU		4 Dok	79.750.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				299.997.600,00	DAU			580.300.000,00	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Bolsel	1 Lap	49.999.500,00	DAU		1 Lap	290.300.000,00	

6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Bolsel	5 Lap	249.998.100,00	DAU		6 Lap	290.000.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Bolsel	Terdefinisi	385.745.555,00	DAU		Terdefinisi	485.250.000,00	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Bolsel	Terintegrasi		DAU		Terintegrasi		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				87.496.920,00	DAU			114.500.000,00	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Bolsel	1 Rekom	29.996.920,00	DAU		1 Rekom	32.000.000,00	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Bolsel	1 Rekom	57.500.000,00	DAU		1 Rekom	82.500.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi				298.248.635,00	DAU			370.750.000,00	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Bolsel	36 PD	94.999.715,00	DAU		36 PD	100.000.000,00	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bolsel	36 PD	97.499.470,00	DAU		36 PD	135.750.000,00	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bolsel	1 Keg	49.999.950,00	DAU		2 Keg	75.000.000,00	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bolsel	36 PD	55.749.500,00	DAU		36 PD	60.000.000,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang bersifat umum dan menunjang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.11.543.073557,00, program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 8 kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp1.247.085,00.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp6.402.046.219,00.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp34.999665,00.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp1.099.580.370,00.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp384.998.400,00.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp104.999.340,00.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp177600.713,00.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp53.383.620,00.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN dengan 2 kegiatan yaitu

- a. Penyelenggaraan Pengawasan internal yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp2.598.474.990,00.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp299.997.600,00.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI dengan 2 kegiatan terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp87.496.920,00.
- b. Pendampingan dan asistensi yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp298.248.635,00.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Posigadan menyusun Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

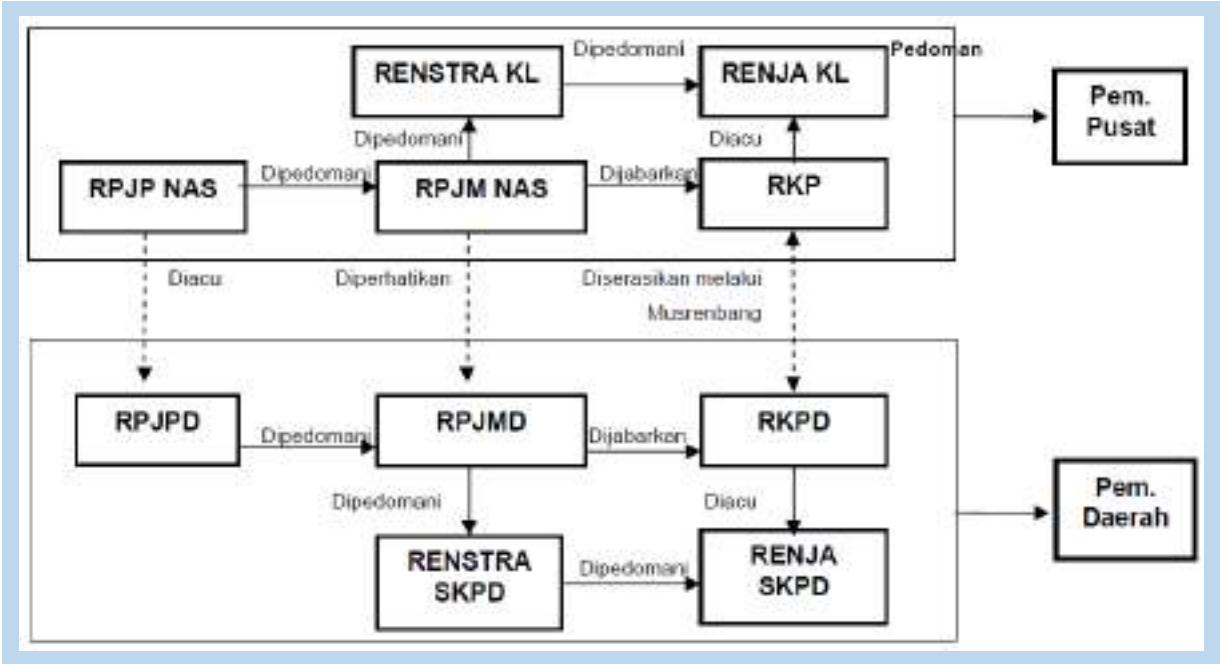
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,

- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
 23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah
- 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah
- 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya aturan/perbub tentang pengelolaan keuangan
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Efisiensi dan Eektifitas penggunaan aset Barang Milik Daerah
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adanya aturan yang meminimalisir Pelanggaran Disiplin Pegawai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya SOP yang membutuhkan ASN untuk cepat dalam hal pelayanan publik
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai Perencanaan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memuaskan
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik
8	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Partisipasi & antusias Masyarakat terhadap program kegiatan yang menyangkut pemberdayaan
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum aparat desa & Linmas

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
	BIDANG URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	82%		50%	93,00%	185,78%	81%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	18 dok		18 dok	150 lembar	49,67%	18 dok		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perncanaan Perangkat daerah yang di susun	2 dok		2 dok			2 Dok		

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dok		1 dok			1 Dok		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok		1 dok			1 Dok		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dok		1 dok			1 Dok		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok		1 dok			1 Dok		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi	12 dok		12 dok			12 DOK		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kinerja keuangan								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	12 bulan		100%			12 Bulan		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Administrasi Sesuai dengan SOP	100%		100%			100%		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelola keuangan	2 org/bln		100%			2 Orang/bulan		

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 laporan		1 laporan			1 Berkas		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 bulan		18 dok			12 Bulan		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	100%		100%			1,00		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan Aset daerah	2 org/bln		2 org/bln			2 orang/bulan		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	10%		10%			0,1		
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparatur Sipil Negara	18 org		18 org			18 Orang		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan	2 org		0.00%			0 Orang		
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 org		0,00%			0 Orang		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%		90			0,90		
		Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%		100%			1,00		

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang tersedia	3 unit		100%			3 unit		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kelengkapan Kantor	7 unit		100%			7 unit		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan barang yang dicetak	12 bulan		100%			12 Bulan		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas Umum	1 kegiatan		100%			20 Orang		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi	18 org		100%			18 Orang		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	10 unit		100%			10 Unit		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang diadakan	3 unit		100%			3 Unit		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%			100%		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%		90%			90%		

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan		100%			12 Bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		100%			12 Bulan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan		100%			12 Bulan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%		100%			100%		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	8 unit		100%			8 Unit		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	100%		100%			1		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit		100%			3 unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan kecamatan	95%		95%			0,95		
		Presentase Desa yang melunasi PBB tepat waktu	16 Desa		100%			16 Desa		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	1 Keg		0,00%			0 Keg		

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan perwakilan masyarakat	100%		100%			1 keg		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan	1 kegiatan		0,00%			0 Keg		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok	100%		100%			100%		
		Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin	100%		100%			100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 kali		100%			4 Kali		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan	4 kali		100%			4 Kali		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	100%		80%			100%		
		Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%)	0%		0%			0%		
		Persentse desa yang memiliki Linmas aktif (%)	16 Desa		100%			100%		

		Persentase organisasi kemasyarakatan aktif(%)	16 Desa		100%			100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja						1		
		Presentase Desa yang memiliki Linmas Aktif						100%		
		Persentase organisasi kemasyarakatan aktif	65%		100%			1		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja	100%		65%			1		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan	4 kali		4 kali			4 kali		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi rapat yang dilaksanakan	4 kali		4 kali			4 kali		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Posigadan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Posigadan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 95 % bisa tercapai 90 %, target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
2. Pada Indikator Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif/Jumlah seluruh kelompok dengan target 100 % masih tersisa 30 % di tahun 2024 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 10 Desa dari 16 Desa
3. Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % telah terealisasi 100 %
4. Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 100% sudah teralisasi 100% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes
5. Pada Indikator Persentase desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
6. Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
7. Pada Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif dengan target 85 % realisasi 85 % karena semua lembaga organisasi di fasilitasi dan dilakukan pembinaan

Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Posigadan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Pelaksanaan tugas rutin administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu			80%	85%	90%	95%	93,99%	99,09%	90%	95%	
2	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana			70%	75%	80%	85%	96,57%	98,91%	80%	85%	
3	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur			70%	80%	85%	90%	86,34%	0%	85%	90%	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur			75%	80%	85%	90%	0%	0%	85%	90%	
5	Presentase Perencanaan Daerah melalui kegiatan Musrembang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kantor Kecamatan Posigadan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Rentan	1. Masih rendahnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di desa 2. Belum Optimalnya Bantuan Sosial yang tersalurkan Kepada Masyarakat 3. Masih Rendahnya Usulan Masyarakat yang Masuk Ke APBD Kabupaten
Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN	Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya

Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Posigadan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.	1. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	2. Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
	3. Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya

Peluang	Tantangan
	masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
	4. Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 2. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
- 3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 2.7 (T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Posigadan Tahun 2026

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	13
	KECAMATAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOLSEL	Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi	82%	2.660.184.710	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOLSEL	Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi	0,82	2.660.184.710	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	37.170.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	37.170.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	24.483.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	24.483.900	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	2.075.021.679	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BOLSEL	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	0%	2.075.021.679	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLSEL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	103.561.631	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLSEL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	103.561.631	
			Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%				Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	43.050.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	43.050.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BOLSEL	Jumlah BMD yang diadakan	2 Unit	227.325.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BOLSEL	Jumlah BMD yang diadakan	2 Unit	227.325.000	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	145.635.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BOLSEL	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	145.635.000	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%		
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLSEL	Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	18 Dok	3.937.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLSEL	Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	18 Dok	3.937.500	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BOLSEL	Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP	6 Layanan	26.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BOLSEL	Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP	6 Layanan	26.250.000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	BOLSEL	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi	34 Perencanaan	26.250.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	BOLSEL	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi	34 Perencanaan	26.250.000	
			Jumlah aparat pemerintah desa yang melaporkan laporan kinerja	122 Orang				Jumlah aparat pemerintah desa yang melaporkan laporan kinerja	122 Orang		
			Jumlah Layanan / Jumlah Survei IKM	6 Layanan				Jumlah Layanan / Jumlah Survei IKM	6 Layanan		
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	BOLSEL	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi		12.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	BOLSEL	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi		12.600.000	
			Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin	100%				Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin	100%		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	BOLSEL	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	4 Kali	12.600.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	BOLSEL	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang	4 Kali	12.600.000	

								dilaksanakan			
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	BOLSEL	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	100%	61.787.445	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	BOLSEL	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	100%	61.787.445	
			Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib	0%				Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib	0%		
			Persentse desa yang memiliki Linmas aktif	100%				Persentse desa yang memiliki Linmas aktif	100%		
			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif	100%				Persentase organisasi kemasyarakatan aktif	100%		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	BOLSEL	Jumlah Monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes		61.787.445	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan De sa	BOLSEL	Jumlah Monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes		61.787.445	
			Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan	88 Orang				Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan	88 Orang		
			Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan	4 Kali				Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan	4 Kali		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 dilakukan telaahan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Posigadan dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah **“peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”**. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana

- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target sasaran Tahun 2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%)	100
			Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%)	100
			Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%)	100
			Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%)	100
			Persentase desa yang memiliki Linmas aktif (%)	100
			Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib(%)	0

			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif(%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Posigadan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Posigadan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
- 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
- 3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
- 4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
- 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Posigadan melaksanakan 5 program dan 11 Kegiatan serta 22 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

Tabel 3.3 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju
Tahun 2027
Kantor Kecamatan Posigadan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi	BOLSEL	0,82	2.011.659.182	DAU		73 Poin	2.518.165.446	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	BOLSEL	100%	7.800.000	DAU		100%	12.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	BOLSEL	0%	0	DAU		5%	25.708.095	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	BOLSEL	100%	1.748.267.414	DAU		0%	1.978.772.763	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	BOLSEL	90%	85.597.500	DAU		90%	90.739.713	
		Persentase SOP dan SP yang diterapkan		100%				100%		

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	BOLSEL	100%	60.470.000	DAU		100%	55.202.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	BOLSEL	100%	102.967.268	DAU		100%	107.916.750	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		90%				90%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	BOLSEL	18 Dok	6.557.000	DAU		18 Dok	9.134.375	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP	BOLSEL	6 Layanan	13.510.000	DAU		6 Layanan	17.562.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi	BOLSEL	1 Kegiatan	13.510.000	DAU		1 Kegiatan	17.562.500	
		Jumlah aparat pemerintah desa yang melaporkan laporan kinerja		122 Orang				102 Orang		
		Jumlah Layanan / Jumlah Survei IKM		6 Layanan				6 Layanan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi	BOLSEL		0	DAU		11 Desa	13.230.000	

		Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin		0%				100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	BOLSEL	0 Kali	0	DAU		4 Kali	13.230.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prenentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	BOLSEL	0 Kegiatan	0	DAU		1 Kegiatan	10.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	BOLSEL	0 Kegiatan	0	DAU		1 Kegiatan	10.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	BOLSEL	100%	12.280.000	DAU		100%	22.876.817	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	BOLSEL	100%	12.280.000	DAU		2 Keg	22.876.817	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang bersifat umum dan menunjang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Posigadan terdiri dari 5 Program dan 11 Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.037.449.182,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 7 kegiatan yaitu :
 - a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 7.800.000,-
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 0,-
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1.748.267.414,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 85.597.500,-
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 60.470.000,-
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 102.967.268,-
 - g. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 6.557.000,-
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 13.510.000,-
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 0,-
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 0,-
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 12.280.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Kantor Kecamatan Posigadan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsure internal Kantor Kecamatan Posigadan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Posigadan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan.

Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Bolaang Uki menyusun Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

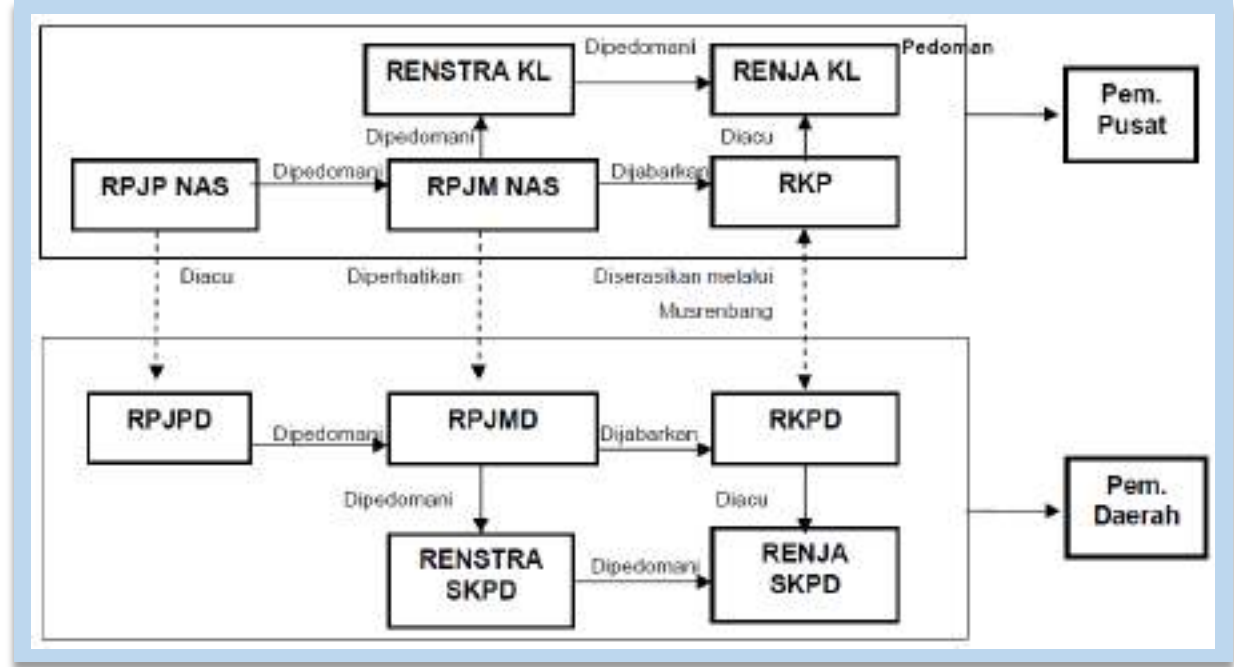
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

- 5. Perumusan rancangan akhir, dan
- 6. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
 23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...);
 24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...);

1.3 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0%
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SOP dan SP yang diterapkan dengan Baik
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai Perencanaan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memuaskan
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan terawat
8	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi
9	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai target
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan dan Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan sesuai target

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bolaang Uki	3.45	89.45	85 Persen	88.08 Perse 6 n	102%	85		
		Nilai SAKIP Kecamatan Bolaang Uki		0	73 Persen	71.7 Perse n	98%	73		
		Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Bolaang Uki		0	73 Persen	0 Perse n	0%	73		

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (DOKUMEN)		0	8	Dokum en	8	Doku men	100%	6		
		Jumlah Dokumen Perencanaan (DOKUMEN)	6	5	12	Dokum en	12	Doku men	100%	4		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang di susun (DOKUMEN)	1	1	1	Dokum en	1	Doku men	100%	1		
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (DOKUMEN)	1	1	1	Dokum en	1	Doku men	100%	1		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	1	1	Dokum en	1	Doku men	100%	1		
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1	1	1	Dokum en	1	Doku men	100%	1		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	1	1	Dokum en	1	Doku men	100%	1		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (laporan)	20	20	20	Lapora n	12	Lapor an	60%	12		
		Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan (orang)			216	Orang	210	Oran g	97%	204		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	20	20	240	Orang	207	Orang	86%	204		

7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DOKUMEN)	20		20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (DOKUMEN)	12	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	1	Laporan	1	Laporan	100%	1		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18	20	0	Laporan	0	Laporan	0	0		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)			2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2		
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (LAPORAN)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12		
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1									
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1									
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara di tingkatkan Kapasitasnya	17	1	0	0	0	0	0	5		
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	0	0	0	0	0	0	1		
7.01.01.2.05.1001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	1	0	0	0	0	0	0		

7.01.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	1								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Kantor dan Barang Perlengkapan Kantor yang Sesuai SOP	6	100	100 Persen	100 Perse	100%	100%			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (PAKET)	1	1	1 Paket	1 Paket	100%	1			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (PAKET)	3	0	3 Paket	3 Paket	100%	0			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1								
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (PAKET)	2	2	2 Paket	2 Paket	100%	2			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (LAPORAN)	4	4	4 Laporan	4 Laporan	100%	4			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (LAPORAN)	240	120	240 Laporan	235 Laporan	98%	60			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	2	0	0 0	0 0	0	2			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan									
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan									
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan									
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	2	0	0 0	0 0	0	1			

7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang disediakan		0	0	0	0	0	1		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	24								
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat									
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (LAPORAN)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (LAPORAN)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (PERSEN)	90	100	73	Persen	73	Perse n	100%	73%	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (UNIT)	6	7	7	Unit	4	Unit	57%	1	
7.01.01.2.09.00006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara(UNIT)	3		5	Unit	1	Unit	20%		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (UNIT)	1		3	Unit	3	Unit	100%		

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	95	78.66	82.5 Persen	78.94 Perse n	95.68%	85%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	5	4 Kali	4 Kali	100%	4		
7.01.02.2.01. 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1 Lapora n	1 Lapor an	100%	1		
7.01.02.2.01. 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	4 Dokum en	4 Doku men	100%	3		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	95	67.2	100 Persen	66.66 Perse n	66.66%	100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	4	3	4 Kali	4 Kali	100%	4		
7.01.03.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan	4	3	4 Lapora n	4 Lapor an	100%	4		

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa	4								
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90								
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1								
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1								
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial yang disediakan	95								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1								
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan Tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1								
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	95	73.52%	90 Persen	79.41 Persen	88.230%	90%			
				76.47%	90 Persen	82.3 Persen	%	90%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	17	17	17 Desa	17 Desa	100%	4			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa (dokumen)	4	4	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4			

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	17	17	8.5 Dokumen	17 Dokumen	200%	17		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	4	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (dokumen)	4	4	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 85 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
2. Pada Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 82.5 % masih teralisasi 78.94 % di tahun 2024 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 9 Desa dari 17 Desa
3. Pada Indikator Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan target 100 % yang teralisasi 66.66 % karena kurangnya partisipasi Masyarakat desa dalam program pemberdayaan dan Masalah Koordinasi antara Perangkat daerah, Lembaga kemasyarakatan dan Stakeholder Lainnya sehingga menghambat pelaksanaan Fasilitasi.
4. Pada Indikator Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital dengan target 90 % sudah teralisasi 82.3% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Bolaang Uki tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bolaang Uki	100	100	85	85	3.45	3.50	88.086%		100	100	
2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	82.5	85	95	95	78.94		100	100	
3	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	100	100	90	95	95	66.66		100	100	
4	Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	100	100	90	90	95	95	82.3		100	100	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kantor Kecamatan Bolaang Uki merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Rentan	1. Masih Rendahnya Usulan Masyarakat yang Masuk Ke APBD Kabupaten 2. Kurangnya Koordinasi antar Perangkat Daerah, Lembaga kemasyarakatan dan stakeholder lainnya 3. Rendahnya Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN	1. Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya 2. SOP Pelayanan yang belum dimaksimalkan

Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Bolaang Uki juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
1. Adanya Program Pemerintah Pusat untuk pengembangan Daerah 2. Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan 3. Kebijakan Otonomi Daerah	1. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan Masyarakat
	2. Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terkait peningkatan kualitas

	Pelayanan Masyarakat.
	3. Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan Program
2. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Proses yang di lakukan membandingkan, Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Kecamatan Bolaang Uki terlihat bahwa ada penambahan Program maupun penambahan kegiatan.Adapun dilakukan penambahan Program dan kegiatan bertujuan untuak mengetahui manfaat atau kerugian dalam penambahan program dan kegiatan tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu – isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan lokasinya kepada Kecamatan Bolaang Uki dengan demikian, usulan – usulan tersebut tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kecamatan Bolaang Uki. Usulan Musrenbang dari masyarakat melalui Desa, difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bolaang Uki selanjutnya direalisasikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu Kegiatan dimaksud. Dengan demikian, usulan program / kegiatan NIHIL untuk dokumen perencanaan Kecamatan Bolaang Uki sebagaimana tabel TC – 32.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Bolaang uki

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2024 meliputi :

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
- 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
- 6. Ekonomi hijau.
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Bolaang Uki adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target sasaran Tahun 2026

1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik.	3.45

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM.
- 2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan
- 3.Meningkatkan Kualitas Proses Pelayanan dengan menerapkan Standar Pelayanan.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Bolaang Uki melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

Tabel 3.3 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kantor Kecamatan Bolaang Uki

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA Perang kat Daerah	REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perangk at Daerah TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangka t Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASION AL	DAERA H				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KECAMATAN BOLAANG UKI						2,986,889,603.00							2,829,000,000.00	
UNSUR KEWILAYAHAN						2,986,889,603.00							2,829,000,000.00	
KECAMATAN						2,986,889,603.00							2,829,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,882,807,743.00						-	2,642,000,000.00	
[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.70	-	-	3.45	2,882,807,743.00	-	-	-	-	-	-	2,642,000,000.00	-

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	-			12.00 Dokumen 8.00 Dokumen 18 Dokumen	24,530,400.00			Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayanan n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki	-	30,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5,010,600.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	4,994,800.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	4,950,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	4,575,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	-			12.00 Laporan 0 Persen 18.00 Orang	1,578,625,943 .00			Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki	-	1,678,000,000 .00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,553,635,943.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		1,650,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				72 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		16,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	4,990,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	-			100 Persen 12.00 Laporan 2.00 Dokumen	10,026,000.00			Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki	-	11,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10,026,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		11,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai Jumlah Dokumen Anjab/ ABK/ Evaja b Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya	-			2.00 Dokumen 5 Persen 3.00 Dokumen 5.00 Orang	4,996,000.00			Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki	-	6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawaaian				20 Dokumen	4,996,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI

Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271,631,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki	-	284,500,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	5,000,500.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		6,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Fasilitasi Kunjungan Tamu															

	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	11,712,500.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		12,500,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	249,918,000.0 0	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		260,000,000.0 0	KECAMATAN BOLAANG UKI

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan Jumlah BMD yang diadakan	-			5.00 Unit 1 Unit	753,748,920.0 0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki	-	250,000,000.0 0	KECAMATAN BOLAANG UKI
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	149,250,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		50,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Pengadaan Mebel														

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	87,165,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		50,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	327,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		50,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	190,333,920.0 0	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		100,000,000.0 0	KECAMAT AN BOLAANG UKI

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	-			100 Persen 90 Persen 100 Persen	96,164,480.00			Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki	-	172,500,000.0 0	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		17,500,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84,164,480.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Kecamata n Bolaang Uki		155,000,000.0 0	KECAMAT AN BOLAANG UKI

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			100 Persen 75.00 Persen	143,085,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki	-	210,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	51,042,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		110,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	92,043,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Kecamatan Bolaang Uki		100,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						28,185,860.00						-	47,500,000.00	
[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	95	90	95	95	28,185,860.00	-	-	-	-	-	-	47,500,000.00	-

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	umlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			1 Dokumen 1 Dokumen	28,185,860.00			Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayanan Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Pemerinta han Kecamatan	-	47,500,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	17,460,860.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Pemerintahan Kecamatan		27,500,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	10,725,000.00	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE	Pemerinta han Kecamata n		20,000,000.00	KECAMAT AN BOLAANG UKI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						14,286,000.0 0						-	27,500,000.0 0	
[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa]	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	95	90	95	95	14,286,000.0 0	-	-	-	-	-	-	27,500,000.0 0	-

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			1 Dokumen	14,286,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Masyarakat Desa	-	27,500,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	14,286,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Masyarakat Desa		27,500,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						61,610,000.00						-	112,000,000.00	
[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	95	90	95	95	61,610,000.00	-	-	-	-	-	-	112,000,000.00	-

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan	-			4 Kali	61,610,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Pemerintahan Desa	-	112,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJAPERangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAPERangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											SASIONAL					DAERAH

		KEGIA TAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa				17 Dokum en	27,499,000.0 0	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokras i, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayan an Publik dan Reforma si Birokra si Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulas i, Penerap an Manaje men Resiko, Percepa tan Digitalis asi Layana n Publik Dan Pelaksa naa n SPBE	Pemerintah an Desa		.00	30,000,000	KECAMAT AN BOLAANG UKI
	7.01.06.2.01. 0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum				4 Dokum en	10,504,000.0 0	Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokras i, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	4. Peningk a tan Pelayan an Publik dan Reforma si Birokra si Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulas i, Penerap an Manaje men Resiko, Percepa tan Digitalis asi Layana n Publik Dan Pelaksa naa n SPBE	Pemerintah an Desa		.00	27,500,000	KECAMAT AN BOLAANG UKI	
	7.01.06.2.01. 0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	11,454,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Pemerintahan Desa		27,000,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
	J U M L A H							2,986,889,603.00							2,829,000,000.00	

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	12,153,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE	Pemerintahan Desa		27,500,000.00	KECAMATAN BOLAANG UKI
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang bersifat umum dan menunjang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Bolaang Uki terdiri dari 4 Program dan 11 Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.394.990.612,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 8 kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 24.530.400,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1,578,625,943,-
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 10.026.000,-
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 4.996.000,-
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 271.631.000,-
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 753.748.920,-
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 96.164.480,-
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 143.085.000,-
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 28.185.860,-
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 14.286.000,-

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 61.610.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Bolaang Uki merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2026, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Selain itu, Renja Kecamatan Bolaang Uki ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Kantor Kecamatan Bolaang Uki, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kesesuaian dengan renja KL, (Renja merupakan mengacu pada renstra perubahan 2)

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunn 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman tahunan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat di lingkungan Kantor Kecamatan Pinolosian dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, dan terukur.

b. Tujuan

1. Menjabarkan Renstra Kecamatan menjadi rencana operasional tahunan yang jelas, terukur, dan realistis.
2. Mensinergikan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pinolosian.
3. Menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 beserta indikator kinerjanya, sehingga memudahkan evaluasi dan pengendalian.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan yang matang, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
5. Mendorong partisipasi dan koordinasi antarinstansi, pemerintah desa, serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan kecamatan.
6. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pinolosian Tahun Anggaran 2026.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Bab ini memuat uraian umum yang menjadi dasar penyusunan Renja, meliputi:

1. Latar Belakang
Menjelaskan kondisi umum dan urgensi penyusunan Renja, keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Renstra Kecamatan, dan dokumen perencanaan lainnya.
2. Landasan Hukum
Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja.
3. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud disusunnya Renja sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan, serta tujuan yang hendak dicapai.
4. Sistematika Penulisan
Menjelaskan susunan bab dan subbab dalam dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH; Bab ini berisi analisis kinerja tahun sebelumnya dan pencapaian target Renstra, meliputi:

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Menguraikan realisasi program/kegiatan tahun sebelumnya serta ketercapaiannya terhadap sasaran Renstra.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menjelaskan capaian kinerja pelayanan yang telah diberikan serta tingkat keberhasilannya.
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Mengidentifikasi permasalahan strategis, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

BAB III UJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; Bab ini memuat arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, meliputi:

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menganalisis keterkaitan Renja Kecamatan dengan kebijakan nasional dan daerah.
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Menetapkan tujuan strategis dan sasaran terukur untuk dicapai pada tahun rencana.
3. Program dan Kegiatan
Merinci program/kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH; Bab ini Berisi daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran, disusun sesuai dengan format perencanaan pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi penegasan dan langkah tindak lanjut penyusunan Renja, meliputi:

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Prinsip dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renja.
2. Rencana Tindak Lanjut
Langkah-langkah operasional yang akan dilakukan pasca penetapan Renja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pinolosian pada tahun anggaran sebelumnya merupakan realisasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pinolosian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan tahun lalu menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi akibat keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, dan kondisi eksternal seperti dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, seperti penerbitan surat keterangan, rekomendasi, dan dokumen administrasi lainnya.
- Koordinasi pemerintahan desa, termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan, guna meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada Renstra telah mengalami kemajuan, terutama pada aspek ketepatan waktu pelayanan administrasi dan koordinasi pemerintahan desa. Namun, pada indikator yang membutuhkan dukungan lintas

sektor, pencapaian masih memerlukan penguatan sinergi dengan instansi terkait.

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan tahun lalu menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi akibat keterbatasan anggaran, dan perubahan kebijakan, Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pinolosian meliputi dapat dilihat pada Tabel T-C 29.

Tabel 2.1 T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kantor Kecamatan Pinolosian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu			Terget Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Restra perangkat Daerah s/ d Tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perankat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2025	Tingkat Capaian realisai target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian (Skor)	255	85	85	85	100	85	255	100
		Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian (Skor)	218	72	73	73	100	73	218	100
		Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian (Skor)	218	72	73	73	100	73	218	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	23	7	8	8	100	8	23	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	28	4	12	12	100	12	28	100
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2	2	1	50	2	5	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	3	

7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	3	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	3	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	3	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	4	12	6	50	12	22	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	85	61	12	12	100	12	85	100
		Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	49	21	15	13	87	15	49	100
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90	63	15	12	80	15	90	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	28	1	18	9	50	18	28	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	30	12	12	6	50	12	30	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	1	1	1	100	1	3	

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	56	20	18	18	100	18	56	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)	16	12	2	2	100	2	16	100
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	27	3	12	12	100	12	27	100
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36	12	12	12	100	12	36	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	10	5	5	100	5	20	100
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib (Dokumen)	20	18	3	0	-	2	20	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen)	6	2	2	2	100	2	6	100
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	46	15	18	13	72	18	46	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	0	5	5	100		5	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	292	100	100	92	92	100	292	100
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	106	100	3	3	100	3	106	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	104	100	2	2	100	2	104	

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	28	20	4	4	100	4	28	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	460	100	216	216	100	144	460	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan (Unit)	3		2	2	100	1	3	100
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		2	2	100	1	3	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	296,85	100	100	96,85	97	100	297	100
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	40	12	16	16	100	12	40	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	12	12	12	100	12	36	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	12	12	12	100	12	36	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen)	217,98	72	73	72,98	100	73	218	100
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	10	10	10	100	10	30	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	1	3	3	100	3	7	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik (Persen)	247	82	82,5	82,5	100	82,5	247	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan (Kali)	5	1	4	2	50	2	5	100

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	1	1	1	100	1	3	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	1	3	1	33	1	3	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi (Desa)	46		6	6	100	40	46	100
		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan (Persen)	122,5		22,5	22,5	100	100	123	100
		Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (Persen)	200		100	100	100	100	200	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kali)	3	1	4	1	25	1	3	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	1	4	1	25	1	3	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu (Persen)	280	90	90	90	100	100	280	100
		Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu (Persen)	280	90	90	90	100	100	280	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi (Desa)	60	40	10	10	100	10	60	100
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	1	4	1	25	1	3	

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	4	4	4	100	10	18	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	3	1	4	1	25	1	3	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	3	1	4	1	25	1	3	

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 2025, evaluasi hasil pelaksanaan renja Kantor Kecamatan Pinolosian Bolaang Mongondow Selatan disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pinolosian Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang optimal. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator program dan kegiatan, seluruh target yang telah ditetapkan pada awal tahun berhasil direalisasikan secara penuh dengan capaian 100%. Hal ini berlaku baik pada tingkat program maupun kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan. Secara rinci, program yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan
Meliputi kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi dan listrik, perkantoran, kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta pemeliharaan gedung kantor. Seluruh kegiatan pada program ini terealisasi 100% sesuai target.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Semua kegiatan mencapai realisasi 100% dari target.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi, rekomendasi, serta

koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian kinerja yang konsisten ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Tahun 2024 telah mendukung arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pinolosian. Seluruh kegiatan terlaksana tepat waktu, sesuai sasaran, dan dalam koridor anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari:

- Perencanaan program yang matang dan terukur.
- Koordinasi efektif antar unit kerja di lingkungan kecamatan.
- Dukungan penuh dari sumber daya aparatur yang kompeten.
- Pengawasan internal yang berjalan secara optimal.

Dengan capaian kinerja 100% ini, Kecamatan Pinolosian telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada table 2.2 T-C 30, sebagai berikut.

Tabel 2.2 T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Indikator	Indikator lainnya	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian				85	85	85	3.45	85	85			85	3.45	
Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian				72	73	73		72	73			73		
Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian				72	73	73		72	73			73		
Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik				82,5	82,5	85		82,5	82,5			85		
Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan				100	100	100		100	100			100		
Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu				90	90	100		90	90			100		
Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				90	90	100		90	90			100		

RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026

Indikator	Indikator lainnya	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan							100						100	
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)							100						100	
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan							100						100	
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan							100						100	
Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital							10						10	

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pelayanan, Kecamatan Pinolosian pada tahun berjalan menunjukkan pencapaian yang sangat baik di hampir seluruh aspek yang diukur.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM Kecamatan Pinolosian berada pada angka 85 secara konsisten. Capaian ini berada pada kategori sangat baik, mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan administrasi, koordinasi pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya yang diberikan oleh kecamatan.

2. Nilai Reformasi Birokrasi

Mengalami peningkatan dari 72 menjadi 73. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, penerapan prinsip akuntabilitas, serta upaya inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Sama halnya dengan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP juga meningkat dari 72 menjadi 73. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang semakin akuntabel.

4. Persentase Sarana dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik

Terjadi peningkatan dari 82,5% menjadi 85%. Peningkatan ini merupakan hasil pemeliharaan yang baik terhadap fasilitas umum di wilayah kecamatan, sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.

5. Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan

Tercapai 100%, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan.

6. Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang Selesai Tepat Waktu

Meningkat dari 90% menjadi 100%, menandakan perbaikan koordinasi dan asistensi kecamatan dalam

mendukung desa menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai jadwal.

7. Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu

Sama halnya, meningkat dari 90% menjadi 100%, yang menunjukkan adanya peningkatan disiplin administrasi dan efektivitas pendampingan dari pihak kecamatan.

8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Terealisasi 100%, menggambarkan kemampuan kecamatan dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara efektif dan efisien.

9. Target 2026 Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Mencapai 100%, menunjukkan peran aktif kecamatan dalam mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan lainnya.

10. Target 2026 Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang Ditegakkan yang akan di Capai 100%, menandakan bahwa fungsi penegakan regulasi akan berjalan secara maksimal dan tanpa hambatan berarti.

11. Target 2026 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

Yang akan direalisasi 100%, akan mencerminkan keberhasilan upaya mediasi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah kecamatan.

12. Target 2026 Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital.

Mencapai 10 desa, yang akan menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pemerintahan desa, mendukung efisiensi dan transparansi layanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya dan capaian indikator kinerja pelayanan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pinolosian, antara lain:

1. Optimalisasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan

Meskipun capaian program dan kegiatan relatif tinggi, masih diperlukan sinkronisasi yang lebih baik antara program kecamatan, perangkat daerah kabupaten, serta pemerintah desa agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan program pembangunan.

2. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Publik

Walaupun persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik telah meningkat menjadi 85%, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pelayanan publik, terutama di desa-desa dengan akses terbatas.

3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP menunjukkan progres positif, namun masih diperlukan penguatan kompetensi SDM, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, dan penyusunan dokumen perencanaan.

4. Transformasi Digital Pelayanan Pemerintahan Desa

Meskipun sudah 10 desa menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital, masih diperlukan percepatan implementasi di seluruh desa serta peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat agar pelayanan berbasis teknologi berjalan optimal.

5. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah mencapai 100%, namun tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi partisipasi tersebut dan mengarahkannya pada program-program yang lebih produktif dan berkelanjutan.

6. Penguatan Fungsi Mediasi dan Pencegahan Konflik Sosial

Capaian penyelesaian konflik sosial 100% merupakan prestasi penting yang perlu dipertahankan. Namun, dibutuhkan mekanisme pencegahan yang lebih sistematis melalui forum koordinasi, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan deteksi dini potensi konflik.

7. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Pembiayaan
Beberapa program prioritas masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan inovasi pendanaan, seperti kemitraan dengan sektor swasta, pemanfaatan dana desa, dan optimalisasi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pinolosian berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP, serta sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Fokus kebijakan nasional yang relevan antara lain:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2. Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3. Pengembangan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar yang merata.
- 4. Transformasi digital dalam pelayanan publik.
- 5. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja, analisis pelayanan, serta isu-isu penting, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 3.2 sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Program	Target Program
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik.	3,51	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	10

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berikut adalah daftar program dan kegiatan Kecamatan Pinolosian Tahun 2026:

Tabel 3.3 T-C 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN PINOLOSIAN TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	10	8	9	11	15	16
						KECAMATAN PINOLOSIAN				2.249.822.042,00			2.240.100.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.249.822.042,00			2.240.100.000,00
	7	01				KECAMATAN				2.249.822.042,00			2.240.100.000,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	2.135.822.042,00		-	2.105.100.000,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6.500.000,00		-	8.000.000,00
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.750.000,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	1.615.858.360,00		-	1.710.800.000,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	15 Orang/bulan	1.606.133.560,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.700.000.000,00
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6.524.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.000.000,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	18 Laporan	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.300.000,00
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	8.800.000,00		-	8.800.000,00
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Laporan	8.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8.800.000,00
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	27.000.000,00		-	11.250.000,00
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	26.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	210.108.682,00		-	170.000.000,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	3 Paket	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.500.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	10 Paket	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.500.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.000.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	216 Laporan	201.608.682,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160.000.000,00

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	109.000.000,00		-	35.000.000,00
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	2 Unit	46.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	3 Unit	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	3 Unit	33.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	100 Unit	20.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	110.000.000,00		-	111.250.000,00
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	48.555.000,00		-	50.000.000,00
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	10 Unit	37.055.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		38.000.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.000.000,00
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	3 Unit	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	19.000.000,00		-	30.000.000,00
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	19.000.000,00		-	30.000.000,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	23.000.000,00		-	25.000.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	23.000.000,00		-	25.000.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Laporan	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		-	72.000.000,00		-	80.000.000,00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	72.000.000,00		-	80.000.000,00
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	12.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14.000.000,00
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6.000.000,00
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00

RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026

	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	J U M L A H										2.249.822.042,00		2.240.100.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Kantor Kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kantor kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pinolosian Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dokumen ini telah disusun melalui proses yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian sasaran strategis, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Pinolosian dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target dan peningkatan kinerja Kecamatan Pinolosian..

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman teknis penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah-kaidah pelaksanaan dimaksud meliputi:

- **Kepatuhan terhadap Landasan Hukum**
Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Renstra Kecamatan Pinolosian, dan kebijakan teknis terkait.

- Efisiensi dan Efektivitas
Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Transparansi dan Akuntabilitas
Proses pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara terbuka, dapat diakses oleh publik, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun finansial.
- Partisipatif
Melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- Pengendalian dan Evaluasi
Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
- Integrasi dan Sinkronisasi
Seluruh program dan kegiatan diintegrasikan dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta disinkronkan dengan program lintas sektor guna menghindari tumpang tindih dan memastikan keterpaduan pembangunan.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

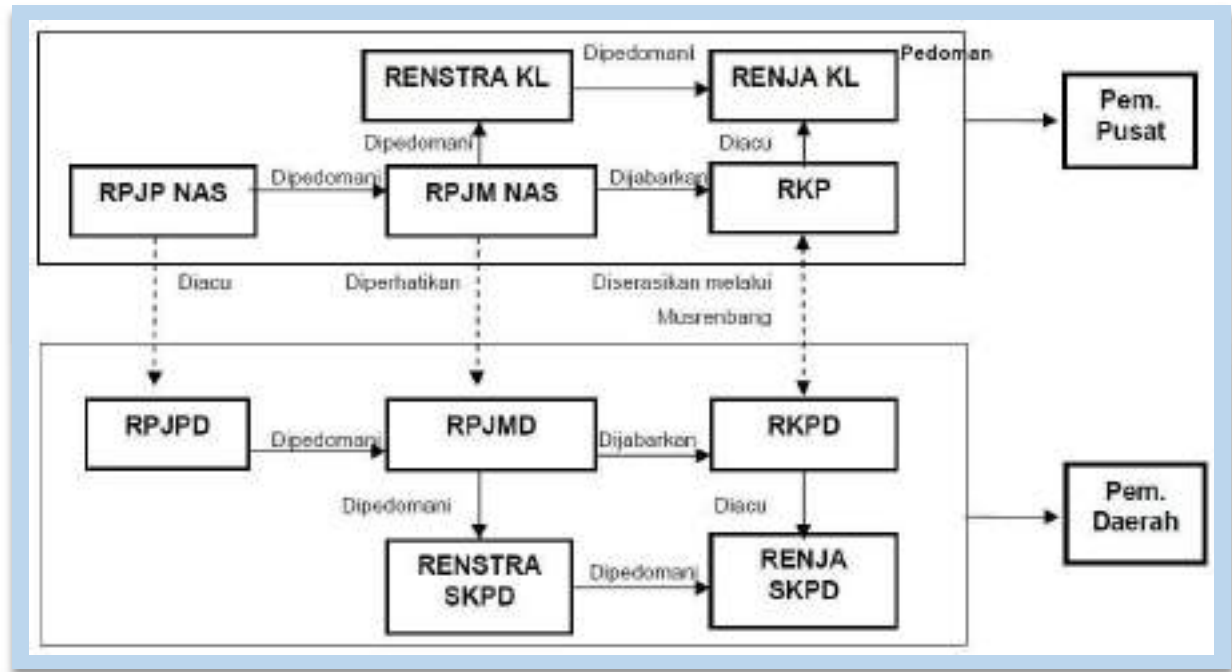
Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Pinolosian Timur menyusun Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah
- 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah
- 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Anggaran yang tersedia
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Anggaran yang tersedia
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
3.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
3.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
3.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
3.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
3.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3.1.6	asilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan ini belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian Timur	3.45	89.45	85 Persen	88.086 Persen	102%	85		
		Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian Timur		0	73 Persen	71.7 Persen	98%	73		
		Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian Timur		0	73 Persen	0 Persen	0%	73		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (DOKUMEN)		0	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	6		

		Jumlah Dokumen Perencanaan (DOKUMEN)	6	5	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	4		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang di susun (DOKUMEN)	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1		
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (DOKUMEN)	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1		
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (laporan)	20	20	20	Laporan	12	Laporan	60%	12		
		Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan (orang)			216	Orang	210	Orang	97%	204		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	20	20	240	Orang	207	Orang	86%	204		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DOKUMEN)	20		20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20		

7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (DOKUMEN)	12	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	1	Laporan	1	Laporan	100%	1		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18	20	0	Laporan	0	Laporan	0	0		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen)			2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2		
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (LAPORAN)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12		
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1									
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1									
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara di tingkat Kapasitasnya	17	1	0	0	0	0	0	5		
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	0	0	0	0	0	0	1		
7.01.01.2.05.1001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	1	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	1									

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Kantor dan Barang Perlengkapan Kantor yang Sesuai SOP	6	100	100	Persen	100	Perse n	100%	100%		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (PAKET)	1	1	1	Paket	1	Paket	100%	1		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (PAKET)	3	0	3	Paket	3	Paket	100%	0		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1									
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (PAKET)	2	2	2	Paket	2	Paket	100%	2		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (LAPORAN)	4	4	4	Lapora n	4	Lapor an	100%	4		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (LAPORAN)	240	120	240	Lapora n	235	Lapor an	98%	60		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	2	0	0	0	0	0	0	2		
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan										
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan										
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan										
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	2	0	0	0	0	0	0	1		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang disediakan		0	0	0	0	0	0	1		

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	24								
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat									
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (LAPORAN)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (LAPORAN)	12	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (PERSEN)	90	100	73	Persen	73	Perse n	100%	73%	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (UNIT)	6	7	7	Unit	4	Unit	57%	1	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara(UNIT)	3		5	Unit	1	Unit	20%		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (UNIT)	1		3	Unit	3	Unit	100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	95	78.66	82.5	Persen	78.94	Perse n	95.68%	85%	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	5	4 Kali	4 Kali	100%	4		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1 Laporan	1 Laporan	100%	1		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	95	67.2	100 Persen	66.66 Persen	66.66%	100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	4	3	4 Kali	4 Kali	100%	4		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	4	3	4 Laporan	4 Laporan	100%	4		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa	4							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90							

	KETERTIBAN										
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1								
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1								
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial yang disediakan	95								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1								
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan Tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1								
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	95	73.52%	90 Persen	79.41 Perse n	88.230%	90%			
				76.47%	90 Persen	82.3 Perse n	%	90%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	12	12	12 Desa	12 Desa	100%	4			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa (dokumen)	4	4	4 Dokum en	4 Doku men	100%	4			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	17	17	8.5 Dokum en	17 Doku men	200%	17			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	0	4 Dokum en	4 Doku men	100%	2			

		(dokumen)								
7.01.06.2.01. 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (dokumen)	4	4	4 Dokum en	4 Doku men	100%	2		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Trantib di Kecamatan dengan target 5 Kasus yang terealisasi 0 Kasus karena Indikator tersebut baru dilaksanakan di Tahun 2024.
2. Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
3. Pada Indikator Persentase desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah terealisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
4. Pada Indikator Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan dengan target 73 poin telah terealisasi karena meningkatnya kerjasama sosial antar Masyarakat
5. Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang terealisasi 0 % karena indikator tersebut baru dilaksanakan di tahun 2025
6. Pada Indikator Jumlah Data Base kelompok usaha produktif yang Uptodate dan terintegrasi dengan target 100 % masih terealisasi 30 % di tahun 2021 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 8 Desa
7. Pada Indikator kinerja jumlah desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara Uptodate dan terintegrasi indikator ini masih 0 karena nanti dilaksanakan pada Tahun 2025
8. Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 80 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
9. Pada Indikator Kinerja Presentase kesesuaian produk layanan dengan standar pelayanan dengan target 80% bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan
10. Pada Indikator jumlah produk layanan sesuai dengan SOP dengan target 6 SOP Indikator tersebut belum tercapai karena belum ada Bimbingan Teknis tentang pembuatan SOP
11. Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang

berbasis kinerja dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan

Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

12 Pada Indikator jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 8 Desa sudah teralisasi 8 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

13 Pada Indikator Presentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan dan Desa

Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2026	2024	2021	2022	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kasus pelanggaran Trantib di Kecamatan			5	5	4	4	4		4	4	
2	Presentasi angka kejadian gangguan Trantib	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	
3	Presentase desa yang memiliki Linmas aktif	100	100	80	100	100	100	70		85	85	
4	Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan	100	100	75	75	75	75	75		75	75	
5	Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Gotong royong secara rutin	100	100	75	75	75	75	75		75	75	
6	Jumlah Data base kelompok usaha produktif yang secara uptodate dan terintegrasi			3	3	3	3	3		3	3	
7	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi			0	5	3	3	3		3	3	
8	Indeks kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	100	100	80	80	80	80	80		80	80	
9	Prosentase Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan	100	100	80	90	90	90	80		80	80	
10	Jumlah Produk layanan sesuai dengan SOP			6	6	6	6	6		6	6	
11	Presentase Desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	100	100	80	80	80	80	80		80	80	
12	Jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja			8	8	8	8	8		8	8	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2026	2024	2021	2022	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Prosentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100	100	80	80	80	80	80		80	80	

a. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kantor Kecamatan Pinolosian Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai dan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan	Belum Maksimal Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum Memadai Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor
		Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Petugas pelayanan belum memahami SOP dan Standar Pelayanan
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
		Pelayanan yang tidak responsif dan kurangnya informasi yang jelas	Sistem Informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya pelatihan kepada Staf
3	Partisipasi Masyarakat yang belum Optimal	Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan, Kurangnya Informasi yang Jelas dan Kurangnya Kepercayaan Masyarakat	Masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat.
4	Lambatnya Peranan fungsi Kelembagaan di Masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan	Sistem Kelembagaan yang tidak efektif dan Efisien

5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan dan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku	Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan peraturan serta keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Timur juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.	1. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	2. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	3. Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
	4. Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
	5. Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan

Pinolosian Timur Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 3.3 (T-C-32)

Program dan Kegiatan Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA AN KERANGKA PENANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			2026		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS				TARGET	PAGU (Rp)		
			TARGET	PAGU (Rp)			NASIONAL		DAERAH					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.625.548.187,00										2.921.134.355,00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.497.004.270,00										2.792.434.355,00
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3.45	2.497.004.270,00									3.50	2.792.434.355,00
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000,00										12.600.000,00
Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	12	2.000.000,00									12	2.100.000,00
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00										2.100.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	12	2.000.000,00									12	2.100.000,00
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00									1 2	10.500.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2								1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1								1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1								1			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5											
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												1 3	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1											
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-										320.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-									1	320.000.000,00
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00										60.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	20.000.000,00									3	60.000.000,00
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000,00										-
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5	25.000.000,00										-
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00										-
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	60.000.000,00										-
7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-										-
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-										-
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-										-
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-										-
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000,00									12 12 12 4	121.000.000,00

[illegible]

[illegible]

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-										-
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-										-
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-										-
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa				17.000.000,00										17.000.000,00
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				11.000.000,00										11.000.000,00
Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	11.000.000,00									1 1	11.000.000,00
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1											
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6.000.000,00										6.000.000,00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	6.000.000,00										1
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00										5.000.000,00
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	5.000.000,00									1	5.000.000,00
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.000.000,00									1	6.000.000,00
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang dibina oleh kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	6.000.000,00										6.000.000,00
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.000.000,00										6.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	6.000.000,00									1	6.000.000,00
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.000.000,00										10.000.000,00
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	1	-									1	-

	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		12									12	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		12									12	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		12									12	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12									12	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12									12	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		12									12	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	12									12	
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		12									12	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
													6.000.000,00
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa												-
													15.000.000,00
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		12									12	15.000.000,00

	Pendayagunaan Aset Desa												
												6.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		12								12	6.000.000,00	
												-	
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		12								12	6.000.000,00	
												6.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		12								12	6.000.000,00	
												6.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											-	
												-	
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12								12	6.000.000,00	
												-	
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan											-	
												-	
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak		12								12	6.000.000,00	

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Pinolosian Timur dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program- program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target sasaran Tahun 2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%)	100
			Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%)	100
			Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%)	100
			Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%)	100
			Persentase desa yang memiliki Linmas aktif (%)	100
			Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%)	0
			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang

direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Pinolosian Timur melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Kantor Kecamatan Pinolosian Timur, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kantor Kecamatan Pinolosian Timur, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Pinolosian Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur.

Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Helumo menyusun Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

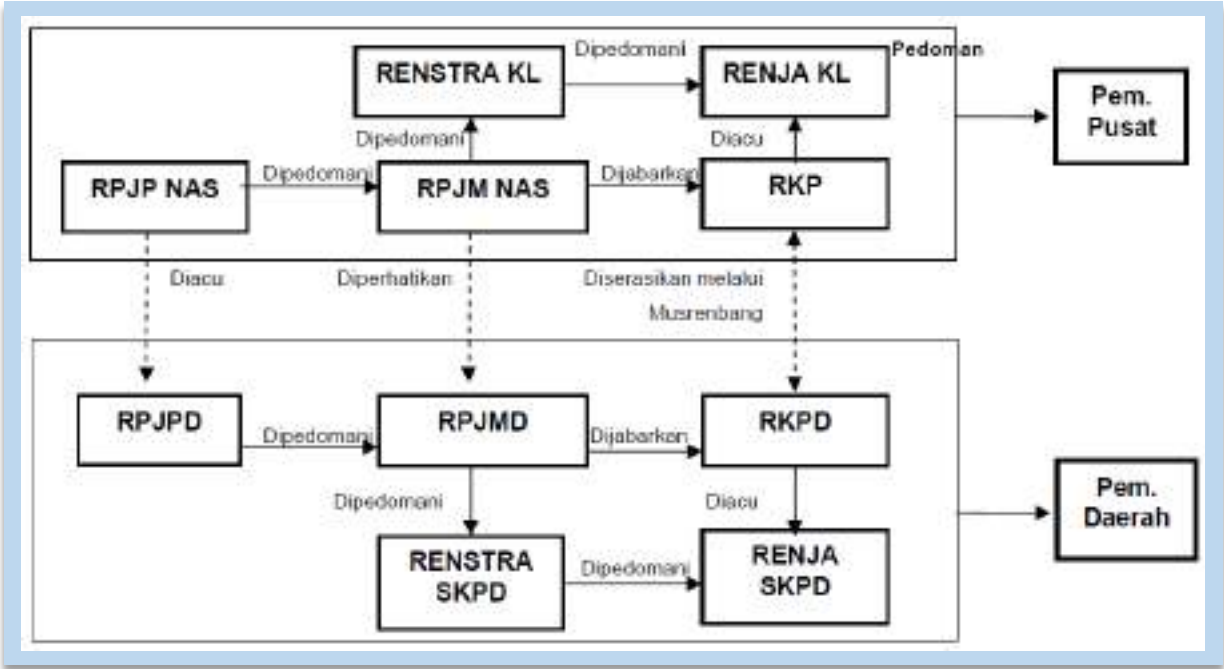
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 989).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah
- 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah
- 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Anggaran yang tersedia
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Anggaran yang tersedia
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
3.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
3.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
3.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
3.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
3.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3.1.6	asilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan ini belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi	365 Poin		70 Poin	67 Poin	96%	71		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	90 Dok		18 Dok	0 Dok	0%	18 Dok		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perncaanaan Perangkat daerah yang di susun	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi	60 DOK		12 Dok	12 Dok	100%	12 DOK		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	500%		0 %	0 %	0%	0%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Administrasi Sesuai dengan SOP	500%		100 %	0	0%	0%		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	90 Dok		18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	500%		100 %	100 %	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan Aset daerah	30 orang/bulan		6 orang/bulan	6 orang/bulan	100%	6 orang/bulan		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	25%		5 %	5 %	100%	5%		
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparatur Sipil Negara	70 Orang		14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	75%		15 %	0 %	0%	0%		
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	250%		50 %	50 %	100%	50%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	450%		90 %	90 %	100%	90%		
		Persentase SOP dan SP yang diterapkan	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	500%		100 %	0 %	0%	100%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	500%		100 %	0 %	0%	100%		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	100 Orang		20 Orang	0 Orang	0%	20 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	500%		100 %	95,46 %	95%	100%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	27 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	3 unit		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	24 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit		2 Unit	2	Unit	0		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/Gedung	3 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	500%		100 %	100 %	100%	100%		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	450%		90 %	90 %	100%	90%		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	500%		100 %	93 %	93%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	45 unit		9 Unit	9 Unit	100%	9 unit		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	6 Unit		8 Unit	2 Unit	20%	0		
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah Rumah jabatan terpelihara	1 Unit		0	0	0	0		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	40 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	8 unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP	30 SOP		6 SOP	6 SOP	100%	6 SOP		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi	80 Orang		80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang		
		Jumlah Layanan/Jumlah Survey IKM	30 SOP		6 SOP	6 SOP	100%	6 SOP		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan perwakilan masyarakat	750 Orang		150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja	450 %		90 %	90 %	100%	90 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi	11 Desa		3 Desa	3 Desa	100%	100%		
		Presentase Desa Yang melakukan gotong royong secara rutin	375 %		75 %	75 %	100%	100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	400%		80 %	80 %	100 %	100%		
		Persentase desa yang memiliki Linmas aktif	500 %		100 %	100 %	100%	100%		
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	400 %		80 %	80%	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan masyarakat desa	400%		80 %	80 %	100%	100 %		
		Jumlah monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja	11 Desa		8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengikuti peningkatan Pengelolaan Dana dan Aset Desa	11 desa		8 Desa	8 Desa	100%	8 desa		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi rapat yang dilaksanakan	20 kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 kali		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Helumo dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Helumo Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Trantib di Kecamatan dengan target 5 Kasus yang terealisasi 0 Kasus karena Indikator tersebut baru dilaksanakan di Tahun 2024.
2. Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
3. Pada Indikator Persentase desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah terealisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
4. Pada Indikator Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan dengan target 73 poin telah terealisasi karena meningkatnya kerjasama sosial antar Masyarakat
5. Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang terealisasi 0 % karena indikator tersebut baru dilaksanakan di tahun 2025
6. Pada Indikator Jumlah Data Base kelompok usaha produktif yang Uptodate dan terintegrasi dengan target 100 % masih terealisasi 30 % di tahun 2021 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 8 Desa
7. Pada Indikator kinerja jumlah desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara Uptodate dan terintegrasi indikator ini masih 0 karena nanti dilaksanakan pada Tahun 2025
8. Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 80 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
9. Pada Indikator Kinerja Presentase kesesuaian produk layanan dengan standar pelayanan dengan target 80% bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
- 10 Pada Indikator jumlah produk layanan sesuai dengan SOP dengan target 6 SOP Indikator tersebut belum tercapai karena belum ada Bimbingan Teknis tentang pembuatan SOP
- 11 Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang

berbasis kinerja dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

12 Pada Indikator jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 8 Desa sudah teralisasi 8 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

13 Pada Indikator Presentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan dan Desa

Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Helumo tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2026	2024	2021	2022	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kasus pelanggaran Trantib di Kecamatan			5	5	4	4	4		4	4	
2	Presentasi angka kejadian gangguan Trantib	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	
3	Presentase desa yang memiliki Linmas aktif	100	100	80	100	100	100	70		85	85	
4	Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan	100	100	75	75	75	75	75		75	75	
5	Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Gotong royong secara rutin	100	100	75	75	75	75	75		75	75	
6	Jumlah Data base kelompok usaha produktif yang secara uptodate dan terintegrasi			3	3	3	3	3		3	3	
7	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi			0	5	3	3	3		3	3	
8	Indeks kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	100	100	80	80	80	80	80		80	80	
9	Prosentase Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan	100	100	80	90	90	90	80		80	80	
10	Jumlah Produk layanan sesuai dengan SOP			6	6	6	6	6		6	6	
11	Presentase Desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	100	100	80	80	80	80	80		80	80	
12	Jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja			8	8	8	8	8		8	8	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2026	2024	2021	2022	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Prosentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100	100	80	80	80	80	80		80	80	

a. **Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Kantor Kecamatan Helumo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai dan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan	Belum Maksimal Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum Memadai Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor
		Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Petugas pelayanan belum memahami SOP dan Standar Pelayanan
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
		Pelayanan yang tidak responsif dan kurangnya informasi yang jelas	Sistem Informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya pelatihan kepada Staf
3	Partisipasi Masyarakat yang belum Optimal	Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan, Kurangnya Informasi yang Jelas dan Kurangnya Kepercayaan Masyarakat	Masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat.
4	Lambatnya Peranan fungsi Kelembagaan di Masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan	Sistem Kelembagaan yang tidak efektif dan Efisien
5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan dan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku	Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan peraturan serta keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Helumo juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.	1. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	2. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	3. Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
	4. Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
	5. Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Helumo Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 3.3 (T-C-32)

Program dan Kegiatan Kecamatan Helumo Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA Peran gkat Daera h	REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TAR G E T 20 26	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN HELUMO						2.460.525.744,0 0						2.743.760.653,0 0		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.460.525.744,0 0							2.743.760.653,0 0	
	7.01	KECAMATAN						2.460.525.744,0 0							2.743.760.653,0 0	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA						2.370.354.994,0 0						-	2.677.157.401,0 0	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyara kat	3.70	-	-	3.45	2.370.354.994,0 0	-	-	-	-	-	-	2.677.157.401,0 0	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Perwuju dan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib	-	-	5.469.778,00	KECAMATAN HELUMO

												an Dan Keaman an				
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokume n	5.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwuj dan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keaman an	-		5.469.778,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	982.129.586,00			-	-	-	-	1.514.690.294,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN</i>				14 Orang/b ulan	967.129.586,00	Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.474.870.309,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD</i>				100 Dokume n	15.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwuj dan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keaman an	-		39.819.985,00	KECAMATAN HELUMO

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	30.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-		27.431.545,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	427.843.108,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	-	291.742.042,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	100.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-		128.134.901,00	KECAMATAN HELUMO
		-	-	-	-	-	-	2.370.354.994,00	-	-	-	-	-	-	2.677.157.401,00	-
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	60.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN HELUMO
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.70	-	-	3.45	2.370.354.994,00	-	-	-	-	-	-	2.677.157.401,00	-

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	267.843.108,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		163.607.141,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	733.000.000,00			-	-	-	-	526.050.000,00	KECAMATAN HELUMO
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA Perangkat Daerah	REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	73.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.000.000,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	660.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		463.050.000,00	KECAMATAN HELUMO

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	9.500.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-		13.663.243,00	KECAMATAN HELUMO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.700.000,00						-	8.823.983,00	
		[Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	0	0	1	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-	8.823.983,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	9.700.000,00			-	-	-	-	8.823.983,00	KECAMATAN HELUMO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA Peran gkat Daera h	REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TAR G E T 20 26	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITA S		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIO NAL					DAER AH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				4 Laporan	9.700.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.823.983,00	KECAMATAN HELUMO
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						55.970.750,00						-	27.135.125,00	
		[Meningkatkan kuantitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	-	-	-	-	-	55.970.750,00	-	-	-	-	-	-	27.135.125,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	55.970.750,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	-	27.135.125,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				11 Dokumen	37.470.750,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-		11.461.367,00	KECAMATAN HELUMO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.849.775,00	KECAMATAN HELUMO	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ketertiban Dan Keamanan	-		8.823.983,00	KECAMATAN HELUMO	
	J U M L A H							2.460.525.744,00								2.743.760.653,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Helumo dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah **“peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”**. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target sasaran Tahun 2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%)	100
			Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%)	100
			Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%)	100
			Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%)	100
			Persentase desa yang memiliki Linmas aktif (%)	100
			Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%)	0
			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Helumo adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan

Helumo, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Helumo dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Helumo menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Helumo melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Helumo Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Kantor Kecamatan Helumo, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kantor Kecamatan Helumo, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Helumo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo.

Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

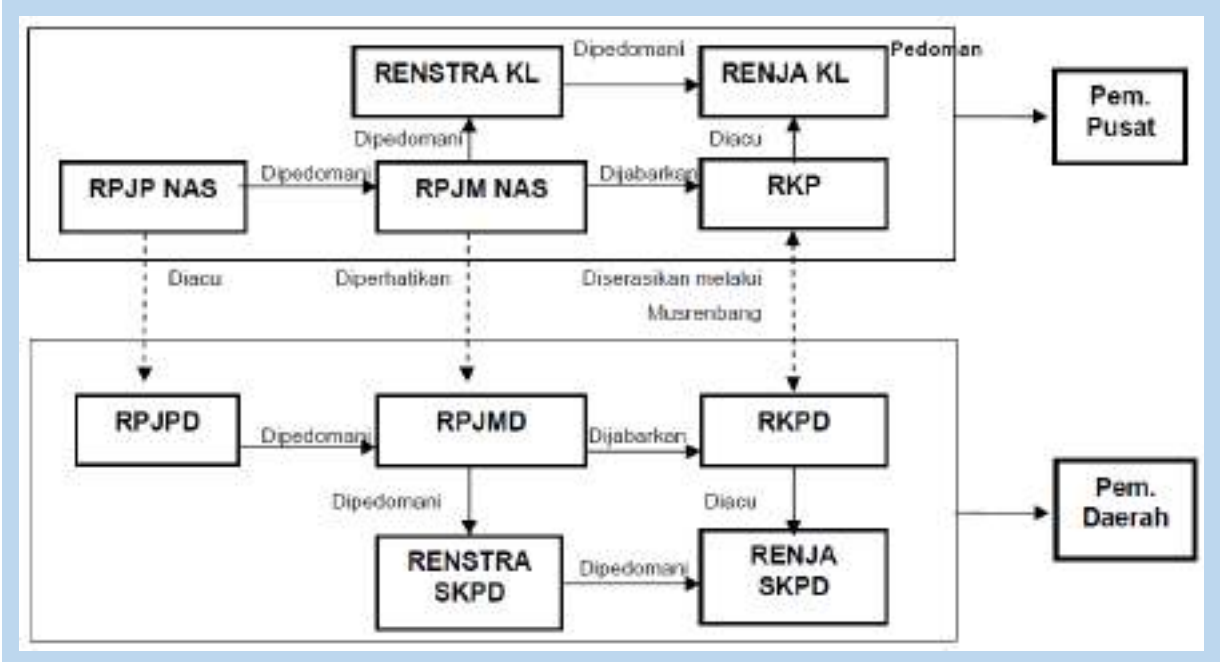
Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Camat Tomini menyusun Renja Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Camat Tomini Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling member masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1.**

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arahan dan sekaligus tolak ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah
- 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah
- 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- 5) Sebagai instrument kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0%
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SOP dan SP yang diterapkan dengan Baik
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai Perencanaan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memuaskan
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan terawatt
8	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi
9	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai target
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan dan Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan sesuai target

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

[illegible]

7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	294.925	0	0	1	294.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	12	1.267.901.218	0	0	12	1.267.901.218	0	3.556.239.958	0	3.162.572.856	0	2.105.345.293	12	3.380.196.491	12	12.204.354.598	12	12.204.354.598	100	962,56
		Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang)	12		0		12		0		0		12		12		12		100			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	1.259.041.218	0	0	12	1.259.041.218	393.678.769	3.556.239.958	350.716.984	3.156.452.856	0	2.101.145.293	1.455.746.589	3.364.356.491	2.200.142.342	12.178.194.598	2.200.142.342	12.178.194.598	18.334.951.16,67	967,26
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	8.860.000	0	0	12	8.860.000	0	0	0	6.120.000	0	4.200.000	5.280.000	15.840.000	5.280.000	26.160.000	5.280.000	26.160.000	44.000.000	295,26
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Laporan)	2	9.070.000	0	0	2	9.070.000	0	0	0	0	0	22.500.000	2	58.500.000	2	81.000.000	2	81.000.000	100	893,05
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	12		0		12		0		0		12		12		12		100			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	9.070.000	0	0	12	9.070.000	0	0	0	0	0	22.500.000	9.000.000	58.500.000	9.000.000	81.000.000	9.000.000	81.000.000	75.000.000	893,05
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5	23.068.000	0	0	5	23.068.000	0	117.914.000	0	0	0	0	5	0	5	117.914.000	5	117.914.000	100	511,16
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evabab (Dokumen)	3		0		3		0		0		3		3		3		100			
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen)	2		0		2		0		0		0		2		2		2		100	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	23.068.000	0	0	11	23.068.000	15.688.400	117.914.000	0	0	0	0	15.688.400	0	31.376.800	117.914.000	31.376.800	117.914.000	285.243.636,36	511,16

		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	134.706.000	0	0	100	134.706.000	0	0	0	161.190.400	0	227.381.200	100	631.314.000	100	1.019.885.600	100	1.019.885.600	100	757,12
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240	134.706.000	0	0	240	134.706.000	0	0	6.351.600	161.190.400	0	227.381.200	146.385.000	631.314.000	152.736.600	1.019.885.600	152.736.600	1.019.885.600	63.640.250	757,12
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100	105.134.890	0	0	100	105.134.890	0	0	112.500.000	168.750.000	0	182.750.000	100	264.600.000	100	728.600.000	100	728.600.000	100	693,01
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	14.640.000	0	0	12	14.640.000	0	0	0	0	0	64.000.000	12.400.000	39.600.000	12.400.000	103.600.000	12.400.000	103.600.000	103.333,33	707,65
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.494.890	0	0	12	90.494.890	12.500.000	0	18.750.000	168.750.000	0	118.750.000	75.000.000	225.000.000	106.250.000	625.000.000	106.250.000	625.000.000	885.416,6667	690,65
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen)	73	48.671.244	0	0	73	48.671.244	0	0	33.750.000	132.712.650	0	30.000.000	73	187.690.500	73	384.153.150	73	384.153.150	100	789,28
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10.995.850	38.251.244	0	0	10.995.850	38.251.244	3.750.000	0	10.995.850	132.712.650	0	18.750.000	34.055.350	106.285.500	48.801.200	291.498.150	48.801.200	291.498.150	443,81	762,06
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	11.250.000	3.000.000	15.750.000	3.000.000	27.000.000	3.000.000	27.000.000	300.000.000	900
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	7.420.000	0	0	2	7.420.000	0	0	0	0	0	0	7.295.000	65.655.000	7.295.000	65.655.000	7.295.000	65.655.000	364.750.000	884,84
2		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik (Persen)	82,5	12.542.500	0	0	82,5	12.542.500	0	0	92.430.000	0	0	0	82,5	0	82,5	92.430.000	82,5	92.430.000	100	736,93
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan (Kali)	4	12.542.500	0	0	4	12.542.500	0	0	92.430.000	0	0	0	4	0	4	92.430.000	4	92.430.000	100	736,93

		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	11.670.000	0	0	1	11.670.000	10.270.000	92.430.000	0	0	0	10.270.000	0	20.540.000	92.430.000	20.540.000	92.430.000	2.054.000	792,03	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	872.500	0	0	4	872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan (Persen)	22,5	832.500	0	0	22,5	832.500	0	0	0	0	0	22,5	0	22,5	0	22,5	0	100	0	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kali)	4	832.500	0	0	4	832.500	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	100	0	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	832.500	0	0	4	832.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Kejadian)	2	902.500	0	0	2	902.500	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	100	0	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum (Kali)	4	902.500	0	0	4	902.500	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	100	0	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	902.500	0	0	1	902.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu (Persen)	90	9.509.075	0	0	90	9.509.075	0	32.800.000	0	0	0	90	0	90	32.800.000	90	32.800.000	100	344,93	

[illegible]

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024

No	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket					
								I		II		III		IV				K	Rp		K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.613.076.297		0		1.613.076.297		3.945.633.958							3.945.633.958		3.945.633.958		244,6		
		7.01	KECAMATAN			1.613.076.297		0		1.613.076.297		3.945.633.958							3.945.633.958		3.945.633.958		244,6		
1		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tomini (Skor)	85	1.589.289.722	0	0	85	1.589.289.722	0	3.820.403.958						0	3.820.403.958	0	3.820.403.958	0	240,38		
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tomini (Skor)	73		0		73	0						0		0		0					
				Nilai SAKIP Kecamatan Tomini (Skor)	73		0		73	0						0		0		0					
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	8	738.370	0	0	8	738.370	0	0						0	0	0	0	0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	12		0		12	0						0		0		0					
		7.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	260.850	0	0	1	260.850	0	0						0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	182.595	0	0	1	182.595	0	0						0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	294.925	0	0	1	294.925	0	0						0	0	0	0	0			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	12	1.267.901.218	0	0	12	1.267.901.218	0	3.556.239.958						0	3.556.239.958	0	3.556.239.958	0	280,48				

	Perangkat Daerah																				
		Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang)	12		0		12		0							0		0		0	
7.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	1.259.041.218	0	0	12	1.259.041.218	393.678.769	3.556.239.958						393.678.769	3.556.239.958	393.678.769	3.556.239.958	3.280.656.408,33	282,46
7.01.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	8.860.000	0	0	12	8.860.000	0	0						0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Laporan)	2	9.070.000	0	0	2	9.070.000	0	0						0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan)	12		0		12		0							0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	9.070.000	0	0	12	9.070.000	0	0						0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5	23.068.000	0	0	5	23.068.000	0	117.914.000						0	117.914.000	0	117.914.000	0	511,16
		Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajib (Dokumen)	3		0		3		0							0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen)	2		0		2		0							0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	23.068.000	0	0	11	23.068.000	15.688.400	117.914.000						15.688.400	117.914.000	15.688.400	117.914.000	142.621.818,18	511,16
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	134.706.000	0	0	100	134.706.000	0	0						0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240	134.706.000	0	0	240	134.706.000	0	0						0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100	105.134.890	0	0	100	105.134.890	0	112.500.000						0	112.500.000	0	112.500.000	0	107,01
7.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	14.640.000	0	0	12	14.640.000	0	0						0	0	0	0	0	0

		7.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.494.890	0	0	12	90.494.890	12.50 0.000	112.500.000						12.5 00.0 00	112.500.000	12.50 0.000	112.500.000	104.166. 666,67	124,32
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen)	73	48.671.244	0	0	73	48.671.244	0	33.750.000						0	33.750.000	0	33.750.000	0	69,34
		7.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10.99 5.850	38.251.244	0	0	10.99 5.850	38.251.244	3.750. 000	33.750.000						3.75 0.00 0	33.750.000	3.750. 000	33.750.000	34,1	88,23
		7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0						0	0	0	0	0	0
		7.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	7.420.000	0	0	2	7.420.000	0	0						0	0	0	0	0	0
2		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik (Persen)	82,5	12.542.500	0	0	82,5	12.542.500	0	92.430.000						0	92.430.000	0	92.430.000	0	736,93
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kali)	4	12.542.500	0	0	4	12.542.500	0	92.430.000						0	92.430.000	0	92.430.000	0	736,93
		7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	11.670.000	0	0	1	11.670.000	10.27 0.000	92.430.000						10.2 70.0 00	92.430.000	10.27 0.000	92.430.000	1.027.00 0.000	792,03
		7.01.02.2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	872.500	0	0	4	872.500	0	0						0	0	0	0	0	0
3		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan (Persen)	22,5	832.500	0	0	22,5	832.500	0	0						0	0	0	0	0	0
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kali)	4	832.500	0	0	4	832.500	0	0						0	0	0	0	0	0

		7.01.03.2.01.00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	832.500	0	0	4	832.500	0	0						0	0	0	0	0	0
4		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Kejadian)	2	902.500	0	0	2	902.500	0	0						0	0	0	0	0	0
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum (Kali)	4	902.500	0	0	4	902.500	0	0						0	0	0	0	0	0
		7.01.04.2.01.00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	902.500	0	0	1	902.500	0	0						0	0	0	0	0	0
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu (Persen)	90	9.509.075	0	0	90	9.509.075	0	32.800.000						0	32.800.000	0	32.800.000	0	344,93
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu (Persen)	90		0		90		0							0		0		0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi (Desa)	7	9.509.075	0	0	7	9.509.075	0	32.800.000						0	32.800.000	0	32.800.000	0	344,93
		7.01.06.2.01.00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	972.500	0	0	4	972.500	0	0						0	0	0	0	0	0
		7.01.06.2.01.00 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7	7.634.075	0	0	7	7.634.075	4.850.000	32.800.000						4.850.000	32.800.000	4.850.000	32.800.000	69.285.714,29	429,65
		7.01.06.2.01.00 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		7.01.06.2.01.00 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	4	902.500	0	0	4	902.500	0	0						0	0	0	0	0	0

7.01.06.2.01.00 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	0	0	0	1	0	0	0						0	0	0	0	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			:																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			:																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya			:																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya			:																	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Tomini dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Tomini Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 95 % bisatercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
2. Pada Indikator Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif/Jumlah seluruh kelompok dengan target 100 % masih teralisasi 30 % di tahun 2024 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 7 Desa.
3. Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang teralisasi 0 % karena indikator tersebut baru di laksanakan di tahun 2025
4. Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 100% sudah teralisasi 100% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes
5. Pada Indikator Persentase desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
6. Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bias tercapai karena desa memiliki Linmas aktif.
7. Pada Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif dengan target 85 % realisasi 85 % karena semua lembaga organisasi di fasilitasi dan dilakukan pembinaan.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tomini tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

[illegible]

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kantor Kecamatan Tomini merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selamaTahun 2024, Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Rentan	1. Masih rendahnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di desa 2. Belum Optimalnya Bantuan Sosial yang tersalurkan Kepada Masyarakat 3. Masih Kurangnya Usulan Masyarakat yang Masuk Ke APBD Kabupaten
Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN	Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya

Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Tomini juga menghadapi beberapa peluang dan tantanganya itu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.	1. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	2. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	3. Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
	4. Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan

Peluang	Tantangan
	Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
	5. Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindalanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 2. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
- 3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikutini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kantor Kecamatan Tomini Tahun 2026

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	KECAMATAN TOMINI				1.610.730.027,00	KECAMATAN TOMINI				1.610.730.027,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	1.586.224.202,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	1.586.224.202,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	2.337.850,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	2.337.850,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Tomini	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	737.850,00		Tomini	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	737.850,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Tomini	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00		Tomini	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

		Tomini	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00		Tomini	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Tomini	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000,00		Tomini	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Tomini	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000,00		Tomini	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	1.267.901.218,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	1.267.901.218,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Tomini	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.259.041.218,00		Tomini	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.259.041.218,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Tomini	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.860.000,00		Tomini	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.860.000,00	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	9.070.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	9.070.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Tomini	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.070.000,00		Tomini	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.070.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	21.403.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	21.403.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Tomini	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	21.403.000,00		Tomini	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	21.403.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	134.706.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	134.706.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Tomini	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	134.706.000,00		Tomini	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	134.706.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	105.134.890,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	105.134.890,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Tomini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.640.000,00		Tomini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.640.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

		Tomini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.494.890,00		Tomini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.494.890,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	45.671.244,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	45.671.244,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Tomini	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	38.251.244,00		Tomini	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	38.251.244,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Tomini	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.420.000,00		Tomini	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.420.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	12.542.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	12.542.500,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	12.542.500,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	12.542.500,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										

		Tomini	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	899.250,00		Tomini	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	899.250,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-	10.231.575,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-	10.231.575,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	10.231.575,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	10.231.575,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
		Tomini	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	932.500,00		Tomini	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	932.500,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										
		Tomini	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.634.075,00		Tomini	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.634.075,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										
		Tomini	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	832.500,00		Tomini	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	832.500,00	

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
		Tomini	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	832.500,00		Tomini	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	832.500,00	
					1.610.730.027,00					1.610.730.027,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap pusulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Tomini dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatanTahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut.

Tabel 2.8 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN7	MemperkuatS tabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sertatujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maker umusan tujuan dan sasaran Renja Kantor kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan	Target sasaranTahun 2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%)	100
			Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%)	100
			Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%)	100
			Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%)	100
			Persentase desa yang memiliki Linmas aktif (%)	100
			Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%)	0
			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Tomini adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Tomini, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencega isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomini dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tomini menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Kantor kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Penyediaan system pelaporan yang efektif dan efisien
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Tomini melaksanakan 5 program dan 12 Kegiatan serta 24 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tomini Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

Tabel 3.3 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kantor Kecamatan Tomini

No	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		KET
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01	KECAMATAN TOMINI				2.571.264.495,00				2.699.827.719,75	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	2.546.778.495,00			-	2.674.117.419,75	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	2.319.500			-	2.435.475,00	
	7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tomini	4 Dokumen	702.500,00	DAU		4 Dokumen	737.625,00	
	7.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tomini	1 Dokumen	507.000,00	DAU		1 Dokumen	532.350,00	
	7.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tomini	1 Dokumen	500.000,00	DAU		1 Dokumen	525.000,00	
	7.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tomini	1 Dokumen	310.000,00	DAU		1 Dokumen	325.500,00	
	7.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tomini	1 Dokumen	300.000,00	DAU		1 Dokumen	315.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	1.334.132.347,00			-	1.400.838.964,35	
	7.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tomini	210 Orang/bulan	1.325.260.347,00	DAU		210 Orang/bulan	1.391.523.364,35	
	7.01.01.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tomini	12 Dokumen	8.872.000,00	DAU		12 Dokumen	9.315.600,00	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	8.646.000,00			-	9.078.300,00	
	7.01.01.2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tomini	12 Laporan	8.646.000,00	DAU		12 Laporan	9.078.300,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	43.734.000,00			-	45.920.700,00	
	7.01.01.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tomini	5 Orang	43.734.000,00	DAU		5 Orang	45.920.700,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	135.758.000,00			-	142.545.900,00	
	7.01.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tomini	240 Laporan	135.758.000,00	DAU		240 Laporan	142.545.900,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				870.465.000,00					
	7.01.01.2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tomini	11 Unit	74.595.000,00	DAU			78.324.750,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tomini	1 Unit	795.870.000,00	DAU			835.663.500,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100.733.648,00			-	105.770.330,40	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tomini	12 Laporan	18.660.000,00	DAU		12 Laporan	19.593.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomini	12 Laporan	82.073.648,00	DAU		12 Laporan	86.177.330,40	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	50.990.000,00			-	53.539.500,00	
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tomini	3 Unit	39.770.000,00	DAU		3 Unit	41.758.500,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tomini	2 Unit	11.220.000,00	DAU		2 Unit	11.781.000,00	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	12.543.000,00			-	13.170.150,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	12.543.000,00			-	13.170.150,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tomini	1 Laporan	11.673.000,00	DAU		1 Laporan	12.256.650,00	
	7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tomini	1 Dokumen	870.000,00	DAU		1 Dokumen	913.500,00	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	830.000,00			-	871.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	830.000,00			-	871.500,00	
	7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tomini	1 Laporan	830.000,00	DAU		1 Laporan	871.500,00	
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		-	890.000,00			-	934.500,00	
	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	890.000,00			-	934.500,00	
	7.01.04.2.01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tomini	1 Laporan	890.000,00	DAU		1 Laporan	934.500,00	
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		-	10.223.000,00			-	10.734.150,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	10.223.000,00			-	10.734.150,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tomini	1 Dokumen	930.000,00	DAU		1 Dokumen	976.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tomini	1 Dokumen	7.633.000,00	DAU		1 Dokumen	8.014.650,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tomini	1 Dokumen	830.000,00	DAU		1 Dokumen	871.500,00	
	7.01.06.2.01	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tomini	1 Laporan	830.000,00	DAU		1 Laporan	871.500,00	
						2.571.264.495,00				2.699.827.719,75	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Kantor Kecamatan Tomini, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsure internal Kantor Kecamatan Tomini, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Tomini sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini.

Semoga Rencana Kerja Kantor kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan.

II. KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah menyusun Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

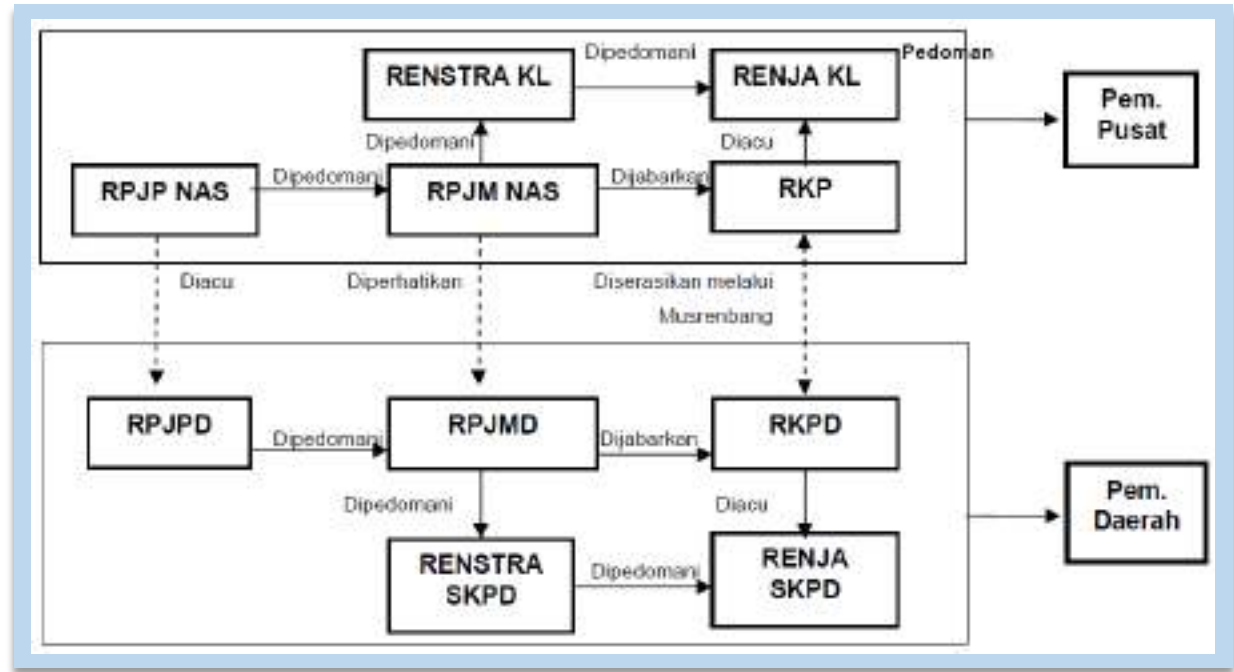
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:

1. Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah
- 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah
- 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:**

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Pendukung
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Anggaran yang tersedia
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Anggaran yang tersedia
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
3.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
3.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
3.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
3.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
3.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3.1.6	asilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan	

	Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

2. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan	Faktor Penghambat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan ini belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi	365 Poin		70 Poin	67 Poin	96%	71		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi	90 Dok		18 Dok	0 Dok	0%	18 Dok		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perncaanaan Perangkat daerah yang di susun	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi	60 DOK		12 Dok	12 Dok	100%	12 DOK		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi	500%		0 %	0 %	0%	0%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji ASN yang terbayarkan	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Administrasi Sesuai dengan SOP	500%		100 %	0	0%	0%		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	90 Dok		18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	500%		100 %	100 %	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan Aset daerah	30 orang/bulan		6 orang/bulan	6 orang/bulan	100%	6 orang/bulan		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	25%		5 %	5 %	100%	5%		
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparatur Sipil Negara	70 Orang		14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	75%		15 %	0 %	0%	0%		
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi	250%		50 %	50 %	100%	50%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	450%		90 %	90 %	100%	90%		
		Persentase SOP dan SP yang diterapkan	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	500%		100 %	0 %	0%	100%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	500%		100 %	0 %	0%	100%		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	100 Orang		20 Orang	0 Orang	0%	20 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	500%		100 %	95,46 %	95%	100%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	27 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	3 unit		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	24 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit		2 Unit	2	Unit	0		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/Gedung	3 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	500%		100 %	100 %	100%	100%		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	450%		90 %	90 %	100%	90%		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	500%		100 %	93 %	93%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	500%		100 %	100 %	100%	100%		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	45 unit		9 Unit	9 Unit	100%	9 unit		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	6 Unit		8 Unit	2 Unit	20%	0		
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah Rumah jabatan terpelihara	1 Unit		0	0	0	0		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	40 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	8 unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP	30 SOP		6 SOP	6 SOP	100%	6 SOP		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi	80 Orang		80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang		
		Jumlah Layanan/Jumlah Survey IKM	30 SOP		6 SOP	6 SOP	100%	6 SOP		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan perwakilan masyarakat	750 Orang		150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja	450 %		90 %	90 %	100%	90 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi	15 Desa		3 Desa	3 Desa	100%	100%		
		Presentase Desa Yang melakukan gotong royong secara rutin	375 %		75 %	75 %	100%	100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	400%		80 %	80 %	100 %	100%		
		Persentase desa yang memiliki Linmas aktif	500 %		100 %	100 %	100%	100%		
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	400 %		80 %	80%	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan masyarakat desa	400%		80 %	80 %	100%	100 %		
		Jumlah monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja	40 Desa		8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengikuti peningkatan Pengelolaan Dana dan Aset Desa	40 desa		8 Desa	8 Desa	100%	8 desa		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi rapat yang dilaksanakan	20 kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 kali		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Trantib di Kecamatan dengan target 5 Kasus yang terealisasi 0 Kasus karena Indikator tersebut baru dilaksanakan di Tahun 2024.
2. Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
3. Pada Indikator Persentase desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah terealisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
4. Pada Indikator Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan dengan target 73 poin telah terealisasi karena meningkatnya kerjasama sosial antar Masyarakat
5. Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang terealisasi 0 % karena indikator tersebut baru dilaksanakan di tahun 2025
6. Pada Indikator Jumlah Data Base kelompok usaha produktif yang Uptodate dan terintegrasi dengan target 100 % masih terealisasi 30 % di tahun 2021 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 8 Desa
7. Pada Indikator kinerja jumlah desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara Uptodate dan terintegrasi indikator ini masih 0 karena nanti dilaksanakan pada Tahun 2025
8. Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 80 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
9. Pada Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian produk layanan dengan standar pelayanan dengan target 80% bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan
- 10 Pada Indikator jumlah produk layanan sesuai dengan SOP dengan target 6 SOP Indikator tersebut belum tercapai karena belum ada Bimbingan Teknis tentang pembuatan SOP
- 11 Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang

berbasis kinerja dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

12 Pada Indikator jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 8 Desa sudah teralisasi 8 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes

13 Pada Indikator Presentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan dan Desa

Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2026	2024	2021	2022	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kasus pelanggaran Trantib di Kecamatan			5	5	4	4	4		4	4	
2	Presentasi angka kejadian gangguan Trantib	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	
3	Presentase desa yang memiliki Linmas aktif	100	100	80	100	100	100	70		85	85	
4	Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan	100	100	75	75	75	75	75		75	75	
5	Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Gotong royong secara rutin	100	100	75	75	75	75	75		75	75	
6	Jumlah Data base kelompok usaha produktif yang secara uptodate dan terintegrasi			3	3	3	3	3		3	3	
7	Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi			0	5	3	3	3		3	3	
8	Indeks kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	100	100	80	80	80	80	80		80	80	
9	Prosentase Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan	100	100	80	90	90	90	80		80	80	
10	Jumlah Produk layanan sesuai dengan SOP			6	6	6	6	6		6	6	
11	Presentase Desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	100	100	80	80	80	80	80		80	80	
12	Jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja			8	8	8	8	8		8	8	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2026	2024	2021	2022	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Prosentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100	100	80	80	80	80	80		80	80	

a. **Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Kantor Kecamatan Pinolosian tengah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai dan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan	Belum Maksimal Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum Memadai Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor
		Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Petugas pelayanan belum memahami SOP dan Standar Pelayanan
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
		Pelayanan yang tidak responsif dan kurangnya informasi yang jelas	Sistem Informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya pelatihan kepada Staf
3	Partisipasi Masyarakat yang belum Optimal	Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan, Kurangnya Informasi yang Jelas dan Kurangnya Kepercayaan Masyarakat	Masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat.
4	Lambatnya Peranan fungsi Kelembagaan di Masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan	Sistem Kelembagaan yang tidak efektif dan Efisien
5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan dan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku	Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan peraturan serta keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.	1. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	2. Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
	3. Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
	4. Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
	5. Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.7 (T-C 31)** berikut ini:

Tabel 3.3 (T-C-32)

Program dan Kegiatan Kecamatan Pinolosian Tengah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							NASIONAL	DAERAH		
2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	16
	KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH			2.754.023.154,00						2.538.991.561,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.754.023.154,00						2.538.991.561,00
7.01	KECAMATAN			2.754.023.154,00						2.538.991.561,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.691.536.604,00					-	2.470.491.561,00
	[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	2.691.536.604,00	-	-	-	-	-	2.470.491.561,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.500.000,00			-	-	-	7.500.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		7.500.000,00

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.357.536.604,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	1.357.536.604,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13 Orang/bulan	1.342.536.604,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		1.342.536.604,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		15.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.000.000,00			-	-	-	8.000.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	8.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		8.000.000,00

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	35.000.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang	25.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		35.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	232.000.000,00			-	-	-	277.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	100 Paket	45.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		90.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		60.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Laporan	137.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		127.000.000,00

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	890.000.000,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	618.954.957,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	40.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		50.000.000,00
	-	-	-	2.691.536.604,00	-	-	-	-	-	2.470.491.561,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	850.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		568.954.957,00
	[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45	2.691.536.604,00	-	-	-	-	-	2.470.491.561,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.500.000,00			-	-	-	99.500.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		12.500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	100 Laporan	87.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		87.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	72.000.000,00			-	-	-	67.000.000,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit	37.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		37.000.000,00
	-	-	-	2.691.536.604,00	-	-	-	-	-	2.470.491.561,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		30.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.986.550,00					-	16.000.000,00
	[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	14.986.550,00	-	-	-	-	-	16.000.000,00

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	14.986.550,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	16.000.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Laporan	14.986.550,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		16.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.000.000,00					-	7.000.000,00
	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	7.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.000.000,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	7.000.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		7.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6.000.000,00					-	9.000.000,00

	[Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	6.000.000,00	-	-	-	-	-	9.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	6.000.000,00			-	-	-	9.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		9.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36.500.000,00					-	36.500.000,00
	[Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	8	36.500.000,00	-	-	-	-	-	36.500.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	36.500.000,00			-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan	-	36.500.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		18.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									

		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		7.500.000,00
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	4 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan		11.000.000,00
J U M L A H				2.754.023.154,00						2.538.991.561,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026

	Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “**peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
- e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target sasaran Tahun 2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%)	100
			Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%)	100
			Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%)	100
			Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%)	100
			Persentase desa yang memiliki Linmas aktif (%)	100
			Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%)	0
			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah.

Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

JJ. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dimulai dengan penyusunan rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu pertama bulan Desember. Selanjutnya, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026 dengan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026, maka penyusunan renja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempedomani Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026.

Penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Renja Badan Kesbang dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

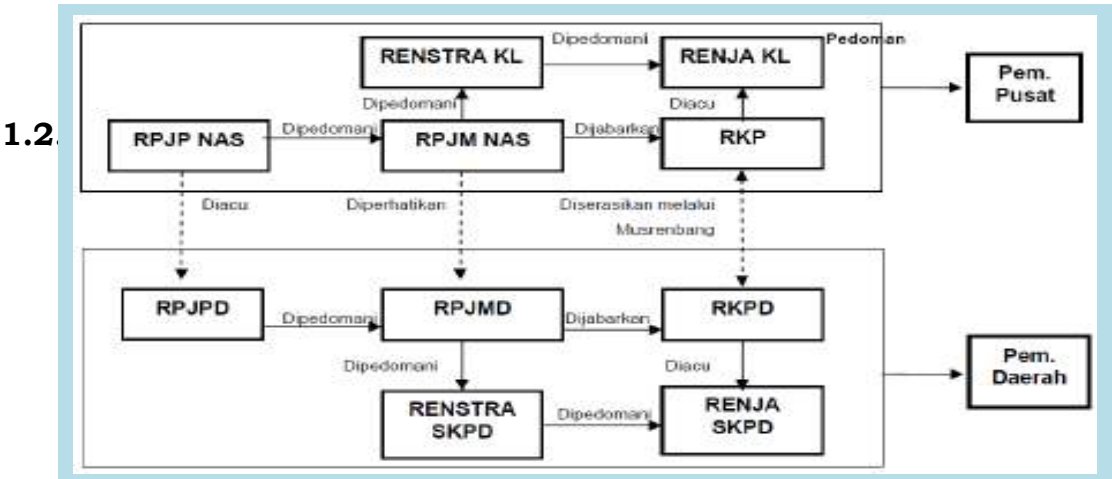
(Renstra) Instansi.

- 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026
- 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pada tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

- 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerjahasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbang dan Politik Kab. Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2026.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Penyempurnaan Renja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2024

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD tahun 2024) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.3 (T-C-29)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2025
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	0	0%	100%	0	0%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1	100%	100%	0	0%	100%	0	0%
		Jumlah Ormas yang dibina	1	1	1	0	0%	1	0	0%

1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah program kerja peningkatan dan fasilitasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Keg.	-	1 Keg.	-	0%	1 Keg.	0	0%
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan dan Laporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dok	-	1	0	0%	1	0	0%
3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah penerapan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	100	100	0	0%	100%	0	0%
4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Rakor dan sosilisasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Kali	1	1	0	0%	1 kali	0	0%
5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan perkembangan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0	0%	1 Dokumen	0	0%
8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan Penguatan Ketahanan ekonomi, Seni dan Budaya	100%	100%	100%	0	0%	1	0	0%

2.15.02.2.05	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan terkait peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan terkait peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Keg.	0	1	0	0%	1	0	0%
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kebijakan	0	1 Kebijakan	0	0%	1 Kebijakan	0	0%
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan Rakor Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kali	0	1 Kali	0	0%	1 kali	0	0%
4	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	0	0%

8.01.06	Program peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Menurunnya angka kriminalitas	198 Kasus	Kasus	190 Kasus	270 Kasus	136%	190 Kasus	0	0%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang di rumuskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pelaksa ⁿ an rapat koordinasi Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	0	0%

3	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dok	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dok	0 Dokumen	0 Dokumen
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi FORKOPIMDA	1 Kali	0 Kali	4 Kali	1 Kali	25%	2 Kali	0 Kali	0%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase peningkatan pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	83%	99%	85%	85%	100%	87%	0%	0%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Kebijakan Teknis dan Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program kerja di Bidang pendidikan idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0%	1 Kegiatan	0	0%
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan terkait pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di rumuskan	1 Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Keg	0 Kegiatan	0%
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	0 Kali	0%
		Jumlah masyakat dan Pelajar yang mengikuti pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0 Orang	0%	50 Orang	0 Orang	0%
8.01.03	Program Peningkatan dan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui Pendididkan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Presentase Partispasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan terkait Pendidikan Politik dan Etika Politik dan peningkatan Demokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokume n	0%
		Jumlah Koordinasi dan Pemantauan pelaksanaan Tahapanan pemilu/Pilkada	0	93,95%	2	2	100%	2	0	0%
		Jumlah Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah	-	0	98%	90,40	92,24%	0	0	0%

		Presentasi Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	100%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	7 Partai	7 Partai	7 Partai	7 Partai	100%	7 Partai	7 Partai	100%
2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	0 Keg	0%	1 Keg	0 Keg	0%
3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Rakor Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%

4	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Kali	0 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	0 Kali	0 Kali	0%
8.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase rata-rata capaian target reformasi Birokrasi	72%	50.06%	70.05 Poin	70.05 Poin	100%	71 Poin		
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85%	90,61	85%	86,31	101%	85%	84,68	99,62%
		Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74	51,49	74	62.41	84,33%	74	0	0
		Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politi	74	65,61	73	66.11	89.33	74	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Rencana Kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%
8.01.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Administrasi sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga pengelola keuangan	4 Orang	3 Orang	4 Orang	2 Orang	50%	4 Orang	2 Orang	50%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	1 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	18 Dok	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	4 Dok	-	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%

	Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	4 Dok	-	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
8.01.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Laporan Barang Habis Pakai	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
8.01.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	5%	10%	5%	5%	100%	5%	5%	100%
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	100%	43%	2 Orang	28,57%	7 Orang	0 Orang	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90.61	90%	86.31	95.90%	90%	0	0.00%
		Jumlah Inovasi	1	0	0	0	0	1	0	0
		Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan	100%	0	100%	100	100%	100%	100	100%
		Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	100%	0	100%	100	100%	100%	100	100%

		Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
		Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase SOP dan SP yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 Unit	0	2 Unit	0	0	2 Unit	0	0
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi	2 Lembar	2 Lembar	2 Lembar	2 Lembar	100%	2 Lembar	2 Lembar	100%
		Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Standar Pelayanan dan SOP	2 Lembar	0 Lembar	2 Lembar	0	0	2 Lembar	0	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Exemplar	0 Exemplar	3 Exemplar	0	0	3 Exemplar	0	0
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	25 Orang	80%	25 Orang	0	0	25 Orang	0	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	200%	1 Dok	2 Dok	200%

		Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	60	60%	1 Dok	60	60%
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0	0	1 Dok	0	0
		Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0	0	1 Dok	0	0
		Jumlah Maklumat Pelayanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik	1 Layanan	0	1 Layanan	0	0	1 Layanan	0	0
		Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	10%	0%	0%	0	0%	10%	0	0%
		Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR	10%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%
8.01.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan	7 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	7 Unit	0 Unit	0%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	0 Unit	1	1 Unit	100%	1 Unit	0 Unit	0%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	3 Unit	4 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	0 Unit	0%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	3 Unit	0 Unit	0	0	0%	3 Unit	0	0%
8.01.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	90.61	87	86.31	99%	87	84,68	97,33%

		Jumlah Inovasi	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa Surat menyurat	12 Bulan	100%	0	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Internet yang tersedia	1 Unit	0	1	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%
		Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia				0	0%		0	0%
		Jumlah jaringan Air Yang Tersedia				0	0%		0	0%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0%	0 Unit	0	0%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6 Unit	150%	4 Unit	6 Unit	150%

Berdasarkan hasil review Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di sajikan dalam Tabel T-C 29 diatas, Presentase Program dan Kegiatan yang di dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 secara garis besar sampaikan sebagai berikut :

A. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi Target Hasil/Keluaran yang di rencanakan Sesuai RENSTRA 2021–2026 dari adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terkait dengan jumlah inovasi perangkat daerah dari Tahun awal dengan presentase capaian 0 %

B. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi Target Hasil/Keluaran yang di rencanakan Sesuai RENSTRA 2021 – 2026 dari Tahun 2024 s/d 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Dokumen Peencanaan Peranga Daerah dengan Target 100%, tingkat capaian 100%
 - b. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaian 100% pertahun.
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Adminstrasi Penunjang dan Operasional Perkantoran dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaian 100% pertahun.
 - d. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaian 100% pertahun.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target RENSTRA 7 Unit, tingkat capaian realisasi dengan jumlah 6 Unit sehingga presentase capaian 85,71%.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionald engan target RENSTRA 100%, tingkat capaian 100% pertahun.

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaian 100% pertahun.
- 3. Program Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - a. Penatausahaan barang milik daerah dengan target 100, dengan tingkat capaian 100%
- C. Realisasi kegiatan yang melebihi target Kinerja/hasil/keluaran yang di rencanakan Sesuai RENSTRA 2021-2026 dari Tahun 2024 s/d 2025 adalah
 - Targt Indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 101%
 - Jumlah Dokumen Survey kepuasan Masyarakat dengan capaian 200%
- D. Angka kriminalitas yang merupakan indikator negatif dengan capaian 136% di Tahun 2024
- E. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program dan kegiatan
 - Faktor utama tidak tercapainya/terpenuhinya target program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah di susun, secara garis besar terletak pada kurangnya dukungan anggaran yang di sediakan Pemda, adanya keterbatasan pagu indikativ yang di berikan sehingga tidak memungkinkan program dan kegiatan terrealisasi sesuai target yang di harapkan.
- F. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah
 - Melihat hasil capaian selama Tahun 2024 s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) secara keseluruhan serapan anggaran dapat diklasifikasikan tinggi sesuai dengan target serta capaian kinerja. Sehingga berimplikasi terhadap Peningkatan kualitas terhadap kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun untuk kegiatan teknis banyak kegiatan yang tidak terakomodir sesuai dengan rencana kerja yang seharusnya dikarenakan

ketersediaan dana APBD tidak memungkinkan untuk mengkaver kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan, dampak dari hal tersebut terdapat pada banyaknya kebijakan Pemerintahpusat yang tidak terlaksanakan.

G. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dengan adanya kondisi tersebut, perlu adanya upaya pemerintah atau Perangkat daerah melakukan suatu kebijakan perencanaan dan penganggaranatas program dan kegiatan dengan mengutamakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis yang telah di tetapkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Perubahan ke dua Periode 2021-2026. Indikator capaian kinerja atas pelayanan perangkat daerah merupakan capaian kinerja masing-masing Pejabat sesuai struktur organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan Kesatuan bangsa dan Politik, sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja indikator utama yang menjadi target Kesbangpol merupakan indikator utama sesuai tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi. Pencapaian Kinerja Perangkat daerah di gambarkan dalam tabel T-C. 30 di bawah ini

:

TABEL 2.2
Tabel (T-C. 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Ormas yang terdaftar dan mendapatkan bantuan			100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
2	Jumlah kegiatan Penguatan Ketahanan ekonomi, Seni dan Budaya			100%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	100%	100%	
3	Menurunnya angka kriminalitas			195 Kasus	194 Kasus	193 Kasus	192 Kasus	191 Kasus	270 Kasus		190 Kasus	189 Kasus	
4	Presentase peningkatan pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan			78%	80%	83%	85%	87%	79%	85%	87%	80%	
5	Presentase Partispasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik			0%	100%	100%	100%	0%	99%	0%	100%	100%	

[illegible]

[illegible]

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan rencana kerja Perangkat daerah, beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama baik Perangkat Daerah maupun pemerintah daerah guna peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Beberapa hal yang menjadi catatan yakni :

1. Pencapaian Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah yang maksimal dilakukan Koordinasi sesuai dengan garis hirarki baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kooordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait, Kementerian dan lembaga instansi vertikal. Kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus bersinergi dengan Program yang di turunkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemerataan Pembangunan khususnya dalam urusan Pemerintahan Untuk Tahun 2026 yang menjadi program prioritas Pemerintah pusat yang sejalan dengan kondisi daerah yakni Penangan Konflik Sosial, Pembumiharian nilai nilai Pancasila, Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas dan pengawasan Ormas di Daerah guna mencegah adanya premanisme Ormas. Dengan terlaksananya program tersebut di harapkan situasi Kantibmas serta ATHG akan terdeteksi dan situasi di daerah aman dan kondusif serta mampu menekan jumlah angka kriminalitas Tahun 2026.

2. Permasalahan dan hambatan

Dalam peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Beberapa masalah dan hambatan yang di temui dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Kurangnya Sarana Gedung Kantor
- b. Kurangnya ketersediaan personil di Badan Kesbangpol
- c. Kurangnya fasilitas untuk kegiatan Operasional kantor

- d. Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kesbangpol
 - e. Kurangnya kemampuan SDM yang berfungsi sebagai intelijen daerah
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah
- Program dan kegiatan yang di laksanakan perangkat daerah khususnya Kesbangpol mempunyai pengaruh besar terhadap Pembangunan Daerah karena sangat erat kaitannya dengan situasi kantibmas. Pembangunan akan terlaksana dari semua aspek ketika situasi di wilayah berjalan aman dan kondusif.
4. Tantangan dan peluang
- a. Tantangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Untuk mewujudkan situasi lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif dengan agenda terwujudnya kerukunan bangsa dan politik terdapat beberapa tantangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban antara lain:
- 1. Mewujudkan sistem politik yang demokratis, yang berbasis pada semakin berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur secara efektif serta berlandaskan pada semakin meningkatnya budaya politik demokrasi berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa;
 - 2. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tenteram, rukun dan damai yang ditopang oleh meningkatnya wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa, falsafah kehidupan bangsa serta kemampuan bela negara segenap warga negara;
 - 3. Mewujudkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha perlindungan masyarakat yang didukung oleh mantapnya manajemen perlindungan masyarakat;

4. Mewujudkan integrasi sosial budaya bangsa melalui penguatan peran institusi-institusi sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta ditopang perilaku sosial masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa;
5. Mewujudkan situasi dan kondisi tenteram serta perilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah daerah;
2. Adanya kerja sama dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat luas dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah;
3. Kerjasama yang baik dengan Forum dan Tim yang telah terbentuk, Ormas/Lembaga dan pihak lain.

5. Formulasi isu-isu Strategis

Dalam rangka menyikapi isu-isu strategis yang di hadapi maka beberpa upaya yang dilakukan sebagai bentuk formulasi yang dilakukan guna mencapai target yang diinginkan antara lain :

- a. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat dalam menghadapi budaya politik demokrasi melalui pengurangan resiko, peningkatan pencegahan dan kesiap siagaan pemerintah.
- b. Peningkatan pendidikan politik terhadap masyarakat terkait budaya politik demokrasi.
- c. Peningkatan keamanan lingkungan

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 2026

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Tahun 2026, merupakan program

dan kegiatan berdasarkan Rencana strategis ditetapkan. Program dan ke Daerah merupakan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, dan telah disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD meskipun nantinya akan banyak kegiatan yang tidak akan terakomodir dalam Rencana kegiatan Anggaran yang akan diberikan kepada daerah khususnya Kesbangpol karena usulan tersebut akan menyesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersedia pada tahun berkenaan. Dari hasil evaluasi atas RKPD sebelumnya banyak kegiatan yang dilaksanakan kebutuhan anggarannya belum sesuai dengan pagu anggaran yang sesuai dengan usulan. Secara garis besar proses evaluasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel. T-C.31

TABEL. 2.3
TABEL T-C 31
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2026

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	8	9	3		4	8	9	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3,581,913,087.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,581,913,087.00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3,581,913,087.00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				3,581,913,087.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3,581,913,087.00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,581,913,087.00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA			1,115,277,742.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMKAB BOLSEL			1,115,277,742.00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45 86	1,115,277,742.00	[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.45 86	1,115,277,742.00	

	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6,501,950.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6,501,950.00	
	8.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1,501,950.00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1,501,950.00	
	8.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	

	8.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1,000,000.00			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1,000,000.00	
	8.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1,000,000.00			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1,000,000.00	
	8.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1,000,000.00			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1,000,000.00	
	8.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1,000,000.00			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1,000,000.00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	709,239,902.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PEMKAB BOLSEL	-	-	709,239,902.00	
	8.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7 Orang/bulan	700,439,902.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7 Orang/bulan	700,439,902.00	
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	8,800,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	8,800,000.00	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	16,200,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PEMKAB BOLSEL	-	-	16,200,000.00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	16,200,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	16,200,000.00	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	222,187,490.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PEMKAB BOLSEL	-	-	222,187,490.00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	20,840,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	20,840,000.00	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	14,147,490.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	14,147,490.00	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1,900,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1,900,000.00	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	20 Laporan	185,300,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	20 Laporan	185,300,000.00	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	75,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PEMKAB BOLSEL	-	-	75,000,000.00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	75,000,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	75,000,000.00	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43,591,100.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PEMKAB BOLSEL	-	-	43,591,100.00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	2,641,100.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	2,641,100.00	
	8.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	6,000,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	6,000,000.00	
	8.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	34,950,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	34,950,000.00	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	42,557,300.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PEMKAB BOLSEL	-	-	42,557,300.00	
	8.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	40,177,300.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	40,177,300.00	
	8.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	2,380,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	2,380,000.00	

			Jumlah Paskibraka	75 Orang	1,625,000,000.00		PEMKAB BOLSEL	Jumlah Paskibraka	75 Orang	1,625,000,000.00	
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			362,752,445.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PEMKAB BOLSEL			362,752,445.00	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	362,752,445.00	[Meningkatnya etika dan budaya politik]		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	362,752,445.00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	362,752,445.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	PEMKAB BOLSEL	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	362,752,445.00	

		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Situasi Politik					
	8.01.03.2.01.000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	1 Dokumen	336,425,445.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	1 Dokumen	336,425,445.00	
	8.01.03.2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	243 Orang	26,327,000.00		PEMKAB BOLSEL	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	243 Orang	26,327,000.00	
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK			339,167,800.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PEMKAB BOLSEL			339,167,800.00	

		ATAN									
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	339,167,800.00	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	339,167,800.00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang 50 Orang	339,167,800.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang 50 Orang	339,167,800.00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	303,443,500.00		PEMKAB BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	303,443,500.00	

	8.01.04.2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	75 Orang	35,724,300.00			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	75 Orang	35,724,300.00	
5	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			108,222,350.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PEMKAB BOLSEL			108,222,350.00	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	90	108,222,350.00	[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	90	108,222,350.00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan</i>	50 Orang 1 Dokumen	108,222,350.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi</i>	50 Orang 1 Dokumen	108,222,350.00	

			Daerah Kabupaten/Kota					Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
	8.01.06.2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	243 Orang	36,387,100.00		PEMKAB BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	243 Orang	36,387,100.00	
	8.01.06.2.01.000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71,835,250.00		PEMKAB BOLSEL	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71,835,250.00	
	J U M L A H				3,581,913,087.00					3,581,913,087.00	

2.5. Penelaah usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan program dan kegiatan prioritas guna mendukung visi dan misi Kepala daerah dan bukan berasal dari usulan Masyarakat/lembaga lain.

BAB. III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Dalam rangka memahami dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka diperlukan penelaahan yang tepat. Pemahaman visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Bolaang Mongondow Selatan 2025- 2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025-2029 yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN MADANI, MAJU, SEJAHTERA, GOTONG ROYONG DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi, juga merupakan pedoman yang mengarahkan oryentasi strategis dalam menentukan posisi organisasi dimasa depan sebagai wujud nyata memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di masa kini atau secara potensial terhadap organisasi di perlukan suatu perencanaan strategis yang di awali dengan visi dan misi.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan di hadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Visi RPJMD kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2025-2029

Visi	Pokok Visi		Penjelasan Visi	
Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong Dan Berkelanjutan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani	Bolaang Selatan	Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Maju	Bolaang Selatan	Pembangunan Bolaang Mongondow Selatan yang berdaya, modern, inovatif dan berbudaya	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Sejahtera	Bolaang Selatan	Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Ekonomi, Sosial, Rasa Aman Dan Nyaman	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Gotong Royong	Bolaang Selatan	Kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Berkelanjutan	Bolaang Selatan	Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Selatan seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik	

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

Misi RPJMD Kab Boalaang Mongondow Selatan
Tahun 2025-2029

MISI 1	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Melalui Penguatan Sistem Yang Baik, Bersih Dan Adaptif;
MISI 2	Transformasi Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Perikanan Dan Pertanian Yang Berkelanjutan

MISI 3	Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, Berakhlak Dan Berdaya Saing
MISI 4	Mewujudkan Daerah Yang Memiliki Ketahanan Sosial, Budaya Dan Lingkungan;
MISI 5	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan Dengan Sarana Prasarana Berkualitas Dan Berkesinambungan

Dari uraian 5 Misi Kepala daerah tersebut diatas serta untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung Misi 4 Yakni;

‘Mewujudkan Daerah Yang Memiliki Ketahanan Sosial, Budaya Dan Lingkungan’

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks susunan organisasi Bidang Kesatuan Bangsa, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Yakni ‘Mewujudkan Kestabilan Politik dan Toleransi Bermasyarakat dalam Memperkuat Ideologi Pancasila” dimana sasarannya terdiri dari 2 urusan yakni :

- 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi
- 2. Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik di Masyarakat dalam menjaga Kestabilan Politik dan Keamanan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan atau kebijakan dalam rangka menunjang pembangunan Demokrasi serta menopang perekonomian daerah yakni perumusan rencana yang bersifat

strategis yang wajib dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan program yang menunjang visi dan misi daerah serta Program Nasional. Jumlah program yang diusulkan Tahun 2026 adalah 6 program dan 11 kegiatan belum termasuk di dalamnya sub kegiatan yang rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 11 Kegiatan belum termasuk dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
2. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter.
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Perumusan kebijakanteknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
5. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Administrasi umum perangkat daerah

8. Administasi kepegawaian perangkat daerah
9. Administrasi keuangan perangkat daerah
10. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
11. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

TABEL 2.4
Tabel (T-C-32)
Usulan Program Kegiatan dan Kinerja Tahun 2026

	KODE	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	4	9	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3,581,913,087.00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3,581,913,087.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3,581,913,087.00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,115,277,742.00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	BOLSEL	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,115,277,742.00	

	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BOLSEL	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,501,950.00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			BOLSEL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,501,950.00	
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			BOLSEL	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000.00	
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
			BOLSEL	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000.00	

	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			BOLSEL	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1,000,000.00	
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			BOLSEL	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1,000,000.00	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1,000,000.00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	709,239,902.00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			BOLSEL	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	700,439,902.00	

	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			BOLSEL	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	8,800,000.00	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BOLSEL	-	16,200,000.00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	16,200,000.00	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BOLSEL	-	222,187,490.00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			BOLSEL	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	20,840,000.00	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			BOLSEL	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	14,147,490.00	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1,900,000.00	

	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			BOLSEL	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	185,300,000.00	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	75,000,000.00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>BOLSEL</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	75,000,000.00	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43,591,100.00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>BOLSEL</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2,641,100.00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>BOLSEL</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	6,000,000.00	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>BOLSEL</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34,950,000.00	

	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	42,557,300.00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			BOLSEL	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40,177,300.00	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			BOLSEL	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,380,000.00	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1,656,492,750.00	
		[Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan]	BOLSEL	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,656,492,750.00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka	1,656,492,750.00	

	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
			BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31,492,750.00	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka				
			BOLSEL	Jumlah Paskibraka	1,625,000,000.00	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			362,752,445.00	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	BOLSEL	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	362,752,445.00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	BOLSEL	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	362,752,445.00	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				

		Situasi Politik di Daerah				
			BOLSEL	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	336,425,445.00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
			BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26,327,000.00	
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			339,167,800.00	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	339,167,800.00	

	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	339,167,800.00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
			BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	303,443,500.00	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
			BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35,724,300.00	

5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			108,222,350.00	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	108,222,350.00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	108,222,350.00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
			BOLSEL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	36,387,100.00	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				

			BOLSEL	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	71,835,250.00	
	J U M L A H				3,581,913,087.00	

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.5
T-C 33

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DISERTAI INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PAGU INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,581,913,087.00						4,092,333,237.00	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				3,581,913,087.00						4,092,333,237.00	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,581,913,087.00						4,092,333,237.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,115,277,742.00					-	1,125,177,742.00	
	[Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.50 89	3.45 86	1,115,277,742.00	-	-	-		-	1,125,177,742.00	-

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6,501,950.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	6,351,950.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	1,501,950.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,501,950.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,050,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		1 Laporan	1,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			800,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	709,239,902.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	709,239,902.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		7 Orang/bulan	700,439,902.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			700,439,902.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		1 Dokumen	8,800,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			8,800,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	16,200,000.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	16,200,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		1 Laporan	16,200,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			16,200,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	222,187,490.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	222,187,490.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	20,840,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			20,840,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		1 Paket	14,147,490.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			14,147,490.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		1 Laporan	1,900,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,900,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		20 Laporan	185,300,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			185,300,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	75,000,000.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	75,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		3 Unit	75,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			75,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	43,591,100.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	53,641,100.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		1 Laporan	2,641,100.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			2,641,100.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		1 Laporan	6,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			6,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		1 Laporan	34,950,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			45,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	42,557,300.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politikb		-	42,557,300.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		1 Unit	40,177,300.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politikb			40,177,300.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		2 Unit	2,380,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politikb			2,380,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1,656,492,750.00					-	1,732,500,000.00	
	[Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90	85	1,656,492,750.00	-	-	-		-	1,732,500,000.00	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka</i>	-	1 Orang 33 Orang	1,656,492,750.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	1,732,500,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		5 Orang	31,492,750.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			32,500,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pembentukan Paskibraka											
		<i>Jumlah Paskibraka</i>		75 Orang	1,625,000,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1,700,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				362,752,445.00					-	364,425,445.00	
	[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	362,752,445.00	-	-	-		-	364,425,445.00	-

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	-	1 Dokumen	362,752,445.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	364,425,445.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>		1 Dokumen	336,425,445.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			337,425,445.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		243 Orang	26,327,000.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			27,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				339,167,800.00					-	786,000,000.00	
	[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	339,167,800.00	-	-	-		-	786,000,000.00	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	50 Orang 50 Orang	339,167,800.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	786,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		75 Orang	303,443,500.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			750,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											

[illegible]

		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		243 Orang	36,387,100.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			37,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>		1 Dokumen	71,835,250.00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			47,230,050.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					3,581,913,087.00						4,092,333,237.00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Momngondow Selatan 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten serta target dan sasaran pembangunan yang di usulkan dan di tetapkan dalam melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maupun PD yang membidangi fungsi lain.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU